

STATISTIK

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DESEMBER 2017

STATISTIK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2016

Penyunting/Editor :

Pusat Data dan Informasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Diterbitkan Oleh/Published by :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah menyelesaikan Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, yang merupakan publikasi lanjutan dari Buku Statistik Tahun 2015.

Data dan informasi yang disajikan dalam Buku Statistik ini bersumber dari unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Statistik Tahun 2016 ini.

Kami menyadari masih adanya berbagai kekurangan dalam Buku Statistik ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dinantikan.

Semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2017
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
PENDAHULUAN	xxi
1. PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	1
1.1. Kawasan Hutan	3
1.2. Penutupan Lahan/Vegetasi	5
1.3. Penataan Batas Kawasan Hutan	5
1.4. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	5
1.5. Penggunaan Kawasan Hutan	6
1.6. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	6
1.7. Inventarisasi Hutan	6
1.8. Deforestasi	7
1.9. Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan	7
1.10. Deskripsi Ekoregion	8
A. Wilayah Ekoregion Nasional	8
B. Ekoregion Laut	10
C. Pembagian Ekoregion Berdasarkan Bentang Lahan	11
2. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	113
2.1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	115
2.2. Bidang Kawasan Konservasi	115
2.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	116
2.4. Konservasi Keanekaragaman Hayati	117
2.5. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	118
3. PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG	131
3.1. Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	133
3.1.1. Lahan Kritis	133
3.1.2. Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS)	134
3.1.3. Banjir dan Tanah Longsor	134
3.2. Konservasi Tanah dan Air	134
3.2.1. Rehabilitasi Hutan	135
3.2.2. Rehabilitasi Lahan	135
3.2.3. Teknik Konservasi Tanah	136
3.3. Perbenihan Tanaman Hutan	138
3.3.1. Kebun Bibit Rakyat (KBR)	138
3.3.2. Persemaian Permanen	139

3.3.3. <i>Seed for People</i>	139
3.4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	139
3.5. Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	139
4. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	165
4.1. Pemanfaatan Hutan Alam	167
4.2. Pemanfaatan Hutan Tanaman	167
4.3. Industri Primer Kehutanan	168
4.4. Produksi Hasil Hutan	169
5. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	199
6. PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	217
6.1. Pengelolaan Sampah	220
6.2. Pengelolaan B3	221
6.3. Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3	221
6.3.1. Limbah B3 Dikelola	222
6.3.2. Limbah B3 yang Dimanfaatkan	222
6.4. Verifikasi Pengelolaan B3 dan Limbah Non B3	224
6.5. Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	226
7. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	247
8. PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	269
8.1. Kawasan Perhutanan Sosial	271
8.2. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	272
8.3. Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan	272
9. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	291
9.1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, Sanksi Administrasi (PPSA) ..	293
9.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)	294
9.3. Penegakan Hukum Pidana (PHP)	294
9.4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH)	294
10. PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ..	305
11. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	319
12. KESEKRETARIATAN	329
13. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	341
13.1. Realisasi Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2012 s.d. 2016	344
13.2. Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Audit	344
13.3. Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2011 s.d. 2016	345
13.4. Rekapitulasi Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2011 s.d. 2016	345
13.5. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja	346
13.6. Jenis Temuan Tahun 2011 s.d. 2016	346
13.7. Jenis Rekomendasi Tahun 2011 s.d. 2016	347
13.8. Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	347

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	
Tabel 1.1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan	13
Tabel 1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per Provinsi	14
Tabel 1.3. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan	24
Tabel 1.4. Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas	25
Tabel 1.5. Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)	26
Tabel 1.6. Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	27
Tabel 1.7. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan	28
Tabel 1.8. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan (HL) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)	29
Tabel 1.9. Perkembangan Mutasi Kawasan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)	30
Tabel 1.10. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)	31
Tabel 1.11. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)	32
Tabel 1.12. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	33
Tabel 1.13. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)	34
Tabel 1.14. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Lindung (HL)	35
Tabel 1.15. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)	36
Tabel 1.16. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Lindung (HL)	37
Tabel 1.17. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)	38
Tabel 1.18. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	39
Tabel 1.19. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)	40
Tabel 1.20. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) ..	41
Tabel 1.21. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)	42
Tabel 1.22. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Lindung (HL)	43
Tabel 1.23. Perkembangan Mutasi Antar Kawasan Konservasi (KK)	44

Tabel 1.24.	Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)	45
Tabel 1.25.	Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	46
Tabel 1.26.	Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Lindung (HL)	47
Tabel 1.27.	Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)	48
Tabel 1.28.	Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	49
Tabel 1.29.	Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses RTRWP	50
Tabel 1.30.	Progres Persetujuan Substansi Kehutanan dalam Usulan Revisi RTRWP	55
Tabel 1.31.	Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan	61
Tabel 1.32.	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)	63
Tabel 1.33.	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)	64
Tabel 1.34.	Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan	65
Tabel 1.35.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)	66
Tabel 1.36.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)	67
Tabel 1.37.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Untuk Operasi Produksi (Tambang)	68
Tabel 1.38.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Non Tambang	69
Tabel 1.39.	Perkembangan Lahan Kompensasi (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima)	70
Tabel 1.40.	Perkembangan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ..	71
Tabel 1.41.	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Model	75
Tabel 1.42.	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	76
Tabel 1.43.	Penetapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Fasilitas Tahun 2016	80
Tabel 1.44.	Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Fasilitas s.d. Tahun 2016	84
Tabel 1.45.	Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan	85
Tabel 1.46.	Potensi Tegakan Hutan	88
Tabel 1.47.	Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	89
Tabel 1.48.	Jumlah Satuan dan Luas Ekoregion Pulau	94
Tabel 1.49.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	96

Tabel 1.50.	Proporsi Indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	97
Tabel 1.51.	Luas Wilayah Ekoregion Laut	98
Tabel 1.52.	Perencanaan Ekonomi Lingkungan	99
2.	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	
Tabel 2.1.	Daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	120
Tabel 2.2.	Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar	122
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Prioritas	123
Tabel 2.4.	Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Air, Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Air, Izin Pemanfaatan Izin Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	125
Tabel 2.5.	Potensi Jasa Lingkungan Karbon	126
Tabel 2.6.	Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi	127
Tabel 2.7.	Jumlah Koleksi Spesies Kawasan Ekosistem Esensial di Taman Kehati	128
Tabel 2.8.	Jenis Tumbuhan Penting di Enam Lokasi Taman Kehati	129
3.	PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG	
Tabel 3.1.	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2006, Tahun 2011 dan Tahun 2013	141
Tabel 3.2.	Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	142
Tabel 3.3.	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)	144
Tabel 3.4.	Perkembangan Rehabilitasi Lahan	146
Tabel 3.5.	Perkembangan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat	148
Tabel 3.6.	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Kota	150
Tabel 3.7.	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Rawa, dan Gambut	152
Tabel 3.8.	Bangunan DAM Pengendali	154
Tabel 3.9.	Bangunan DAM Penahan	156
Tabel 3.10.	Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug	158
Tabel 3.11.	Bangunan Sumur Resapan	160
Tabel 3.12.	Bangunan Embung Air	162
Tabel 3.13.	Pembangunan Kebun Bibit Rakyat	164
4.	PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	
Tabel 4.1.	Luas Arah Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan	170

Tabel 4.2.	Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak	171
Tabel 4.3.	Nilai Investasi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)	172
Tabel 4.4.	Pengayaan dan Penanaman Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Rencana Kerja Tahunan (RKT)	173
Tabel 4.5.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang Bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	174
Tabel 4.6.	Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)	175
Tabel 4.7.	Investasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)	176
Tabel 4.8.	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK)	177
Tabel 4.9.	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJL) ...	177
Tabel 4.10.	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK-BK) Definitif	178
Tabel 4.11.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun (IUPHHK-HT)	180
Tabel 4.12.	Nilai Investasi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Berdasarkan Laporan Keuangan	181
Tabel 4.13.	Penanaman pada Hutan Tanaman Industri (HTI)	182
Tabel 4.14.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Kapasitas di atas 6000 M ³ /Th	183
Tabel 4.15.	Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Kapasitas di atas 6000 M ³ /Th	184
Tabel 4.16.	Rencana Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di atas 6000 M ³ /Th	185
Tabel 4.17.	Realisasi Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di atas 6000 M ³ /Th	186
Tabel 4.18.	Jumlah dan Kapasitas Izin Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di atas 6000 M ³ /Th	187
Tabel 4.19.	Rencana Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di Atas 6.000 M ³ /Th	188
Tabel 4.20.	Produksi Kayu Bulat Bersumber dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	189
Tabel 4.21.	Produksi Kayu Bulat dari RKTUPHHK Hutan Alam	190
Tabel 4.22.	Produksi Plywood dan LVL Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Lebih dari 6.000 M ³ /Th	191
Tabel 4.23.	Produksi Veneer Berasal dari Industri Kapasitas di atas 6.000 M ³ /Th	192
Tabel 4.24.	Produksi Kayu Gergajian yang Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas di atas 6.000 M ³ /Th	193
Tabel 4.25.	Produksi Serpih Kayu yang Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas di atas 6.000 M ³ /Th	194

Tabel 4.26.	Produksi Pulp	195
Tabel 4.27.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	196
Tabel 4.28.	Ekspor Produk Industri Kehutanan	197
5.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	
Tabel 5.1.	Analisis Storet Status Mutu Air Laut Teluk Benoa	203
Tabel 5.2.	Status Mutu Air	204
Tabel 5.3.	Indeks Kualitas Udara	207
Tabel 5.4.	Indeks Tutupan Lahan	208
Tabel 5.5.	Indeks Kualitas Air	209
Tabel 5.6.	Rata-Rata Karbon Monoksida (CO)	210
Tabel 5.7.	Rata-Rata Nitrogen Dioksida (NO ₂)	211
Tabel 5.8.	Rata-Rata Hidro Karbon (HC)	212
Tabel 5.9.	Rata-Rata Ozon (O ₃)	213
Tabel 5.10.	Rata-Rata Partikulat 10 (PM ₁₀)	214
Tabel 5.11.	Rata-Rata Sulfur Dioksida (SO ₂)	215
6.	PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
Tabel 6.1.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2011	227
Tabel 6.2.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2012	229
Tabel 6.3.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2013	232
Tabel 6.4.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2014	234
Tabel 6.5.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2015	236
Tabel 6.6.	Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2016	238
Tabel 6.7.	Pelaksanaan Registrasi B3	241
Tabel 6.8.	Pelaksanaan Notifikasi B3	241
Tabel 6.9.	Rekomendasi Pengangkutan B3	241
Tabel 6.10.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Metode	242
Tabel 6.11.	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola	242
Tabel 6.12.	Jumlah Limbah B3 yang Termanfaatkan	242
Tabel 6.13.	Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2015	243
Tabel 6.14.	Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2016	243
Tabel 6.15.	Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Tahun 2015	244
Tabel 6.16.	Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Tahun 2016	245

7.	PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	
Tabel 7.1.	Konsumsi Bahan Perusak Ozone (BPO)	251
Tabel 7.2.	Emisi Gas Rumah Kaca Aksi Mitigasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir	252
Tabel 7.3.	Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Kehutanan	253
Tabel 7.4.	Emisi Gas Rumah Kaca Sektoral	255
Tabel 7.5.	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	256
Tabel 7.6.	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor IPPU	257
Tabel 7.7.	Emisi dari Sektor Pertanian Menurut Kategori	258
Tabel 7.8.	Emisi dari Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya	259
Tabel 7.9.	Emisi dari Sektor Limbah	260
Tabel 7.10.	Target dan Realisasi Jumlah Hotspot NOAA-18/19 pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	261
Tabel 7.11.	Jumlah Hotspot Terbanyak di Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di 10 Provinsi di Indonesia	262
Tabel 7.12.	Jumlah Hotspot Terbanyak Semua Fungsi Kawasan	263
Tabel 7.13.	Hotspot di Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di 3 Pulau	264
Tabel 7.14.	Sebaran Hostpot di 6 Provinsi Prioritas	265
Tabel 7.15.	Jumlah Sebaran Hotspot NOAA 18/19	266
Tabel 7.16.	Luas Kebakaran Hutan	268
8.	PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
Tabel 8.1.	Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK-HKm) ..	273
Tabel 8.2.	Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm) ..	274
Tabel 8.3.	Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK-HD)	275
Tabel 8.4.	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HP-HD)	276
Tabel 8.5.	Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	279
Tabel 8.6.	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Rakyat (IUPHH-HTR)	280
Tabel 8.7.	Kemitraan Kehutanan	281
Tabel 8.8.	Kelompok Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	284
Tabel 8.9.	Penanganan Konflik dan Tenurial	285
Tabel 8.10.	Hutan Adat/Masyarakat Hutan Adat yang Telah Diidentifikasi dan Dipetakan	286
Tabel 8.11.	Capaian Luas Wilayah Penyelesaian Konflik	287
Tabel 8.12.	Pemenang Wana Lestari	289
9.	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Tabel 9.1.	Kategori Pengaduan yang Diterima Kementerian LHK	296
Tabel 9.2.	Jumlah Pengaduan LHK yang Diterima Melalui Media Pengaduan	296
Tabel 9.3.	Status Penanganan Pengaduan LHK Tahun 2015	296

Tabel 9.4.	Status Penanganan Pengaduan LHK Tahun 2016	297
Tabel 9.5.	Distribusi Wilayah Pengawasan	297
Tabel 9.6.	Jenis Pengenaan Sanksi Administrasi	298
Tabel 9.7.	Distribusi Wilayah Pengenaan Sanksi Administrasi	298
Tabel 9.8.	Pengenaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Tahun 2015	299
Tabel 9.9.	Pengenaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Tahun 2016	299
Tabel 9.10.	Status Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	300
Tabel 9.11.	Status Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	300
Tabel 9.12.	Rekapitulasi Tindak Pidana P-21	300
Tabel 9.13.	Hasil Penanganan Kasus LHK Fasilitas Polri dan Kejaksanaan	301
Tabel 9.14.	Proses Penegakan Hukum Pidana Hasil Fasilitas	301
Tabel 9.15.	Tipologi Perkara Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ..	301
Tabel 9.16.	Proses Penegakan Hukum Pidana Hasil Penyelidikan dan Penyidikan PPNS KLHK	301
Tabel 9.17.	Rekapitulasi Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	302
Tabel 9.18.	Operasi Pemulihan Kawasan Hutan	302
Tabel 9.19.	Komposisi Distribusi Tenaga Teknis Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015	303
10.	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
Tabel 10.1.	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)	309
Tabel 10.2.	Jumlah Penyuluh yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya masyarakat (PKSM), dan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)	310
Tabel 10.3.	Profesi yang Sudah Dilakukan Uji Kompetensi	311
Tabel 10.4.	Jumlah Bakti Rimbawan	312
Tabel 10.5.	Rekapitulasi Diklat Aparatur dan Non Aparatur pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)	313
Tabel 10.6.	Jumlah Karyasiswa Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin	316
Tabel 10.7.	Rekapitulasi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)	317
Tabel 10.8.	Jumlah Sekolah Adiwiyata Menurut Tingkatan	318
11.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	
Tabel 11.1.	Kegiatan Litbang, Pilot IPTEK dan Tematik Unggulan Daerah Berdasarkan Program	322
Tabel 11.2.	Hasil-hasil Penemuan Badan Litbang dan Inovasi yang Sudah/Dalam Proses untuk Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	324
Tabel 11.3.	Publikasi Ilmiah Badan Litbang dan Inovasi	325
Tabel 11.4.	Daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Badan Litbang dan Inovasi	326

Tabel 11.5.	Rekapitulasi Sumber Benih yang Sudah Bersertifikasi	327
Tabel 11.6.	Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti Badan Litbang dan Inovasi	328
12.	KESEKRETARIATAN	
Tabel 12.1.	Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja, Golongan, dan Jenis Kelamin	332
Tabel 12.2.	Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin	333
Tabel 12.3.	Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja, Jabatan, dan Jenis Kelamin	334
Tabel 12.4.	Neraca Nilai Barang Milik Negara	335
Tabel 12.5.	Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015	337
Tabel 12.6.	Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	337
Tabel 12.7.	Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	338
Tabel 12.8.	Penerimaan Penghargaan Nirwasita Tantra	339
13.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
Tabel 13.1.	Perkembangan Kualifikasi Auditor	348
Tabel 13.2.	Realisasi Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Berdasarkan PKPT	349
Tabel 13.3.	Realisasi Audit Investigasi	349
Tabel 13.4.	Rekapitulasi Jumlah LHA Audit Kinerja	350
Tabel 13.5.	Jumlah Audit Investigasi	351
Tabel 13.6.	Pemantauan Tindak Lanjut/Rekomendasi Hasil Audit Kinerja	352
Tabel 13.7.	Klasifikasi Temuan Audit	353
Tabel 13.8.	Klasifikasi Jenis Rekomendasi Audit	354
Tabel 13.9.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	355

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Tahun 2016	3
Grafik 1.2. Luas Penutupan Lahan/Vegetasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2016	5
Grafik 2.1. Pengunjung Taman Nasional Tahun 2013 – 2016	117
Grafik 3.1. Luas Lahan Kritis Tahun 2006, 2011, dan 2013	133
Grafik 3.2. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 – 2016	134
Grafik 3.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2011 – 2016	135
Grafik 3.4. Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2012 – 2016	136
Grafik 3.5. Pembangunan Dan Penahan Tahun 2012 – 2016	137
Grafik 3.6. Pelaksanaan Pembangunan KBR Tahun 2012 – 2016	138
Grafik 4.1. Produksi Plywood dan LVL dari IPHHK di atas 6000 M ³ /Th Tahun 2012 – 2016	168
Grafik 4.2. Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan RKTUPHHK Hutan Alam (HA) Tahun 2013 – 2016	169
Grafik 6.1. Perkembangan Jumlah Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2011 – 2016	220
Grafik 6.2. Jumlah Industri dan Pengelolaan Limbah Tahun 2015 – 2016	222
Grafik 6.3. Persentase Jumlah B3 Dimanfaatkan Per Sektor tahun 2015 dan 2016	223
Grafik 6.4. Total Tonase dan Luas Lahan Terkontaminasi per Sektor Tahun 2015 – 2016	226
Grafik 7.1. Jumlah Sebaran Hotspot NOAA18/19 Tahun 2016	250
Grafik 8.1. Capaian Perhutanan Sosial s.d. 2016	271
Grafik 8.2. Luas Areal Kemitraan Tahun 2015 – 2016	272
Grafik 9.1. Persentase Kategori Pengaduan yang Diterima KLHK 2015 -2016	293
Grafik 9.2. Persentase Pengenaan Sanksi Administrasi Tahun 2015 dan 2016	294
Grafik 10.1. Rekapitulasi Lulusan Per-SMKKN Berdasarkan BDLHK Tahun 2016	308
Grafik 10.2. Jumlah Sekolah Adiwiyata Menurut Tingkatan Tahun 2016	308
Grafik 11.1. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti BLI Tahun 2012-2016	321
Grafik 12.1. Distribusi PNS Kementerian LHK	331
Grafik 12.2. Target dan Realisasi PNPB Tahun 2013 – 2016	331
Grafik 13.1. Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2012 – 2016	343
Grafik 13.2. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Reguler Berdasarkan PKPT Tahun 2012 – 2016	344
Grafik 13.3. Persentase Realisasi Audit Kinerja Per Provinsi Tahun 2012 – 2016	344

Grafik 13.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2012 – 2016	345
Grafik 13.5.	Persentase Realisasi Audit Khusus/Investigasi Per Provinsi Tahun 2011 – 2016	345
Grafik 13.6.	Trend Temuan Tahun 2012 – 2016	346
Grafik 13.7.	Trend Rekomendasi Tahun 2012 – 2016	347

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1. Peta Lokasi Sampling Air Laut Teluk Benoa	201
---	-----

DAFTAR SINGKATAN (disusun menurut alfabet)

AM	: Adiwiyata Mandiri
AN	: Adiwiyata Nasional
APL	: Areal Penggunaan Lain
B3	: Bahan Beracun Berbahaya
BA	: Berita Acara
Babel	: Bangka Belitung
Balai PPI	: Balai Pengendalian Perubahan Iklim
BBKSDAE	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional
BDLHK	: Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BKSDAE	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
BLI	: Badan Penelitian & Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BOD	: <i>Biological Oxygen Demand</i>
BP2LHK	: Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BP2SDM	: Badan Pengembangan Penyuluhan Sumber Daya Manusia
BPDASHL	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPHP	: Balai Pemanfaatan Hutan Produksi
BPO	: Bahan Perusak <i>Ozone</i>
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BTN	: Balai Taman Nasional
CA	: Cagar Alam
Cd	: <i>Kadmium</i>
CN	: <i>Sianida</i>
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
COP	: <i>Conference of The Parties</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Dit. PPH	: Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DO	: <i>Dissolved Oxygen</i>
Fe	: Ferrum
Gakkum	: Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gol.	: Golongan
GRK	: Gas Rumah Kaca
H ₂ S	: <i>Sulfida</i>
Ha	: Hektar
HA	: Hutan Adat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCFC	: <i>Hydrochloroflourocarbon</i> (Freon)
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu

HK	: Hutan Konservasi
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPHD	: Hak Pengelolaan Hutan Desa
HPK	: Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HR	: Hutan Rakyat
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	: Indeks Kualitas Udara
IPA	: Izin Pemanfaatan Air
IPEA	: Izin Pemanfaatan Energi Air
IPJLPBTE	: Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IPPU	: <i>Industrial Processes and Product Use</i>
Itjen	: Inspektorat Jenderal
IU-IPHHK	: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IUJL	: Izin Usaha Jasa Lingkungan
IUPA	: Izin Usaha Pemanfaatan Air
IUPEA	: Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air
IUPHH-BK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHBK-HA	: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHBK-HT	: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
IUPHHK-RE	: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem
IUPJWA	: Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam
IUPSWA	: Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam
Jabar	: Jawa Barat
Jateng	: Jawa Tengah
Jatim	: Jawa Timur
JLK	: Jasa Lingkungan Konservasi
Jml	: Jumlah
Kab.	: Kabupaten
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kalsel	: Kalimantan Selatan
Kalteng	: Kalimantan Tengah
Kaltim	: Kalimantan Timur
KBR	: Kebun Bibit Rakyat
Kec.	: Kecamatan
KEE	: Kawasan Ekosistem Esensial
Kehati	: Keanekaragaman Hayati

Kel	: Kelompok
Kepri	: Kepulauan Riau
KK	: Kawasan Konservasi
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Km	: Kilometer
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
KTH	: Kelompok Tani Hutan
LC HTI	: Laporan <i>Cruising</i> Hutan Tanaman Industri
LHA	: Laporan Hasil Analisis
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LVL	: <i>Laminated Veneer Lumber</i>
M ³	: Meter Kubik
Malut	: Maluku Utara
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
MHA	: Masyarakat Hutan Adat
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTsN	: Madrasah Tsanawiyah Negeri
NH ₃	: <i>Amonia</i>
NO ₂	: <i>Nitrogen Dioksida</i>
NO ₃	: <i>Nitrat</i>
NOAA	: National Oceanic and Atmospheric Administration
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
ODP	: <i>Ozone Depletion Potential</i>
OSHA	: <i>Occupational Safety and Health of the United State Government</i>
P3E	: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
PAK HD	: Penetapan Areal Kerja Hutan Desa
Pb	: Timbal
PDASHL	: Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
PEM	: Pertambangan, Energi dan Migas
PHP	: Penegakan Hukum Pidana
PHPL	: Pengelolaaan Hutan Produksi Lestari
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PN	: Pengadilan Negeri
PNBP	: Penerimaan Nasional Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPI	: Pengendalian Perubahan Iklim
PPKL	: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSLB3	: Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
PSLH	: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
REDD	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rokeu	: Biro Keuangan
Ropeg	: Biro Kepegawaian
RPBBI	: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SD	: Sekolah Dasar
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SILH	: Sistem Informasi Lingkungan Hidup
SILK	: Sistem Informasi Legalitas Kayu
SK	: Surat Keputusan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SLHD	: Status Lingkungan Hidup Daerah
SLHI	: Status Lingkungan Hidup Indonesia
SM	: Suaka Margasatwa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMKKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMS	: Short Message Service
SO ₂	: <i>Sulfur Dioksida</i>
SSPLT	: Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi
Sulbar	: Sulawesi Barat
Sulsel	: Sulawesi Selatan
Sulteng	: Sulawesi Tengah
Sultra	: Sulawesi Tenggara
Sulut	: Sulawesi Utara
Sumbar	: Sumatera Barat
Sumsel	: Sumatera Selatan
Sumut	: Sumatera Utara
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TB	: Taman Buru
Th	: Tahun
THR	: Taman Hutan Raya
TN	: Taman Nasional
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
TSS	: <i>Total Suspended Solid</i>
TWA	: Taman Wisata Alam

PENDAHULUAN

Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2016 disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta salah satu Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatkan nilai manfaat informasi publik khususnya data bidang pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan Buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan. Dengan bergabungnya Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan maka Buku Statistik ini sudah memuat data dan informasi bidang pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

Data yang disajikan pada Buku Statistik ini merupakan kompilasi data (pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa) dari seluruh unit Eselon I lingkup Kementerian LHK sesuai tugas pokok dan fungsinya, yaitu : 1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain meliputi data luas kawasan hutan; 2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain meliputi data jumlah pengunjung kawasan konservasi, jumlah penangkar tumbuhan dan satwa liar, dan rekapitulasi populasi satwa terancam punah prioritas; 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung antara lain meliputi data kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, luas penyebaran lahan kritis, dan bangunan DAM pengendali; 4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari antara lain meliputi data produksi kayu bulat, penanaman pada kawasan hutan yang dibebani hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, dan produksi plywood/LVL/veneer/kayu gergajian; 5) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain meliputi data indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan, rata-rata karbon dioksida (CO₂)/nitrogen dioksida (NO₂)/hidro karbon (HC); 6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) antara lain meliputi data limbah B3 yang dikelola/termanfaatkan, rekapitulasi hasil pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, kota-kota penerima penghargaan adipura; 7) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim antara meliputi data target dan realisasi jumlah hotspot NOAA-18-19 pada kawasan hutan non konservasi dan lahan, emisi gas rumah kaca, luas kebakaran hutan; 8) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan antara lain meliputi data penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan hutan desa, pencadangan hutan tanaman rakyat; 9) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain meliputi data kategori pengaduan yang diterima Kementerian LHK, status penanganan pengaduan LHK, rekapitulasi tindak pidana P-21; 10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain meliputi data rekapitulasi sekolah Adiwiyata, jumlah penyuluh PNS/penyuluh kehutanan swadaya masyarakat/penyuluh kehutanan swasta, rekapitulasi diklat aparatur

dan non aparatur; 11)Badan Litbang dan Inovasi antara lain meliputi data daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tahun 2012-2016, hasil-hasil penemuan Badan Litbang dan Inovasi yang sudah/dalam proses mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekapitulasi sumber benih yang sudah bersertifikasi; 12)Kesekretariatan antara lain meliputi data jumlah dan sebaran pegawai Kementerian LHK, neraca nilai Barang Milik Negara, capaian kinerja Kementerian LHK; dan 13)Inspektorat Jenderal antara lain meliputi data perkembangan kualifikasi auditor tahun 2012-2016, realisasi jumlah Laporan Hasil Audit kinerja Kementerian LHK, realisasi audit investigasi.

Data yang berasal dari Buku Statistik Kementerian LHK Tahun 2016 dapat digunakan dan diakses untuk keperluan publik melalui *website* Kementerian LHK (www.kemenlhk.go.id) atau prosedur pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Kementerian LHK.

1

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

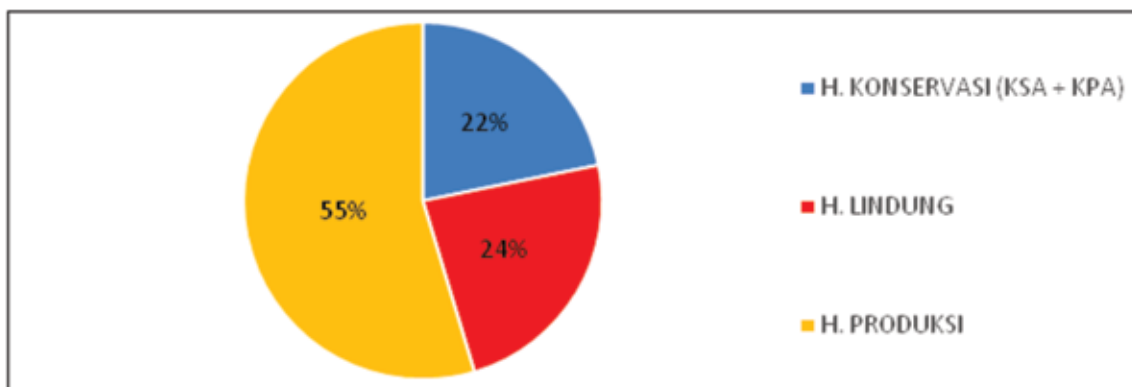


Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dibutuhkan peran serta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan kehutanan dan lingkungan, sehubungan dengan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan daerah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh instansi-instansi lingkup Kementerian LHK lainnya.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni: 1) Inventarisasi hutan; 2) Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; 3) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan 4) Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.



Grafik 1.1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Tahun 2016

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.

Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dengan pengertian sebagai berikut:

- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Hutan Konservasi terdiri dari:

- Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
- Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA).
- Taman Buru (TB).

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

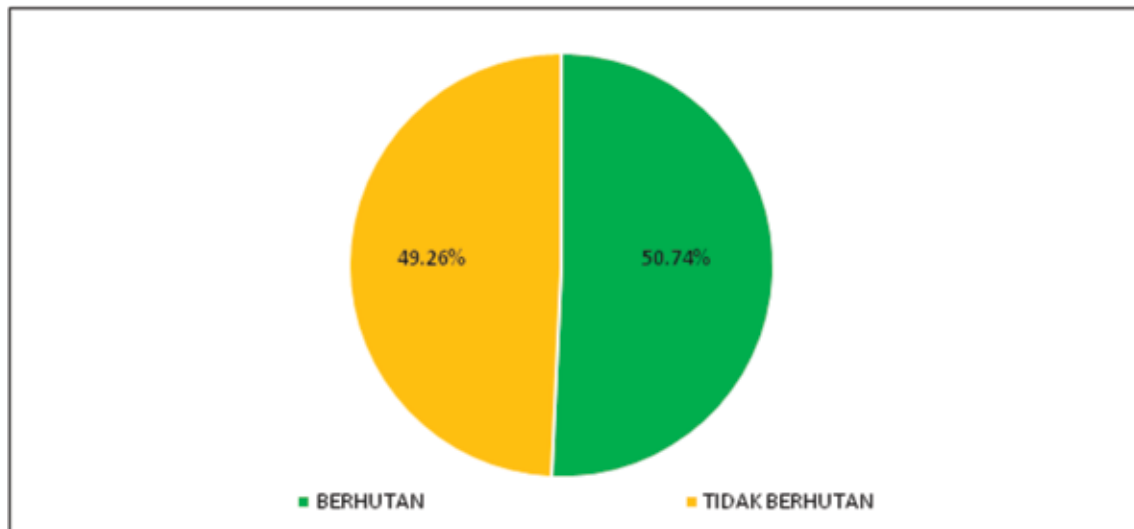
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

1.2. Penutupan Lahan/Vegetasi

Penutupan lahan/vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi.

Keadaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2015. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama yaitu areal berhutan dan areal tidak berhutan.



Grafik 1.2. Luas Penutupan Lahan/Vegetasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013 - 2016

Areal berhutan diklasifikasikan lagi secara lebih detil menjadi kelas-kelas sebagai berikut: hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2016, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ±187.751,9 Juta ha, dengan hasil sebagai berikut:

- Areal berhutan: 95.271,9 juta ha (50,74%)
- Areal tidak berhutan: 92.480,0 juta ha (49,26%)

1.3. Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan batas-batas yang pasti mengenai batas kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaannya dimulai dengan menentukan batas sementara di lapangan. Selanjutnya deliniasi batas kawasan hutan didiskusikan dengan segenap pihak yang terkait dengan penggunaan lahan dan kemudian disetujui Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Kementerian LHK.

1.4. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan meliputi:

1. Perubahan secara parsial
 - a). Perubahan peruntukan kawasan hutan
 - Pelepasan kawasan hutan;
 - Tukar menukar kawasan hutan.
 - b). Perubahan fungsi kawasan hutan
2. Perubahan untuk wilayah provinsi

1.5. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

Penggunaan kawasan hutan dapat berupa kegiatan yang bersifat komersil dan non komersil. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersil adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersil adalah kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

1.6. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, Beberapa prinsip pembentukan KPH adalah kebijakan ekologi, sosial budaya serta ekonomi.

1.7. Inventarisasi Hutan

Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Ruang lingkup inventarisasi hutan meliputi: survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya hutan, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Hirarki inventarisasi hutan adalah inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Tujuan inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana kehutanan sesuai tingkatannya.

Dalam rangka inventarisasi hutan nasional, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran *Temporary Sample Plot* (TSP) dan *Permanent Sample Plot* (PSP) di kawasan hutan di bawah ketinggian 1.000 mdpl di seluruh Indonesia. Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Dari hasil pengukuran TSP dan PSP telah dilakukan penghitungan taksiran potensi tegakan per hektar semua jenis di masing-masing provinsi dan secara nasional.

1.8. Deforestasi

Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain).

Laju deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan setiap tahun untuk setiap provinsi (ha/tahun) untuk periode tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.47.

1.9. Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Evaluasi kinerja sistem kajian dampak lingkungan dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) dan evaluasi kinerja penyusunan dokumen Amdal serta melalui evaluasi mutu dokumen Amdal baik oleh penyusun Amdal perorangan maupun Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP). Evaluasi bertujuan agar sistem Amdal berjalan sesuai dengan NSPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini merupakan bagian dibangunnya mekanisme standardisasi sistem kajian dampak lingkungan.

Sebagaimana diketahui Amdal merupakan *Environmental & Social safeguard* yang digunakan untuk melindungi kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat, serta menjaga keseimbangan 3P yaitu: *profit* (bisnis), *planet* (lingkungan) dan *people* (masyarakat), sehingga perlu dilakukan evaluasi agar proses Amdal dan izin lingkungan benar-benar dilakukan pendalaman dan analisis aspek teknis dan *scientific* terkait dengan kepentingan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat serta pendalaman terkait dengan *concern* masyarakat sebagai wujud perlindungan kepentingan masyarakat.

1.10. Deskripsi Ekoregion

A. Wilayah Ekoregion Nasional

Wilayah ekoregion nasional terdiri dari 3 wilayah, yaitu:

1. Ekoregion Paparan Sunda
Ekoregion ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Madura, Bali, Kepulauan Banyak, Mentawai, Riau, Bangka Belitung dan sejumlah pulau kecil lainnya, Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Jawa.
2. Ekoregion Wallace
Ekoregion ini mencakup pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Arafura dan selat Makassar.
3. Ekoregion Paparan Sahul
Ekoregion ini mencakup pulau Papua, Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Aru dan Laut Aru.

Berdasarkan ketentuan seperti disajikan di atas, maka ekoregion nasional terbagi menjadi 44 Sub Ekoregion, yaitu:

1. Dataran Material Aluvium Beriklim Basah (Pl Qa W) Paparan Sunda
2. Dataran Material Aluvium Beriklim Kering (Pl Qa D) Paparan Sunda
3. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Pl Sd W) Paparan Sunda
4. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Pl Sd D) Paparan Sunda
5. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Hi Sd W) Paparan Sunda
6. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Hi Sd D) Paparan Sunda
7. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah (Hi Ig W) Paparan Sunda
8. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering (Hi Ig D) Paparan Sunda
9. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Hi Mt W) Paparan Sunda
10. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Hi Mt D) Paparan Sunda
11. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Mn Sd W) Paparan Sunda

12. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Mn Sd D) Paparan Sunda
13. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah (Mn Ig W) Paparan Sunda
14. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering (Mn Ig D) Paparan Sunda
15. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Mn Mt W) Paparan Sunda
16. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Mn Mt D) Paparan Sunda
17. Dataran Material Aluvium Beriklim Basah (Pl Qa W) Wallacea
18. Dataran Material Aluvium Beriklim Kering (Pl Qa D) Wallacea
19. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Pl Sd W) Wallacea
20. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Pl Sd D) Wallacea
21. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Hi Sd W)
22. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Hi Sd D) Wallacea
23. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah (Hi Ig W) Wallacea
24. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering (Hi Ig D) Wallacea
25. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Hi Mt W) Wallacea
26. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Hi Mt D) Wallacea
27. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Mn Sd W) Wallacea
28. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Mn Sd D) Wallacea
29. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah (Mn Ig W) Wallacea
30. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering (Mn Ig D) Wallacea
31. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Mn Mt W) Wallacea
32. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Mn Mt D) Wallacea
33. Dataran Material Aluvium Beriklim Basah (Pl Qa W) Paparan Sahul
34. Dataran Material Aluvium Beriklim Kering (Pl Qa D) Paparan Sahul
35. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Pl Sd W) Paparan Sahul

36. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Pl Sd D) Paparan Sahul
37. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Hi Sd W) Paparan Sahul
38. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Hi Sd D) Paparan Sahul
39. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Hi Mt W) Paparan Sahul
40. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Hi Mt D) Paparan Sahul
41. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah (Mn Sd W) Paparan Sahul
42. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering (Mn Sd D) Paparan Sahul
43. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah (Mn Mt W) Paparan Sahul
44. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering (Mn Mt D) Paparan Sahul

B. Ekoregion Laut

Ekoregion laut terdiri dari 18 wilayah ekoregion laut, yaitu:

1. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera
2. Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa
3. Selat Malaka
4. Laut Natuna
5. Selat Karimata
6. Laut Jawa
7. Laut Sulawesi
8. Selat Makassar
9. Perairan Bali dan Nusa Tenggara
10. Teluk Tomini
11. Laut Halmahera
12. Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi
13. Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi
14. Laut Seram dan Teluk Bintuni
15. Laut Banda
16. Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua
17. Teluk Cendrawasih
18. Laut Arafura

C. Pembagian Ekoregion Berdasarkan Bentang Lahan

Klasifikasi ekoregion berdasarkan pendekatan bentang lahan menurut klasifikasi verstappen untuk skala peta 1:250.000:

Kode	Provinsi
V. Pegunungan Gunung api	
V1	Kerucut Gunung api (<i>Volcanic Cone</i>)
V2	Lereng Gunung api (<i>Volcanic Slope</i>)
V3	Kaki Gunung api (<i>Volcanic foot</i>)
F. Transisi Vulkanik dan Fluvial	
Fv	Dataran Fluvio Gunung api (<i>Fluvio-volcanic Plain</i>)
F	Dataran Aluvial (<i>Aluvial Plain</i>)
F. Transisi Fluvio dan Marin	
Fm	Dataran Fluvialmarin (<i>Fluvio- marine Plain</i>)
M. Bentang lahan Marin (Aktivitas Gelombang)	
M1	Pantai (<i>shore</i>)
M2	Pesisir (<i>coast</i>)
E. Bentang lahan Eolian (Aktivitas Angin)	
E1	Gumuk Pasir (<i>Sand Dunes</i>)
E2	Padang Pasir (<i>Desert</i>)
S. Bentang lahan Struktural (Aktifitas Tektonik Lempeng)	
S. Pegunungan Struktural	
S11	Pegunungan patahan (<i>Block atau Faulted Mountain</i>)
S12	Pegunungan Lipatan(<i>Folded Mountain</i>)
S. Perbukitan Struktural	
S21	Perbukitan Patahan (<i>Block Hills atau Faulted Hills</i>)
S22	Perbukitan Lipatan (<i>Folded Hills</i>)
S. Lereng Perbukitan Struktural	
S31	Lereng kaki Perbukitan/ Pegunungan Patahan(<i>Slope of Block Hills atau Faulted Hills/Mountains</i>)
S32	Lereng kaki Perbukitan/ Pegunungan Lipatan(<i>Slope of Folded Hills/Mountains</i>)
S. Lembah Perbukitan Struktural	
S41	Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Patahan (<i>Faulted Interhilly atau Intermountain Basin</i>)
S42	Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Lipatan (<i>Synclinal</i>)
D. Bentang lahan Denudasional (Aktivitas Degradasional)	
D1	Pegunungan Denudasional (<i>Denudasional Mountain</i>)
D2	PerbukitanDenudasional(<i>Denudasional Hills</i>)
D3	Lereng kaki Perbukitan/ Pegunungan Denudasional (<i>Slope of Denudasional Hills/Mountains</i>)
D4	Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Denudasional (<i>Denudasional Interhilly atau Intermountain Basin</i>)

K. Bentang lahan Solusional (Pelarutan Batuan)	
K1	Pegunungan Solusional (<i>Solusional Mountain</i>)
K2	Perbukitan Solusional (<i>Solusional Hills</i>)
K3	Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Solusional (<i>Solusional Interhilly</i> atau <i>Intermountain Valley</i>)
K. Bentang lahan Organik (Aktivitas Organisme)	
O1	Dataran Gambut (<i>Peat-organic Plain</i>)
O2	Dataran Terumbu (<i>Reef-organic Plain</i>)
G. Bentang lahan Glasial (Aliran Salju atau Gletser)	
G1	Pegunungan Glasial (<i>Glacier Mountain</i>)
G2	Perbukitan Glasial (<i>Glacier Hills</i>)
G3	Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Glasial (<i>Glacier Interhilly</i> atau <i>Intermountain Valley</i>)
A. Bentang lahan Antropogenik (Aktivitas Manusia)	
A	Dataran Reklamasi (<i>Antropogenic Plain</i>)

Tabel 1.1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2016

No	Provinsi	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan	Kawasan Hutan Konservasi			Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Jumlah Kawasan Hutan Daratan (Ha)	Luas Kawasan Hutan Daratan dan Perairan (Ha)
				Perairan (Ha)	Daratan (Ha)	Jumlah (Ha)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aceh	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016	11 November 2016	0,00	1,057,628.00	1,057,628.00	1,794,350.00	145,384.00	551,073.00	15,378.00	3,563,813.00	3,563,813.00
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	0,00	427,008.00	427,008.00	1,206,881.00	641,769.00	704,452.00	75,684.00	3,055,794.00	3,055,794.00
3	Sumatera Barat	351/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	37,164.00	769,775.00	806,939.00	791,671.00	233,211.00	360,608.00	187,623.00	2,342,894.00	2,380,058.00
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	0,00	630,753.00	630,753.00	233,910.00	1,017,318.00	2,339,578.00	1,185,433.00	5,406,992.00	5,406,992.00
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	685,471.00	685,471.00	179,588.00	258,285.00	963,792.00	11,399.00	2,098,535.00	2,098,535.00
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Sejen/PLA.2/6/2016	17 Juni 2016	49,104.00	741,681.00	790,785.00	578,279.00	213,918.00	1,713,880.00	160,995.00	3,408,754.00	3,457,858.00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	462,965.00	462,965.00	250,750.00	173,280.00	25,873.00	11,763.00	924,631.00	924,631.00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462,030.00	462,030.00	317,615.00	33,358.00	191,732.00	0,00	1,004,735.00	1,004,735.00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	35,454.00	35,454.00	185,531.00	0,00	432,884.00	693.00	654,562.00	654,562.00
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015	06 Maret 2015	0,00	12,294.72	12,294.72	97,662.65	118,833.75	78,830.37	74,510.24	382,131.73	382,131.73
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108,000.00	272.34	108,272.34	44.76	0,00	158.35	0,00	475.45	108,475.45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132,180.00	132,180.00	291,306.00	190,152.00	202,965.00	0,00	816,603.00	816,603.00
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	110,117.00	16,413.00	126,530.00	84,430.00	183,930.00	362,360.00	0,00	647,133.00	757,250.00
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910.34	910.34	2,057.90	0,00	13,851.28	0,00	16,819.52	16,819.52
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	3,506.00	230,126.00	233,632.00	344,742.00	0,00	782,772.00	0,00	1,357,640.00	1,361,146.00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51,467.00	112,991.00	164,458.00	12,359.00	49,439.00	26,998.00	0,00	201,787.00	253,254.00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	3,415.00	22,878.59	26,293.59	95,766.06	6,719.26	1,907.10	0,00	127,271.01	130,686.01
18	N T B	598/Menhut-II/2009	02 Oktober 2009	11,121.00	168,044.00	179,165.00	430,485.00	286,700.00	150,609.00	0,00	1,035,838.00	1,046,959.00
19	N T T	357/MenLHK/Sejen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	256,482.00	264,930.00	521,412.00	684,572.00	169,707.00	288,214.00	78,494.00	1,485,917.00	1,742,399.00
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	190,945.00	1,430,101.00	1,621,046.00	2,310,874.00	2,132,398.00	2,127,365.00	197,918.00	8,198,656.00	8,389,601.00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	22,542.00	1,608,286.00	1,630,828.00	1,346,066.00	3,317,461.00	3,881,817.00	2,543,535.00	12,697,165.00	12,719,707.00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	0,00	213,285.00	213,285.00	526,425.00	126,660.00	762,188.00	151,424.00	1,779,982.00	1,779,982.00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014	29 Agustus 2014	0,00	1,704,666.00	1,704,666.00	2,848,243.00	5,045,879.00	4,077,346.00	179,699.00	13,855,833.00	13,855,833.00
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	69,800.00	245,165.00	314,965.00	161,784.00	208,927.00	64,367.00	14,696.00	694,939.00	764,739.00
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29 September 2014	340,119.00	648,374.00	988,493.00	1,276,087.00	1,390,971.00	401,814.00	217,322.00	3,934,588.00	4,274,687.00
26	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	606,804.00	244,463.00	851,267.00	1,232,683.00	494,846.00	124,024.00	22,976.00	2,118,992.00	2,725,796.00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1,504,160.00	282,924.00	1,787,084.00	1,081,489.00	466,854.00	401,581.00	93,571.00	2,326,419.00	3,830,579.00
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	0,00	196,653.00	196,653.00	204,608.00	251,097.00	89,879.00	82,431.00	824,668.00	824,668.00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	215,190.00	215,190.00	452,030.00	330,700.00	71,859.00	22,597.00	1,092,376.00	1,092,376.00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	9,208.00	420,330.00	429,538.00	627,256.00	894,258.00	643,693.00	1,324,866.00	3,910,409.00	3,919,617.00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	0,00	218,499.00	218,499.00	584,058.00	666,851.00	481,730.00	564,082.00	2,515,220.00	2,515,220.00
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	928,350.00	1,711,908.00	2,640,258.00	1,631,589.00	1,778,480.00	2,188,160.00	1,474,650.00	8,784,787.00	9,713,137.00
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	1,019,017.00	6,736,267.00	7,755,284.00	7,815,283.00	5,961,240.00	4,739,327.00	4,116,365.00	29,368,482.00	30,387,499.00
Jumlah				5,321,321.00	22,109,915.99	27,431,236.99	29,680,475.37	26,788,626.01	29,247,693.10	12,808,111.24	120,634,821.71	125,956,142.71

Sumber: Direktorat Jenderal Pemodelan dan Tata Lingkungan
 catatan : Luas kawasan hutan perfungsi didasarkan/menopik pada lembar SK kawasan hutan yang di berikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Tahun 2016

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan							Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)		Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh										
	A. Hutan	781.8	1,670.9	118.6	399.9	2,971.2	2.4	2,973.7	297.2	3,270.9	57.9
	- Hutan Primer	504.7	1,193.7	56.2	139.3	1,893.9	0.0	1,894.0	52.0	1,946.0	34.5
	- Hutan Sekunder	265.1	470.3	54.7	207.7	997.7	2.0	999.7	198.1	1,197.9	21.2
	- Hutan Tanaman *	12.0	7.0	7.7	52.9	79.6	0.4	79.9	47.1	127.0	2.2
2	B. Non Hutan	64.8	123.4	26.8	151.2	366.2	12.9	379.2	1,997.3	2,376.4	42.1
	Total	846.6	1,794.4	145.4	551.1	3,337.4	15.4	3,352.8	2,294.5	5,647.3	100.0
	Sumatera Utara										
	A. Hutan	379.4	673.2	327.0	276.9	1,656.6	6.1	1,662.7	150.4	1,813.1	25.5
	- Hutan Primer	292.9	249.5	33.6	2.7	578.7	0.9	579.6	3.1	582.7	8.2
3	- Hutan Sekunder	86.3	394.5	287.3	187.4	955.5	5.2	960.8	124.7	1,085.5	15.3
	- Hutan Tanaman *	0.2	29.2	6.1	86.9	122.3	-	122.3	22.6	145.0	2.0
	B. Non Hutan	47.6	533.7	314.7	427.5	1,323.5	69.6	1,393.1	3,895.8	5,288.9	74.5
	Total	427.0	1,206.9	641.8	704.5	2,980.1	75.7	3,055.8	4,046.2	7,102.0	100.0
	Sumatera Barat										
4	A. Hutan	684.9	584.2	150.3	256.0	1,675.4	85.1	1,760.5	163.5	1,924.1	46.0
	- Hutan Primer	387.2	168.2	5.1	7.0	567.6	4.3	571.9	14.3	586.2	14.0
	- Hutan Sekunder	297.7	415.6	143.9	237.4	1,094.6	80.6	1,175.2	144.8	1,320.0	31.6
	- Hutan Tanaman *	-	0.4	1.3	11.6	13.3	0.1	13.4	4.5	17.9	0.4
	B. Non Hutan	84.8	207.5	82.9	104.6	479.8	102.6	582.4	1,677.4	2,259.8	54.0
4	Total	769.8	791.7	233.2	360.6	2,155.3	187.6	2,342.9	1,841.0	4,183.9	100.0
	Riau										
	A. Hutan	481.2	90.9	339.7	1,554.5	2,466.3	59.5	2,525.8	91.8	2,617.6	29.5
	- Hutan Primer	135.9	21.9	26.7	22.9	207.5	2.7	210.2	1.0	211.1	2.4
	- Hutan Sekunder	341.6	69.0	268.8	656.7	1,336.2	51.0	1,387.2	65.3	1,452.5	16.4
4	- Hutan Tanaman *	3.6	-	44.1	874.9	922.6	5.8	928.4	25.6	954.0	10.7
	B. Non Hutan	149.6	143.0	677.7	785.1	1,755.3	1,125.9	2,881.2	3,384.0	6,265.2	70.5
	Total	630.8	233.9	1,017.3	2,339.6	4,221.6	1,185.4	5,407.0	3,475.8	8,882.8	100.0

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Jambi										
	A. Hutan	558.6	142.0	140.9	462.0	1,303.5	0.1	1,303.6	82.0	1,385.6	28.7
	- Hutan Primer	458.8	99.1	52.4	70.5	680.7	0.0	680.7	29.3	710.0	14.7
	- Hutan Sekunder	99.7	42.8	76.5	105.4	324.4	0.0	324.5	35.9	360.3	7.5
	- Hutan Tanaman *	0.1	0.1	12.0	286.2	298.4	0.1	298.4	16.8	315.2	6.5
6	B. Non Hutan	126.9	37.6	117.4	501.8	783.6	11.3	795.0	2,651.8	3,446.8	71.3
	Total	685.5	179.6	258.3	963.8	2,087.1	11.4	2,098.5	2,733.8	4,832.3	100.0
	Sumatera Selatan										
	A. Hutan	410.8	269.8	86.8	657.3	1,424.7	0.1	1,424.8	111.6	1,536.4	17.8
	- Hutan Primer	288.1	73.4	10.8	6.8	379.1	0.0	379.1	1.0	380.1	4.4
7	- Hutan Sekunder	120.1	192.3	55.5	55.4	423.4	0.1	423.4	56.7	480.1	5.6
	- Hutan Tanaman *	2.7	4.0	20.5	595.1	622.3	0.1	622.3	53.9	676.2	7.8
	B. Non Hutan	330.9	308.5	127.1	1,056.6	1,823.0	160.9	1,983.9	5,106.5	7,090.5	82.2
	Total	741.7	578.3	213.9	1,713.9	3,247.8	161.0	3,408.8	5,218.1	8,626.9	100.0
	Kep. Bangka Belitung										
8	A. Hutan	10.6	79.7	0.0	98.0	188.3	0.0	188.3	41.3	229.7	13.8
	- Hutan Primer	1.6	22.1	0.0	7.1	30.7	0.0	30.8	3.8	34.5	2.1
	- Hutan Sekunder	9.0	57.6	0.0	91.0	157.6	0.0	157.6	37.6	195.2	11.8
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	B. Non Hutan	24.8	105.9	-	334.9	465.5	0.7	466.2	963.8	1,430.0	86.2
9	Total	35.5	185.5	-	432.9	653.9	0.7	654.6	1,005.2	1,659.7	100.0
	Bengkulu										
	A. Hutan	400.5	174.4	64.9	14.7	654.5	0.1	654.6	26.9	681.5	34.0
	- Hutan Primer	346.7	98.6	17.2	2.9	465.4	-	465.4	0.9	466.3	23.3
	- Hutan Sekunder	53.8	75.8	47.7	11.8	189.1	0.1	189.2	26.0	215.1	10.7
9	- Hutan Tanaman *	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.0
	B. Non Hutan	62.5	76.3	108.4	11.1	258.3	11.7	270.0	1,051.4	1,321.4	66.0
	Total	463.0	250.8	173.3	25.9	912.9	11.8	924.6	1,078.3	2,002.9	100.0
	Lampung										
	A. Hutan	261.3	57.6	3.0	13.4	335.2	0.0	335.2	19.6	354.9	10.3

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Hutan Primer	151.7	2.9	1.9	0.0	156.5	0.0	156.5	0.8	157.3	4.6
	- Hutan Sekunder	109.7	54.6	1.1	0.1	165.5	0.0	165.5	18.1	183.6	5.3
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	13.3	13.3	-	13.3	0.8	14.1	0.4
	B. Non Hutan	200.7	260.1	30.4	178.4	669.5	-	669.5	2,411.0	3,080.5	89.7
10	Total	462.0	317.6	33.4	191.7	1,004.7	-	1,004.7	2,430.6	3,435.4	100.0
	Kepulauan Riau										
	A. Hutan	2.0	50.5	65.9	51.4	169.8	43.2	213.0	55.7	268.7	32.9
	- Hutan Primer	0.0	0.9	4.3	4.8	10.0	2.8	12.8	1.9	14.7	1.8
	- Hutan Sekunder	2.0	49.7	61.6	46.3	159.5	40.4	199.9	52.7	252.7	30.9
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	1.1	1.4	0.2
	B. Non Hutan	10.3	47.1	52.9	27.5	137.8	31.3	169.1	379.1	548.3	67.1
	Total	12.3	97.7	118.8	78.8	307.6	74.5	382.1	434.9	817.0	100.0
	SUMATERA										
	A. Hutan	3,971.2	3,793.2	1,297.2	3,784.0	12,845.6	196.6	13,042.2	1,040.2	14,082.4	29.8
	- Hutan Primer	2,567.6	1,930.2	208.4	263.9	4,970.1	10.7	4,980.8	108.0	5,088.8	10.8
	- Hutan Sekunder	1,385.0	1,822.2	997.2	1,599.2	5,803.6	179.4	5,983.0	759.8	6,742.8	14.3
	- Hutan Tanaman *	18.7	40.8	91.6	1,920.9	2,072.0	6.4	2,078.5	172.3	2,250.8	4.8
	B. Non Hutan	1,102.8	1,843.0	1,538.2	3,578.7	8,062.7	1,526.9	9,589.6	23,518.2	33,107.8	70.2
	Total	5,074.1	5,636.2	2,835.4	7,362.7	20,908.4	1,723.5	22,631.8	24,558.4	47,190.2	100.0
11	Banten										
	A. Hutan	86.5	6.3	24.1	11.8	128.8	0.0	128.8	38.4	167.1	17.8
	- Hutan Primer	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.8
	- Hutan Sekunder	54.1	4.2	3.3	0.7	62.3	0.0	62.3	3.6	65.9	7.0
	- Hutan Tanaman *	25.2	2.1	20.9	11.1	59.1	-	59.1	34.7	93.9	10.0
	B. Non Hutan	26.4	6.1	25.3	15.2	73.0	-	73.0	699.0	772.1	82.2
	Total	113.0	12.4	49.4	27.0	201.8	-	201.8	737.4	939.2	100.0
	DKI Jakarta										
	A. Hutan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5
	- Hutan Primer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Hutan Sekunder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	B. Non Hutan	0.2	0.0	-	0.2	0.3	-	0.3	64.7	65.1	99.5
	Total	0.3	0.0	-	0.2	0.5	-	0.5	64.9	65.3	100.0
13	Jawa Barat										
	A. Hutan	110.0	191.7	107.1	106.1	514.9	0.0	514.9	135.1	650.0	17.6
	- Hutan Primer	8.5	3.6	1.4	0.0	13.5	0.0	13.5	0.2	13.7	0.4
	- Hutan Sekunder	66.3	69.8	12.7	15.4	164.1	0.0	164.1	12.7	176.8	4.8
	- Hutan Tanaman *	35.3	118.3	93.0	90.8	337.3	-	337.3	122.2	459.6	12.4
	B. Non Hutan	22.2	99.6	83.0	96.8	301.7	-	301.7	2,746.9	3,048.6	82.4
	Total	132.2	291.3	190.2	203.0	816.6	-	816.6	2,882.0	3,698.6	100.0
14	Jawa Tengah										
	A. Hutan	10.8	75.3	158.8	310.6	555.6	0.0	555.6	231.8	787.3	22.8
	- Hutan Primer	0.0	7.6	0.8	0.0	8.4	0.0	8.4	0.0	8.4	0.2
	- Hutan Sekunder	5.2	30.4	32.3	6.8	74.7	0.0	74.7	18.2	93.0	2.7
	- Hutan Tanaman *	5.6	37.4	125.7	303.8	472.4	-	472.4	213.5	686.0	19.8
	B. Non Hutan	5.6	9.1	25.1	51.7	91.5	-	91.5	2,577.7	2,669.2	77.2
	Total	16.4	84.4	183.9	362.4	647.1	-	647.1	2,809.4	3,456.6	100.0
15	DI Yogyakarta										
	A. Hutan	0.8	1.4	0.0	11.2	13.4	0.0	13.4	32.5	45.9	14.4
	- Hutan Primer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Hutan Sekunder	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	18.1	18.5	5.8
	- Hutan Tanaman *	0.6	1.2	-	11.2	13.0	-	13.0	14.4	27.4	8.6
	B. Non Hutan	0.2	0.6	-	2.6	3.4	-	3.4	270.1	273.5	85.6
	Total	0.9	2.1	-	13.9	16.8	-	16.8	302.6	319.4	100.0
16	Jawa Timur										
	A. Hutan	186.9	284.3	0.0	669.5	1,140.7	0.0	1,140.7	294.9	1,435.6	29.7
	- Hutan Primer	26.4	11.8	0.0	4.3	42.5	0.0	42.5	2.2	44.7	0.9
	- Hutan Sekunder	147.3	178.3	0.0	64.3	389.9	0.0	389.9	43.8	433.7	9.0
	- Hutan Tanaman *	13.1	94.2	-	601.0	708.3	-	708.3	248.9	957.2	19.8
	B. Non Hutan	43.2	60.5	-	113.2	216.9	-	216.9	3,185.1	3,402.0	70.3

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total	230.1	344.7	-	782.8	1,357.6	-	1,357.6	3,480.0	4,837.7	100.0
	JAWA										
	A. Hutan	395.1	559.1	290.1	1,109.3	2,353.5	-	2,353.5	732.8	3,086.3	23.2
	- Hutan Primer	42.2	23.0	2.2	4.3	71.7	-	71.7	2.4	74.1	0.6
	- Hutan Sekunder	273.2	283.0	48.3	87.2	691.7	-	691.7	96.6	788.2	5.9
	- Hutan Tanaman *	79.7	253.1	239.6	1,017.8	1,590.2	-	1,590.2	633.8	2,224.0	16.7
	B. Non Hutan	97.8	175.9	133.4	279.8	687.0	-	687.0	9,543.5	10,230.5	76.8
	Total	492.9	734.9	423.5	1,389.1	3,040.5	-	3,040.5	10,276.3	13,316.8	100.0
17	Kalimantan Barat										
	A. Hutan	1,148.5	1,786.0	1,360.1	752.3	5,046.9	59.3	5,106.2	476.9	5,583.1	38.3
	- Hutan Primer	966.6	937.0	293.9	28.3	2,225.8	2.0	2,227.8	4.3	2,232.1	15.3
	- Hutan Sekunder	182.0	848.9	1,066.1	665.8	2,762.8	57.3	2,820.1	468.5	3,288.6	22.6
	- Hutan Tanaman *	-	-	0.1	58.2	58.3	-	58.3	4.0	62.4	0.4
	B. Non Hutan	281.6	524.9	772.3	1,375.1	2,953.8	138.6	3,092.5	5,897.3	8,989.7	61.7
	Total	1,430.1	2,310.9	2,132.4	2,127.4	8,000.7	197.9	8,198.7	6,374.1	14,572.8	100.0
18	Kalimantan Selatan										
	A. Hutan	134.1	360.2	78.3	245.9	818.5	4.3	822.8	74.2	897.0	24.2
	- Hutan Primer	17.9	37.9	1.8	0.4	58.0	0.0	58.0	2.2	60.2	1.6
	- Hutan Sekunder	80.8	321.8	74.7	181.7	659.0	3.2	662.1	33.2	695.3	18.7
	- Hutan Tanaman *	35.4	0.5	1.8	63.8	101.5	1.1	102.6	38.8	141.4	3.8
	B. Non Hutan	79.2	166.2	48.4	516.3	810.1	147.1	957.2	1,859.8	2,817.0	75.8
	Total	213.3	526.4	126.7	762.2	1,628.6	151.4	1,780.0	1,934.0	3,713.9	100.0
19	Kalimantan Tengah										
	A. Hutan	1,079.0	943.2	2,854.3	1,981.4	6,857.9	601.6	7,459.5	149.6	7,609.1	49.8
	- Hutan Primer	300.0	449.4	374.7	32.6	1,156.8	2.7	1,159.5	0.6	1,160.1	7.6
	- Hutan Sekunder	779.0	493.8	2,474.6	1,803.4	5,550.8	579.6	6,130.4	127.1	6,257.5	41.0
	- Hutan Tanaman *	-	0.0	5.0	145.3	150.3	19.3	169.6	21.9	191.5	1.3
	B. Non Hutan	529.2	402.8	463.2	1,900.4	3,295.7	1,941.9	5,237.7	2,419.4	7,657.0	50.2
	Total	1,608.3	1,346.1	3,317.5	3,881.8	10,153.6	2,543.5	12,697.2	2,569.0	15,266.2	100.0
20&21	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara										

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah Hutan Produksi (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah Hutan (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A. Hutan	1,411.6	2,769.6	4,681.7	2,596.2	11,459.1	102.0	11,561.1	1,561.8	13,122.9	67.3
	- Hutan Primer	1,198.4	2,143.7	2,157.3	364.5	5,863.9	5.2	5,869.1	273.1	6,142.2	31.5
	- Hutan Sekunder	211.8	625.5	2,521.0	1,811.6	5,169.9	94.2	5,264.1	1,225.4	6,489.5	33.3
	- Hutan Tanaman *	1.4	0.4	3.3	420.1	425.3	2.5	427.9	63.3	491.2	2.5
	B. Non Hutan	293.1	78.7	364.2	1,481.1	2,217.1	77.7	2,294.7	4,087.2	6,381.9	32.7
	Total	1,704.7	2,848.2	5,045.9	4,077.3	13,676.1	179.7	13,855.8	5,649.0	19,504.8	100.0
	KALIMANTAN										
	A. Hutan	3,773.2	5,859.0	8,974.4	5,575.8	24,182.3	767.2	24,949.6	2,262.5	27,212.0	51.3
	- Hutan Primer	2,482.9	3,568.1	2,827.7	425.8	9,304.4	9.9	9,314.3	280.3	9,594.6	18.1
	- Hutan Sekunder	1,253.5	2,290.0	6,136.5	4,462.5	14,142.5	734.3	14,876.8	1,854.1	16,730.9	31.5
22	- Hutan Tanaman *	36.8	0.9	10.2	687.4	735.4	23.0	758.4	128.0	886.4	1.7
	B. Non Hutan	1,183.1	1,172.6	1,648.0	5,272.9	9,276.7	2,305.4	11,582.1	14,263.6	25,845.7	48.7
	Total	4,956.3	7,031.6	10,622.4	10,848.7	33,459.1	3,072.6	36,531.6	16,526.1	53,057.7	100.0
	Sulawesi Utara										
	A. Hutan	210.5	110.9	143.6	30.5	495.6	12.2	507.8	47.5	555.3	38.6
	- Hutan Primer	128.8	62.0	34.9	10.3	236.1	0.0	236.1	6.9	243.0	16.9
	- Hutan Sekunder	81.7	48.9	108.7	20.2	259.5	12.2	271.7	40.6	312.3	21.7
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	B. Non Hutan	34.6	50.9	65.3	33.8	184.6	2.5	187.1	697.1	884.3	61.4
	Total	245.2	161.8	208.9	64.4	680.2	14.7	694.9	744.6	1,439.5	100.0
23	Gorontalo										
	A. Hutan	184.6	179.5	193.3	63.1	620.5	58.8	679.3	13.4	692.7	57.8
	- Hutan Primer	129.8	77.2	60.8	6.2	273.9	1.2	275.1	1.8	276.9	23.1
	- Hutan Sekunder	54.9	102.3	132.3	56.9	346.4	57.7	404.0	11.6	415.6	34.7
	- Hutan Tanaman *	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.0	0.2	0.0
	B. Non Hutan	12.0	25.1	57.8	26.8	121.8	23.6	145.4	360.4	505.8	42.2
	Total	196.7	204.6	251.1	89.9	742.2	82.4	824.7	373.8	1,198.5	100.0
	Sulawesi Tengah										
	A. Hutan	563.8	1,165.7	1,175.3	295.7	3,200.5	161.9	3,362.4	492.0	3,854.3	63.9
	- Hutan Primer	456.9	790.0	616.2	125.8	1,989.0	64.3	2,053.3	147.0	2,200.3	36.5

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Hutan Sekunder	106.9	375.7	559.0	169.9	1,211.4	97.6	1,309.0	344.3	1,653.2	27.4
	- Hutan Tanaman *	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.7	0.8	0.0
	B. Non Hutan	84.6	110.4	215.6	106.2	516.8	55.4	572.2	1,608.2	2,180.4	36.1
25	Total	648.4	1,276.1	1,391.0	401.8	3,717.2	217.3	3,934.6	2,100.1	6,034.7	100.0
	Sulawesi Tenggara										
	A. Hutan	198.9	952.3	383.5	204.5	1,739.2	34.5	1,773.7	123.2	1,896.8	52.5
	- Hutan Primer	8.4	143.2	65.4	26.8	243.8	4.9	248.7	6.0	254.7	7.1
26	- Hutan Sekunder	190.5	809.0	318.1	176.3	1,494.0	29.5	1,523.5	116.8	1,640.3	45.4
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	1.4	1.4	0.1	1.5	0.4	1.9	0.1
	B. Non Hutan	84.0	129.2	83.3	197.1	493.6	59.1	552.7	1,162.1	1,714.8	47.5
	Total	282.9	1,081.5	466.9	401.6	2,232.8	93.6	2,326.4	1,285.2	3,611.6	100.0
27	Sulawesi Barat										
	A. Hutan	202.1	304.9	231.9	44.2	783.1	5.9	788.9	34.3	823.2	49.0
	- Hutan Primer	118.8	119.7	73.7	10.6	322.8	0.1	323.0	0.1	323.1	19.2
	- Hutan Sekunder	83.3	185.2	158.1	33.6	460.2	5.8	466.0	34.2	500.2	29.8
27	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	B. Non Hutan	13.1	147.1	98.8	27.7	286.7	16.7	303.4	553.6	857.0	51.0
	Total	215.2	452.0	330.7	71.9	1,069.8	22.6	1,092.4	587.9	1,680.2	100.0
	Sulawesi Selatan										
27	A. Hutan	183.4	814.2	285.8	40.6	1,324.1	10.8	1,334.9	80.5	1,415.4	31.5
	- Hutan Primer	106.4	374.3	97.0	2.0	579.7	5.0	584.7	10.3	595.0	13.2
	- Hutan Sekunder	76.4	437.6	182.5	37.0	733.5	5.8	739.2	67.4	806.6	17.9
	- Hutan Tanaman *	0.6	2.3	6.4	1.7	11.0	-	11.0	2.8	13.8	0.3
27	B. Non Hutan	61.0	418.5	209.0	83.4	771.9	12.2	784.1	2,298.9	3,083.0	68.5
	Total	244.5	1,232.7	494.8	124.0	2,096.0	23.0	2,119.0	2,379.4	4,498.4	100.0
	SULAWESI										
	A. Hutan	1,543.4	3,527.5	2,413.4	678.6	8,163.0	284.1	8,447.0	790.8	9,237.8	50.0
27	- Hutan Primer	949.2	1,566.5	948.0	181.6	3,645.3	75.5	3,720.8	172.2	3,892.9	21.1
	- Hutan Sekunder	593.6	1,958.7	1,458.7	493.9	4,505.0	208.5	4,713.5	614.8	5,328.2	28.9
	- Hutan Tanaman *	0.6	2.3	6.7	3.1	12.7	0.1	12.8	3.9	16.6	0.1

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B. Non Hutan	289.4	881.1	730.0	474.9	2,375.4	169.5	2,545.0	6,680.3	9,225.2	50.0
	Total	1,832.8	4,408.7	3,143.4	1,153.5	8,163.0	453.6	10,992.0	7,471.1	18,463.1	100.0
28	Bali										
	A. Hutan	13.2	73.5	0.8	0.2	87.8	0.0	87.8	3.8	91.6	16.2
	- Hutan Primer	3.5	43.2	0.0	0.0	46.7	0.0	46.7	0.2	46.8	8.3
	- Hutan Sekunder	9.5	30.0	0.7	0.1	40.4	0.0	40.4	3.5	43.9	7.7
	- Hutan Tanaman *	0.2	0.4	0.1	0.1	0.8	-	0.8	0.0	0.9	0.2
	B. Non Hutan	9.7	22.2	5.9	1.7	39.4	-	39.4	435.8	475.3	83.8
	Total	22.9	95.8	6.7	1.9	127.3	-	127.3	439.6	566.9	100.0
29	Nusa Tenggara Barat										
	A. Hutan	85.2	387.8	230.0	90.7	793.7	0.0	793.7	126.3	920.0	46.5
	- Hutan Primer	45.6	245.2	98.4	18.0	407.3	0.0	407.3	9.8	417.0	21.1
	- Hutan Sekunder	39.5	142.2	131.5	72.0	385.2	0.0	385.2	115.9	501.1	25.3
	- Hutan Tanaman *	0.1	0.4	0.1	0.7	1.2	-	1.2	0.6	1.8	0.1
	B. Non Hutan	82.8	42.7	56.7	59.9	242.1	-	242.1	818.1	1,060.2	53.5
	Total	168.0	430.5	286.7	150.6	1,035.8	-	1,035.8	944.3	1,980.2	100.0
30	Nusa Tenggara Timur										
	A. Hutan	176.4	441.7	107.1	185.9	911.2	17.7	928.9	831.9	1,760.8	37.3
	- Hutan Primer	114.1	127.9	26.1	44.1	312.2	1.6	313.8	154.6	468.4	9.9
	- Hutan Sekunder	61.5	312.9	81.0	141.2	596.5	16.1	612.6	675.1	1,287.7	27.3
	- Hutan Tanaman *	0.9	0.9	0.0	0.6	2.5	-	2.5	2.1	4.6	0.1
	B. Non Hutan	88.5	242.9	62.6	102.3	496.3	60.8	557.0	2,404.7	2,961.8	62.7
	Total	264.9	684.6	169.7	288.2	1,407.4	78.5	1,485.9	3,236.6	4,722.5	100.0
	BALI NUSA TENGGARA										
	A. Hutan	274.9	903.1	337.9	276.8	1,792.7	17.7	1,810.4	961.9	2,772.3	38.1
	- Hutan Primer	163.2	416.3	124.5	62.1	766.1	1.6	767.7	164.6	932.3	12.8
	- Hutan Sekunder	110.5	485.1	213.2	213.2	1,022.1	16.1	1,038.2	794.5	1,832.7	25.2
	- Hutan Tanaman *	1.2	1.7	0.2	1.5	4.5	-	4.5	2.8	7.3	0.1
	B. Non Hutan	180.9	307.8	125.2	163.9	777.8	60.8	838.6	3,658.7	4,497.3	61.9
	Total	455.9	1,210.8	463.1	440.7	2,570.5	78.5	2,649.0	4,620.5	7,269.6	100.0

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan								Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)		Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	Maluku Utara											
	A. Hutan	204.8	479.6	534.5	359.5	1,578.3	273.4	1,851.7	95.1	1,946.8	62.2	
	- Hutan Primer	62.8	144.3	95.1	29.0	331.3	14.5	345.7	8.6	354.3	11.3	
	- Hutan Sekunder	141.9	335.0	435.2	300.1	1,212.1	257.3	1,469.4	86.4	1,555.8	49.7	
	- Hutan Tanaman *	-	0.2	4.2	30.5	34.9	1.7	36.6	0.1	36.7	1.2	
	B. Non Hutan	13.7	104.5	132.4	122.2	372.8	290.6	663.5	520.4	1,183.8	37.8	
	Total	218.5	584.1	666.9	481.7	1,951.1	564.1	2,515.2	615.4	3,130.6	100.0	
32	Maluku											
	A. Hutan	368.8	513.6	753.1	428.4	2,063.9	808.5	2,872.4	157.6	3,030.0	65.6	
	- Hutan Primer	133.2	86.0	49.7	70.8	339.6	171.0	510.7	14.0	524.7	11.4	
	- Hutan Sekunder	235.6	427.6	703.4	357.6	1,724.2	637.5	2,361.7	143.6	2,505.3	54.2	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	
	B. Non Hutan	51.6	113.6	141.2	215.3	521.7	516.4	1,038.0	554.1	1,592.1	34.4	
	Total	420.3	627.3	894.3	643.7	2,585.5	1,324.9	3,910.4	711.7	4,622.1	100.0	
33	MALUKU											
	A. Hutan	573.5	993.2	1,287.5	787.9	3,642.2	1,082.0	4,724.1	252.7	4,976.9	64.2	
	- Hutan Primer	196.0	230.4	144.8	99.8	670.9	185.5	856.4	22.6	879.0	11.3	
	- Hutan Sekunder	377.5	762.6	1,138.6	657.7	2,936.3	894.8	3,831.1	230.0	4,061.2	52.4	
	- Hutan Tanaman *	-	0.2	4.2	30.5	34.9	1.7	36.6	0.1	36.7	0.5	
	B. Non Hutan	65.3	218.1	273.6	337.5	894.5	807.0	1,701.5	1,074.4	2,775.9	35.8	
	Total	638.8	1,211.3	1,561.1	1,125.4	4,536.7	1,888.9	6,425.6	1,327.1	7,752.8	100.0	
34	Papua											
	A. Hutan	5,224.9	6,989.2	5,228.0	3,929.1	21,371.2	2,759.0	24,130.2	952.4	25,082.6	80.7	
	- Hutan Primer	4,549.4	6,208.9	4,198.1	2,610.3	17,566.8	1,632.6	19,199.4	552.8	19,752.2	63.6	
	- Hutan Sekunder	675.6	780.3	1,029.8	1,318.2	3,803.8	1,125.2	4,929.1	399.4	5,328.5	17.1	
	- Hutan Tanaman *	-	0.1	0.0	0.5	0.6	1.2	1.8	0.1	1.9	0.0	
	B. Non Hutan	1,511.3	826.0	733.3	810.3	3,880.9	1,357.4	5,238.3	756.1	5,994.3	19.3	
	Total	6,736.3	7,815.3	5,961.2	4,739.3	25,252.1	4,116.4	29,368.5	1,708.4	31,076.9	100.0	
34	Papua Barat											
	A. Hutan	1,668.9	1,469.7	1,708.3	2,076.0	6,922.9	1,348.2	8,271.2	550.4	8,821.6	91.7	

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan							Diluar Kawasan Hutan (Ribu Ha)	Total	
		Hukum Konservasi (Ribu Ha)	Hutan Lindung (Ribu Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ribu Ha)	Hutan Produksi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ribu Ha)	Jumlah (Ribu Ha)		Jumlah (Ribu Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Hutan Primer	1,514.7	1,203.5	1,213.0	1,020.2	4,951.4	667.1	5,618.5	188.0	5,806.5	60.3
	- Hutan Sekunder	154.2	266.3	495.3	1,055.7	1,971.5	681.1	2,652.7	362.4	3,015.1	31.3
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	B. Non Hutan	43.0	161.9	70.1	112.2	387.2	126.4	513.6	289.7	803.3	8.3
	Total	1,711.9	1,631.6	1,778.5	2,188.2	7,310.1	1,474.7	8,784.8	840.1	9,624.9	100.0
	PAPUA										
	A. Hutan	6,893.8	8,459.0	6,936.3	6,005.0	28,294.2	4,107.2	32,401.4	1,502.8	33,904.1	83.3
	- Hutan Primer	6,064.1	7,412.4	5,411.1	3,630.6	22,518.2	2,299.7	24,817.9	740.8	25,558.7	62.8
	- Hutan Sekunder	829.8	1,046.5	1,525.1	2,373.9	5,775.3	1,806.4	7,581.7	761.9	8,343.6	20.5
	- Hutan Tanaman *	-	0.1	0.0	0.5	0.6	1.2	1.8	0.1	1.9	0.0
	B. Non Hutan	1,554.3	987.9	803.4	922.5	4,268.1	1,483.8	5,751.9	1,045.8	6,797.6	16.7
	Total	8,448.2	9,446.9	7,739.7	6,927.5	32,562.3	5,591.0	38,153.3	2,548.5	40,701.8	100.0
	INDONESIA										
	A. Hutan	17,425.2	24,094.0	21,536.8	18,217.5	81,273.5	6,454.8	87,728.3	7,543.6	95,271.9	50.7
	- Hutan Primer	12,465.2	15,146.8	9,666.7	4,668.0	41,946.7	2,583.0	44,529.7	1,490.9	46,020.5	24.5
	- Hutan Sekunder	4,823.0	8,648.1	11,517.6	9,887.7	34,876.4	3,839.5	38,715.9	5,111.7	43,827.6	23.3
	- Hutan Tanaman *	137.0	299.1	352.6	3,661.7	4,450.4	32.3	4,482.7	941.0	5,423.7	2.9
	B. Non Hutan	4,473.8	5,586.4	5,251.8	11,030.2	26,342.2	6,353.3	32,695.6	59,784.4	92,480.0	49.3
	Total	21,898.9	29,680.5	26,788.6	29,247.7	107,615.7	12,808.1	120,423.8	67,328.0	187,751.9	100.0

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman

baik Hutan Tanaman Industri/LUPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan;

terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.3. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s.d. Desember 2016

No.	Provinsi	Realisasi s.d. Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Realisasi s.d. Tahun 2016	
		Batas Luar (km)	Batas Fungsi (km)	Batas Luar (km)	Batas Fungsi (km)	Batas Luar (km)	Batas Fungsi (km)	Batas Luar (km)	Batas Fungsi (km)	Batas Luar (km)	Batas Fungsi (km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		4.430.93	1.097.67	-	-	152.70	135.76	165.55	-	4.749.18	1.233.43
2	Sumatera Utara	7.840.46	1.662.00	634	230.39	204.45	118.57	556.35	-	9.235.67	2.010.96
3	Sumatera Barat	3.914.23	1.578.70	88.18	-	-	-	-	-	4.002.41	1.578.70
4	Riau	8.760.42	1.407.16	-	-	-	316.93	213.14	-	8.973.56	1.724.09
5	Jambi	3.625.07	764.51	777.47	618.25	-	-	344	-	4.405.98	1.382.76
6	Sumatera Selatan	4.513.52	1.044.58	550	7.00	98.24	-	202.00	-	5.363.76	1.051.58
7	Bengkulu	1.524.49	489.85	-	-	-	-	5.00	-	1.529.49	489.85
8	Lampung	3.176.39	25.01	62.27	-	34.36	-	-	-	3.273.02	25.01
9	Kep. Bangka Belitung	496.49	66.00	3.842.83	600.14	43.99	-	100.31	11.42	4.483.62	677.56
10	Kepulauan Riau	18.04	805.17	-	-	654.27	56.74	527.92	-	1.200.23	861.91
11	DKI Jakarta	44.00	-	-	-	-	-	-	-	44.00	-
12	Jawa Barat	19.847.56	2.84	175.37	-	167.53	14.43	23.54	-	20.213.99	17.27
13	Jawa Tengah	19.064.65	-	-	-	-	-	-	-	19.064.65	-
14	D.I. Yogyakarta	203.51	-	72.77	-	-	-	-	-	276.28	-
15	Jawa Timur	19.382.27	43.56	12.53	-	-	-	-	-	19.394.80	43.56
16	Banten	46.91	-	-	-	-	-	-	-	46.91	-
17	Bali	1.610.00	208.97	229	-	-	-	-	-	1.839.13	208.97
18	Nusa Tenggara Barat	4.806.47	856.16	-	-	-	-	-	-	4.806.47	856.16
19	Nusa Tenggara Timur	4.860.94	13.30	247.73	-	167.67	-	138.00	-	5.414.35	13.30
20	Kalimantan Barat	9.517.04	7.794.98	201.30	599.55	110.52	265.77	633.65	37.57	10.462.51	8.697.87
21	Kalimantan Tengah	3.424.91	3.054.12	210.82	250.07	334.17	364.03	288.58	87.45	4.258.48	3.755.67
22	Kalimantan Selatan	10.861.09	3.115.13	216.59	226.45	431.14	-	207.55	93.90	11.716.38	3.435.48
23	Kalimantan Timur	5.412.90	10.864.61	2.935.84	380.82	1.046.42	30.48	287.77	7.03	9.682.92	11.282.95
24	Sulawesi Utara	2.614.97	7.423.72	59.59	25.38	101.00	324.00	62.50	-	2.838.06	7.773.10
25	Sulawesi Tengah	10.589.49	6.345.69	545.32	190.99	288.86	77.94	238.00	-	11.661.67	6.614.62
26	Sulawesi Selatan	710.63	1.653.77	-	-	-	-	-	-	710.63	1.653.77
27	Sulawesi Tenggara	5.789.45	4.228.80	-	-	-	-	-	-	5.789.45	4.228.80
28	Gorontalo	5.634.05	993.73	120.19	13.87	134.58	5.93	132.22	4.87	6.021.04	1.018.40
29	Sulawesi Barat	739.07	127.55	55.87	1.096.85	-	105.12	118.91	-	913.85	1.329.52
30	Maluku	7.616.84	3.954.72	146.80	82.04	198.74	33.49	97.70	12.20	8.060.08	4.082.45
31	Maluku Utara	221.05	938.00	96.65	673.67	55.67	324.24	121.29	202.04	494.66	2.137.95
32	Papua Barat	1.043.53	1.626.62	123.75	536.81	199.73	341.75	167.85	-	1.534.86	2.505.18
33	Papua	11.705.70	11.153.54	300.43	1.233.23	87.06	200.45	90.88	-	12.184.07	12.587.22
Jumlah		184.047.07	73.340.46	11.705.84	6.765.51	4.511.10	2.715.64	4.382.15	456.49	204.646.16	83.278.10

Cat: (-) tidak ada data

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.4. Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas s.d. Desember 2016

No.	Provinsi	Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas									
		s.d. Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		s.d. Tahun 2016	
		Jumlah Berita Acara	Kilometer	Jumlah Berita Acara	Kilometer	Jumlah Berita Acara	Kilometer	Jumlah Berita Acara	Kilometer	Jumlah Berita Acara	Kilometer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	71	5.807,32	-	-	-	-	18	248,73	89	6.056,05
2	Sumatera Utara	83	13.038,73	5	180,03	-	-	12	112,37	100	13.331,13
3	Sumatera Barat	129	4.912,77	43	1.437,85	-	-	5	98,00	177	6.448,62
4	Riau	119	11.315,24	3	274,10	-	-	5	411,05	127	12.000,39
5	Jambi	87	5.405,58	3	129,75	59	123.863,50	3	13,77	152	129.412,60
6	Sumatera Selatan	191	7.408,27	2	137,00	-	-	4	201,78	197	7.747,05
7	Bengkulu	119	2.457,14	1	9,90	-	-	-	-	120	2.467,04
8	Lampung	54	4.164,59	28	2,00	-	-	-	-	80	4.166,59
9	Kep. Bangka Belitung	38	475,11	2	72,90	24	50.833,24	11	94,00	75	51.475,25
10	Kepulauan Riau	7	90,78	1	25,01	-	-	-	-	8	115,79
11	DKI Jakarta	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
12	Jawa Barat	121	449,78	3	63,38	3	7,28	8	56,01	135	576,45
13	Jawa Tengah	54	78,04	3	7,54	-	-	1	15,01	58	100,59
14	D.I. Yogyakarta	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
15	Jawa Timur	31	508,28	1	1,95	3	24,43	1	3,41	36	538,06
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	39	1.616,40	1	9,40	-	-	-	-	40	1.625,80
18	Nusa Tenggara Barat	97	5.337,11	3	28,69	-	-	-	-	100	5.365,80
19	Nusa Tenggara Timur	101	7.219,37	-	-	2	28,45	15	185,68	118	7.433,50
20	Kalimantan Barat	233	13.588,74	35	794,76	268	28.767,00	5	296,87	541	43.447,37
21	Kalimantan Tengah	54	4.126,67	4	180,27	58	8.613,88	21	1.063,00	137	13.983,82
22	Kalimantan Selatan	57	3.578,46	9	283,31	66	7.723,00	8	371,70	140	11.956,47
23	Kalimantan Timur	256	16.767,16	32	1.311,38	288	36.157,08	-	-	576	54.235,62
24	Sulawesi Utara	67	6.851,59	6	101,44	-	-	8	179,89	81	7.132,92
25	Sulawesi Tengah	200	13.698,99	63	1.667,61	9	219,73	-	-	272	15.586,33
26	Sulawesi Selatan	140	10.457,65	-	-	-	-	2	32,66	142	10.490,31
27	Sulawesi Tenggara	124	11.240,36	2	103,52	4	299,85	-	-	130	11.643,73
28	Gorontalo	4	210,40	39	1.234,87	13	134,39	3	140,52	59	1.720,18
29	Sulawesi Barat	-	-	6	255,75	5	1.059,57	1	91,32	12	1.406,64
30	Maluku	164	9.278,69	26	411,18	-	-	-	-	190	9.689,87
31	Maluku Utara	7	252,62	36	1.253,28	-	-	-	-	43	1.505,90
32	Papua Barat	174	15.120,95	17	1.126,40	-	-	1	14,89	192	16.262,25
33	Papua	20	3.037,12	90	7.795,19	-	-	21	1.200,75	131	12.033,06
	Jumlah	2.853	178.493,91	462	18.898,47	802	257.731,40	153	4.831,38	4.270	459.955,17

Cat. (-) tidak ada data

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.5. Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam

No.	Provinsi	Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam				
		s.d. Tahun 2013 (Km)	Tahun 2014 (Km)	Tahun 2015 (Km)	Tahun 2016 (Km)	s.d. Tahun 2016 (Km)
1	2	3	4		6	7
1	Aceh	2,366.97	-	-	107.15	2,474.12
2	Sumatera Utara	1,973.28	-	-	53.50	2,026.78
3	Sumatera Barat	1,698.74	-	-	-	1,698.74
4	Riau	7,648.64	-	-	-	7,648.64
5	Jambi	3,161.87	-	-	-	3,161.87
6	Sumatera Selatan	2,554.95	-	-	-	2,554.95
7	Bengkulu	356.98	-	-	-	356.98
8	Lampung	52.35	-	-	-	52.35
9	Kep. Bangka Belitung	0.00	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	0.00	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	0.00	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0.00	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	0.00	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	0.00	-	-	-	-
15	Jawa Timur	0.00	-	-	-	-
16	Banten	0.00	-	-	-	-
17	Bali	0.00	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	457.78	-	-	-	457.78
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9,487.95	141.92	-	148.05	9,777.92
21	Kalimantan Timur	13,578.12	254.98	-	410.49	14,484.00
22	Kalimantan Selatan	1,559.10	-	-	-	1,559.10
23	Kalimantan Tengah	14,202.92	314.22	-	285.69	14,901.83
24	Kalimantan Utara	-	-	-	90.12	90.12
25	Sulawesi Utara	1,531.72	-	-	-	1,613.78
26	Sulawesi Tengah	3,852.04	-	-	-	3,852.04
27	Sulawesi Selatan	1,188.61	-	-	-	1,188.61
28	Sulawesi Tenggara	920.05	-	-	-	920.05
29	Gorontalo	0.00	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0.00	-	-	-	-
31	Maluku	7,275.38	-	-	-	7,275.38
32	Maluku Utara	246.47	-	-	-	246.47
33	Papua Barat	11,456.82	-	-	161.28	11,618.10
34	Papua	114.49	-	-	134.12	248.61
Jumlah		85,685.23	711.12	-	1,390.40	88,208.22

Cat: (-) tidak ada data

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.6. Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

No.	Provinsi	Perkembangan Tata Batas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman				
		s.d. Tahun 2013 (Km)	Tahun 2014 (Km)	Tahun 2015 (Km)	Tahun 2016 (Km)	s.d. Tahun 2016 (Km)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1,066.00	-	-	-	1,066.00
2	Sumatera Utara	1,733.00	99.728	-	203.19	2,035.92
3	Sumatera Barat	2,189.16	-	-	-	2,189.16
4	Riau	1,672.71	457.37	-	1,145.03	3,360.04
5	Jambi	1,299.58	-	-	-	1,369.04
6	Sumatera Selatan	1,425.97	510.31	-	113.383	2,190.60
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	231.47	-	-	-	231.47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	260.97	-	479.38	871.19
21	Kalimantan Timur	2,493.54	81.80	-	316.37	2,891.71
22	Kalimantan Selatan	466.55	115.13	-	-	581.68
23	Kalimantan Tengah	417.36	-	-	154.66	581.81
24	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	-	-	-	-	101.32
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Maluku	162.00	-	-	-	162.00
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
Jumlah		13,157.34	1,525.31	-	2,412.02	17,631.95

Cat: (-) tidak ada data

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.7. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan

No.	Provinsi	s.d. 2013		2014		2015		2016		s.d. 2016	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	9	36,628.55	5	877,678.37	1	5,326.23	-	-	19	919,633.15
2	Sumatera Utara	13	56,651.50	28	1,688,614.93	-	-	-	-	43	1,725,266.43
3	Sumatera Barat	20	478,042.20	31	926,278.76	-	-	-	-	51	1,404,320.96
4	Riau	28	507,775.14	15	690,069.88	4	855,740.95	-	-	55	2,053,585.97
5	Jambi	12	714,011.38	15	274,056.89	5	192,026.59	14	553,278.31	44	1,733,373.16
6	Sumatera Selatan	22	699,177.88	32	2,314,165.74	-	-	-	-	53	3,013,343.62
7	Bengkulu	35	616,410.97	17	68,688.60	-	-	-	-	54	685,099.56
8	Lampung	21	296,998.18	2	2,424.58	3	250,438.98	2	25,031.79	29	574,893.53
9	Kepulauan Bangka Belitung	40	316,241.68	36	210,919.03	-	-	4	3,035.84	80	530,196.55
10	Kepulauan Riau	16	66,680.84	11	37,424.93	-	-	-	-	28	104,105.77
11	DKI Jakarta	4	107,856.20	-	-	-	-	-	-	4	107,856.20
12	Jawa Barat	38	38,005.63	62	525,118.52	4	300.84	8	321,664.06	128	885,089.05
13	Jawa Tengah	26	141,544.33	71	328,097.46	-	-	32	289,467.61	135	759,109.40
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	283.33	8	8,577.61	-	-	-	-	11	8,860.94
15	Jawa Timur	48	121,706.60	22	153,351.66	4	616.95	44	471,277.10	114	746,952.30
16	Banten	6	5,824.11	5	112,385.41	-	-	9	81,494.91	19	199,704.43
17	Bali	11	10,216.35	14	128,545.84	-	-	-	-	37	138,762.19
18	Nusa Tenggara Barat	33	415,716.46	26	740,860.78	-	-	4	8,584.31	64	1,165,161.55
19	Nusa Tenggara Timur	55	359,037.94	25	150,193.26	5	145,846.63	44	171,207.19	136	826,285.02
20	Kalimantan Barat	62	1,094,350.70	71	4,806,971.79	17	119,015.98	4	74,549.16	155	6,094,887.62
21	Kalimantan Tengah	9	325,103.00	11	3,079,176.70	1	3,970.20	4	334,471.35	26	3,742,721.25
22	Kalimantan Selatan	18	351,161.08	22	1,127,249.07	-	-	1	57,541.50	44	1,535,951.65
23	Kalimantan Timur	49	844,486.17	24	2,176,348.01	7	118,733.10	2	130,089.68	101	3,269,656.96
24	Kalimantan Utara	-	-	12	7,030,817.72	4	182,752.03	3	793,467.70	8	8,007,037.45
25	Sulawesi Utara	16	43,538.69	41	243,541.31	1	208.81	-	-	59	287,288.81
26	Sulawesi Tengah	19	623,906.91	31	1,669,118.99	13	480,071.45	5	118,948.44	71	2,892,045.79
27	Sulawesi Selatan	48	656,055.88	17	1,308,052.01	-	-	3	71,190.61	69	2,035,298.50
28	Sulawesi Tenggara	20	1,777,994.47	19	950,772.36	8	535,336.16	-	-	47	3,264,102.99
29	Gorontalo	6	28,645.80	15	699,183.29	8	16,771.84	2	29,515.63	38	774,116.56
30	Sulawesi Barat	2	765.20	8	325,912.29	5	359,889.95	3	312,616.07	19	999,183.51
31	Maluku	74	515,922.35	38	2,144,573.64	-	-	-	-	127	2,660,495.99
32	Maluku Utara	23	819,077.16	31	424,194.21	1	103,253.90	-	-	59	1,346,525.27
33	Papua Barat	17	259,431.41	18	5,313,837.47	1	244,980.05	2	842,556.11	45	6,660,805.04
34	Papua	29	1,644,607.35	58	21,181,295.05	-	-	6	1,860,981.60	99	24,686,884.00
	Jumlah	830	13,973,855.43	841	61,698,496.14	92	3,615,280.63	196	6,550,968.96	2,071	85,838,601.16

Cat: (-) tidak ada data

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.8. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70,755.00	-	-	-	-	-	70,755.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40,390.00	-	-	-	-	-	40,390.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32,685.70	-	-	-	-	-	32,685.70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11,075.56	-	-	-	-	-	11,075.56
15	D.I. Yogyakarta	1,000.66	-	-	-	-	-	1,000.66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3,155.00	-	-	-	-	-	3,155.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10,659.00	-	-	-	-	-	10,659.00
28	Sulawesi Selatan	22,063.10	-	-	-	-	-	22,063.10
29	Sulawesi Tenggara	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	153,575.00	-	-	-	-	-	153,575.00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		349,359.02	-	-	-	-	-	349,359.02

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.9. Perkembangan Mutasi Kawasan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	2,725.00	-	-	-	-	-	2,725.00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6,351.22	-	-	-	-	-	6,351.22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583.00	-	-	-	-	-	583.00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5,170.00	-	-	-	-	-	5,170.00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	1,942.00	-	17.30	1,959.30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2,990.00	-	-	-	-	165.00	3,155.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8,750.00	-	-	-	-	-	8,750.00
22	Kalimantan Timur	2,460.00	-	-	-	-	-	2,460.00
23	Kalimantan Selatan	11,245.00	-	681.54	-	-	-	11,926.54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	295.40	-	-	295.40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		40,274.22	-	681.54	2,237.40	-	182.30	43,375.46

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.10. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)						
		s.d. Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	s.d. Tahun 2016
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20,290.00	-	-	-	-	-	20,290.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	55.00	-	-	55.00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	2,958.00	2,958.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48,021.12	-	-	-	-	-	48,021.12
21	Kalimantan Tengah	53,125.00	-	-	-	-	-	53,125.00
22	Kalimantan Timur	59,285.00	-	-	-	-	-	59,285.00
23	Kalimantan Selatan	55,950.00	-	57.21	-	-	-	56,007.21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	1962.75	-	-	-	1,962.75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	6549.76	-	-	-	6,549.76
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		236,671.12	-	8569.72	55.00	-	2,958.00	248,253.84

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.11. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6,163.75	-	-	-	-	-	6,163.75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137,376.00	-	-	-	-	-	137,376.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20,700.00	-	-	-	-	-	20,700.00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	40,192.56	833.00	-	-	-	-	41,025.56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	649.00	649.00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193.00	-	-	-	-	-	193.00
28	Sulawesi Selatan	145.00	-	-	-	-	-	145.00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7,650.00	-	-	-	-	-	7,650.00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		212,420.31	833.00	-	-	-	649.00	213,902.31

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.12. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14,747.00	-	-	-	-	-	14,747.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13,388.00	-	-	-	-	-	13,388.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	1,218.43	-	1,218.43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234.50	-	-	-	-	-	234.50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1,030.00	-	-	-	-	-	1,030.00
Jumlah		32,599.50	-	-	-	1,218.43	-	33,817.93

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.13. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)						
		s.d. Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213,221.00	-	-	-	-	-	213,221.00
3	Sumatera Barat	11,148.00	-	-	-	-	-	11,148.00
4	Riau	194,440.00	-	-	-	-	-	194,440.00
5	Kepulauan Riau	342.82	-	-	-	-	-	342.82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2,710.00	-	-	-	-	-	2,710.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20,160.00	-	-	-	-	-	20,160.00
22	Kalimantan Timur	77,010.00	-	-	-	-	-	77,010.00
23	Kalimantan Selatan	31,790.00	-	-	-	-	-	31,790.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		550,821.82	-	-	-	-	-	550,821.82

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.14. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Lindung (HL)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Menjadi Hutan Lindung (HL)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14,780.00	-	-	-	-	-	14,780.00
5	Kepulauan Riau	12,950.00	-	-	-	-	-	12,950.00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133,075.00	-	-	-	-	-	133,075.00
22	Kalimantan Timur	31,685.00	-	-	-	-	-	31,685.00
23	Kalimantan Selatan	5,900.00	-	-	-	-	-	5,900.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		198,390.00	-	-	-	-	-	198,390.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.15. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43,100.00	-	-	-	-	-	43,100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	3,242.00	3,242.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25,560.00	-	-	-	-	-	25,560.00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24,142.80	662.00	-	-	-	-	24,804.80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617.00	-	-	-	-	-	617.00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352.62	-	-	-	-	-	352.62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600,250.00	-	-	-	-	-	600,250.00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11,759.00	-	-	-	-	-	11,759.00
28	Sulawesi Selatan	10,355.00	-	-	-	-	-	10,355.00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6,075.00	-	-	-	-	-	6,075.00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		722,211.42	662.00	-	-	-	3,242.00	726,115.42

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.16. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Lindung (HL)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Lindung (HL)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11,595.00	-	-	-	-	-	11,595.00
23	Kalimantan Selatan	66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		77,595.00	-	-	-	-	-	77,595.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.17. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59,120.00	-	-	-	-	-	59,120.00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		60,320.00	-	-	-	-	-	60,320.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.18. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800.00	-	-	-	-	-	800.00
3	Sumatera Barat	9,840.00	-	-	-	-	-	9,840.00
4	Riau	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29,924.85	-	-	-	-	-	29,924.85
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	261.00	-	-	-	-	76,532.00	76,793.00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6,303.00	-	-	-	7,730.57	-	14,033.57
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64.00	-	-	-	-	-	64.00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3,915.00	-	-	-	-	-	3,915.00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2,436.00	-	-	-	-	-	2,436.00
Jumlah		59,543.85	-	-	-	7,730.57	76,532.00	143,806.42

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.19. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Kawasan Konservasi (KK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5,920.00	-	-	-	-	-	5,920.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	58,450.00	-	-	-	-	3,297.00	61,747.00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara							
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3,221.00	-	-	-	-	-	3,221.00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		67,591.00	-	-	-	-	3,297.00	70,888.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.20. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12,150.00	-	-	-	-	-	12,150.00
4	Riau	49,700.00	-	-	-	-	-	49,700.00
5	Kepulauan Riau	3,902.00	-	-	-	-	-	3,902.00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	1,820.00	-	-	-	-	-	1,820.00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18,445.00	-	-	-	-	-	18,445.00
30	Sulawesi Barat	9,125.00	-	-	-	-	-	9,125.00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2,856.00	-	-	-	-	-	2,856.00
Jumlah		97,998.00	-	-	-	-	-	97,998.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.21. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)						
		s.d. Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	s.d. Tahun 2016
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180.00	-	-	-	-	-	180.00
3	Sumatera Barat	25,381.00	-	-	4,105.00	-	-	29,486.00
4	Riau	133,238.00	-	-	-	-	-	133,238.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15,269.75	-	-	-	-	-	15,269.75
21	Kalimantan Tengah	84,948.00	-	-	-	-	-	84,948.00
22	Kalimantan Timur	53,760.00	-	-	-	-	-	53,760.00
23	Kalimantan Selatan	38,630.00	-	-	-	-	-	38,630.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17,555.00	-	-	-	-	-	17,555.00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2,860.00	-	-	-	-	-	2,860.00
33	Papua	234,730.00	-	-	-	89,951.00	-	324,681.00
34	Papua Barat	4,076.00	-	-	-	-	-	4,076.00
Jumlah		610,627.75	-	-	4,105.00	89,951.00	-	704,683.75

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.22. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Lindung (HL)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Hutan Lindung (HL)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21,750.00	-	-	-	-	-	21,750.00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79.75	-	-	-	-	-	79.75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49,400.00	-	-	-	-	-	49,400.00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	6,572.00	-	6,572.00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		71,229.75	-	-	-	6,572.00	-	77,801.75

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.23. Perkembangan Mutasi Antar Kawasan Konservasi (KK)

No.	Provinsi	Mutasi Antar Kawasan Konservasi (KK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5,688.65	-	-	-	-	-	5,688.65
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	28,238	28,238.00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27,200.00	-	-	-	-	-	27,200.00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14,200.75	95.00	-	-	-	-	14,295.75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6.50	-	-	-	-	-	6.50
15	D.I. Yogyakarta	283.58	-	-	-	-	-	283.58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	71,645.64	-	71,645.64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300,040.00	-	-	-	-	-	300,040.00
22	Kalimantan Timur	61,850.00	-	-	-	-	-	61,850.00
23	Kalimantan Selatan	7,563.60	-	-	-	-	-	7,563.60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	24,669.00	-	-	-	-	-	24,669.00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15,381.90	-	-	-	-	-	15,381.90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	15.00	15.00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		456,883.98	95.00			71,645.64	28,253.00	556,877.62

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.24. Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)						
		s.d. Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	s.d. Tahun 2016
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	490.00	-	-	-	-	-	490.00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	4,158.00	4,158.00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	27,500.00	-	94.89	-	745.00	-	28,339.89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27,990.00	-	94.89	-	745.00	4,158.00	32,987.89

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.25. Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi (HPK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi (HPK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	169.95	-	-	169.95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25.00	-	-	-	-	-	25.00
23	Kalimantan Selatan	465.00	-	-	-	-	-	465.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		490.00	-	-	169.95	-	-	659.95

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.26. Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Lindung (HL)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Konservasi (KK Menjadi Hutan Lindung (HL)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	3,738.00	3,738.00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	3,738.00	3,738.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.27. Perkembangan Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Konservasi (KK) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	9,477.00	9,477.00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	9,477.00	9,477.00

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.28. Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

No.	Provinsi	Mutasi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)						
		s.d. Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2013 (Ha)	Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Tahun 2016 (Ha)	s.d. Tahun 2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) = Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.29. Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses Review RTRWP

No	Provinsi	Fungsi Kawasan	Luas Usulan Perubahan Kawasan Hutan				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan				Keterangan
			Kawasan Hutan				Kawasan Hutan				
			Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Aceh	KSA/KPA HL HP1 HP HPK Jumlah	18,462	3,331	3,568	2,613	2,630	3,028	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
			64,654	67,488	18,224	60,590	35,010	7,864			
			4,517	5,496	5,743	654	960	10,113			
			91,903	55,402	1,137	66,685	41,656	5,456			
			-	-	2,603	-	-	-			
			179,536	131,717	31,275	130,542	80,256	26,461			
2	Sumatera Utara	KSA/KPA HL HP1 HP HPK Jumlah	-	4,850	-	-	-	1,140	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013		
			50,783	461,527	10,857	104,444	208,305	8,598			
			104,210	319,449	2,291	3,467	176,722	2,326			
			141,270	447,156	21,577	28,504	222,009	5,830			
			36,302	704	70,947	35,680	-	-			
			296,263	1,269,284	35,429	207,362	642,716	17,894			
3	Sumatera Barat	KSA/KPA HL HP1 HP HPK Jumlah	4,852	7,560	882	-	1,070	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhut-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhut-II/2012, tanggal 3/15/2011		
			86,339	97,363	3,650	87,456	50,887	3,412			
			23,606	25,709	6,098	21,541	21,293	6,098			
			97,062	50,204	1,045	33,621	36,230	253			
			4,330	30,350	1,869	4,595	16,806	143			
			216,189	211,386	13,544	147,213	126,286	9,906			
4	Riau	KSA/KPA HL HP1 HP HPK Jumlah	4,577	25,469	5,521	2,186	-	5,796	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP.41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhut-II/2016 4. Sejen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhut-II/2016 5. Sejen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 6. 4. Persub S.438/Menhut-PKTL/Revi/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhut/Sejen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.		
			16,864	32,256	12,331	17,636	-	5			
			597,466	546,252	8,875	481,978	173,039	4,846			
			296,400	327,677	19,491	11,493	84,446	905			
			172,400	2,599,042	696	204,250	1,445,889	-			
			1,087,707	3,530,696	46,914	717,543	1,703,374	11,552			
5	Jambi	KSA/KPA HL HP1 HP HPK Jumlah	-	1,582	-	-	336	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
			-	303	-	271	-	-			
			63,411	5,010	-	1,323	167	-			
			8,534	100,152	10,908	18,935	13,545	-			
			-	-	-	-	-	-			
			72,245	107,047	10,908	20,529	14,048	-			

No	Provinsi	Fungsi Kawasan	Luas Usulan Perubahan				Persetujuan Perubahan			Keterangan
			Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Sumatera Selatan	KSA/KPA	607	22,145	6,207	607	12,574	7,624	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	55,362	25,653	2,224	8,436	7,071	1,891		
		HP1	23,838	9,432	1,493	24,099	1,912	1,493		
		HP	-	88,932	36,054	6,970	31,106	30,183		
		HPK	2,818	264,388	1,485	4,187	177,541	-		
		Jumlah	82,825	410,550	47,463	44,299	230,204	41,191		
7	Bengkulu	KSA/KPA	3,683	13,217	101	3,610	-	101	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.643/Menhut-II/2011, tanggal 10-11-2012	
		HL	18,082	13,112	-	5,358	399	-		
		HP1	1,897	58,376	-	4,226	1,453	-		
		HP	5,796	18,130	-	17,819	340	-		
		HPK	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	29,458	102,835	101	31,013	2,192	101		
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
9	Kep. Bangka Belitung	KSA/KPA	772	420	-	190	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012	
		HL	-	33,072	1,993	2,529	-	1,993		
		HP1	-	-	-	-	-	-		
		HP	8,589	100,158	1,225	8,159	19,131	1,225		
		HPK	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	9,361	133,590	3,218	10,878	19,131	3,218		
10	Kep. Riau	KSA/KPA	3,720	12,943	3	4,014	1,571	-	Telah diberikan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP. 41/XII/2014, telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menhut-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri	
		HL	13,197	36,317	2,085	11,733	5,163	2,108		
		HP1	11,374	114,252	282	25,807	67,243	-		
		HP	163	6,461	-	720	8949	262		
		HPK	30,869	362,981	-	104,688	256,152	-		
		Jumlah	58,723	532,954	2,370	146,962	339,078	2,370		
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
19	Nusa Tenggara Timur	KSA/KPA Darat	3,613	7,352	5,328	617	-	5,328	Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor : 1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013, tgl 11-10-2013 2. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013, tgl 20-11-2013 3. Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tgl 5-6-2014 4. Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015, tgl 15-4-2015 Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi Telah diberikan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhut/Setjen/PLA.06/2016; 11 Mei 2016	
		KSA/KPA Air	-	1,963	-	-	-	-		
		HL	-	74,606	5,064	-	12,492	551		
		HP1	-	23,800	34	-	4,307	35		
		HP	6,263	59,939	14,092	3,499	10,307	5,897		
		HPK	11,472	45,535	-	8,052	27,057	-		
		Jumlah	21,348	213,195	24,518	12,168	54,163	11,811		

No	Provinsi	Fungsi Kawasan	Luas Usulan Perubahan Kawasan Hutan				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan				Keterangan
			Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20	Kalimantan Barat	HL	198,125	220,648	77,186	66,048	-	29,156	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013		
		HPI	235,863	637,048	51,984	149,567	189,460	2,977			
		HP	126,769	1,064,863	87,434	41,681	294,912	20,253			
		HPK	111,339	211,200	5,768	77,007	69,765	-			
		Jumlah	714,792	2,560,149	271,408	358,639	594,137	76,008			
21	Kalimantan Tengah	KSA/KPA	148,512	38,856	15,169	48,412	-	13,601	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.529/Menhut-I/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng		
		HL	180,947	5,426	33,116	-	9,968	-			
		HPI	636,359	124,183	17,933	86,977	101,157	3,179			
		HP	2,401,681	840,773	40,234	402,043	333,261	2,720			
		HPK	533,117	1,913,076	820,907	119,118	734,238	204			
22	Kalimantan Selatan	Jumlah	3,900,656	2,922,312	944,715	689,666	1,166,656	29,672	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.435/Menhut-II/2009, tanggal 23-7-2009		
		KSA/KPA	29,092	1,372	6,556	1,240	8,749	6,556			
		HL	17,249	52,711	18,247	6,795	563	15,733			
		HPI	8,170	51,308	1,312	28,168	31	4,355			
		HP	133,764	174,716	14,644	63,391	14,227	13,103			
		HPK	82,018	272	7,092	-	35,933	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW.05433/DPR RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		Jumlah	210,293	280,319	47,851	99,594	59,503	39,747			
		KSA/KPA	-	176,708	14,006	-	48,732	-			
		HL	14,796	85,973	21,705	7,677	24,999	11,732			
		HPI	482,778	582,195	15,760	53,799	108,063	-			
23	Kalimantan Timur	HP	127,752	1,689,617	121,359	214,764	287,533	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW.05433/DPR RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HPK	-	25	-	-	25	-			
		Jumlah	625,326	2,534,518	172,830	276,240	469,352	11,732			
		KSA/KPA	793	12,421	465	182	521	290			
		HL	6,457	15,278	1,423	296	5,264	-			
24	Sulawesi Utara	HPI		16,545	1,166				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW.05433/DPR RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HP		3,821			904				
		HPK		526			166				
		Jumlah	7,250	48,591	2,589	761	7,037	290			
		KSA/KPA	59,489	73,687	-	-	5,510	-			
25	Sulawesi Tengah	HL	142,445	200,128	-	34,379	9,802	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 23 September 2013, sebagaimana telah diperbaharui dengan SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HPI	59,184	302,334	1,004	8,005	28,686	-			
		HP	50,765	197,972	120	404	28,788	0			
		HPK	9,563	208,702	80	-	37,285	91			
		Jumlah	321,446	962,823	1,204	42,788	110,071	91			

No	Provinsi	Fungsi Kawasan	Luas Usulan Perubahan Kawasan Hutan				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan			Keterangan
			Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Sulawesi Selatan	KSA/KPA	-	-	-	-	-	-	Proses pembentukan Tim Terpadu	
27	Sulawesi Tenggara	HL	28,823	8,334	-	8,061	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.465/Menhut-II/2011, tanggal 9-8-2011	
		HL	187,128	30,236	-	52,660	-	-		
		HPT	23,706	23,421	-	15,773	13,059	-		
		HP	61,714	154,376	-	34,078	52,287	-		
		HPK	3,553	87,792	-	4,539	44,759	-		
		Jumlah	304,924	310,165	-	115,111	110,105	-		
28	Gorontalo	KSA/KPA	17,031	-	-	15,024	167	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/Menhut-II/2010, tanggal 25-5-2010	
		HL	8,353	5,550	37	28,603	5,095	-		
		HP1	55,850	22,428	1,550	8,265	13,779	1,055		
		HP	14,161	4,535	2,316	3,661	2,055	1,194		
		HPK	-	3,319	2,048	-	1,509	1,538		
		Jumlah	95,395	35,832	5,951	55,553	22,605	3,787		
29	Sulawesi Barat	KSA/KPA	-	825	-	-	825	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	214,184	44,126	-	214,184	8,470	-		
		HP1	80,446	44,566	-	37,416	11,671	-		
		HP	-	48,258	-	-	28,618	-		
		HPK	-	31,085	-	-	23,972	-		
		Jumlah	294,630	168,860	-	251,600	73,556	-		
30	Maluku	KSA/KPA	3,484	17,256	-	-	2	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	30,670	75,645	6,125	-	3,955	2,326		
		HP1	204,600	117,452	987	4,785	11,482	987		
		HP	41,439	84,196	-	12,264	26,863	-		
		HPK	16,352	1,230,827	578	3,619	321,813	-		
		Jumlah	296,545	1,525,376	-	20,668	364,115	3,313		
31	Maluku Utara	KSA/KPA	28,650	1,656	444	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 5-9-2012	
		HL	180,735	56,260	6,017	29,001	1,662	2,892		
		HPT	92,591	77,108	10,065	22,994	8,599	710		
		HP	40,641	136,148	1,122	9,585	15,648	1,479		
		HPK	42,156	679,564	7,071	30,642	247,452	-		
		Jumlah	384,773	950,736	24,719	92,222	273,361	5,081		
32	Papua	KSA/KPA	8,108	133,814	521	763	9,662	521	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15-8-2012	
		HL	405,429	269,758	10,661	395,176	44,532	7,742		
		HP1	156,662	80,581	18,189	133,115	39,468	18,282		
		HP	3,570,941	126,766	14,307	3,404,532	50,426	14,307		
		HPK	2,058,356	667,704	4,482	1,803,244	232,297	4,406		
		Jumlah	6,199,496	1,278,623	48,160	5,736,830	376,385	45,258		

No	Provinsi	Fungsi Kawasan	Luas Usulan Perubahan			Persetujuan Perubahan			Keterangan
			Kawasan Hutan			Kawasan Hutan			
			Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	Perubahan Fungsi (Ha)	Perubahan Peruntukan (Ha)	Penunjukan Baru (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Papua Barat	KSA/KPA	238,324	35,714	4	5,835	-	4	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27-8-2014
		HL	97,990	145,399	1,687	8,388	-	59	
		HPT	92,203	102,674	2,150	23,532	44,817	2,633	
		HP	136,735	132,632	3,080	-	61,594	-	
		HPK	467,507	563,033	16,949	400,465	136,634	1,238	
		Jumlah	1,032,759	979,452	23,870	438,220	243,045	3,934	

Keterangan: pm = pro memory

Keterangan: pm = pro memory

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.30. Progres Persetujuan Substansi Kehutanan Dalam Usulan Revisi RTRWP

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan : 131.747 Ha Fungsi : 179.536 Ha Penunjukan : 31.275 Ha	Peruntukan : 80.256 Ha Fungsi : 130.542 Ha Penunjukan : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan : 1.269.284 Ha Fungsi : 296.263 Ha Penunjukan : 35.429 Ha	Peruntukan : 642.716 Ha Fungsi : 207.362 Ha Penunjukan : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014; 18 September 2014	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan : 211.386 Ha Fungsi : 216.189 Ha Penunjukan : 13.544 Ha	Peruntukan : 126.286 Ha Fungsi : 147.213 Ha Penunjukan : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK. 141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhut No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan : 3.530.696 Ha Fungsi : 1.087.707 Ha Penunjukan : 46.914 Ha	Peruntukan : 1.703.374 Ha Fungsi : 717.543 Ha Penunjukan : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha → SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/2016	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
5	Kepulauan Riau	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.	Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPIK. 1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri. 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.91/Menlhk-II/2015 tanggal 6 Maret 2015. 4. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPIK.
6	Jambi	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha SK.727/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub : S.11/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 336 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPIK.
7	Bengkulu	Peruntukan : 102.835 Ha Fungsi : 29.458 Ha Penunjukan : 101 Ha	Peruntukan : 2.192 Ha Fungsi : 31.013 Ha Penunjukan : 101 Ha SK.643/Menhut-II/2011; 10 November 2011 Persub : S.58/Menhut-VII/2012; 30 Januari 2012	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menhut No.421/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPIK.
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361 Ha Penunjukan : 3.218 Ha	Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha SK. 798/Menhut-II/2012; 27 Desember 2012 Persub : S.110/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPIK.
9	Sumatera Selatan	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825 Ha	Peruntukan : 230.204 Ha Fungsi : 44.299 Ha	1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		Penunjukan : 47.463Ha	Penunjukan : 41.191 Ha SK.822/Menhut-II/2013; 19 November 2013 Persub : S.32/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS pertama sudah di Include-kan seluas 19.045 ha) Persub : S.519/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009	Hutan yang DPCLS 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK nomor SK.454/Menhk/Sejen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel. 3. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan		1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Menhut-VII/2011; 3 Maret 2011	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Menhut-VII/2010; 10 Juni 2010	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Menhut-VII/2009; 11 Desember 2009	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Menhut-VII/2010; 11 November 2010	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 395/Menhut- II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	1. Memberikan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Menhut-VII/2009; 14 September 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha	Peruntukan : 54.163 Ha Fungsi : 12.168 Ha Penunjukan : 11.811 Ha SK. 357/Menhk/Sejen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.382/Menhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. • Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 • Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 • Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Sejen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menhk/Sejen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727Ha Penunjukan : 236.133Ha	Peruntukan : 554.137 Ha Fungsi : 352.772 Ha Penunjukan : 52.386 Ha SK.936/Menhut-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.656Ha Penunjukan : 944.715Ha	Peruntukan : 1.168.656 Ha Fungsi : 689.666 Ha Penunjukan : 29.672 Ha SK.292/Menhut-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Menhut-VII/2012; 28 September 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menhut No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
22	Kalimantan Timur	Peruntukan : 2.534.518 Ha Fungsi : 625.326 Ha	Peruntukan : 469.352 Ha Fungsi : 276.240 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		Penunjukan : 172.830 Ha	Penunjukan : 11.732 Ha SK.554/Menhut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha	Peruntukan : 59.503 Ha Fungsi : 99.594 Ha Penunjukan : 39.747 Ha SK.432/Menhut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Menhut-VII/2009; 6 Juli 2009.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha	Peruntukan : 23.604 Ha Fungsi : 55.553 Ha Penunjukan : 3.787 Ha SK.324/Menhut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Menhut-VII/2010; 14 Mei 2010.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha	Peruntukan : 7.037 Ha Fungsi : 761 Ha Penunjukan : 290 Ha SK.434/Menhut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan : 982.823 Ha Fungsi : 321.446 Ha Penunjukan : 1.204 Ha	Peruntukan : 101.071 Ha Fungsi : 42.788 Ha Penunjukan : 91 Ha SK.635/Menhut-II/2013; 24 September 2013 Sebagaimana telah diperbaharui melalui SK.708/Menhut-II/2014; 22 Agustus 2014. Persub No. S.884/Menhut-VII/2014; 1 September 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
27	Sulawesi Selatan	Peruntukan : 255.289 Ha Fungsi : 101.563 Ha Penunjukan : 42.378 Ha		1. Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP melalui surat Gubernur Nomor 522/2064/DISHUT tanggal 31 Maret 2015. 2. Telah dibentuk SK Tim Terpadu
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan : 310.165 Ha Fungsi : 304.924 Ha	Peruntukan : 110.105 Ha Fungsi : 115.111 Ha SK.465/Menhut-II/2011; 9 Agustus 2011. Persub No : S. 61/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013.	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan Menhut No. 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan

No.	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
				hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
				3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.
29	Sulawesi Barat	Peruntukan : 168.860 Ha Fungsi : 294.630 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK.726/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
30	Maluku	Peruntukan : 1.525.376 Ha Fungsi : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK. 871/Menhut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
31	Maluku Utara	Peruntukan : 950.736 Ha Fungsi : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Menhut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Menhut-VII/2012; 26 September 2012	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.302/Menhut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
32	Papua	Peruntukan : 1.278.623 Ha Fungsi : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Menhut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S. 409/Menhut-VII/2012; 11 September 2011	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhut No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
33	Papua Barat	Peruntukan : 979.452 Ha Fungsi : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 243.045 Ha Fungsi : 438.220 Ha Penunjukan : 23.934 Ha SK.710/Menhut-II/2014; 27 Agustus 2014 Persub No. S.406/Menhut-VII/2014; 18 September 2014	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.31. Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan

No.	Jenis Rencana		Progres
1	2		3
1	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)	1 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011, tanggal 28 Juni 2011
2	Rencana Makro	1 Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Draft
		2 Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	Proses Penyempurnaan
		3 Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013, tanggal 25 Juni 2013
		4 Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Proses Penetapan
		5 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sumatera	Proses Penetapan
		6 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Proses Penetapan
		7 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Kalimantan	Proses Penetapan
		8 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sulawesi, Maluku, Papua	Proses Penetapan
3	Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP)	1 Aceh	Proses Penyusunan
		2 Sumatera Utara	Proses Pengesahan
		3 Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012
		4 Jambi	Proses Penyempurnaan
		5 Riau	Proses Penyempurnaan
		6 Kepulauan Riau	Belum Menyusun
		7 Bengkulu	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
		8 Kepulauan Bangka Belitung	Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
		9 Sumatera Selatan	Proses Penyusunan
		10 Lampung	Proses Penyempurnaan
		11 Banten	Proses Pengesahan
		12 DKI Jakarta	Proses Penyusunan
		13 Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014
		14 Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
		15 D.I. Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
		16 Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
		17 Bali	Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
		18 Nusa Tenggara Barat	Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
		19 Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
		20 Kalimantan Barat	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
		21 Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
		22 Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan

No.	Jenis Rencana		Progres
1	2		3
4	Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTk)	23 Kalimantan Timur	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012
		24 Kalimantan Utara	Proses Penyusunan
		25 Sulawesi Utara	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
		26 Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
		27 Sulawesi Tengah	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
		28 Sulawesi Selatan	Proses Pengesahan
		29 Sulawesi Barat	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
		30 Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
		31 Maluku Utara	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
		32 Maluku	Belum Menyusun
		33 Papua	Proses Penyusunan
		34 Papua Barat	Proses Penyempurnaan
		1 Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013
		2 Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2014, tanggal 18 Februari 2014
		3 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013
		4 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 3 November 2014
		5 Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2014, tanggal 19 November 2013
5	Peraturan Perencanaan Kehutanan	6 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		7 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		8 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		9 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		10 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		11 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		12 Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		13 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		14 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		15 Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Proses Penyusunan
		16 Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau	Proses Penyusunan
		17 Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Proses Penyusunan
		1 Sistem Perencanaan Kehutanan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tanggal 14 September 2010
		2 Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2012, tanggal 9 Januari 2012
		3 Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013, tanggal 3 Juli 2013

Catatan: Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTk) terhenti dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.32. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)

No.	Provinsi	Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)											
		s.d. Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	12	39.376.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	12	28.054.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	10	17.433.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	900.75
4	Riau	11	66.499.68	-	-	1	2.313.30	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	14	78.412.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	30	121.222.46	-	-	3	918.34	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	5	14.327.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	16	134.147.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	2	7.530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	17	28.804.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	28	67.253.60	2	1.257.92	3	2.266.65	1	609.70	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	9	31.916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	7	36.600.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	2	3.291.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	16	20.016.73	1	324.56	1	1.216.86	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	6	4.015.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	3	5.089.56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	571.74
30	Sulawesi Barat	2	2.486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1244.78
31	Maluku	3	5.664.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	9	18.434.08	1	664.97	1	555.09	-	-	-	-	1	1057.16
33	Papua	15	92.303.95	-	-	-	-	1	32.75	-	-	-	-
34	Papua Barat	7	15.319.38	-	-	1	1.078.36	-	-	-	-	-	-
Jumlah		261	879.321.56	4	2.247.45	10	8.348.60	2	642.45	-	-	4	3.774.43

Keterangan

- : Nilai/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.33. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)

No.	Provinsi	Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan)											
		s.d. Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	27	142.762,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	26	157.956,37	-	-	-	-	1	6.429,52	-	-	1	5.370,25
4	Riau	134	1.523.126,36	2	18.410,34	1	5.543,00	2	8.061,60	1	3.393,00	-	-
5	Jambi	44	366.925,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	30	243.428,86	4	84.759,42	6	14.628,36	3	15.503,63	-	-	2	5.259,85
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	8	83.964,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	8	55.333,03	-	-	-	-	1	9.694,84	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	18	224.040,93	2	17.499,21	1	16.999,20	3	14.732,43	2	5.427,30	-	-
21	Kalimantan Tengah	59	653.422,23	5	50.224,95	11	81.093,79	14	111.622,20	4	26.421,68	7	26.772,94
22	Kalimantan Selatan	17	209.130,53	-	-	1	5.074,30	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	51	437.115,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	6	57.359,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	8	72.805,00	1	5.727,90	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	3	4.584,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.003,45
29	Gorontalo	4	47.032,20	1	6934,48	-	-	1	8.863,00	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	12	12.657,74	-	-	-	-	1	386,33	-	-	-	-
32	Maluku Utara	9	47.112,72	1	1432,22	-	-	1	11.404,20	-	-	-	-
33	Papua	15	377.311,64	10	287.430,30	1	37.467,00	9	192.850,49	-	-	1	12.245,80
34	Papua Barat	7	117.347,40	4	64.248,41	2	55.696,20	6	115.460,33	2	31.917,40	-	-
Jumlah		572	5.284.149,48	30	536.667,23	23	216.501,85	42	495.008,57	9	67.159,38	12	53.652,29
Keterangan :													
-													

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

[illegible]

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.35. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Tambang) s.d. Desember 2016

No.	Provinsi	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)													
		s.d. 2011		2012		2013		2014		2015		2016		Total	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Aceh	8	59,845.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.72	9
2	Sumatera Utara	5	35,717.17	2	2,031.71	2	18,191.00	1	22,988.27	6	45,599.78	2	26,592.11	18	151,120.04
3	Sumatera Barat	2	349.89	1	4,370.64	0	-	0	-	0	-	0	-	3	4,720.53
4	Riau	2	166.42	1	365,021.00	5	48,779.95	0	-	0	-	0	-	8	413,967.37
5	Jambi	23	78,358.76	6	11,808.59	10	95,615.70	3	1,565.02	7	43,394.02	2	4,826.26	51	235,568.35
6	Sumatera Selatan	20	55,340.28	5	18,112.00	8	57,882.95	4	5,666.73	3	9,799.45	3	61,671.26	43	208,472.66
7	Bengkulu	1	1,652.00	1	2,279.00	0	-	1	156.04	1	1,265.00	1	164.00	5	5,516.04
8	Lampung	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	8,624.19	2	8,624.19
9	Kep. Bangka Belitung	5	18,524.72	2	1,576.00	0	-	0	-	0	-	0	-	7	20,100.72
10	Kepulauan Riau	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
11	DKI Jakarta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
12	Jawa Barat	13	9,932.44	1	7.32	2	69.69	1	2.75	1	4.98	1	16.00	19	10,033.19
13	Jawa tengah	11	12,864.62	2	243.57	3	773.50	0	-	3	6,927.82	2	4,501.88	21	25,311.39
14	DI Yogyakarta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15	Jawa Timur	12	56,745.30	2	1,989.93	2	3,980.30	2	115.78	3	2,717.24	3	1,474.99	24	67,023.53
16	Banten	2	0.65	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,790.00	3	1,790.65
17	Bali	1	25.28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	25.28
18	Nusa Tenggara Barat	7	81,594.77	3	24,357.00	2	13,364.22	1	4,320.00	3	15,914.00	0	-	16	139,549.99
19	Nusa Tenggara Timur	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20	Kalimantan Barat	1	3,239.00	5	15,617.00	-	-	1	9,433.00	0	-	1	11,254.26	8	39,543.26
21	Kalimantan Tengah	39	253,852.18	18	107,280.38	9	54,813.90	13	88,195.10	3	17,588.70	7	1,102,906.30	89	1,624,636.56
22	Kalimantan Selatan	8	16,832.14	6	3,075.40	1	861.12	2	44,790.01	0	-	0	-	17	65,558.67
23	Kalimantan Timur	46	188,596.74	29	76,626.22	16	53,701.54	8	57,742.88	2	2,036.38	2	527.14	103	379,230.90
24	Kalimantan Utara	11	69,867.14	5	7,759.14	4	10,681.15	1	9,767.87	3	18,303.93	0	-	24	116,379.23
25	Sulawesi Utara	2	7,857.10	1	26,017.00	1	821.28	1	3,041.13	2	7,922.49	0	-	7	45,659.00
26	Sulawesi Tengah	6	27,459.00	5	40,121.98	1	9,127.00	1	8,228.00	0	-	2	15,286.75	15	100,222.73
27	Sulawesi Selatan	4	4,232.40	1	21,181.55	0	-	0	-	0	-	1	28,389.50	6	53,803.45
28	Sulawesi Tenggara	18	58,615.93	0	-	-	-	2	13,442.53	1	19,686.00	0	-	21	91,744.46
29	Gorontalo	0	-	1	472.00	2	19,767.00	2	5,557.00	2	4,561.24	0	-	7	30,357.24
30	Sulawesi barat	1	33.55	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	33.55
31	Maluku	7	111.33	3	7,017.50	1	11.05	6	6,285.55	1	10.02	0	-	18	13,435.45
32	Maluku Utara	16	52,364.18	25	99,784.91	8	34,013.57	31	76,398.79	5	56,024.57	1	5,464.42	86	324,050.44
33	Papua Barat	10	20,177.75	6	6,371.26	4	8,683.49	2	8,843.36	1	39.50	3	48,247.81	26	92,363.17
34	Papua	3	58,439.78	1	18.80	1	9,934.00	1	9,941.00	1	258.36	0	-	7	78,491.94
Total		284	1,172,795.51	132	843,139.90	82	440,972.41	84	376,480.80	48	252,053.48	35	1,321,747.59	665	4,407,189.69

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.36. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang) s.d. Desember 2016

No.		Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)													
Provinsi		s.d. 2011		2012		2013		2014		2015		2016		Total (Ha)	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kep. Bangka Belitung	-	-	1	1,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,081.00
2	Jawa Timur	1	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.24
3	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23,870.28	-	-	1	23,870.28
Total		1	1.24	1	1,081.00	-	-	-	-	1	23,870.28	-	-	3	24,952.52

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.37. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang) s.d. Desember 2016

No.	Provinsi	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)															
		s.d. 2011		2012		2013		2014		2015		2016		Total			
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		Aceh	0	-	0	-	1	344.00	1	100.42	0	-	0	-	2	444.42	
2	Sumatera Utara	1	2.32	2	66.69	0	-	0	-	0	-	1	485.00	4	554.01		
3		Sumatera Barat	2	229.25	0	-	3	620.26	1	153.89	1	102.22	2	516.27	9	1,621.89	
4	Riau	6	3,249.26	1	999.84	1	538.04	2	1,125.59	1	108.22	5	1,726.06	16	7,747.01		
5		Jambi	30	1,681.97	5	1,244.85	1	2.29	8	2,124.05	2	597.89	2	603.40	48	6,254.46	
6	Sumatera Selatan	7	2,353.74	3	792.49	8	2,958.50	8	2,604.74	2	43.88	10	5,274.39	38	14,027.75		
7		Bengkulu	1	128.58	0	-	2	1,094.07	0	-	0	-	3	1,071.07	6	2,293.72	
8	Lampung	1	40.05	0	-	1	17.20	3	72.16	0	-	3	79.66	8	209.07		
9		Kep. Bangka Belitung	7	3,175.71	1	15.31	5	754.84	3	1,086.41	2	429.59	0	-	18	5,461.85	
10	Kepulauan Riau	0	-	0	-	1	1,834.47	0	-	0	-	1	56.66	2	1,891.13		
11		DKI Jakarta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
12	Jawa Barat	9	1,547.56	5	107.48	6	153.78	5	419.74	2	10.10	5	93.90	32	2,332.55		
13		Jawa Tengah	7	390.81	0	-	1	16.85	0	-	1	38.23	6	212.61	15	658.49	
14	DI Yogyakarta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
15		Jawa Timur	5	546.56	1	3.40	4	115.93	5	255.23	1	6.63	4	945.20	20	1,872.95	
16	Banten	1	16.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	16.00		
17		Bali	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	
18	Nusa Tenggara Barat	1	6,417.30	0	-	0	-	0	-	0	-	1	999.78	2	7,417.08		
19		Nusa Tenggara Timur	3	117.42	0	-	0	-	1	688.19	0	-	0	-	4	805.61	
20	Kalimantan Barat	2	1,913.13	4	1,735.57	2	1,895.70	1	316.20	0	-	1	695.72	10	6,556.32		
21		Kalimantan Tengah	20	43,984.35	12	9,895.58	14	15,522.78	11	11,398.96	6	4,902.53	9	5,560.48	72	91,264.67	
22	Kalimantan Selatan	41	38,418.72	11	2,723.10	15	5,438.05	11	6,958.26	7	1,358.48	9	4,959.46	94	59,856.07		
23		Kalimantan Timur	50	130,351.71	14	18,207.07	13	24,384.03	10	10,077.43	1	519.87	8	7,803.66	96	191,343.77	
24	Kalimantan Utara	3	1,612.75	0	-	2	4,063.27	2	1,404.95	0	-	2	3,171.17	9	10,252.14		
25		Sulawesi Utara	1	443.40	1	561.96	1	99.99	0	-	0	-	3	1,258.04	6	2,363.39	
26	Sulawesi Tengah	0	-	1	130.83	4	3,167.53	0	-	1	1,206.57	2	1,201.56	8	5,706.49		
27		Sulawesi Selatan	4	106.98	4	1,072.94	1	80.35	3	121.39	1	48.35	2	52.92	15	1,482.93	
28	Sulawesi Tenggara	7	8,457.07	5	3,383.32	11	6,547.77	5	2,470.84	1	965.31	5	2,706.04	34	24,530.35		
29		Gorontalo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
30	Sulawesi Barat	0	-	1	603.50	0	-	0	-	0	-	0	-	1	603.50		
31		Maluku	1	562.42	0	-	1	134.63	1	4.94	0	-	1	6.42	4	708.41	
32	Maluku Utara	9	5,719.87	7	4,580.21	7	2,678.68	8	4,809.48	0	-	3	2,491.58	34	20,279.82		
33		Papua Barat	4	95.49	0	-	0	-	0	-	1	603.25	1	116.86	6	815.60	
34	Papua	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Total		224	251,562.39	78	46,124.14	105	72,463.01	89	46,192.86	30	10,941.13	89	42,087.91	615	469,371.44		

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.38. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Non Tambang s.d. Desember 2016

No.	Provinsi	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Non Tambang														
		s.d. 2011		2012		2013		2014		2015		2016		Jumlah		
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		Aceh	3	18.06	0	-	0	-	0	-	0	-	4	962.00	7	980.06
2		Sumatera Utara	30	4,472.36	3	79.60	7	506.70	3	38.07	6	905.66	12	771.58	61	6,773.97
3		Sumatera Barat	9	361.82	2	139.06	1	8.37	0	-	1	14.48	8	112.44	21	636.17
4		Riau	2	12,068.75	2	297.32	0	-	0	-	0	-	1	561.72	5	12,927.79
5	Jambi	0	-	0	-	1	136.18	0	-	1	21.28	1	90.33	3	247.79	
6	Sumatera Selatan	2	103.51	4	741.98	1	46.80	4	25.40	1	0.04	3	34.72	15	952.44	
7	Bengkulu	4	144.50	1	11.76	0	-	1	38.83	2	31.65	0	-	8	226.74	
8	Lampung	1	49.35	0	-	0	-	2	97.38	0	-	3	218.15	6	364.88	
9	Kep. Bangka Belitung	3	67.01	0	-	1	14.90	1	4.47	1	1.49	0	-	6	87.87	
10	Kepulauan Riau	1	27.00	0	-	0	-	0	-	0	-	5	398.72	6	425.72	
11	DKI Jakarta	0	-	0	-	-	-	2	1.97	0	-	1	14.25	3	16.22	
12	Jawa Barat	8	299.50	1	3.85	2	29.72	2	51.35	1	4.56	5	585.91	19	974.88	
13	Jawa Tengah	27	347.17	0	-	1	1.57	1	0.52	0	-	3	81.26	32	430.52	
14	DI Yogyakarta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
15	Jawa Timur	3	18.64	0	-	0	-	3	49.75	1	11.68	5	759.82	12	839.89	
16	Banten	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	223.74	3	223.74	
17	Bali	17	60.24	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17	60.24	
18	Nusa Tenggara Barat	4	487.20	3	3.54	1	0.08	2	10.30	1	149.42	3	281.11	14	931.65	
19	Nusa Tenggara Timur	2	2.46	0	-	1	1.82	2	71.26	0	-	3	91.35	8	166.90	
20	Kalimantan Barat	3	3.30	0	-	1	11,881.50	0	-	0	-	0	-	4	11,884.80	
21	Kalimantan Tengah	1	710.60	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,211.62	2	1,922.22	
22	Kalimantan Selatan	2	27.32	0	-	0	-	0	-	1	228.13	0	-	3	255.45	
23	Kalimantan Timur	5	58.94	1	754.50	1	57.40	2	61.71	1	77.81	1	146.33	11	1,156.69	
24	Kalimantan Utara	1	36.80	1	457.33	0	-	0	-	1	225.71	2	2,541.48	5	3,261.32	
25	Sulawesi Utara	2	0.52	0	-	0	-	0	-	0	-	1	12.89	3	13.41	
26	Sulawesi Tengah	5	488.88	5	153.26	1	340.13	1	88.41	1	19.86	2	91.25	15	1,181.79	
27	Sulawesi Selatan	2	24.46	0	-	1	194.36	4	49.09	0	-	2	121.73	9	389.64	
28	Sulawesi Tenggara	5	138.97	0	-	0	-	0	-	0	-	1	0.29	6	139.25	
29	Gorontalo	1	41.00	0	-	1	109.20	1	124.20	0	-	1	38.13	4	312.53	
30	Sulawesi Barat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
31	Maluku	1	53.97	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	53.97	
32	Maluku Utara	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
33	Papua Barat	0	-	0	-	1	5,702.99	0	-	0	-	1	669.64	2	6,372.63	
34	Papua	4	1,464.21	0	-	1	45.67	1	716.77	1	348.03	1	3.80	8	2,578.48	
Total		148	21,576.53	23	2,642.19	23	19,077.39	32	1,429.47	20	2,039.80	73	10,024.25	319	56,789.63	

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.39. Perkembangan Lahan Kompensasi (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima)

No.	Provinsi	Perkembangan Lahan Kompensasi (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima)											
		s.d. 2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bali	0	-	1	7.50	0	-	0	-	0	-	0	-
2	Banten	1	12.01	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	DKI Jakarta	0	-	0	-	0	-	2	4.18	0	-	0	-
4	Jawa Barat	51	4,498.35	2	95.18	2	64.04	6	789.12	3	184.91	2	38.43
5	Jawa Tengah	26	939.39	0	-	0	-	3	281.99	0	-	2	26.50
6	Jawa Timur	27	704.79	1	58.88	2	855.58	3	480.86	2	259.81	3	258.37
7	Lampung	5	234.73	1	7.50	1	33.27	1	182.70	0	-	2	80.46
8	Sumatera Utara	1	104.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah	111	6,493.27	5	169.06	5	952.88	15	1,738.84	5	444.71	9	403.76
												150	10,202.53

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.40. Perkembangan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

No.	Provinsi	Tahapan	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal Surat Keputusan (SK)	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung																	
					2011			2012			2013			2014			2015			2016		
					Unit	Luas (Ha)		Unit	Luas (Ha)		Unit	Luas (Ha)		Unit	Luas (Ha)		Unit	Luas (Ha)		Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Aceh	1. Rancang Bangun*)																				
		2. Arahlan Pencadangan	S.1737/VII-WP3H/2013	31 Desember 2013	0	0	0	0	6	2,544,205												
		3. Usulan Penetapan			0	0	0	0														
		4. Penetapan	SK-932/Menhut-II/2014	31 Desember 2014	0	0	0	0	6	2,521,333												
2	Sumatera Utara	1. Rancang Bangun*)																				
		2. Arahlan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan	SK. 102/Menhut-II/2010	5 Maret 2010																		
3	Sumatera Barat	1. Rancang Bangun*)																				
		2. Arahlan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan	SK.798/Menhut-VII/2009	7 Desember 2009																		
4	Riau	1. Rancang Bangun																				
		2. Arahlan Pencadangan	S.632/VII-WP3H/2010	15 September 2010	0	0	0	0														
		3. Usulan Penetapan			0	0	0	0														
		4. Penetapan			0	0	0	0														
5	Kepulauan Riau	1. Rancang Bangun																				
		2. Arahlan Pencadangan	S.257/VII-WP3H/2010	6 Mei 2010																		
		3. Usulan Penetapan	522/969/set	30 September 2015										6	281,383,67							
		4. Penetapan	SK.452/Menhk/Setjen/PLA. 0/6/2016	Friday, June 17, 2016												6	295,327					
6	Jambi	1. Rancang Bangun																				
		2. Arahlan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan	SK. 77/Menhut-VII/2010	10 Pebruari 2010																		
7	Bengkulu	1. Rancang Bangun*)																				
		2. Arahlan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan	SK. 91/Menhut-VII/2010	19 Pebruari 2010																		
8	Bangka Belitung	1. Rancang Bangun*)																				
		2. Arahlan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan																				

No.	Provinsi	Tahapan	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal Surat Keputusan (SK)	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung												
					2011		2012		2013		2014		2015		2016		
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Sumatera Selatan	4. Penetapan	SK. 797/Menhut-VII/2009	7 Desember 2009													
		1. Rancang Bangun*)															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
10	Lampung	4. Penetapan	SK.76/Menhut-II/2010	10 Pebruari 2010													
		1. Rancang Bangun*)															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
11	DI. Yogyakarta	4. Penetapan	SK. 68/Menhut-II/2010	28 Januari 2010													
		1. Rancang Bangun															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
12	Bali	4. Penetapan	SK. 439/Menhut-II/2007	13 Desember 2007													
		1. Rancang Bangun*)															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
13	Nusa Tenggara Barat	4. Penetapan	SK. 800/Menhut-II/2009	7 Desember 2009													
		1. Rancang Bangun*)															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
		4. Penetapan	SK. 337/Menhut-VII/2009	15 Juni 2009													
14	Nusa Tenggara Timur	1. Rancang Bangun															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
15	Kalimantan Barat	4. Penetapan	SK. 591/Menhut-II/2010	19 Oktober 2010													
		1. Rancang Bangun*)															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
16	Kalimantan Tengah	4. Penetapan	SK. 67/Menhut-II/2010	28 Januari 2010													
		1. Rancang Bangun															
		2. Arahan Pencadangan															
		3. Usulan Penetapan															
			S.207/VII-WP3H/2011	11 Februari 2011	34	8.510,524											
		4. Penetapan	SK.02/Menhut-II/2012	9 Januari 2012			33	8.510.524									

No.	Provinsi	Tahapan	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal Surat Keputusan (SK)	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung									
					2011		2012		2013		2014		2015	
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Kalimantan Timur	1. Rancang Bangun 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	S. 208/VI-WP3H/2011	11 Februari 2011	36	12.606.634								
18	Kalimantan Selatan	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK.674/Menhut-II/2011	01 Desember 2011	34	12.567.139								
19	Gorontalo	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK. 78/Menhut-II/2010	10 Februari 2010										
20	Sulawesi Utara	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK. 65/Menhut-II/2010	28 Januari 2010										
21	Sulawesi Tengah	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK. 796/Menhut-II/2009	7 Desember 2009										
22	Sulawesi Selatan	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	Sk. 79/Menhut-II/2010	10 Februari 2010										
23	Sulawesi Tenggara	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK.88/Menhut-II/2011	09 Maret 2011	10	1.814.490								
24	Sulawesi Barat	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK. 338/Menhut-VII/2009	15 Juni 2009										
25	Maluku	4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arah Pencadangan 3. Usulan Penetapan	SK. 799/Menhut-II/2009	7 Desember 2009										

No.	Provinsi	Tahapan	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal Surat Keputusan (SK)	Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung													
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
26	Maluku Utara	4. Penetapan	SK. 66/Menhut-II/2010	28 Januari 2010														
		1. Rancang Bangun*)																
		2. Arahana Pencadangan																
		3. Usulan Penetapan																
27	Papua	4. Penetapan	SK. 73/Menhut-II/2010	8 Februari 2010														
		1. Rancang Bangun*)																
		2. Arahana Pencadangan																
		3. Usulan Penetapan																
28	Papua Barat	4. Penetapan	SK. 481/Menhut-II/2009	18 Agustus 2009														
		1. Rancang Bangun*)																
		2. Arahana Pencadangan																
		3. Usulan Penetapan																
		4. Penetapan	SK. 744/Menhut-II/2009	19 Oktober 2009														

Ket:

0 : Belum ada Proses

*) : Rancang bangun dilaksanakan sebelum tahun 2007

*) : Ada koreksi data

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.41. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Model s.d. Tahun 2016

No.	Provinsi	Luas Penetapan					
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Tahura	Jumlah
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	406,273	276,118	-	-	-	682,391
2	Sumatera Utara	153,481	19,895	189,264	-	-	362,640
3	Sumatera Barat	371,491	88,595	118,290	-	-	578,376
4	Sumatera Selatan	89,229	829,091	129,662	-	-	1,047,982
5	Kepulauan Riau	9,605	-	8,002	-	-	17,607
6	Riau	24,440	491,768	332,312	18,848	6,172	873,540
7	Kep. Bangka Belitung	31,372	160,836	-	-	-	192,208
8	Bengkulu	16,224	21,483	108,977	-	-	146,684
9	Jambi	106,846	88,001	52,607	-	-	247,454
10	Lampung	148,417	159,381	-	-	-	307,798
11	DI Yogyakarta	2,313	13,412	-	-	-	15,725
12	Bali	96,390	2,979	1,610	-	-	100,979
13	Nusa Tenggara Barat	134,799	63,377	63,526	-	-	261,702
14	Nusa Tenggara Timur	238,902	68,565	68,682	-	-	376,149
15	Kalimantan Barat	251,210	292,297	150,262	-	-	693,769
16	Kalimantan Timur	682,498	573,765	1,253,976	-	-	2,510,239
17	Kalimantan Selatan	140,812	299,687	54,517	-	-	495,016
18	Kalimantan Tengah	430,722	582,359	1,366,281	-	-	2,379,362
19	Sulawesi Utara	5,265	19,739	16,594	-	-	41,598
20	Gorontalo	120,442	59,548	210,701	-	-	390,691
21	Sulawesi Tengah	376,195	206,265	506,296	-	-	1,088,756
22	Sulawesi Barat	346,737	38,855	178,802	-	-	564,394
23	Sulawesi Tenggara	189,594	183,755	66,151	-	-	439,500
24	Sulawesi Selatan	222,583	65,394	133,940	-	-	421,917
25	Maluku Utara	83,892	17,364	84,129	-	-	185,385
26	Maluku	142,288	195,527	232,522	-	-	570,337
27	Papua Barat	139,752	184,633	195,019	-	-	519,404
28	Papua	318,500	295,420	314,195	-	-	928,115

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.42. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi s.d. Tahun 2016

No.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Provinsi	Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Taman Nasional Batang Gadis	Sumatera Utara	SK. 786/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	72,150.00
2	Taman Nasional Siberut	Sumatera Barat	SK. 787/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	190,500.00
3	Taman Nasional Sembilang	Sumatera Selatan	SK. 748/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	202,896.31
4	Taman Nasional Tesso Nilo	Riau	SK. 788/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	38,576.00
5	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	Riau	SK. 789/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	144,223.00
6	Taman Nasional Berbak	Jambi	SK. 774/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	62,700.00
7	Taman Nasional Bukit Duabelas	Jambi	SK. 720/Menhut - II/2010	29 Desember 2010	60,500.00
8	Taman Nasional Way Kambas	Lampung	SK. 712/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	130,000.00
9	Taman Nasional Ujung Kulon	Banten	SK. 775/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	122,956.00
10	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Banten dan Jawa Barat	SK. 776/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	113,357.00
11	Taman Nasional Gunung Ciremai	Jawa Barat	SK. 790/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	15,500.00
12	Taman Nasional Gunung Merapi	DIY dan Jawa Tengah	SK. 713/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	6,410.00
13	Taman Nasional Karimun Jawa	Jawa Tengah	SK. 749/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	111,625.00
14	Taman Nasional Gunung Merbabu	Jawa Tengah	SK. 751/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5,725.00
15	Taman Nasional Meru Betiri	Jawa Timur	SK. 779/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	58,000.00
16	Taman Nasional Alas Purwo	Jawa Timur	SK. 801/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	43,420.00
17	Taman Nasional Baluran	Jawa Timur	SK. 718/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	25,000.00
18	Taman Nasional Bali Barat	Bali	SK. 780/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	19,002.89
19	Taman Nasional Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	SK. 781/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	41,330.00
20	Taman Nasional Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	SK. 714/Menhut II/2010	29 Desember 2010	47,014.00
21	Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	SK. 719/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	87,984.00
22	Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur	SK. 753/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	173,000.00
23	Taman Nasional Danau Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	SK. 754/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5,356.50
24	Taman Nasional Danau Sentarum	Kalimantan Barat	SK. 715/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	132,000.00
25	Taman Nasional Gunung Palung	Kalimantan Barat	SK. 721/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	90,000.00
26	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	SK. 750/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	181,090.00

No.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Provinsi	Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
27	Taman Nasional Kutai	Kalimantan Timur	SK. 778/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	198,629.00
28	Taman Nasional Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	SK. 752/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	1,360,500.00
29	Taman Nasional Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	SK. 777/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	415,040.00
30	Taman Nasional Sebangau	Kalimantan Tengah	SK. 791/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	568,700.00
31	Taman Nasional Bunaken	Sulawesi Utara	SK. 782/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	89,065.00
32	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK. 716/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	287,115.00
33	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	SK. 755/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	105,194.00
34	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	SK. 717/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	43,750.00
35	Taman Nasional Manusela	Maluku	SK. 756/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	189,000.00
36	Taman Nasional Aketajawe Loloabata	Maluku Utara	SK. 757/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	167,300.00
37	Taman Nasional Lorentz	Papua	SK. 792/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	2,354,644.00
38	Taman Nasional Wasur	Papua	SK. 793/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	413,810.00
39	Rawa Singkil	Aceh	SK. 980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102,500
40	Kerumutan	Riau	SK. 981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120,000
41	Arau Hilir	Padang	SK. 982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105,375
42	Danku Bentayan	Sumatera Selatan	SK. 983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89,574
43	Guntur-Papandayan	Jawa Barat	SK. 984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15,318
44	Tambora	Nusa Tenggara Barat	SK. 985/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	78,116
45	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	SK. 986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32,248
46	Gunung Melintang	Kalimantan Barat	SK. 987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25,125
47	Morowali	Sulawesi Tengah	SK. 988/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	209,400
48	Towuti	Sulawesi Tengah	SK. 989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	209,400
49	Nantu	Gorontalo	SK. 990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31,215
50	Jayawijaya	Papua	SK. 991/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	800,000
51	Boimalit Maghilit	Papua Barat	SK. 450/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9,194
52	Sorong Klamono	Papua Barat	SK. 456/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2,990
53	Gunung Meja Sidei Kaironi	Papua Barat	SK. 457/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	968
54	Arfak	Papua Barat	SK. 458/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	68,325
55	Waigeo	Papua Barat	SK. 459/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264,073

No.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Provinsi	Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
56	Morowali	Sulawesi Tengah	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	216,908
57	Bakirang	Sulawesi Tengah	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	17,479
58	Pamona	Sulawesi Tengah	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	35,125
59	Pangi Binangga	Sulawesi Tengah	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	70,997
60	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	38,608
61	KPHK Gunung Dako	Sulawesi Tengah	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21,659
62	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	4,008
63	Giam Siak Kecil Bukit Batu	Riau	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	99,858
64	Bukit Rimbang Bukit Baling	Riau	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142,156
65	Buki kaba	Bengkulu	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	15,133
66	Eggano	Bengkulu	SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9,374
67	Pati Barat	Jawa Tengah	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1,426
68	Cilacap	Jawa Tengah	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	982
69	Parawen	Kalimantan Tengah	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	5,855
70	KPHK Lamandau	Kalimantan Tengah	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	61,425
71	Bedugul Sangeh	Bali	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3,635
72	Kintamani	Bali	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2,649
73	Barumun	Sumatera Utara	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	02 September 2016	36,261
74	Sicke Cike	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6,144
75	Kawah Ijen	Jawa Timur	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2,575
76	Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12,865
77	Cycloops Youtefa	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	33,289
78	Muara Akam Sedulang	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	65,445
79	Taliabu	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13,114
80	Jakarta	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	242
81	Kepulauan Krakatau	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13,365
82	Lambusango	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	28,595
83	Peropa	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	44,012
84	Durian Luncuk	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	111

No.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Provinsi	Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
85	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	147,614
86	Gunung Nyiut	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	91,759
87	Simpang Tili	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	23,356
88	Burangrang Tangkuban Perahu	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4,772
89	Moyo	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	30,945
90	Padang Sugihan	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	88,148
91	Harlu	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3,681
92	Gunung Mutis	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12,315
93	Pulau Weh	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6,481
94	Lingga Isaq	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	86,634
95	Tangkoko	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8,545
96	Yogyakarta	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	632
97	Gunung Sahuwai	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	32,476
98	Hutan Bakau Pantai Timur	Jambi	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4,872
99	Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2,225
Jumlah					12,084,633.70

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.43. Penetapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Fasilitas Tahun 2016

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Lalan Sembilang	UNIT II	KPH Produksi	Perbup Banyuasin No. 420 Tahun 2013	
2	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	UNIT XII	KPH Lindung	Pewako No.41 Tahun 2014	16 Oktober 2014
3	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Ogan Ulu	UNIT XIII	KPH Lindung	Perbup No.27 Tahun 2013	29 Agustus 2013
4	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim, Kab. OKU	Suban Jeriji	UNIT XIV	KPH Produksi	Perda No.16/2013 dan Pergub No.36/2014	
5	Sumatera Selatan	Kab. OKU	Bukit Nanti	UNIT XV	KPH Lindung	Perbup No.31/2014	09 September 2014
6	Sumatera Selatan	Kab. OKUS	Peraduan Gistang	UNIT XVI	KPH Lindung	Perbup No.4 Tahun 2015	16 Februari 2015
7	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XVI	UNIT XVI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
8	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Barat	UNIT XVII	UNIT XVII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
9	Sumatera Utara	Kab. Samosir, Kab. Tobasa	UNIT XVIII	UNIT XVIII	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
10	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan	UNIT XX	UNIT XX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
11	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXIII	UNIT XXIII	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
12	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	UNIT XXIV	UNIT XXIV	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
13	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XXV	UNIT XXV	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
14	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXVI	UNIT XXVI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
15	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Tapanuli Selatan	UNIT XXVII	KPH Produksi	0	
16	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVIII	UNIT XXVIII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
17	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas, Kab. Labusel	UNIT XXXI	UNIT XXXI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
18	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	Merukung	UNIT XXIII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 140 Tahun 2016	30 Desember 2016
19	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	Sokan	UNIT XXIV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 142 Tahun 2016	30 Desember 2016
20	Kalimantan Barat	Kab. Kelapang, Kab. Kayong Utara	Belimbing	UNIT XXV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 138 Tahun 2016	30 Desember 2016
21	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat	Delta Mahakam	UNIT XXIX	KPH Produksi	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
22	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	DAS Belayan	UNIT XXVI	KPH Produksi	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
23	Kalimantan Timur	Kab. Kukar, Kab. Bontang	Santan	UNIT XXVII	KPH Produksi	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
24	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat	Bongan	UNIT XXXII	KPH Produksi	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
25	Kalimantan Timur	Kab. Paser	Telakai	UNIT XXXIII	KPH Produksi	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
26	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Sungai Wain-Sungai Manggar	UNIT XXX	KPH Lindung	Peraturan Walikota BPN	
27	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	Tana Tidung	UNIT VII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016	28 November 2016
28	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Palangkaraya	UNIT III	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
29	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Barito Utara	UNIT V	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
30	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	Barito Timur	UNIT XIV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (K-PH)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Kotawaringin Timur	UNIT XXIX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
32	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	UNIT XXXI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
33	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Tengah	UNIT IX	KPH Lindung	Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 46 Tahun 2014	6 Oktober 2014
34	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	Tanah Bumbu	UNIT VI	KPH Produksi	Perbup Tanah Bumbu No.49 Tahun 2014	24 November 2014
35	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung	Tomohon	UNIT VI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016	14 November 2014
36	Maluku	Kab. Buru Selatan	Wae Mala-Wae Mikona	UNIT I	KPH Produksi	*	*
37	Maluku	Kota Ambon	Kota Ambon	UNIT XIV	KPH Lindung	*	*
38	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Maluku Tenggara	UNIT XVI	KPH Lindung	*	*
39	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	Bungai	UNIT XVIII	KPH Produksi	*	*
40	Maluku	Kab. Kep. Aru	P. Molkar - P. Trangan	UNIT XXI	KPH Produksi	*	*
41	Maluku	Kab. Kep. Aru	Unit XXII	UNIT XXII	KPH Produksi	*	*
42	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Halmahera Timur	UNIT IV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2018
43	Maluku Utara	Kab. Taliabu	Kepulauan Sula	UNIT XVI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2018
44	Maluku Utara	Kab. Tidore Kepulauan	Oba	UNIT IX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2018
45	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	Karossa	UNIT IV	KPH Produksi	Perbup Mamuju Tengah No. 061 Tahun 2014	20 Januari 2014
46	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Karama	UNIT VI	KPH Produksi	Perbup Mamuju No. 8 Tahun 2014	7 September 2014
47	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	kep. Selayar	UNIT X	KPH Produksi	Perbup Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2014	27 Januari 2014
48	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	Tofo Pajo	UNIT XVI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016	27 Desember 2016
49	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	Madapangga Rempu	UNIT XX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016	28 Desember 2016
50	Papua	Kab. Nabire, Kab. Dogiai	Nabire	UNIT LI	KPH Lindung	*	*
51	Papua	Kab. Boven Digoel	Boven Digoel	UNIT LI	KPH Produksi	*	*
52	Papua	Kab. Sarmi	Sarmi	UNIT XXII	KPH Produksi	*	*
53	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	Pegunungan Bintang	UNIT XXXV	KPH Lindung	*	*
54	Papua	Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Waropen	Intan Jaya	UNIT X	KPH Lindung	*	*
55	Papua	Kota Jayapura	Kota Jayapura	UNIT XXVIII	KPH Produksi	*	*
56	Papua	Kab. Mimika, Kab. Dogiai	Mimika	UNIT VI	KPH Lindung	Peraturan Daerah Mimika No. 8 Tahun 2014	
57	Papua	Kab. Lani Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara	Jayawijaya	UNIT XLII	KPH Lindung	Peraturan Bupati Jayawijaya No.10 Tahun 2014	
58	Papua	Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Asmat	Nduga	UNIT XLIII	KPH Produksi	Perbup Nduga No. 04 Tahun 2015	
59	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	Jebu Bembang Antan	UNIT II	KPH Produksi	Perbup No.19 Th 2012	05 Juli 2012
60	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	Bubus Panca	UNIT III	KPH Produksi	*	*
61	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	Bangka Selatan	UNIT VIII	KPH Produksi	Peraturan Bupati Bangka No. 19 Tahun 2012	20 Nopember 2012
62	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	Belitung	UNIT X	KPH Lindung	*	*
63	Jambi	Kab. Tebo	Tebo Barat	UNIT IX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016	
64	Jambi	Kab. Tebo	Tebo Timur	UNIT X	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016	
65	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	Manggarai	UNIT II	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
66	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	Ngada	UNIT IV	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
67	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	Unit IX Lembata	UNIT IX	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
68	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTU	Timor Tengah Utara	UNIT XXI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	Manggarai Timur	UNIT III	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
70	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Sumba Barat Daya	UNIT XI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
71	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	Nagekeo	UNIT V	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
72	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	Ende	UNIT VI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
73	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	Sikka	UNIT VII	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
74	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Selatan	UNIT XX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
75	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Belu	UNIT XXII	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
76	Riau	Kab. Bengkalis	Bengkalis	UNIT V	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
77	Riau	Kab. Siak	Siak	UNIT VII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
78	Riau	Kab. Rokan Hulu	Rokan Hulu	UNIT XIV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
79	Riau	Kab. Pelalawan	Pelalawan XX	UNIT XX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
80	Riau	Kab. Pelalawan	Pelalawan XXI	UNIT XXI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
81	Riau	Kab. Indragiri Hulu	Indragiri Hulu	UNIT XXX	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
82	Riau	Kab. Kuantan Singingi	Kuantan Singingi	UNIT XXXI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
83	Kep. Riau	Kab. Lingga	Lingga	UNIT III	KPH Produksi	*	
84	Kep. Riau	Kab. Bintan	Bintan Tanjung Pinang	UNIT IV	KPH Produksi	*	
85	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Bone Bolango	UNIT VII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016	23 Desember 2016
86	Sulawesi Tengah	Kab. Toi-Toi	Gunung Dako	UNIT II	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
87	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Banawa Lalundu	UNIT VII	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
88	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Morowali	UNIT XIV	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
89	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut	Pelling	UNIT XXI	KPH Produksi	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
90	Papua Barat	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong	Raja Ampat	UNIT I	KPH Lindung	Peraturan Bupati Raja Ampat No.4 Tahun 2014	
91	Papua Barat	Kab. Teluk Birtuni	Bakau	UNIT XV	KPH Produksi	Peraturan Bupati Teluk Birtuni Nomor 9 Tahun 2015	22 September 2015
92	Papua Barat	Kab. Fakfak	Fakfak	UNIT XVI	KPH Produksi	Perbup Fakfak Nomor 36 Tahun 2015	11 November 2015
93	Papua Barat	Kab. Tambora	Tambora	UNIT IV	KPH Produksi	*	
94	Aceh	Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie	KPH lntas Kabupaten	UNIT I	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2014
95	Aceh	Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah	KPH lntas Kabupaten	UNIT II	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2014
96	Aceh	Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tengah	KPH lntas Kabupaten	UNIT IV	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2014
97	Aceh	Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya	KPH lntas Kabupaten	UNIT V	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2014
98	Aceh	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kota Sulibusalam, Kab. Aceh Singkil	KPH lntas Kabupaten	UNIT VI	KPH Lindung	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2014
99	Bengkulu	Kab. Seluma	Seluma	UNIT IV	KPH Lindung	Peraturan Bupati Seluma No. 22 Tahun 2014	7 April 2014
100	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah	Lintas Kabupaten	UNIT III	KPH Lindung	*	
101	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan	UNIT V	KPH Lindung	*	
102	Bengkulu	Kab. Kaur	Kaur	UNIT VI	KPH Lindung	*	
103	Lampung	Kab. Lampung Barat	Liwa	UNIT II	KPH Lindung	Peraturan Bupati Lampung Barat No. 29 Tahun 2014	
104	Lampung	Kab. Lampung Tengah	Sandang Agung	UNIT VII	KPH Lindung	Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 6 tahun 2016	29 Februari 2016
105	Lampung	Kab. Lampung Utara	Tangkli Tabak	UNIT VIII	KPH Lindung	*	

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Lampung	Kab. Lampung Timur	Gunung Balak	UNIT XV	KPH Lindung	Peraturan Bupati Lampung Timur No. 11 Tahun 2013	1 Mei 2013
107	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Mekongga Selatan	UNIT XI	KPH Produksi	*	
108	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	Kota Baubau	UNIT V	KPH Produksi	*	
109	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	Muna	UNIT VI	KPH Produksi	*	
110	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Mekongga Selatan	UNIT XIII	KPH Lindung	*	
111	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Ueesi	UNIT XIV	KPH Lindung	*	
112	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	Wakatobi	UNIT XXV	KPH Lindung	*	
113	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka	Ladongi	UNIT XII	KPH Produksi	Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor : 11 Tahun 2013	
114	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara, Kab. Morowali	Bina Mahawana Sejuk	UNIT XIX	KPH Produksi	Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 410 Tahun 2014	22 September 2014

Keterangan : *) KPH dalam proses pembentukan kelembagaan

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.44. Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Fasilitas s.d. Tahun 2016

No.	Provinsi	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luas Penetapan				Jumlah Luas (Ha)
			Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	
1		Aceh	5	1,389,389	300,398	136,112	1,825,899
2		Sumatera Utara	15	530,325	370,438	256,667	1,453,384
3		Sumatera Barat	2	-	-	-	385,869
4		Riau	21	71,810	449,148	204,711	3,437,863
5		Jambi	8	4,966	223,566	18,085	834,759
6		Sumatera Selatan	12	196,349	220,003	45,214	1,270,903
7		Bengkulu	4	233,532	4,791	66,962	305,285
8	Lampung	6	111,813	-	-	167,584	
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	72,028	158,745	230,773	488,745	
10	Kepulauan Riau	4	52,275	35,736	57,498	239,383	
11	Nusa Tenggara Barat	12	30,626	16,124	24,335	546,345	
12	Nusa Tenggara Timur	13	308,782	140,220	74,410	752,969	
13	Kalimantan Barat	11	225,947	300,904	160,926	2,148,832	
14	Kalimantan Tengah	17	168,952	633,120	218,919	3,810,103	
14	Kalimantan Selatan	3	115,813	169,915	39,377	466,454	
15	Kalimantan Timur	7	351,593	884,928	719,733	2,614,383	
16	Kalimantan Utara	1	-	120,789	-	120,789	
17	Sulawesi Utara	4	17,628	-	9,472	80,830	
18	Sulawesi Tengah	7	193,386	89,317	297,914	1,047,382	
19	Sulawesi Selatan	4	9,812	4,030	7,060	355,114	
20	Sulawesi Tenggara	12	319,856	153,593	119,187	1,034,589	
21	Gorontalo	2	16,144	836	18,804	126,428	
22	Sulawesi Barat	3	70,906	36,368	112,754	271,113	
23	Maluku	9	81,596	184,230	103,333	664,270	
157	Maluku	UNIT XV				10,067	
24	Maluku Utara	4	59,413	188,121	138,516	556,493	
25	Papua	17	1,210,057	719,491	926,422	6,116,710	
26	Papua Barat	6	210,175	603,183	368,585	1,663,332	

Sumber : Direktorat Jenderal Pencanaan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.45. Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan s.d. Tahun 2016

No.	Provinsi	Penetapan	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	No. Surat Keputusan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
1	2	3	4	5	6
1	Kalimantan Selatan	MODEL	TABALONG	KPH Produksi	SK. 10/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
2	Gorontalo	MODEL	BOALEMO	KPH Produksi	SK. 108/Menhut-II/Reg.4-2/2014
3	Kalimantan Selatan	MODEL	BANJAR	KPH Produksi	SK. 15/Menhut-II/REG.III/2014
4	Kalimantan Barat	MODEL	KAPUAS HULU	KPH Produksi	SK. 16/Menhut-II/REG.III/2014
5	Kalimantan Tengah	MODEL	KAPUAS	KPH Lindung	SK. 17/Menhut-II/REG.III/2014
6	Kalimantan Utara	MODEL	TARAKAN	KPH Lindung	SK. 18/Menhut-II/REG.III/2014
7	Kalimantan Timur	MODEL	BERAU BARAT	KPH Produksi	SK. 19/Menhut-II/REG.III/2014
8	Nusa Tenggara Timur	MODEL	MUTIS TIMAU	KPH Lindung	SK. 1931/Menhut-II/Reg.2-1/2015
9	Kepulauan Bangka Belitung	MODEL	SUNGAI SEMBULAN	KPH Produksi	SK. 194/Menhut-II/REG.I/2014
10	Sumatera Barat	MODEL	LIMA PULUH KOTA	KPH Lindung	SK. 195/Menhut-II/REG.I/2014
11	Sumatera Barat	MODEL	SIJUNJUNG	KPH Lindung	SK. 196/Menhut-II/REG.I/2014
12	Sumatera Barat	MODEL	SOLOK	KPH Lindung	SK. 197/Menhut-II/REG.I/2014
13	Jambi	MODEL	LIMAU	KPH Produksi	SK. 198/Menhut-II/REG.I/2014
14	Sumatera Utara	MODEL	MANDAILING NATAL	KPH Produksi	SK. 199/Menhut-II/REG.I/2014
15	Kalimantan Timur	MODEL	MERATUS	KPH Produksi	SK. 20/Menhut-II/REG.III/2014
16	Kalimantan Selatan	MODEL	TANAH LAUT	KPH Produksi	SK. 21/Menhut-II/REG.III/2014
17	Kalimantan Selatan	MODEL	PULAU LAUT DAN SEBUKU	KPH Produksi	SK. 22/Menhut-II/Reg.III/2014
18	Sumatera Selatan	MODEL	LAKITAN	KPH Produksi	SK. 255/Menhut-II/REG.I/2014
19	Sulawesi Utara	MODEL	POIGAR	KPH Produksi	SK. 265/Menhut-II/Reg.4-2/2014
20	Sulawesi Selatan	MODEL	JENEBERANG	KPH Produksi	SK. 266/Menhut-II/Reg.4-2/2014
21	Lampung	MODEL	RAJABASA	KPH Lindung	SK. 268/Menhut-II/REG.I/2014
22	Sulawesi Tenggara	MODEL	BOMBANA	KPH Produksi	SK. 2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2016
23	Lampung	MODEL	GEDONG WANI	KPH Produksi	SK. 293/Menhut-II/REG.I-1/2014
24	Lampung	MODEL	MUARA DUA	KPH Produksi	SK. 294/Menhut-II/REG.I-1/2014
25	Sulawesi Barat	FASILITASI 2015	KARAMA	KPH Produksi	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
26	Bengkulu	MODEL	MUKO-MUKO	KPH Produksi	SK. 3038/Menhut-II/REG.I-1/2014
27	Lampung	MODEL	REGISTER 47 WAY TERUSAN	KPH Produksi	SK. 3039/MENHUT-II/REG.I-1/2014
28	Lampung	MODEL	BATU TEGI	KPH Lindung	SK. 342/Menhut-II/REG.I-1/2014
29	Lampung	MODEL	KOTAAGUNG UTARA	KPH Lindung	SK. 343/Menhut-II/REG.I-1/2014
30	Sumatera Selatan	MODEL	LALAN MANGSANG MENDIS	KPH Produksi	SK. 3646/Menhut-II/REG.I-1/2014
31	Sulawesi Tenggara	MODEL	GULARAYA	KPH Produksi	SK. 3694/Menhut-II/Reg.4-1/2014
32	Sulawesi Tengah	MODEL	RANO PATANU	KPH Produksi	SK. 3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014

No.	Provinsi	Penetapan	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	No. Surat Keputusan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
1	2	3	4	5	6
33	Sulawesi Tengah	MODEL	DOLAGO TANGGUNUNG	KPH Produksi	SK. 3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014
34	Sulawesi Selatan	FASILITASI 2015	KEPULAUAN SELAYAR	KPH Produksi	SK. 41PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
35	Yogyakarta	MODEL	YOGYAKARTA	KPH Produksi	SK. 4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014
36	Nusa Tenggara Barat	MODEL	BATULANTEH	KPH Produksi	SK. 4052/Menhut-II/Reg.2-1/2014
37	Nusa Tenggara Timur	MODEL	MANGGARAI BARAT	KPH Produksi	SK. 426/Menhut-II/Reg.2-1/2015
38	Papua Barat	MODEL	REMU	KPH Lindung	SK. 470/Menhut-II/Reg.4-1/2015
39	Kalimantan Tengah	MODEL	KOTAWARINGIN BARAT	KPH Produksi	SK. 51PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
40	Nusa Tenggara Barat	MODEL	RINJANI BARAT	KPH Lindung	SK. 5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014
41	Bali	MODEL	BALI BARAT	KPH Lindung	SK. 5045/Menhut-II/Reg.2-1/2014
42	Bali	MODEL	BALI TENGAH	KPH Lindung	SK. 5046/Menhut-II/Reg.2-1/2014
43	Bali	MODEL	BALI TIMUR	KPH Lindung	SK. 5273/Menhut-II/Reg.2-1/2014
44	Nusa Tenggara Barat	MODEL	RINJANI TIMUR	KPH Lindung	SK. 5299/Menhut-II/Reg.2-1/2014
45	Sulawesi Tengah	MODEL	BALANTAK	KPH Produksi	SK. 5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
46	Sulawesi Tengah	MODEL	POGOGUL	KPH Produksi	SK. 5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
47	Sulawesi Barat	MODEL	MAMASA BARAT	KPH Produksi	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
48	Papua	MODEL	MEMBERAMO	KPH Produksi	SK. 5880/Menhut-II/Reg.4-1/2014
49	Papua	MODEL	WAROPEN	KPH Produksi	SK. 5881/Menhut-II/Reg.4-1/2014
50	Kalimantan Tengah	MODEL	SERUYAN	KPH Produksi	SK. 61PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
51	Aceh	MODEL	UNIT III ACEH	KPH Lindung	SK. 6062/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/10/2016
52	Nusa Tenggara Barat	MODEL	SEJORONG	KPH Produksi	SK. 6102/Menhut-II/Reg.2-1/2014
53	Gorontalo	FASILITASI 2015	BONE BOLANGO	KPH Produksi	SK. 6102/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2016
54	Nusa Tenggara Barat	MODEL	AMPANG	KPH Lindung	SK. 630/Menhut-II/Reg.2-1/2015
55	Nusa Tenggara Barat	MODEL	MARIA	KPH Produksi	SK. 634/Menhut-II/Reg.2-1/2015
56	Riau	FASILITASI 2015	KUANTAN SINGINGI	KPH Lindung	SK. 6403/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/11/2016
57	Sulawesi Barat	MODEL	MAPILI	KPH Lindung	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/11/2016
58	Nusa Tenggara Barat	FASILITASI 2016	UNIT VII NTB	KPH Lindung	SK. 6479/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/11/2016
59	Bengkulu	FASILITASI 2015	SELUMA	KPH Lindung	SK. 6480/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/11/2016
60	Bengkulu	MODEL	BUKIT BALAI REJANG	KPH Lindung	SK. 6481/MENLHK-KPHL/PKPHP/DAS.3/11/2016
61	Papua	MODEL	KEEROM	KPH Produksi	SK. 6520/Menhut-II/Reg.4-1/2014
62	Gorontalo	MODEL	GORONTALO UTARA	KPH Produksi	SK. 6521/Menhut-II/Reg.4-1/2014
63	Sulawesi Tengah	MODEL	TOILI BATURUBE	KPH Produksi	SK. 6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014
64	Gorontalo	MODEL	POHUWATO	KPH Lindung	SK. 6523/Menhut-II/Reg.4-1/2014
65	Papua	MODEL	BAIK NUMFOR	KPH Lindung	SK. 6544/Menhut-II/Reg.4-1/2014
66	Sulawesi Tengah	MODEL	DAMPELAS TINOMBO	KPH Produksi	SK. 6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013

No.	Provinsi	Penetapan	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	No. Surat Keputusan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
1	2	3	4	5	6
67	Kalimantan Tengah	MODEL	GUNUNG MAS	KPH Produksi	SK. 7/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
68	Nusa Tenggara Timur	MODEL	ROTE NDAO	KPH Produksi	SK. 700/Menhut-II/Reg.2-1/2015
69	Riau	MODEL	KAMPAR KIRI	KPH Produksi	SK. 7204/Menhut-II/REG. 1/1/2014
70	Sumatera Selatan	MODEL	MERANTI	KPH Produksi	SK. 7216/Menhut-II/REG. 1/1/2014
71	Gorontalo	MODEL	GORONTALO	KPH Produksi	SK. 7315/Menhut-II/Reg.4-1/2014
72	Sulawesi Tengah	MODEL	TOJO UNA-UNA	KPH Produksi	SK. 7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014
73	Sulawesi Barat	MODEL	LARIANG	KPH Lindung	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4-1/2014
74	Papua Barat	MODEL	SORONG SELATAN	KPH Produksi	SK. 7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014
75	Sumatera Selatan	MODEL	BENAKAT	KPH Produksi	SK. 7369/Menhut-II/REG. 1-1/2014
76	Lampung	MODEL	PESAWARAN	KPH Lindung	SK. 7370/Menhut-II/REG. 1-1/2014
77	Riau	MODEL	TASIK BESAR SERKAP	KPH Produksi	SK. 7565/Menhut-II/REG. 1-1/2014
78	Maluku Utara	MODEL	GUNUNG SINOPA	KPH Produksi	SK. 7578/Menhut-II/Reg.4-1/2014
79	Sulawesi Barat	MODEL	GANDA DEWATA	KPH Lindung	SK. 7579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
80	Maluku Utara	MODEL	BACAN	KPH Produksi	SK. 7580/Menhut-II/Reg.4-1/2014
81	Sulawesi Tenggara	MODEL	PEROPA EA GANTARA	KPH Lindung	SK. 7581/Menhut-II/Reg.4-1/2014
82	Papua Barat	MODEL	SORONG	KPH Produksi	SK. 7582/Menhut-II/Reg.4-1/2014
83	Sulawesi Selatan	MODEL	LARONA MALILI	KPH Lindung	SK. 7583/Menhut-II/Reg.4-1/2014
84	Sulawesi Barat	MODEL	MAMASA TENGAH	KPH Lindung	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4-1/2014
85	Sulawesi Tenggara	MODEL	LAKOMPA	KPH Produksi	SK. 764/Menhut-II/Reg.4-1/2015
86	Sumatera Barat	MODEL	BUKIT BARISAN	KPH Lindung	SK. 7701/Menhut-II/REG.1-1/2014
87	Nusa Tenggara Timur	MODEL	ALOR PANTAR	KPH Lindung	SK. 7734/Menhut-II/Reg.2-1/2014
88	Lampung	MODEL	BUKIT PUNGGUR	KPH Produksi	SK. 7755/Menhut-II/REG. 1-1/2014
89	Kalimantan Tengah	MODEL	LAMANDAU	KPH Produksi	SK. 8/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
90	Sulawesi Selatan	MODEL	AWOTA	KPH Produksi	SK. 806/Menhut-II/Reg.4-1/2015
91	Sulawesi Barat	MODEL	BUDONG-BUDONG	KPH Produksi	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/2015
92	Kalimantan Tengah	MODEL	MURUNG RAYA	KPH Produksi	SK. 9/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
93	Sumatera Selatan	MODEL	RAWAS	KPH Produksi	SK. 940/Menhut-II/Reg.1-1/2015
94	Sumatera Selatan	MODEL	BANYUASIN	KPH Lindung	SK.4411/MENLHK-KPHL/PKPH/DAS.3/9/2016
95	Sumatera Selatan	FASILITASI 2015	DEMPO	KPH Lindung	SK.6482/MENLHK-KPHL/PKPH/DAS.3/11/2016
96	Sulawesi Utara	FASILITASI 2015	LINTAS SULUT	KPH Lindung	SK.6676/MENLHK-KPHL/PKPH/DAS.3/12/2016
97	Nusa Tenggara Barat	FASILITASI 2015	TOFFO PAJO	KPH Lindung	SK.6677/MENLHK-KPHL/PKPH/DAS.3/12/2016

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.46. Potensi Tegakan Hutan

No.	Provinsi	Potensi Tegakan Hutan Berdasarkan Penutupan Lahan Tahun 2016											
		Hutan Lahan Kering Primer				Hutan Lahan Kering Sekunder				Hutan Rawa Primer			
		Jumlah Plot	Diameter ≥ 20 Cm (m ³ /Ha)	Diameter ≥ 50 Cm (m ³ /Ha)	Jumlah Plot	Diameter ≥ 20 Cm (m ³ /Ha)	Diameter ≥ 50 Cm (m ³ /Ha)	Jumlah Plot	Diameter ≥ 20 Cm (m ³ /Ha)	Diameter ≥ 50 Cm (m ³ /Ha)	Jumlah Plot	Diameter ≥ 20 Cm (m ³ /Ha)	Diameter ≥ 50 Cm (m ³ /Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	14	198.27	123.75	8	215.58	128.31				1	147.39	69.61
2	Sumatera Utara	14	179.2	97.04	23	145.51	73.56						
3	Sumatera Barat	8	190.09	101.77	22	147.98	77.71				1	76.92	5.72
4	Riau	7	149.68	64.19	14	166.24	80.19	3	137.08	60.07	31	105.63	31.63
5	Kepulauan Riau				8	99.15	27.07						
6	Jambi	10	180.68	109.96	2	66.5	20.65				2	118.79	61.42
7	Bengkulu	15	174.65	104.6	7	146.43	71.89						
8	Sumatera Selatan	10	162.87	94.31	10	115.52	65.24				6	37.94	13.12
9	Kep. Bangka Belitung	1	37.87	1.86	1	18.79	-				5	25.18	7.87
10	Lampung	12	229.76	152.01	10	102.39	60.91						
11	Jawa Barat	7	130.23	76.76	8	73.9	38.56						
12	Banten				5	164	119.35						
13	Jawa Timur				12	119.36	94.73						
14	Bali	8	126.47	80.65	4	44.63	22.73						
15	Nusa Tenggara Barat	34	145.19	91.63	16	61.62	26.6						
16	Nusa Tenggara Timur	4	85.87	36.94	31	68.09	38.06						
17	Kalimantan Barat	65	184.22	112.4	81	164.26	98.34	2	182.91	94.29	45	94.87	28.19
18	Kalimantan Tengah				5	165.7	87.93				10	83.13	13.03
19	Kalimantan Timur	18	129.04	74.21	101	105.3	53.3						
20	Kalimantan Selatan	3	116.64	62.01	5	88.44	53.11						
21	Kalimantan Utara	17	149.94	97.72	30	140.62	80.69				2	12.61	-
22	Sulawesi Utara	10	216.02	147.03	14	202.56	136.11						
23	Gorontalo	5	206.96	139.35	9	170.68	107.99						
24	Sulawesi Tengah	7	91.61	42.56	39	88.04	41.05						
25	Sulawesi Tenggara	6	100.08	52.55	20	99.77	57.7						
26	Sulawesi Selatan	9	101.31	41.6	20	98.56	42.57						
27	Sulawesi Barat	6	183.02	93.58	13	97.68	50.41						
28	Maluku	4	138.17	75.84	29	115.6	60.25						
29	Maluku Utara	7	147.42	87.92	31	131.32	82.11						
30	Papua	26	132.72	74.14	17	124.43	68.09	5	82.18	41.96	4	28.78	5.51
31	Papua Barat	9	163.32	92.19	20	151.01	87.92	1	102.34	51.58			

Keterangan:

1. Data yang digunakan adalah data plot PSP kegiatan inventarisasi hutan nasional tahun 2010-2014

2. Nilai potensi tegakan adalah nilai potensi untuk seluruh jenis pohon

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.47. Angka Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2016

No.	Provinsi	Hutan Lahan Kering Primer										Hutan Primer				
		Deforestasi Dalam Kawasan Hutan										Deforestasi Dalam Kawasan Hutan				
		Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Aceh	905.5	645.7	-	-	-	-	1,551.2	2.5	1,553.7	79.5	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	434.9	361.7	62.2	9.8	-	-	868.5	49.7	918.2	-	-	-	-	-	
3	Riau	143.1	343.3	254.1	-	90.3	-	830.8	31.0	861.8	29.3	-	119.0	54.5	-	
4	Sumatera Barat	1,632.1	1,055.3	165.0	9.1	429.7	-	3,291.1	447.6	3,738.7	-	-	-	-	-	
5	Jambi	5,513.7	766.8	1,132.6	2,266.0	-	-	9,679.1	2,086.4	11,765.5	11,242.3	-	2,650.8	-	-	
6	Sumatera Selatan	396.4	403.8	-	-	-	-	800.3	-	800.3	-	-	-	-	-	
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Bengkulu	263.6	856.7	192.1	-	-	-	1,312.4	31.6	1,344.0	-	-	-	-	-	
9	Lampung	0.1	309.6	515.4	-	-	-	825.1	-	825.1	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	-	-	90.6	-	-	-	90.6	285.8	376.3	-	0.2	4.7	228.4	-	
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Kalimantan Barat	102.7	1,237.7	682.9	283.8	-	-	2,307.1	177.3	2,484.4	-	-	1.7	66.5	-	
18	Kalimantan Selatan	285.9	131.7	-	-	-	-	417.6	-	417.6	-	-	-	-	-	
19	Kalimantan Tengah	-	-	20.2	-	-	-	20.2	-	20.2	-	-	-	35.5	2.7	
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30.7	-	839.9	60.8	-	-	931.3	1,478.8	2,410.2	-	-	-	15.6	-	
21	Sulawesi Utara	260.2	28.1	151.2	99.8	-	-	539.3	159.4	698.7	-	-	-	-	-	
22	Gorontalo	360.5	-	353.2	5.4	-	-	719.1	7.4	726.5	-	-	-	-	-	
23	Sulawesi Tengah	400.9	1,680.3	6,277.6	1,086.1	281.3	-	9,726.1	817.2	10,543.3	-	-	-	-	-	
24	Sulawesi Tenggara	-	858.8	604.0	20.9	-	-	1,483.8	-	1,483.8	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Barat	74.3	68.1	72.1	6.9	-	-	221.5	-	221.5	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Selatan	-	2,627.4	694.7	-	-	-	3,322.1	291.1	3,613.2	-	-	-	-	-	
27	Bali	30.4	166.2	0.002	0.1	-	-	196.7	251.8	448.5	-	-	-	-	-	
28	Nusa Tenggara Barat	269.4	1,333.3	333.2	376.0	-	-	2,311.9	657.7	2,969.7	-	-	-	-	-	
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Maluku Utara	-	-	914.6	17.5	-	-	932.0	-	932.0	-	-	-	38.1	-	
31	Maluku	-	21.1	1,998.2	398.2	1,060.5	-	3,477.9	3.9	3,481.8	-	-	-	5.0	-	
32	Papua	-	522.1	198.7	33.7	-	-	754.4	1,913.9	2,668.3	64.2	-	451.4	-	-	
33	Papua Barat	-	158.7	93.9	19.0	1,671.4	-	1,943.0	146.9	2,089.9	128.1	-	33.7	16.9	92.9	
Indonesia		11,104.4	13,576.2	15,646.4	4,644.9	3,533.2	48,505.1	8,360.2	56,865.3	11,543.3	-	3,137.8	258.2	421.6	-	

Kat. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Lpulan Tahun 2015 dan 2016, Direktorat Jenderal Peralihan dan Tata Lingkungan

No.	Provinsi	Hutan Mangrove Primer												
		Deforestasi Dalam Kawasan Hutan						Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan						
		Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)		
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Aceh	79.5	-	79.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	-	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Riau	202.8	76.0	278.8	-	-	19.4	-	-	19.4	6.0	25.4	-	
4	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	38.1	-	
5	Jambi	13.893.1	353.4	14.246.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sumatera Selatan	-	-	-	27.9	16.0	-	-	-	-	80.2	124.2	-	
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	178.0	178.0	5.1	250.2	-	163.1	-	418.4	327.5	745.9	-	
8	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	233.2	52.4	285.6	4.3	77.7	115.5	33.1	31.4	262.0	97.4	359.5	-	
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Kalimantan Barat	68.2	145.8	214.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kalimantan Selatan	-	-	-	75.7	-	-	-	-	75.7	82.5	158.3	-	
19	Kalimantan Tengah	38.2	-	38.2	-	-	-	-	-	92.1	-	92.1	-	
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	156	316.4	332.0	-	-	-	32.5	-	32.5	163.4	195.9	-	
21	Sulawesi Utara	-	-	-	-	18.8	-	-	-	18.8	50.5	69.3	-	
22	Gorontalo	-	-	-	-	53.8	-	-	-	53.8	58.0	111.8	-	
23	Sulawesi Tengah	-	-	-	23.5	-	-	-	-	23.5	237.9	261.4	-	
24	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Bali	-	-	-	18.8	-	-	-	-	-	187.6	187.6	-	
28	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	49.3	172.9	87.3	-	-	18.8	-	18.8	-	
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	309.5	404.2	713.7	-	
30	Maluku Utara	38.1	-	38.1	-	187.1	-	-	0.9	187.9	379.4	567.3	-	
31	Maluku	5.0	21.4	26.4	-	-	-	-	192.3	192.3	16.8	209.1	-	
32	Papua	515.6	802.8	1,318.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua Barat	271.5	100.6	372.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indonesia		15,360.9	2,053.8	17,414.7	204.7	776.5	222.2	228.7	316.6	1,748.6	2,129.8	3,878.5	-	

No.	Provinsi	Hutan Lahan Kering Sekunder										Hutan Sekunder				
		Hutan Lahan Kering Sekunder										Hutan Rawa Sekunder				
		Deforestasi Dalam Kawasan Hutan										Deforestasi Dalam Kawasan Hutan				
		Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	Aceh	322.4	3,559.8	854.5	4,833.2	54.7	9,624.6	8,017.6	17,642.2	704.4	49.1	-	8.8	-		
2	Sumatera Utara	-47.7	1,303.1	2,547.1	894.2	256.9	4,953.6	1,023.1	5,976.7	-	-	188.9	49.4	-		
3	Riau	1,503.0	2,215.7	3,226.1	252.8	815.0	8,012.6	991.2	9,003.8	437.6	-32.1	1,490.2	3,788.9	1,407.8		
4	Sumatera Barat	91.2	-2,183.8	3,750.8	1,546.9	2,243.2	5,448.3	-1,053.2	4,395.1	-	194.7	-	174.8	296.9		
5	Jambi	815.9	-685.8	7,659.1	8,182.9	6.2	15,978.2	-1,149.9	14,828.3	2.7	1,164.2	-139.3	732.8	-		
6	Sumatera Selatan	1,361.4	2,425.9	6,342.1	1,014.0	-	11,143.4	690.9	11,834.3	550.2	217.3	-	1,066.1	-		
7	Kepulauan Bangka Belitung	3.5	-85.9	-	110.8	-	28.4	331.4	359.9	129.0	110.7	-	245.9	-		
8	Bengkulu	-1,995.5	-673.8	2,539.6	201.5	-22.1	49.7	85.2	134.9	-	-	-	-	-		
9	Lampung	-130.5	-11.6	201.3	-	-	59.2	52.9	112.1	562.2	-	-	-	-		
10	Kepulauan Riau	6.6	-1,167.6	2,107.6	519.8	-105.4	1,361.0	-1,190.9	170.1	-	-	-80.6	753.7	283.9		
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Kalimantan Barat	609.1	5,403.1	14,568.1	7,780.6	69.4	28,430.2	17,064.6	45,494.7	2,069.6	5,455.6	889.0	16,303.9	4,185.2		
18	Kalimantan Selatan	767.6	9,235.4	1,091.6	7,636.5	-	18,731.1	2,054.5	20,785.6	64.8	-	-	271.5	2,520.5		
19	Kalimantan Tengah	-226.0	193.0	4,247.2	12,250.6	7,891.9	24,356.7	2,326.8	26,683.5	17,784.5	4,290.4	989.9	20,670.0	21,278.3		
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	2,750.6	3,572.8	8,378.6	37,927.1	690.2	53,319.4	43,345.6	96,665.0	-	-	-	1,759.2	1.7		
21	Sulawesi Utara	396.3	52.1	505.1	337.3	2.3	1,293.2	314.3	1,607.5	-	-	-	-	-		
22	Gorontalo	133.3	53.8	440.2	226.8	-229.6	624.4	-82.6	541.8	-	-	-	-	-		
23	Sulawesi Tengah	280.4	1,623.4	2,677.6	1,109.0	634.2	6,324.7	7,821.0	14,145.7	-	-14.8	-	-	-		
24	Sulawesi Tenggara	362.8	-155.8	5,150.4	4,356.8	1,093.9	10,808.1	2,924.5	13,732.6	-	-	-	-	-		
25	Sulawesi Barat	73.6	2,269.0	2,904.4	1,404.6	387.4	7,039.0	1,846.4	8,885.4	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Selatan	1,334.6	14,214.0	3,423.7	1,150.1	19.6	20,142.0	3,309.4	23,451.4	10.4	-	-	-	-		
27	Bali	228.8	2,713.0	265.9	42.8	-	3,250.5	3,004.5	6,255.0	-	-	-	-	-		
28	Nusa Tenggara Barat	1,193.9	3,076.8	2,640.0	2,647.7	-	9,558.5	7,496.6	17,055.1	-	-	-	-	-		
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Maluku Utara	254.2	4,493.5	5,801.8	4,113.5	6,706.4	21,369.4	2,622.9	23,992.3	-	-	-	-	-		
31	Maluku	51.8	-1,249.7	2,061.7	1,416.6	2,018.6	4,299.0	-210.3	4,088.7	-	-	-	-	-		
32	Papua	-	186.7	82.1	143.1	85.4	497.5	1,740.6	2,238.0	-	-	317.1	-	32.6		
33	Papua Barat	-	-	108.4	1,941.8	1,829.0	3,879.2	3,872.0	7,751.2	-	7.9	-	-	-		
	Indonesia	10,141.5	50,377.2	83,574.9	102,041.1	24,447.3	270,582.0	107,249.0	377,831.0	22,305.5	11,443.0	3,655.2	45,825.0	30,006.9		

No.	Provinsi	Hutan Mangrove Sekunder												
		Deforestasi Dalam Kawasan Hutan											Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan	
		Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)		Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah (Ha)	Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)			
			(Ha)	(Ha)							(Ha)	(Ha)		
1	2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
1	Aceh	762.3	1,990.2	2,752.5	-	224.7	-	41.0	-	265.7	466.4	732.1		
2	Sumatera Utara	238.3	404.6	642.9	42.8	-65.8	-	79.5	-	56.5	-9.7	46.7		
3	Riau	7,092.3	2,436.5	9,528.8	-	143.7	-23.7	-22.4	432.4	529.9	434.9	964.9		
4	Sumatera Barat	666.5	160.2	826.7	-	-	-	24.0	-	24.0	14.8	38.8		
5	Jambi	1,760.4	742.1	2,502.4	29.1	0.0	37.8	10.3	16.2	93.4	-202.3	-108.9		
6	Sumatera Selatan	1,833.6	537.1	2,370.7	-619.2	722.6	-	1.7	-	105.0	466.5	571.6		
7	Kepulauan Bangka Belitung	485.6	537.3	1,023.0	-56.6	-694.3	-	163.2	-	-587.6	-26.8	-614.5		
8	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Lampung	552.2	-124.9	427.2	-60.4	-	-	-18.6	-	-79.0	-438.8	-517.8		
10	Kepulauan Riau	957.0	-1,154.0	-197.0	400.6	-317.5	-525.7	260.5	-70.3	-252.5	-44.3	-296.8		
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Kalimantan Barat	28,903.3	45,728.4	74,631.7	12.9	238.0	208.0	20.6	-	479.4	1,352.4	1,831.8		
18	Kalimantan Selatan	2,856.8	785.3	3,642.0	1,091.2	-	-	200.4	22.5	1,314.2	1,661.1	2,975.3		
19	Kalimantan Tengah	65,013.2	6,507.2	71,520.4	46.3	0.3	-	-909.0	-131.1	-993.5	-220.3	-1,213.9		
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1,760.9	4,320.9	6,081.8	277.7	-	-	3,605.9	5.2	3,888.8	2,534.0	6,422.8		
21	Sulawesi Utara	-	-	-	4.4	-17.1	-	-	-	-12.7	-10.2	-22.9		
22	Gorontalo	-	-	-	264.3	442.5	-	-	-	706.8	185.0	891.7		
23	Sulawesi Tengah	-14.8	635.2	620.4	-	-23.1	-	-	-	-23.1	460.7	437.6		
24	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	107.2	-	-	-	107.2	41.6	148.8		
25	Sulawesi Barat	-	128.8	128.8	-	-76.3	5.7	-	99.5	29.0	260.0	289.0		
26	Sulawesi Selatan	10.4	0.2	10.6	-	800.5	463.8	-	-	1,264.3	1,364.8	2,629.1		
27	Bali	-	-	-	95.6	-	1.5	-	-	97.1	39.7	136.8		
28	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	96.4	41.4	134.7	6.0	-	278.6	1,088.4	1,367.0		
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Maluku Utara	-	-	-	-	199.4	-	-	3.6	203.0	59.4	262.4		
31	Maluku	-	56.6	56.6	-	-152.9	-	1,638.0	-2,640.5	-1,155.4	208.2	-947.2		
32	Papua	349.7	155.2	504.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Papua Barat	7.9	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Indonesia	113,235.6	63,846.8	177,082.4	1,625.0	1,573.2	302.1	5,101.0	-2,262	6,338.9	9,685.5	16,024.4		

No.	Provinsi	Hutan Tanaman									
		Deforestasi Dalam Kawasan Hutan						Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Ha)	Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)		
		Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Tertabas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah (Ha)				
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58		
1	Aceh	110.7	90.3	-36.9	49.2	26.4	239.6	72.0	311.6		
2	Sumatera Utara	-	822.9	277.7	689.8	-	1,790.3	332.3	2,122.7		
3	Riau	53.3	9.7	876.6	128.4	609.6	1,677.6	1,849.8	3,527.4		
4	Sumatera Barat	-	4.8	-135.5	-1,601.0	500.9	-1,230.7	11.1	-1,219.6		
5	Jambi	-	-25.8	-1,188.7	-15,926.3	-0.4	-17,141.2	-1,271.3	-18,412.5		
6	Sumatera Selatan	198.4	-	442.4	-11,460.4	-17.3	-10,836.9	-569.9	-11,406.8		
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Bengkulu	131.4	-	-	-	-	131.4	188.4	319.9		
9	Lampung	-	-	-	26.7	-	26.7	340.3	366.9		
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Kalimantan Barat	-	-	-	-41.9	-	-41.9	341.2	299.3		
18	Kalimantan Selatan	-636.3	306.2	-	2,037.1	1,078.1	2,785.2	2,361.1	5,146.4		
19	Kalimantan Tengah	-	-	541.3	-469.4	217.5	289.4	699.3	988.6		
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	627.8	-3,417.8	-5.6	-2,795.6	-102.3	-2,897.9		
21	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Gorontalo	-	-	-29.3	-	-	-29.3	-	-29.3		
23	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	9.1	9.1	71.1	80.2		
24	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Bali	10.4	84.6	350.6	87.4	-	532.9	63.5	45.4	45.4	
28	Nusa Tenggara Barat	35.3	7.1	-	61.0	-	103.4	153.5	596.4	256.8	
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-14.9	-	-14.9	-	-	-14.9	
32	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indonesia	-96.8	1,299.8	1,725.8	-29,852.1	2,418.4	-24,504.9	4,585.4	-19,919.5	-19,919.5	

Tabel 1.48. Jumlah Satuan dan Luas Ekoregion Pulau

No.	Pulau	Nama Kelas	Kode	Luas Area (Km²)
1	Sumatera	3	4	5
1		1 Dataran Pantai Timur Sumatera & Dataran Pantai Barat Sumatera	M	7,234.51
		2 Dataran Gambut Sumatera	O1	74,591.63
		3 Dataran Fluvial Sumatera	F	82,957.24
		4 Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	D3	17,686.47
		5 Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	S32	46,117.95
		6 Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V3	42,224.88
		7 Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D2	1,200.96
		8 Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan, Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau	S23	94,312.69
		9 Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		17,828.19
		10 Pegunungan Jalur Bukit Barisan		78,029.39
		11 Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		11,345.90
		Jumlah Sumatera		473,529.81
2	Jawa		M1 & M2	2,448.11
		1 Dataran Pantai Utara Jawa & Dataran Pantai Selatan Jawa	F	21,519.82
		2 Dataran Fluvial Jawa	O2	156.84
		3 Dataran Organik/Koral Jawa		20,506.47
		4 Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	S31 & S32	12,079.49
		5 Dataran Struktural Blok Selatan Jawa & Dataran Struktural Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	K1	5,196.36
		6 Perbukitan Karst Jalur Pangandaran-Karangbolong-Gunung Sewu-Blambangan & Perbukitan Karst Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	D2	531.69
		7 Perbukitan Denudasional Jawa	V2	21,650.09
		8 Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	S21	30,182.14
		9 Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa	V1	13,458.43
		10 Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	S11 & S12	4,548.56
		11 Pegunungan Struktural Blok Selatan Jawa & Pegunungan Struktural Jalur Bogor-kendeng-Rembang		132,278.00
		Jumlah Jawa		12,706.06
3	Kalimantan		M	95,688.99
		1 Dataran Pantai Kalimantan	F	44,558.06
		2 Dataran Fluvial Kalimantan	O1	38,685.40
		3 Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam	S3	9,811.23
		4 Dataran Struktural Kompleks Meratus	K2	27,617.29
		5 Perbukitan Karst Kalimantan	D2	144,914.56
		6 Perbukitan Denudasional Kalimantan	S2	7,901.34
		7 Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	D1	147,986.23
		8 Pegunungan Denudasional Kalimantan	S1	3,790.16
		9 Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan	V1	533,659.32
		Jumlah Kalimantan		67.73
4	Bali & Nusa Tenggara		M	3,582.99
		1 Dataran Pantai Bali Nusa Tenggara	F	4,111.46
		2 Dataran Fluvial Bali Nusa Tenggara	O2	1,045.82
		3 Dataran Organik/Koral Bali Nusa Tenggara	V3	3,385.91
		4 Dataran Vulkanik Bali Nusa Tenggara	K2	3,889.32
		5 Perbukitan Karst Bali Nusa Tenggara		
		6 Perbukitan Struktural Bali Nusa Tenggara	S2	

No.	Pulau	Nama Kelas	Kode	Luas Area (km²)		
1	2		4	5		
		7 Perbukitan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D2	4,603.57		
		8 Perbukitan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V2	4,836.78		
		9 Pegunungan Struktural Bali Nusa Tenggara	S1	18,407.04		
		10 Pegunungan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D1	8,279.94		
		11 Pegunungan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V1	19,476.15		
5	Sulawesi	Jumlah Bali & Nusa Tenggara			71,686.71	
		1 Dataran Pantai Sulawesi	M	2,359.53		
		2 Dataran Fluvial Sulawesi	F	21,413.52		
		3 Dataran Organik/Koral Sulawesi	O1	974.29		
		4 Dataran Struktural Sulawesi	S3	100.60		
		5 Dataran Vulkanik Kompleks Manado	V1	337.02		
		6 Perbukitan Denudasional Sulawesi	D2	1,648.04		
		7 Perbukitan Karst Sulawesi	K2	14,165.73		
		8 Perbukitan Struktural Sulawesi	S2	36,479.26		
		9 Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V21 & V22	3,855.74		
		10 Pegunungan Struktural Sulawesi	S1	99,831.95		
		11 Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V11 & V12	3,815.64		
6	Maluku	Jumlah Sulawesi			184,981.32	
		1 Dataran Pantai Maluku	M	2,284.96		
		2 Dataran Fluvial Maluku	F	5,032.38		
		3 Dataran Karst Maluku	K3	1,061.99		
		4 Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S32	1,334.64		
		5 Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	V31	74.18		
		6 Perbukitan Karst Maluku	K2	17,383.02		
		7 Perbukitan Denudasional Maluku	D2	2,938.27		
		8 Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera & Kepulauan Sula-Buru-Seram	S21 & S22	10,185.82		
		9 Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama dan Kompleks Banda	V21 & V22	4,726.49		
		10 Pegunungan Denudasional Maluku	D1	5,001.07		
		11 Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera & Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S11 & S12	26,710.88		
12 Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	V1	1,058.57				
7	Papua	Jumlah Maluku			77,792.27	
		1 Dataran Fluvial Utara Papua, Barat Papua & Selatan Papua	M1, M2 & M3	119,990.48		
		2 Dataran Fluvial Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni dan Nabire-Sarmi	F1, F2, F3 & F4	36,398.10		
		3 Dataran Gambut Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni & Nabire-Sarmi	G1, G2, G3 & G4	35,394.06		
		4 Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	O2	497.18		
		5 Dataran Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S31 & S32	12,664.30		
		6 Perbukitan Karst Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	K	31,125.74		
		7 Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	S21 & S22	51,114.53		
		8 Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S11 & S12	121,072.33		
		9 Pegunungan Glisial	G	3,306.58		
		Jumlah Papua			411,563.30	
		Jumlah Keseluruhan				1,885,490.73

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.49. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.		Jenis Dokumen Kajian Llingkungan Hidup Strategis	Kajian Llingkungan Hidup Strategis																	
			Tahun 2015					Jumlah	Tahun 2016					Jumlah	Total s.d. Desember 2016					Jumlah
			Hirarki				Kota		Hirarki				Kota		Hirarki				Kota	
			Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota	Nasional		Provinsi	Kabupaten	Kota	Nasional	Provinsi		Kabupaten
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Review Kajian Llingkungan Hidup Strategis																			
1	RPJMP										2				2		2			
2	RPJMD			1	1	2			4	28	3	35	-	4	29	4	37			
3	KRP					-						-		-	-	-	-			
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			3		3			2	16	2	20	-	2	19	2	23			
5	Rencana Rinci (RDTR)			3		3					6	6	-	-	3	6	9			
6	Kawasan Strategis Nasional					-						-	-	-	-	-	-			
7	Kawasan Strategis Provinsi		1			1			4			4	-	5	-	-	5			
8	Kawasan Strategis Kabupaten					-						-	-	-	-	-	-			
9	Kawasan Strategis Kota					-						-	-	-	-	-	-			
10	Kawasan Ekonomi Khusus					-						-	-	-	-	-	-			
11	Laut Nasional					-						-	-	-	-	-	-			
12	Zonasi					-						-	-	-	-	-	-			
13	Reklamasi					-						-	-	-	-	-	-			
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutar					-						-	-	-	-	-	-			
	Jumlah I	-	1	7	1	9	-	10	46	11	67	-	11	53	12	76				
II	Bimbingan Teknis Kajian Llingkungan Hidup Strategis																			
1	RPJMP					-						-	-	-	-	-	-			
2	RPJMD			1	1	2				1	1	2	-	-	2	2	4			
3	KRP		1			1			1			1	-	2	-	-	2			
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		1			1			1			1	-	2	-	-	2			
5	Rencana Rinci (RDTR)												-	-	-	-	-			
6	Kawasan Strategis Nasional					-						-	-	-	-	-	-			
7	Kawasan Strategis Provinsi					-						-	-	-	-	-	-			
8	Kawasan Strategis Kabupaten					-						-	-	-	-	-	-			
9	Kawasan Strategis Kota					-						-	-	-	-	-	-			
10	Kawasan Ekonomi Khusus					-						-	-	-	-	-	-			
11	Laut Nasional					-						-	-	-	-	-	-			
12	Zonasi		1			1			1			1	-	2	-	-	2			
13	Reklamasi					-						-	-	-	-	-	-			
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutar					-						-	-	-	-	-	-			
	Jumlah II	-	3	1	1	5	-	3	1	1	5	-	6	2	2	10				

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.50. Proporsi Indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Tahun 2016

Ekoregion	Provinsi	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (%)			Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air (%)			Jasa Ekosistem Penyedia dan Penyimpan Air Bersih (%)			Jasa Ekosistem Pegatur Iklim (%)			Jasa Ekosistem Penyedia Energi (%)			Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Terhadap Bencana (%)			Jasa Ekosistem Pendukung Sumber Daya Genetik (%)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jawa	Banten	52	22	26	18	51	32	31	24	45	12	47	41	29	29	43	27	22	51	17	59	25
	DIY	64	27	9	25	58	17	51	15	34	16	55	29	46	24	30	26	25	50	27	49	25
	DKI	80	4	17	87	13	0	0	1	99	81	15	4	62	17	22	2	78	19	87	11	2
	Jabar	43	28	28	16	52	32	25	33	41	13	45	42	31	28	41	25	24	51	17	57	26
Sumatera	Jateng	38	32	30	14	55	31	31	32	37	18	47	35	31	19	50	20	28	52	19	60	21
	Jatim	41	30	29	13	59	28	28	35	37	21	49	30	40	20	40	11	28	61	21	56	24
	NAD	84	10	6	12	32	56	84	10	6	23	22	55	13	28	60	18	79	3	6	35	59
	Sumsut	62	29	9	17	64	19	62	29	9	42	41	18	22	52	25	28	55	17	13	57	30
	Sumbar	74	19	8	8	58	35	74	19	8	22	45	33	7	54	39	23	68	10	4	58	38
	Riau	75	22	3	17	81	2	75	22	3	37	62	0	14	51	36	17	70	12	17	69	14
	Kep. Riau	96	4	0	50	43	6	96	4	0	64	36	0	51	43	6	70	27	2	36	58	6
	Lambi	72	22	6	15	71	14	72	22	6	52	35	13	13	70	17	39	57	4	25	59	16
	Babel	51	49	0	59	41	0	51	49	0	79	21	0	78	21	0	24	71	4	78	22	0
	Bengkulu	71	24	4	13	43	44	71	24	4	17	43	40	12	44	45	24	65	11	3	54	43
	Sumsel	57	40	3	30	62	8	36	52	12	39	54	7	24	65	10	42	48	10	24	60	15
	Lampung	36	52	12	25	71	3	57	40	3	63	33	3	51	45	4	30	62	7	22	69	9
Kalimantan	Kalbar	80	19	1	10	58	32	48	34	18	19	57	24	48	34	18	22	75	3	12	53	35
	Kalsel	67	14	19	22	45	32	52	24	24	39	40	21	52	24	24	34	64	2	15	62	23
	Kalteng	82	16	2	26	31	42	56	28	16	30	45	25	56	28	16	18	74	8	13	58	29
	Kaltim	95	5	0	14	12	74	86	10	4	17	29	54	86	10	4	16	82	2	2	42	55
	Sulut	81	19	0	3	45	53	72	22	6	3	87	10	2	88	10	32	62	6	5	89	6
	Gorontalo	93	7	0	6	28	65	85	14	1	8	88	4	5	90	4	20	76	4	4	92	4
Sulawesi	Sulbar	93	6	1	11	36	52	80	14	6	12	87	0	9	90	0	15	80	5	8	91	1
	Sulteng	95	5	0	6	66	27	77	20	3	9	90	1	7	92	1	12	77	11	11	87	2
	Sulsel	77	20	3	11	68	21	65	27	8	26	73	1	9	90	2	27	70	3	9	89	2
	Sultra	18	80	1	18	75	7	58	38	4	22	77	0	18	80	1	19	58	23	23	76	2
	Bali	52	41	7	13	53	34	11	53	35	52	41	7	11	53	35	8	64	28	11	61	28
Bali Nusa	NTB	16	40	43	16	40	43	49	36	15	71	21	8	49	36	15	21	62	17	8	54	39
	NTT	89	10	1	41	32	27	72	25	3	27	49	23	72	25	3	41	46	14	30	47	22
Maluku	Maluku	90	9	1	60	0	40	52	35	13	13	55	31	13	55	31	17	58	25	17	58	25
	Malut	87	11	2	36	0	64	68	24	8	7	49	43	7	49	43	17	68	14	17	68	14
Papua	Papua Barat	87	13	0	7	36	58	39	46	15	7	66	27	7	36	58	4	58	38	4	58	38
	Papua	90	10	0	14	34	51	53	29	18	16	46	38	14	34	51	13	80	8	5	43	52

Keterangan:

Tinggi : kondisi sangat baik

Sedang : kondisi sedang

Rendah : kondisi kurang baik

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.51. Luas Wilayah Ekoregion Laut

No.	Wilayah Ekoregion	Luas (km ²)
1	2	3
1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera	782,861
2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa	655,549
3	Selat Malaka	111,343
4	Laut Natuna	360,402
5	Selat Karimata	270,859
6	Laut Jawa	437,978
7	Laut Sulawesi	323,866
8	Selat Makasar	288,005
9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara	625,018
10	Teluk Tomini	70,020
11	Laut Halmahera	451,955
12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi	160,361
13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi	169,160
14	Laut Seram dan Teluk Bintuni	140,040
15	Laut Banda	583,096
16	Samudera Pasifik sebelah Utara Papua	459,857
17	Teluk Cendrawasih	93,369
18	Laut Arafura	326,793
Jumlah		6,310,532

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 1.52. Perencanaan Ekonomi Lingkungan s.d. Desember 2016

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia												
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	Ekosistem Hutan	Taman Hutan Raya (per 22 Ha)										
		Daun Pakan Ternak	Nilai Produksi	3.581.529.620,00	Rp./Tahun	461.418,40	Rp/Ekor/Tahun	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Propinsi Lampung	Aqus Setiawan, 2000, Tesis Program Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung	Luas 22,244 Ha		
		Biomasa Kayu Bakar	Nilai Produksi	10.329.411.216,00	Rp./Tahun	91.402,63	Rp/Org/Tahun					
		Air Rumah Tangga	Nilai Produksi	487.530.594,00	Rp./Tahun	3.385,30	Rp/Org/Tahun					
		Air Sawah	Nilai Produksi	149.083.495,00	Rp./Tahun	35.420,17	Rp/Ha/Tahun					
		Perlindungan Tanaman Semusim	Nilai Produksi	381.235.682,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun					
		Perlindungan Tanaman Tahunan	Nilai Produksi	1.389.565.000,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun					
		Wisata	Nilai Produksi	9.357.513,00	Rp./Tahun	9.275,21	Rp/1000 Penduduk/Tahun					
		Total Nilai (valuasi) dari beberapa sumberdaya alam			16.327.713.120,00	Rp./Tahun						
		2	Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional	Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Hujan)	CVM (WTP)	2.469.012.192,00	Rp./Tahun	3.810.204,00	Rp./KK/Tahun		Herianto,2005, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional Gunung Halimun (Studi Kasus di desa Cisarua Kecamatan Sukajaya dan Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor)	Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Hujan)	CVM (WTP)	1.986.029.280,00	Rp./Tahun	3.064.860,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Hujan)	CVM (WTP)	1.767.873.600,00	Rp./Tahun	2.728.200,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Kemarau)	CVM (WTP)	3.259.958.400,00	Rp./Tahun	5.030.800,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Kemarau)	CVM (WTP)	2.680.096.248,00	Rp./Tahun	4.135.951,00	Rp./KK/Tahun		Tipe A = Air Mineral	Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Kemarau)	CVM (WTP)	1.856.267.280,00	Rp./Tahun	2.864.610,00	Rp./KK/Tahun		Tipe B = Air Keruh	Desa Cisarua (648 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Hujan)	CVM (WTP)	8.251.397.750,00	Rp./Tahun	4.460.215,00	Rp./KK/Tahun		Tipe C = Air Sangat Keruh	Desa Curug Bitung (1850 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Hujan)	CVM (WTP)	6.153.895.500,00	Rp./Tahun	3.326.430,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Hujan)	CVM (WTP)	4.241.565.300,00	Rp./Tahun	2.292.738,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
				Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Kemarau)	CVM (WTP)	1.007.060.265,00	Rp./Tahun	5.443.569,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
	Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Kemarau)			CVM (WTP)	7.601.681.450,00	Rp./Tahun	4.109.017,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)	
Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Kemarau)	CVM (WTP)			4.475.462.650,00	Rp./Tahun	2.419.169,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)		
Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)			10.710.914.630,00	Rp./Musim	16.302.762,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua		
Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)			11.192.321.090,00	Rp./Musim	17.035.542,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua		
Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)			4.914.524.860,00	Rp./Musim	6.921.866,00	Rp/Petani/Musim			Desa Curug Bitung		
Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)			5.591.190.360,00	Rp./Musim	7.874.916,00	Rp/Petani/Musim					
Total Nilai				78.159.250.855,00	Rp./Tahun							

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia											
No	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Valuasi Ekonomi Satwa Liar di Sekitar Hutan Nila Babi		CVM (WTP)	9,702,677.00	Rp./Tahun/KK				Dini Rahmania, 2006, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Satwa Liar Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Sekitar Hutan : Studi Kasus di Hutan Produksi PT Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah.		
			Nilai Kancil	1,029,581.00	Rp./Tahun/KK						
			Nilai Kijang	1,867,297.00	Rp./Tahun/KK						
			Nilai Rusa	8,566,929.00	Rp./Tahun/KK						
			Nilai Trenggiling	11,132,063.00	Rp./Tahun/KK						
			Total Nilai	32,298,547.00	Rp./Tahun/KK						
4	Valuasi Ekonomi Hutan Pendidikan Nila Kayu Bakar		Nilai Produksi	683,338,887.40	Rp./Tahun	1,903,450.94	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat	Emi Rosinda, 2002, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekita		
			Nilai Getah Damar	102,000,000.00	Rp./Tahun	816,000.00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan = 359 Ha	
			Nilai Bbit Alami	75,000,000.00	Rp./Tahun	600,000.00	Rp/Ha/Tahun			Luas Damar = 125 Ha	
			Nilai Pakan Ternak	229,354,144.80	Rp./Tahun	638,869.48	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Tanaman Obat	32,000,000.00	Rp./Tahun	3,200,000.00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Obat = 10 Ha	
			Nilai Tanaman Hias	30,000,000.00	Rp./Tahun	150,000.00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Hias = 200 Ha	
			Nilai Tanaman Pangan Liar	10,800,000.00	Rp./Tahun	43,200.00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Pangan Liar = 250 Ha	
			Nilai Air untuk Rumah Tangga	2,084,018,810.00	Rp./Tahun	5,805,066.32	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Air Untuk Pertanian	190,227.85	Rp./Tahun	3,111.81	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 6.1.131 Ha	
			Nilai Perladangan	1,725,407.95	Rp./Tahun	21,595.13	Rp/Ha/Tahun			Luas Ladang 79,998 Ha	
			Nilai Kesekujan	581,580,000,000.00	Rp./Tahun	1,620,000,000.00	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Serapan Karbon	3,521,014,560.00	Rp./Tahun	9,807,840.00	Rp/Ha/Tahun				
5	Valuasi Ekonomi Hutan Kota, Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan Nila Hutan Kota		Total Nilai	588,349,442,038.00	Rp./Tahun						
			Nilai Kesehatan	1,519,475,000.00	Rp./Tahun	11,255,370.37	Rp/Ha/Tahun		Asyrafy, 2008, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Valuasi Ekonomi Hutan Kota Berdasarkan Pendekatan Biaya Kesehatan (Studi Kasus Taman Margasatwa Ragunan Jakarta)		
									Luas = 135 Ha		
6	Valuasi Ekonomi Total Hutan Kayu Putih, Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa Pitu Nila Daun Kayu Putih		Total Nilai	1,519,475,000.00	Rp./Tahun						
			Nilai Produksi	757,574,000.00	Rp./Tahun	378,787.00	Rp/Ha/Tahun		Evelin Parera, 2005, Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Nilai Ekonomi Total Hutan Kayu Putih: Kasus Di Desa Pitu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	Luas 2000 Ha	
			Nilai Kayu Bakar	226,730,000.00	Rp./Tahun	113,365.00	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Air (Rumah Tangga dan Industri Kayu Putih)	2,076,970,000.00	Rp./Tahun	1,038,485.00	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Flora	4,988,000.00	Rp./Tahun	2,494.00	Rp/Ha/Tahun				
			Nilai Fauna	47,176,000.00	Rp./Tahun	23,588.00	Rp/Ha/Tahun				

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Total Nilai		6.152.388.000,00	Rp./Tahun					
7	Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	21.027.933.840,00	Rp./Tahun	19.012.598.409,49	Rp/Ha/Tahun		Erni Sisca Dewi, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara	Luas Terumbu Karang = 1,11 Ha
		Total Nilai		21.027.933.840,00	Rp./Tahun					
8	Valuasi ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi Hutan dan Lahan Studi Kasus Proyek RHL, Provinsi Di Yogyakarta	Nilai Kayu Pertukangan	Nilai Produksi	3.933.294.737,00	Rp./Tahun	3.070.487,69	Rp/Ha/Tahun		Fin Nurfatriani, 2005, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi (Hutan dan Lahan) Studi Kasus Proyek RHL Kecamatan Ngipar Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Di Yogyakarta	Luas= 1281 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	809.745.067,00	Rp./Tahun	632.199,50	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pakan Ternak	Nilai Produksi	13.129.705.023,00	Rp./Tahun	10.249.574,57	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tanaman Obat	Nilai Produksi	8.779.250,00	Rp./Tahun	2.595,88	Rp/Kg/Tahun			Total Produksi= 3382 kg
		Nilai Kayu Pulih	Nilai Produksi	734.573.861,00	Rp./Tahun	830.871,92	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Kayu Pulih= 884,1 Ha
		Nilai Air Rumah Tangga	CVM (WTP)	1.007.483.598,00	Rp./Tahun	28.745,82	Rp/Org/Tahun			
		Nilai Pencegahan Erosi	CVM (WTP)	1.228.756.480,00	Rp./Tahun	959.216,61	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Flora	CVM (WTP)	349.956.923,00	Rp./Tahun	273.190,42	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Fauna	CVM (WTP)	1.619.044.848,00	Rp./Tahun	1.263.891,37	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	73.064.742.642,00	Rp./Tahun	57.037.269,82	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		95.886.082.429,00	Rp./Tahun					
9	Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahatani Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	476.900.000,00	Rp./Tahun	50.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Sekunder 9538 Ha
		Nilai Kayu Gelondongan Campuran	Nilai Produksi	749.209.000,00	Rp./Tahun	78.549,91	Rp/Ha/Tahun		Elisa Widayana, 1999, Tesis Program Pascasarjana, Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahatani Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan	
		Nilai Durian	Nilai Produksi	1.080.000,00	Rp./Tahun	113,23	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pisang	Nilai Produksi	240.000,00	Rp./Tahun	25,16	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.296.000,00	Rp./Tahun	135,88	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pencegah Erosi	Nilai Penggantian	234.800.000,00	Rp./Tahun	24.617,32	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari biaya rehabilitasi lahan dengan Mucuna sp. yang tererosi sebanyak 15 ton/ha/thn @ Rp. 1641/Ha
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	3.815.200.000,00	Rp./Tahun	400.000,00	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari 20 ton/ha/th serasah setara dengan kompos @Rp 200/kg
		Nilai Habitat Flora dan Fauna	Nilai Barang Pengganti	7.543.500.000,00	Rp./Tahun	790.889,08	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari biaya penghijauan Rp.1,5 juta/ha dan potensi turisme 10 orang/minggu @Rp.7500

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Biodiversity		Benefit Transfer	2,324,900,000.00	Rp./Tahun	243,751.31	Rp/Ha/Tahun			Ministry of State for Population and environmental (1993) US\$ 32.5/ha/tahun
	Nilai Manfaat Kebanggaan		Nilai Barang Pengganti	1,125,000,000.00	Rp./Tahun	117,949.26	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 75 km
	Nilai Bibt Tanaman		Nilai Produksi	2,002,980,000.00	Rp./Tahun	210,000.00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Keberadaan		CVM (WTP)	32,429,200,000.00	Rp./Tahun	3,400,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		50,704,306,000.00						
B	Ekosistem Pesisir									
1	Valuasi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Pengembangan Budidaya Tambak Prov Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai	Nilai Budidaya Udang-Bandeng	Nilai Produksi	2,794,995,612.00	Rp./Tahun	8,078,022.00	Rp/Ha/Tahun		Ashar, 2007, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	
		Nilai Budidaya Rumpuk Laut	Nilai Produksi	3,929,899,451.40	Rp./Tahun	11,358,090.90	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 346 Ha
		Nilai Penangkapan Kepiting Bakau	Nilai Produksi	4,733,597,167.82	Rp./Tahun	13,680,916.67	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi	794,505,960.00	Rp./Tahun	2,296,260.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Benur	Nilai Produksi	2,416,334,250.00	Rp./Tahun	6,983,625.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Nener	Nilai Produksi	1,978,428,000.00	Rp./Tahun	5,718,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bibt Bakau	Nilai Produksi	108,125,000.00	Rp./Tahun	312,500.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	49,539,588.00	Rp./Tahun	143,178.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	49,305,000.00	Rp./Tahun	142,500.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	7,650,000,000.00	Rp./Tahun	22,109,826.59	Rp/Ha/Tahun			PT Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Waler = Rp.100000/m3, Volume bangunan 180000 m3
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	1,169,268.75	Rp./Tahun	3,379.39	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	49,312,125.00	Rp./Tahun	142,500.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9500/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	1,009,677,698.00	Rp./Tahun	2,917,722.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu	Benefit Transfer	1,358,000.00	Rp./Tahun	150,888.89	Rp/Ha/Tahun	Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali	Arief Waluyo Hadi, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai - Bali	Luas 9 ha, Santoso, Elal (1998) 12.3-26.5 m3/ha/tahun atau rata-rata 19.4 m3/ha/tahun
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	14,317,500.00	Rp./Tahun	1,590,833.33	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Arang	Nilai Produksi	15,675,000.00	Rp./Tahun	3,918,750.00	Rp/Ha/Tahun			Pengambilan Arang pada Luas Mangrove 4 Ha
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	69,534,720.00	Rp./Tahun	46,356,480.00	Rp/Ha/Tahun			Pengambilan Daun Nipah pada Luas = 1.5 Ha
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	384,181,714.00	Rp./Tahun	42,686,857.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	213,480,000.00	Rp./Tahun	23,720,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	134,736,000.00	Rp./Tahun	14,970,667.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	166,230,000.00	Rp./Tahun	20,778,750.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	22,950,000.00	Rp./Tahun	2,550,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	32,000,000.00	Rp./Tahun	21,333,333.33	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak 1.5 Ha

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	1,374,552,000.00	Rp./Tahun	152,728,000.00	Rp/Ha/Tahun			Dahuri (1995) biaya Rp. 300,000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	603,117.00	Rp./Tahun	67,013.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1,134,000.00	Rp./Tahun	126,000.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp. 8400/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	25,627,500.00	Rp./Tahun	2,847,500.00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		2,456,379,551.00	Rp./Tahun					
		Total Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan		25,564,889,120.97	Rp./Tahun					
C. Ekosistem Mangrove Sulawesi										
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Utara	Nilai Produk	Nilai Produk	30,544,200.00	Rp./Tahun	492,648.39	Rp/Ha/Tahun	Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Adnan Sjaltout Wantasen, 2002, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	
		Total Nilai Hutan Mangrove		30,544,200.00	Rp./Tahun					Luas 62 Ha, Harga Kayu Rp. 7500/M3
2	Valuasi Ekonomi Mangrove Di Provinsi Sulawesi Selatan	Budidaya Tambak Udang dan Bandeng	Nilai Produk	292,501,886.80	Rp./Tahun	8,410,060.00	Rp/Ha/Tahun		Rusdianah, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi dan Ekologi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Pesisir Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	
		Budidaya Rumput Laut	Nilai Produk	695,600,000.00	Rp./Tahun	20,000,000.00	Rp/Ha/Tahun			Luas 34,78 Ha
		Penangkapan Kepliting	Nilai Produk	486,920,000.00	Rp./Tahun	14,000,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Penangkapan Kelelawar	Nilai Produk	142,273,363.48	Rp./Tahun	4,090,666.00	Rp/Ha/Tahun			
		Kayu Bakar	Nilai Produk	4,979,730.84	Rp./Tahun	143,178.00	Rp/Ha/Tahun			
		Penahan Abrasi Pantai	Biaya Perbaikan	4,434,450,000.00	Rp./Tahun	127,500,000.00	Rp/Ha/Tahun			Harga Break Water Rp. 425000/M3 (L = 5 m, Kedalaman = 6 M, Daya Tahan 10 Tahun)
		Penyedia Pakan	Biaya Barang Pengganti	4,434,816,711.00	Rp./Tahun	127,510,543.73	Rp/Ha/Tahun			Harga Pakan Udang Rp. 1500/Kg, Kebutuhan pakan udang per Kg Udang = 1,5 Kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	4,434,450.00	Rp./Tahun	127,500.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp. 8600/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	101,478,371.00	Rp./Tahun	2,917,722.00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		10,658,592,913.12	Rp./Tahun					
3	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Tinanggea									

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	SumberReferensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	9,504,000.00	Rp./Tahun	1,441.00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Muhammed Allan, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Valuasi ekonomi Konversi Hutan Mangrove Untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Luas 6596 Ha
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	340,998,000.00	Rp./Tahun	51,695.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Rajungan	Nilai Produksi	1,795,377,400.00	Rp./Tahun	272,180.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	101,640,000.00	Rp./Tahun	15,409.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	1,747,245,000.00	Rp./Tahun	264,895.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional	Nilai Produksi	601,118,800.00	Rp./Tahun	2,051,600.00	Rp/Ha/Tahun			Luas 294 Ha Tambak Tradisional
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional Plus	Nilai Produksi	1,021,844,460.00	Rp./Tahun	7,298,889.00	Rp/Ha/Tahun			Luas 140 Ha Tambak Tradisional Plus
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Semi Intensif	Nilai Produksi	557,757,084.00	Rp./Tahun	14,677,818.00	Rp/Ha/Tahun			Luas 38 Ha Tambak Semi Intensif
		Nilai Fungsi Pencegahan Intrusi Air	Nilai Oportunitas	11,728,219,620.00	Rp./Tahun	1,778,080.60	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Unsur Hara	Benefit Transfer	5,105,007,722.00	Rp./Tahun	773,955.08	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	973,613,732.40	Rp./Tahun	147,600.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9141.57/US\$	
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Parigi Moutong	Fuel Wood	Production Value	8,793,500.00	Rp./Year	19,971.11	Rp/Ha/Year	Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central Sulawesi Province	Normawati M.Said, 2006, Thesis Post Graduate School IPB, Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central Sulawesi Province	Luas 440,311 Ha
		House Construction	Production Value	3,035,472.22	Rp./Year	6,893.93	Rp/Ha/Year			
		Nyapa-Roof	Production Value	3,079,667.00	Rp./Year	6,994.30	Rp/Ha/Year			
		Fishing material	Production Value	11,683,638.89	Rp./Year	26,534.97	Rp/Ha/Year			
		mollusk collecting	Production Value	25,012,167.00	Rp./Year	56,805.68	Rp/Ha/Year			
		Crab collecting culturing, and seeds	Production Value	230,257,833.33	Rp./Year	522,943.63	Rp/Ha/Year			
		Shrimp ponds	Production Value	1,382,741,526.33	Rp./Year	3,140,374.70	Rp/Ha/Year			
		Milkfish ponds	Production Value	3,113,128.53	Rp./Year	7,070.29	Rp/Ha/Year			
		Milkfish and shrimp ponds	Production Value	1,409,809,667.92	Rp./Year	3,201,849.76	Rp/Ha/Year			
		Bats	Production Value	708,827,500.00	Rp./Year	1,609,833.73	Rp/Ha/Year			
		Birds	Production Value	2,233,000.00	Rp./Year	5,071.42	Rp/Ha/Year			
	Breakwater	Replacement Cost	30,870,873,596.00	Rp./Year	70,111,520.26	Rp/Ha/Year			Aprilwati (2001) cost Rp.4,153,880 L = 1m, W=11m, H=2.5m, resistance=10 tahun	
	Biodiversity Value	Benefit Transfer	61,555,477.80	Rp./Year	139,800.00	Rp/Ha/Year			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9320/US\$	
	Existence Value	CVM (WTP/WTA)	7,923,840,370.95	Rp./Year	17,996,008.21	Rp/Ha/Year				
		Nilai Total		42,644,856,545.97	Rp./Year					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Donggala									

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia											
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	268.234.050,00	Rp./Tahun	1.207.500,00	Rp/Ha/Tahun		Aman Lalo, 2003, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan Pesisir Banawa Selatan Kabupaten Donggala		
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	238.578.360,00	Rp./Tahun	1.074.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 222.14 Ha	
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	177.712.000,00	Rp./Tahun	800.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	595.335.200,00	Rp./Tahun	2.680.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	2.913.844.000,00	Rp./Tahun	7.450.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak 391.12 Ha	
		Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	28.322.850.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			PT Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.10000/m3, asumsi inflasi 4.25%	
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	306.835.31	Rp./Tahun	1.381.27	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang	
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	28.322.850,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			Rullenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US\$	
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	211.391.289,61	Rp./Tahun	951.612,90	Rp/Ha/Tahun				
		Total Nilai Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan Pesisir Banawa Selatan Kabupaten Donggala				32.756.574.984,92	Rp./Tahun				
D	Ekosistem Mangrove Jawa										
	1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Subang									
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	385.952.364,00	Rp./Tahun		1.711.920,00	Rp/Ha/Tahun	Djoko Santoso, 2005, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Magrove di Kawasan Pondok Bali Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat		
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	106.362.350,10	Rp./Tahun	471.778,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Hutan Mangrove 225,45 Ha		
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	948.234.583,80	Rp./Tahun	4.205.964,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	356.583.894,30	Rp./Tahun	1.581.654,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	191.331.749,70	Rp./Tahun	848.666,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Ular	Nilai Produksi	160.781.020,20	Rp./Tahun	713.156,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Lahan Perambahan Pola Empang Parit	Nilai Produksi	174.904.239,30	Rp./Tahun	1.159.458,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Tambak Pola Empang Parit = 150,85 Ha		
		Nilai Lahan Perambahan Pola Tradisional	Nilai Produksi	454.801.888,80	Rp./Tahun	7.034.832,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Tambak Pola Tradisional = 64,65 Ha		
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	423.891.330,00	Rp./Tahun	4.153.880,00	Rp/27,5m3/tahun		Apriwati (2001) biaya Rp.4, 153.880 P = 1m, L = 11m, T=2,5m, ketahanan= 10 tahun		
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Biaya Barang Pengganti	129.137.760,00	Rp./Tahun	572.800,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Hutan Mangrove 225,45 Ha		
Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	36.789.156,00	Rp./Tahun	144.000,00	Rp/Ha/Tahun		Rullenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9600/US\$				

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Keberadaan		GVM (WTP)	980.707.500,00	Rp./Tahun	4.350.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Total Ekonomi									
				4.349.477.836,20	Rp./Tahun					
2	Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anak, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah									
	Nilai Potensi Kayu		Nilai Produksi	7.666.783.000,00	Rp./Tahun	970.000,00	Rp/Ha/Tahun		Trie Joko Paryono, 1999, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anak, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	
	Nilai Kayu Bakar		Nilai Produksi	339.807.947,00	Rp./Tahun	42.992,44	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 7903,9 Ha
	Nilai Arang		Nilai Produksi	81.270.000,00	Rp./Tahun	10.282,27	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Daun Nipah		Nilai Produksi	63.140.000,00	Rp./Tahun	9.665,70	Rp/Ha/Tahun			Luas Nipah 6532,38 Ha
	Nilai Blot Mangrove		Nilai Produksi	7.884.899.024,40	Rp./Tahun	997.596,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kepting		Nilai Produksi	213.512.760,00	Rp./Tahun	27.013,60	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pemanfaatan Udang		Nilai Produksi	1.943.223.291,00	Rp./Tahun	245.856,26	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Ikan		Nilai Produksi	2.029.646.220,00	Rp./Tahun	256.790,47	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kerang		Nilai Produksi	510.078.000,00	Rp./Tahun	64.534,98	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Burung		Nilai Produksi	40.400.000,00	Rp./Tahun	6.184,58	Rp/Ha/Tahun			Luas penangkapan Burung 6532,38 Ha
	Nilai Penangkapan Biawak		Nilai Produksi	20.854.167,00	Rp./Tahun	3.192,43	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kera		Nilai Produksi	8.100.000,00	Rp./Tahun	1.239,98	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pengambilan Kroto		Nilai Produksi	89.454.000,00	Rp./Tahun	13.693,94	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Wisata		Pengeluaran Wisatawan di Tempat	223.766.400,00	Rp./Tahun	18.508,40	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pemecah Gelombang		Nilai Penggantian	38.628.739.140,00	Rp./Tahun	3.195.101,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penyedia Pakan Alami		Nilai Barang Pengganti	903.956.462,00	Rp./Tahun	74.769,00	Rp/Ha/Tahun			Memakai harga Pupuk
	Nilai Biodiversity		Benefit Transfer	1.773.601.533,00	Rp./Tahun	146.700,00	Rp/Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9780/US\$
	Nilai Keberadaan		GVM (WTP)	43.338.056.220,00	Rp./Tahun	3.584.623,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai									
				105.759.288.164,40	Rp./Tahun					
3	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Indramayu									
	Nilai Kayu Bakar		Nilai Produksi	27.470.000.000,00	Rp./Tahun	3.423.672,00	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Mangrove di Muara Cimanuk Indramayu	Agustono, 1996, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara Cimanuk Indramayu)	Luas = 8023,55 Ha
	Nilai Tambak Tumpangseri		Nilai Produksi	10.610.000.000,00	Rp./Tahun	1.322.357,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak = 4.255 Ha
	Nilai Pemburuan dan Pemancingan		Nilai Produksi	2.440.000.000,00	Rp./Tahun	304.105,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Udang		Nilai Produksi	71.740.000.000,00	Rp./Tahun	8.941.180,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penahan Abrasi		Benefit Transfer	5.030.000.000,00	Rp./Tahun	626.904,00	Rp/Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.2300/US\$
	Total Nilai									
				117.290.000.000,00	Rp./Tahun					
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Karawang									
	Nilai Potensi Kayu		Nilai Produksi	3.554.040.000,00	Rp./Tahun	2.100.000,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Karawang, Jawa Barat		Luas Mangrove = 1692,4 Ha
	Nilai Ranting kayu		Nilai Produksi	220.012.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Tambak		Nilai Produksi	5.793.085.200,00	Rp./Tahun	3.423.000,00	Rp/Ha/Tahun			

No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	SumberReferensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Udag Alam	Nilai Produksi	1,931,451,500.00	Rp./Tahun	1,141,250.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	220,012,000.00	Rp./Tahun	130,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	132,007,200.00	Rp./Tahun	78,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan Lainnya	Nilai Produksi	686,437,440.00	Rp./Tahun	405,600.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Burung	Nilai Produksi	32,155,600.00	Rp./Tahun	19,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	6,646,208,000.00	Rp./Tahun	3,927,090.52	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 16000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp. 4,153,880 P = 1m, L = 11m, T=2.5m, keelahan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	111,207,197.82	Rp./Tahun	65,709.76	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	228,918,255.00	Rp./Tahun	135,262.50	Rp/Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9077.5US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	205,203,500.00	Rp./Tahun	121,250.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	Nilai Barang Pengganti	101,544,000.00	Rp./Tahun	60,000.00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Benih Bakau
		Total Nilai		19,862,281,892.82	Rp./Tahun					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Subang, Desa Muara Kecamatan Blanakan (dari satuan ukur Tambak Tumpangtari)	Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	384,459,075.00	Rp./Tahun	1,072,500.00	Rp/Ha/Tahun		Yuana Dwi Handayani, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemantauan Hutan Mangrove Menjadi Tambak Tumpangtari (studi Kasus: Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang	Luas Mangrove 358.47 Ha
		Nilai Ranting Kayu	Nilai Produksi	407,062,759.32	Rp./Tahun	1,135,556.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	3,548,853,000.00	Rp./Tahun	9,900,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Bandeng	Nilai Produksi	1,461,213,337.50	Rp./Tahun	4,076,250.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	1,157,947,717.50	Rp./Tahun	3,230,250.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Benur	Nilai Produksi	228,524,625.00	Rp./Tahun	637,500.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nener	Nilai Produksi	141,595,650.00	Rp./Tahun	395,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	172,065,600.00	Rp./Tahun	480,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ular	Nilai Produksi	23,659,020.00	Rp./Tahun	66,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	91,284,385.50	Rp./Tahun	254,650.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1,177,573,950.00	Rp./Tahun	3,285,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2,081,940,000.00	Rp./Tahun	5,807,850.03	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp. 4,153,880 P = 1m, L = 11m, T=2.5m, keelahan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	2,082,005,145.40	Rp./Tahun	5,808,031.76	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang Rp 2000/kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	45,570,499.00	Rp./Tahun	127,125.00	Rp/Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8450/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	571,785,147.00	Rp./Tahun	1,595,073.92	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	Nilai Barang Pengganti	1,344,262.50	Rp./Tahun	3,750.00	Rp/Ha/Tahun			Pembelian bakau
		Total Nilai		13,576,885,173.72	Rp./Tahun					
6	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Ciam									

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Penggarap Nipah	Nilai Produksi	70,000,000.00	Rp./Tahun	10,000,000.00	Rp./Ha/Tahun		Dian Suknawan, 2004, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Penilaian Ekonomi Manfaat Hutan Mangrove di Desa Karangjaladri, Kecamatan Perigi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Luas Mangrove 7 Ha
		Nilai Pemancingan Ikan	Nilai Produksi	80,640,000.00	Rp./Tahun	11,520,000.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	26,880,000.00	Rp./Tahun	3,840,000.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Vaname	Nilai Produksi	2,400,000,000.00	Rp./Tahun	800,000,000.00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Vaname 3 Ha
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	2,000,000,000.00	Rp./Tahun	1,000,000,000.00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Windu 2 Ha
		Nilai Tambak Kepiting	Nilai Produksi	45,000,000.00	Rp./Tahun	22,500,000.00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tambak Kepiting 2 Ha
		Nilai Sawah	Nilai Produksi	30,780,000.00	Rp./Tahun	12,312,000.00	Rp./Ha/Tahun			Luas Sawah 2.5 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	41,638,800.00	Rp./Tahun	5,948,400.00	Rp./Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 100 m
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	293,211.65	Rp./Tahun	41,887.38	Rp./Ha/Tahun			Apriwati (2002) biaya Rp 4,163,880 p = 1m, L = 11m, T = 2.5m, ketebanan = 10 tahun
		Nilai Penyedia Alap Rumah	Nilai Produksi	910,000.00	Rp./Tahun	130,000.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penerimaan Sewa Lahan Nipah	Nilai Produksi	15,434,300.00	Rp./Tahun	2,204,900.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	947,625.00	Rp./Tahun	135,375.00	Rp./Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9025/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	41,800,500.00	Rp./Tahun	5,971,500.00	Rp./Ha/Tahun			
		Total Nilai		47,544,324,436.65	Rp./Tahun					
7	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Muara Angke, Jakarta	Nilai Ikan Bandeng	Nilai Produksi	488,000,000.00	Rp./Tahun	7,450,382.00	Rp./Ha/Tahun		Teguh Suryono, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Penilaian Ekonomi Lingkungan Terhadap Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Pemukiman (Studi kasus di Hutan Angke Kapuk Jakarta Utara)	
		Nilai Ikan Mujair	Nilai Produksi	5,600,000.00	Rp./Tahun	89,600.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Berih Bandeng	Nilai Produksi	133,330,000.00	Rp./Tahun	2,978,776.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Cacing Laut	Nilai Produksi	87,600,000.00	Rp./Tahun	1,957,105.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Pemancingan	Nilai Produksi	4,344,000.00	Rp./Tahun	97,051.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	136,383,200.00	Rp./Tahun	2,605,965.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Pemecan Gelombang	Benefit Transfer	2,277,887,294.00	Rp./Tahun	50,891,137.00	Rp./Ha/Tahun			Panjang Pantai 5000 m, Apriwati (2001) biaya Rp 4,153,880 p = 1m, L = 11m, T = 2.5m, ketebanan = 10 tahun
		Nilai Penyeras Carbon	Benefit Transfer	103,722,011.00	Rp./Tahun	1,486,415.00	Rp./Ha/Tahun			Hilmi (2003) potensi karbon untuk Rhizophora mucronata = 3258.34 kg/ha-3957.44kg/ha
		Nilai Penjaga Sklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	8,164,026.00	Rp./Tahun	45,328.00	Rp./Ha/Tahun			

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	115,744,089.00	Rp./Tahun	642,630.00	Rp./Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9300/US\$
		Nilai Pewarisan	Nilai Produksi	35,000,000.00	Rp./Tahun	780,500.00	Rp./Ha/Tahun			Nilai dari Produksi Pembibitan Mangrove
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	791,311,418.20	Rp./Tahun	4,393,489.00	Rp./Ha/Tahun			
		Total Nilai		4,187,086,038.20	Rp./Tahun					
8	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dalam Perubahan Institusi untuk mengatasi kerusakan, Prov Jawa Barat, Kabupaten Bekasi		Nilai Produksi	212,250,835.00	Rp./Tahun	1,198,157.26	Rp./Ha/Tahun		Suhaeni, 2005, Disertasi Sekolah Pascasarjana, Perubahan Institusi untuk Mengatasi Kerusakan Hutan Mangrove (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Luas Tambak 177 Ha
		Nilai Tambak								
		Nilai Tempat Pemijahan	Nilai Produksi	1,474,215,672.00	Rp./Tahun	140,654.00	Rp./Ha/Tahun			Luas Mangrove 10481.15
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	5,111,093,898.00	Rp./Tahun	487,646.29	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Pengendali Banjir dan Badai	Nilai Kerugian Akibat Banjir	66,019,898,902.00	Rp./Tahun	6,298,917.48	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Air	Nilai Produksi	13,519,417,500.00	Rp./Tahun	1,288,879.21	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Karbon	Benefit Transfer	153,679,861,875.00	Rp./Tahun	14,862,500.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	64,702,339,991.00	Rp./Tahun	6,173,210.00	Rp./Ha/Tahun			Dahuri (1995) Penahan Abrasi Rp. US\$ 726.28/Ha/Tahun
		Nilai Konservasi	CVM (WTA)	220,256,063,307.00	Rp./Tahun	21,014,493.00	Rp./Ha/Tahun			Kesediaan Masyarakat menjual tambaknya
		Total Nilai		524,975,131,960.00	Rp./Tahun					
E	Ekosistem Mangrove Kalimantan									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kalimantan Barat, Batu Ampar Pontianak		Nilai Produksi	42,481,912,300.00	Rp./Tahun	3,056,252.68	Rp./Ha/Tahun		Salma Aprilwati, 2001, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Batu Ampar Kabupaten Pontianak	Luas = 13900 Ha
		Nilai Arang	Nilai Produksi	855,141,900.00	Rp./Tahun	61,521.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	81,330,832.00	Rp./Tahun	5,851.14	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Biji Mangrove	Nilai Produksi	79,695,300.00	Rp./Tahun	5,733.47	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1,036,258,900.00	Rp./Tahun	74,551.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	7,701,906,600.00	Rp./Tahun	554,094.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	2,091,449,600.00	Rp./Tahun	150,464.00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penahan Abrasi	Biaya Perbaikan	56,812,885,800.00	Rp./Tahun	4,087,257.97	Rp./Ha/Tahun			Pendekatan menggunakan produksi kepiting dan pakan kepiting secara alami
		Nilai Pakan Alami	Biaya Produksi	69,269,283,228.00	Rp./Tahun	4,983,401.67	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1,720,125,000.00	Rp./Tahun	123,750.00	Rp./Ha/Tahun			Rutenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8250/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	83,068,717,803.00	Rp./Tahun	5,976,166.75	Rp./Ha/Tahun			
		Total Nilai		265,198,707,263.00	Rp./Tahun					
2	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Barru		Nilai Produksi	433,337,249.90	Rp./Tahun	69,556,540.91	Rp./Ha/Tahun		Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Kecamatan Barru Kabupaten Barru	Luas Hutan Mangrove = 6.23 Ha

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Kayu Bangunan	Nilai Produksi	313,185.98	Rp./Tahun	50,270.62	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	975,004.16	Rp./Tahun	156,501.47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai bibit alam (Mener)	Nilai Produksi	1,032,004.02	Rp./Tahun	165,650.73	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	121,899,578.40	Rp./Tahun	19,566,545.49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	2,460,850.00	Rp./Tahun	395,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Bibit Bakau	Nilai Produksi	1,889,247.50	Rp./Tahun	303,250.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	8,955,765,280.00	Rp./Tahun	143,752,251.00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 2156 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L = 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	7,916,290,852.00	Rp./Tahun	23,097,576.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	870,486.75	Rp./Tahun	139,725.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9315/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP/WTA)	21,805,000.00	Rp./Tahun	3,500,000.00	Rp/Ha/Tahun			
Total Nilai				17,456,638,738.71	Rp./Tahun					
F	Hutan Mangrove Sumatera									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Bangk, Kecamatan Merawang									
		Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	14,512,095.26	Rp./Tahun	1,160,967.62	Rp/Ha/Tahun		Ferawati Maedar, 2008, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangk	Luas Mangrove = 12.50 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	28,699,499.17	Rp./Tahun	2,295,959.93	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	226,530,887.13	Rp./Tahun	18,122,470.97	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang	Nilai Produksi	343,962.77	Rp./Tahun	2.00	Rp/Ha/Tahun			Luas= 13.5 Ha
		Nilai Tambak Ikan Bandeng+Udang	Nilai Produksi	9,273,166.37	Rp./Tahun	441,579.35	Rp/Ha/Tahun			Luas= 21 Ha
		Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	285,889,510.79	Rp./Tahun	2,552,584.92	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	97,624,404,682.00	Rp./Tahun	804,419,946.30	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 23501.98 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Produksi	3,031,000,000.00	Rp./Tahun	242,480,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1,756,125.00	Rp./Tahun	140,490.00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9366/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	109,687,500.00	Rp./Tahun	8,775,000.00	Rp/Ha/Tahun			
Total Nilai				101,332,097,428.69	Rp./Tahun					
2	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Lampung, Kabupaten Lampung Timur									
		Nilai Kayu Log	Nilai Produksi	9,994,521.00	Rp./Tahun	136,900.00	Rp/Ha/Tahun		Rahadi Arnyanto, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Model Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Kabupaten Lampung Timur	Luas Mangrove = 73,006 Ha
		Nilai Kayu Bakar (Ranting)	Nilai Produksi	193,086,268.00	Rp./Tahun	2,644,799.99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	543,602,676.00	Rp./Tahun	7,446,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	431,684,478.00	Rp./Tahun	5,913,000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	465,259,937.00	Rp./Tahun	6,372,899.99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	207,948,082.00	Rp./Tahun	2,847,000.00	Rp/Ha/Tahun			

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Belut	Nilai Produksi	274.999.000.00	Rp./Tahun	3.766.799.99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ular	Nilai Produksi	399.707.850.00	Rp./Tahun	5.475.000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Burung	Nilai Produksi	97.769.635.00	Rp./Tahun	1.339.200.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Sayuran	Nilai Produksi	56.769.446.00	Rp./Tahun	777.599.73	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bahan Obat/Makanan	Nilai Produksi	525.906.021.00	Rp./Tahun	7.203.599.99	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Fungsi Biologi	Nilai Barang Pengganti	1.093.018.376.00	Rp./Tahun	14.971.623.92	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	5.999.999.600.00	Rp./Tahun	82.185.020.41	Rp/Ha/Tahun			Hasil Tangkapan Ikan Dahuri (1995) biaya Rp.3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun kurs Rupiah Rp.2800, saat penelitian Kurs Rupiah 10000 jadi biaya sebesar Rp.10714285 Panjang Pantai 5600 m
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	10.950.900.00	Rp./Tahun	150.000.00	Rp/Ha/Tahun			Rutenbeek (1992)= US\$ 1500/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.10000
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	459.937.800.00	Rp./Tahun	6.300.000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	CVM (WTP)	735.900.480.00	Rp./Tahun	10.080.000.00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			11.506.435.070.00	Rp./Tahun					
3	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Sumatera Selatan, Kecamatan Tulung Selatan	Nilai Kayu Arang	Nilai Produksi	2.015.000.00	Rp./Tahun	244.78	Rp/Ha/Tahun		Mayadi, 1998, Tesis Program Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemantauan Sumberdaya Hutan Mangrove Untuk Berbagai Macam Kegiatan Pertanian di Pesisir Pantai Timur Kecamatan Tulung Selapan Provinsi	Luas Mangrove 8232 Ha
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	1.273.800.000.00	Rp./Tahun	154.737.61	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nijah	Nilai Produksi	2.798.000.00	Rp./Tahun	339.89	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	1.868.750.000.00	Rp./Tahun	227.010.45	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepting	Nilai Produksi	10.080.000.00	Rp./Tahun	1.224.49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penjaga Skius Makanan	Nilai Barang Pengganti	28.252.224.000.00	Rp./Tahun	3.432.000.00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kompos
		Nilai Flora dan Fauna Langka	Nilai Barang Pengganti	52.000.000.00	Rp./Tahun	6.316.00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kunjungan wisatawan
		Nilai Manfaat Opsional (Option Values)	Nilai Produksi	250.000.000.00	Rp./Tahun	6.316.00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Produksi Bibit Bakau
		Nilai Kebanggaan (Bequest Values)	Nilai Barang Pengganti	800.000.000.00	Rp./Tahun	6.316.00	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 80 km
		Manfaat Keberadaan	CVM (WTP)	33.956.000.00	Rp./Tahun	6.316.00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai			32.545.623.000.00	Rp./Tahun				
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove terhadap Nilai udang di Kepulauan Riau, Pulau Belakang Kota Batam	Nilai Tegakan Pohon	Market Price	433.160.000.00	Rp./Tahun	3.920.000.00	Rp/Ha/Tahun		Peggy Ratna Marlianingrum, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Keterkaitan Sumberdaya Mangrove dan Udag di Pulau Belakang Pading Kota Batam Kepulauan Riau	Luas Mangrove 110.5 Ha
		Nilai Arang Kayu	Market Price	500.000.000.00	Rp./Tahun	4.524.886.88	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Market Price	696.150.000.00	Rp./Tahun	6.300.000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Perikanan Mangrove (penyedia umpam)	Market Price	3.488.010.000.00	Rp./Tahun	31.565.701.36	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pendidikan	Surrogate Market	10.860.000.00	Rp./Tahun	98.280.54	Rp/Ha/Tahun			

Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem Di Indonesia										
No.	Sumberdaya Alam	Variabel Ukur	Metode Pengukuran	Nilai Total	Satuan	Nilai Satuan	Satuan	Lokasi Sampel	Sumber/Referensi	Abstraksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Rekreasi	Surrogate Market	81.000.000.00	Rp./Tahun	733.031.67	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Replacement Cost	861.000.000.00	Rp./Tahun	7.791.855.20	Rp/Ha/Tahun			1 m x 10 m x 2.5 m daya tahan 10 tahun biaya Rp.4100000, panjang pantai 6.3 kilometer
		Nilai Tempat Pemijahan	Production Function Approach	318.630.000.00	Rp./Tahun	2.883.529.41	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyimpanan Karbor	Damage Avoided Cost	221.000.000.00	Rp./Tahun	2.000.000.00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	16.575.000.00	Rp./Tahun	150.000.00	Rp/Ha/Tahun			Rulienbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.10000/US\$
		Total Nilai		6.626.385.000.00	Rp./Tahun					

Sumber: Sumber: Direktorat Jenderal Pemanfaatan dan Tata Lingkungan

Sumber Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

2

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 bahwa Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

2.1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Kawasan konservasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) sampai dengan tahun 2016 adalah 27,26 juta hektar. Pada tahun 2016 ada tiga kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Maras, Taman Nasional Zamrud dan Taman Nasional Gandang Dewata. Kawasan-kawasan tersebut semula berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam.

Terkait dengan penataan pengelolaan kawasan konservasi, sampai dengan tahun 2016 terdapat 49 unit taman nasional yang sudah melakukan penataan zonasi kawasan yang disahkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal. Sedangkan kawasan konservasi non taman nasional yang telah disahkan blok pengelolaannya sebanyak 121 unit. Pada tahun 2016 telah diterbitkan surat keputusan penetapan untuk 49 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Non Taman Nasional. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai KPHK sebanyak 99 unit, yang terdiri dari 61 unit KPHK Non Taman Nasional, 38 unit KPHK Taman Nasional.

Pemanfaatan kawasan strategis terkait dengan perjanjian kerjasama dari target sebanyak dua puluh dokumen perjanjian kerjasama tahun 2016, sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis menerima sebanyak seratus empat permohonan kerjasama dan telah selesai pada tahap penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama sebanyak 38 dokumen perjanjian kerjasama atau 190% dari target.

2.2. Bidang Kawasan Konservasi

Statistik bidang kawasan konservasi tahun 2016 meliputi pemulihan ekosistem, kawasan konservasi yang mendapat pengakuan internasional, desa binaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di sekitar kawasan konservasi, taman nasional yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat terkait zona tradisional, operasionalisasi KPHK, dan perkembangan rencana pengelolaan jangka panjang di kawasan konservasi. Sesuai amanat Pasal

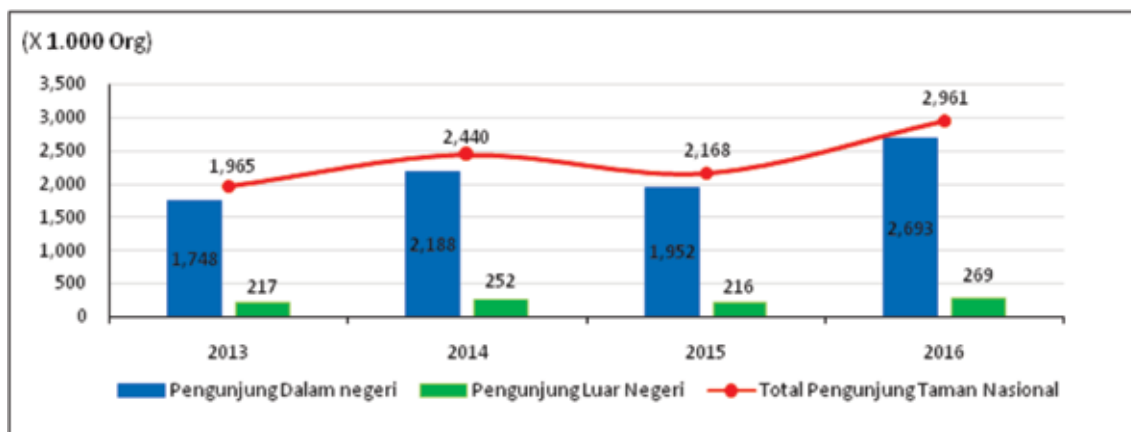
13, 25, 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), bahwa salah satu penyelenggaraan KSA dan KPA adalah pengawetan, dimana satu diantara kegiatan pengawetan adalah pemulihan ekosistem.

Pemulihan ekosistem di kawasan konservasi tahun 2016 seluas 9.225,87 ha. Beberapa kawasan konservasi di Indonesia mendapatkan pengakuan internasional diantaranya Situs Ramsar, Cagar Biosfer, Warisan Dunia, dan *ASEAN Heritage* karena memenuhi kriteria lahan basah penting di dunia. Pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi oleh masyarakat diakomodir di zona/blok tradisional. Namun demikian, pemanfaatan masyarakat terhadap zona/blok tradisional tetap harus memegang azas kelestarian, dengan menggunakan mekanisme kemitraan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Capaian tahun 2016, zona tradisional yang telah dikerjasamakan adalah seluas 3.531,89 ha pada 3 taman nasional. Ditetapkannya empat kawasan konservasi sebagai situs warisan dunia untuk memberikan kesempatan meningkatkan kesadaran publik, dan menggiatkan upaya perlindungan dan pelestarian situs-situs warisan dunia. Sampai dengan tahun 2016, Indonesia memiliki 10 cagar biosfer yang secara internasional diakui keberadaannya sebagai bagian dari Program MAB-UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Ditetapkannya empat kawasan konservasi di Indonesia menjadi *ASEAN Heritage Park* (AHP) karena memiliki nilai konservasi yang tinggi dan menggambarkan spektrum lengkap mewakili ekosistem pada negara-negara anggota ASEAN.

2.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Sampai dengan tahun 2016 terdapat sembilan belas satuan kerja yang menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) yang dikelola oleh 45 perusahaan yang tersebar di beberapa lokasi. Untuk Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) terdapat tujuh belas satuan kerja yang menerbitkan dengan jumlah pemegang izin 215 pemegang izin. Sedangkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Air terdapat dua pemegang izin, Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air terdapat tiga pemegang izin, Izin Pemanfaatan Air terdapat seratus empat pemegang izin, dan Izin Pemanfaatan Energi Air terdapat dua puluh) pemegang izin.

Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dilaksanakan pada Balai Taman Nasional Berbak dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 397.281 ton CO₂e dan Balai Taman Nasional Sebangau dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 31.797 ton CO₂e. Pada tahun 2016 terdapat 7,745,533 pengunjung dengan rincian jumlah pengunjung ke Taman Nasional 2,961,331 orang pengunjung, Taman Wisata Alam 4,779,981 orang pengunjung dan jumlah kunjungan ke Taman Buru sebesar 4,221 orang pengunjung.



Grafik 2.1. Pengunjung Taman Nasional Tahun 2013 - 2016

2.4. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kelimpahan serta jumlah jenis yang banyak dari Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia. Untuk menjaga keanekaragaman hayati pemerintah berupaya melakukan penyelamatan terhadap TSL, salah satunya dengan penangkaran. Mekanisme perijinan penangkaran TSL berdasar pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MenhutII/2005 dan P.69/Menhut-II/2013. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Izin penangkaran diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE, Kepala Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Kepala Dinas Tingkat Provinsi. Izin penangkaran dapat diberikan untuk TSL yang dilindungi maupun tidak dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999. Jumlah penangkaran pada tahun 2016 sebanyak 999 unit yang menangkarkan jenis/kelas *Anthozo*, *Crustacea*, *Aves*, Buaya, Mamalia, tumbuhan, Kuda laut, *Molusca*, Reptil/ Amfibi, *Insecta* dan *Pisces*. Pada tahun 2016, perdagangan ke luar negeri/ekspor TSL dari alam menghasilkan devisa sebesar Rp6,54 triliun. Sedangkan PNPB dari menangkap/mengambil/mengangkut TSL tahun 2016 sebesar Rp15,51 milyar.

Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *in-situ*, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2016 lembaga konservasi sebanyak 68 unit yang terdiri dari 56 izin definitif dan dua belas persetujuan prinsip, dari angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2015. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan

hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati salah satu sasaran program/indikator kinerja program adalah usaha peningkatan persentase peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas sebesar 10% pada tahun 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen. KSDAE Nomor SK.180/IV-KKH/2015, 25 spesies tersebut adalah harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani, 25 satwa tersebut terdiri dari 42 spesies.

Perhitungan persentase peningkatan populasi satwa dari target sebesar 10% dihitung pada tahun 2019 dengan laporan tahunan berupa peningkatan jumlah satwa per tahun atau implementasi dari kegiatan yang mendukung peningkatan populasi satwa. Dari 25 satwa terancam punah prioritas, berdasarkan data populasi yang diperoleh terdapat empat satwa yang mengalami peningkatan jumlah populasi yaitu orangutan, maleo, bekantan dan celepuk rinjani. Satwa dengan jumlah populasi tetap sebanyak satu satwa yaitu kanguru pohon, sedangkan yang mengalami penurunan populasi sebanyak empat satwa yaitu komodo, penyu, surili, dan banteng.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tupoksi terkait dengan *assessment* aman lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetik (PRG). PRG yang akan diedarkan/dilepaskan ke lingkungan harus melalui kajian yang dilakukan secara komprehensif dengan metode ilmiah dengan merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pada tahun 2016 terdapat lima rekomendasi hasil *Assessment* Aman Lingkungan terhadap PRG oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.5. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indonesia merupakan negara yang kaya keanekaragaman hayati, baik pada tingkat ekosistem, jenis, dan genetik. Kekayaan tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kekayaan ini perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal serta dilindungi dari kepunahan, sehingga memberikan manfaat bagi negara secara khusus dan dunia secara umum.

Keanekaragaman ekosistem Indonesia diketahui berjumlah sekitar 74 tipe yang membentuk formasi satu dengan yang lain yang sangat kompleks. Variasi ekosistem tersebut menunjukkan bahwa setiap ekosistem kaya akan kekayaan jumlah spesies flora dan fauna. Untuk melindungi keberadaan ekosistem tersebut, khususnya yang mempunyai nilai keanekaragaman tinggi, maka dilakukan penetapan kawasan konservasi, baik sebagai kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam. Namun, masih banyak ekosistem penting tersebut yang bukan merupakan KSA/KPA, yang sekarang dikenal sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Ekosistem esensial merupakan ekosistem di luar kawasan konservasi (kawasan pelestarian alam/suaka alam) yang secara ekologis penting bagi

konservasi keanekaragaman hayati. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang mendefinisikan kawasan ekosistem esensial sebagai ekosistem, kawasan atau wilayah sistem penyangga kehidupan yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis, yang terdiri atas ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut laut yang tidak lebih dari 6 meter), serta mangrove dan gambut, yang berada di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial menjadi tanggung jawab Pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian LHK.

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang meliputi perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan di daerah. Komitmen kinerja yang harus dicapai Direktorat BPÉE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BPÉE Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Direktorat BPÉE.

Untuk memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat BPÉE selama tahun 2015, maka disusun Renja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen. PHKA Nomor P.14/IV-Set/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2015.

Tabel 2.1. Daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) s/d Tahun 2016

No	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pengesahan SK Menteri			Provinsi
		Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6
KPHK Taman Nasional					
1	TN Berbak	SK.774/Menhut-II/2009	12/7/2009	62,700.00	Jambi
2	TN Gunung Halimun Salak	SK.776/Menhut-II/2009	12/7/2009	113,357.00	Banten dan Jawa Barat
3	TN Ujung Kulon	SK.775/Menhut-II/2009	12/7/2009	122,956.00	Banten
4	TN Alas Purwo	SK.801/Menhut-II/2009	12/7/2009	43,420.00	Jawa Timur
5	TN Meru Betiri	SK.779/Menhut-II/2009	12/7/2009	58,000.00	Jawa Timur
6	TN Bali Barat	SK.780/Menhut-II/2009	12/7/2009	19,002.89	Bali
7	TN Rinjani	SK.781/Menhut-II/2009	12/7/2009	41,330.00	Nusa Tenggara barat
8	TN Tanjung Putting	SK.777/Menhut-II/2009	12/7/2009	415,040.00	Kalimantan Tengah
9	TN Kutai	SK.778/Menhut-II/2009	12/7/2009	198,629.00	Kalimantan Timur
10	TN Bunaken	SK.782/Menhut-II/2009	12/7/2009	89,065.00	Sulawesi Utara
11	TN Bukit Dua Belas	SK.720/Menhut-II/2010	12/29/2010	60,500.00	Jambi
12	TN Way Kambas	SK.712/Menhut-II/2010	12/29/2010	130,000.00	Lampung
13	TN Merapi	SK.713/Menhut-II/2010	12/29/2010	6,410.00	DI. Yogyakarta dan Jateng
14	TN Baluran	SK.718/Menhut-II/2010	12/29/2010	25,000.00	Jawa Timur
15	TN Laiwangi Wanggameti	SK.714/Menhut-II/2010	12/29/2010	47,014.00	Nusat Tenggara Timur
16	TN Manupeu Tanah Daru	SK.719/Menhut-II/2010	12/29/2010	87,984.00	Nusat Tenggara Timur
17	TN Danau Sentarum	SK.715/Menhut-II/2010	12/29/2010	132,000.00	Kalimantan Barat
18	TN Gunung Palung	SK.721/Menhut-II/2010	12/29/2010	90,000.00	Kalimantan Barat
19	TN Bantimurung Bulusaraung	SK.717/Menhut-II/2010	12/29/2010	43,750.00	Sulawesi Selatan
20	TN Bogani Nani Wartabone	SK.716/Menhut-II/2010	12/29/2010	287,115.00	Sulawesi Utara dan Gorontalo
21	TN Sembilang	SK.748/Menhut-II/2011	12/30/2011	202,896.31	Sumatera Selatan
22	TN Karimun Jawa	SK.749/Menhut-II/2011	12/30/2011	111,625.00	Jawa Tengah
23	TN Merbabu	SK.751/Menhut-II/2011	12/30/2011	5,725.00	Jawa Tengah
24	TN Kelimutu	SK.754/Menhut-II/2011	12/30/2011	5,356.50	Nusa Tenggara Timur
25	TN Komodo	SK.753/Menhut-II/2011	12/30/2011	173,300.00	Nusa Tenggara Timur
26	TN Bukit Baka Bukit Raya	SK.750/Menhut-II/2011	12/30/2011	181,900.00	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
27	TN Kayan Mentarang	SK.752/Menhut-II/2011	12/30/2011	1,360,500.00	Kalimantan Timur
28	TN Rawa Aopa Watumohai	SK.755/Menhut-II/2011	12/30/2011	105,194.00	Sulawesi Tenggara
29	TN Manusela	SK.756/Menhut-II/2011	12/30/2011	189,000.00	Maluku
30	TN Aketajawe Lolobata	SK.757/Menhut-II/2011	12/30/2011	167,300.00	Maluku Utara
31	TN Bukit Tiga Puluh	SK.789/Menhut-II/2012	12/27/2012	144,223.00	Jambi dan Riau
32	TN Tesso Nilo	SK.788/Menhut-II/2012	12/27/2012	38,576.00	Riau
33	TN Siberut	SK.787/Menhut-II/2012	12/27/2012	190,500.00	Sumatera Barat
34	TN Batang Gadis	SK.786/Menhut-II/2012	12/27/2012	72,150.00	Sumatera Utara
35	TN Gunung Ciremai	SK.790/Menhut-II/2012	12/27/2012	15,500.00	Jawa Barat
36	TN Sebangau	SK.791/Menhut-II/2012	12/27/2012	568,700.00	Kalimantan Tengah
37	TN Lorentz	SK.792/Menhut-II/2012	12/27/2012	2,354,644.00	Papua
38	TN Wasur	SK.793/Menhut-II/2012	12/27/2012	413,810.00	Papua
KPHK Non Taman Nasional yang Telah Disahkan					
1	Rawa Singkil	SK.980/Menhut-II/2012	12/27/2013	102,500.00	Aceh Darussalam
2	Kerumutan	SK.981/Menhut-II/2013	12/27/2013	120,000.00	Riau
3	Arau Hilir	SK.982/Menhut-II/2013	12/27/2013	105,375.00	Sumatera Barat
4	Dangku Bentayan	SK.983/Menhut-II/2013	12/27/2013	89,574.00	Sumatera Selatan
5	Guntur-Papandayan	SK.984/Menhut-II/2013	12/27/2013	15,318.00	Jawa Barat
6	Tambora	SK.985/Menhut-II/2013	12/27/2013	78,116.00	Nusat Tenggara Barat
7	Ruteng	SK.986/Menhut-II/2013	12/27/2013	32,248.00	Nusat Tenggara Timur
8	Gunung Melintang	SK.987/Menhut-II/2013	12/27/2013	25,127.00	Kalimantan Barat
9	Nantu	SK.990/Menhut-II/2013	12/27/2013	31,215.00	Gorontalo
10	Morowali	SK.988/Menhut-II/2013	12/27/2013	209,400.00	Sulawesi Tengah
11	Towuti	SK.989/Menhut-II/2013	12/27/2013	85,000.00	Sulawesi Selatan
12	Jayawijaya	SK.991/Menhut-II/2013	12/27/2013	800,000.00	Papua

No	Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pengesahan SK Menteri			Provinsi
		Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6
13	Bukit Kaba	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	15,133.00	Bengkulu
14	Enggano	SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	9,374.00	Bengkulu
15	Bukit Rimbang Bukit Baling	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	142,156.00	Riau
16	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	99,858.00	Riau
17	Cilacap	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	982	Jawa Tengah
18	Pati Barat	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	1,426.00	Jawa Tengah
19	Bedugul Sangeh	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	3,635.00	Bali
20	Kintamani	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	2,649.00	Bali
21	Pararawen	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	5,855.00	Kalimantan Tengah
22	Lamandau	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	61,425.00	Kalimantan Tengah
23	Kuala Lupak	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	4,008.00	Kalimantan Selatan
24	Pangi Binangga	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	70,997.00	Sulawesi Tengah
25	Morowali	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	216,908.00	Sulawesi Tengah
26	Gunung Dako	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	21,659.00	Sulawesi Tengah
27	Gunung Tinombala	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	38,608.00	Sulawesi Tengah
28	Bakiriang	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	17,479.00	Sulawesi Tengah
29	Pamona	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	35,125.00	Sulawesi Tengah
30	Arfak	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	68,325.00	Papua Barat
31	Gunung Meja Sidei Kaironi	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	968	Papua Barat
32	Bolmalit-Maghlit	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	9,194.00	Papua Barat
33	Waigeo	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	264073	Papua Barat
34	Sorong Klamono	SK.455/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2	17-Jun-16	2990	Papua Barat
35	Barumun	SK.694/Menlhk/Setjen/	2-Sep-16	36,261.00	Sumatera Utara
36	Sicike-cike	SK.724/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	6144	Sumatera Utara
37	Pulau Weh	SK.746/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	6,481.30	Aceh
38	Lingga Isaq	SK.747/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	86,634.00	Aceh
39	Durian Luncuk	SK.735/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	111	Jambi
40	Hutan Bakau Pantai Timur	SK.736/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	4,872.00	Jambi
41	Padang Sugihan	SK.743/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	88,148.00	Sumatera Selatan
42	Kepulauan Krakatau	SK.732/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	13,365.00	Lampung
43	Jakarta	SK.731/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	242	DKI Jakarta
44	Simpang Tilu	SK.739/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	23,356.00	Jawa Barat
45	Burangrang Tangkuban Parahu	SK.740/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	4,772.00	Jawa Barat
46	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	632	DI Yogyakarta
47	Kawah Ijen	SK.725/ Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	2,575.00	Jawa Timur
48	Dataran Tinggi Yang	SK.726/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	12,865.00	Jawa Timur
49	Moyo	SK.741/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	30,945.00	Nusa Tenggara Barat
50	Gunung Tunak	SK.742/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	2,225.00	Nusa Tenggara Barat
51	Harlu	SK.744/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	3,681.00	Nusa Tenggara Timur
52	Gunung Mutis	SK.745/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	12,315.00	Nusa Tenggara Timur
53	Muara Kendawangan	SK.737/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	147,614.00	Kalimantan Barat
54	Gunung Nyiut	SK.738/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	91,759.00	Kalimantan Barat
55	Muara Kaman Sedulang	SK.728/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	65,445.00	Kalimantan Timur
56	Lambusango	SK.733/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	28,595.00	Sulawesi Tenggara
57	Peropa	SK.734/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	44,012.00	Sulawesi Tenggara
58	Tangkoko	SK.748/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	8,545.00	Sulawesi Utara
59	Taliabu	SK.730/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	13,114.00	Maluku Utara
60	Gunung Sahuwai	SK.729/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	32,476.00	Maluku
61	Cycloops Youtefa	SK.727/Menlhk/Setjen/	20-Sep-16	33,289.00	Papua

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.2. Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2016

No	Klasifikasi Penangkar	Jumlah Penangkar (Unit)
1	2	3
1	Anthozoa	80
2	Crustacea	3
3	Aves	276
4	Buaya	31
5	Insecta	6
6	Kuda Laut	5
7	Mamalia	376
8	Moluska	1
9	Pisces	152
10	Reptil, Amfibi, Mamalia (RAM) Pet	41
11	Tumbuhan	28
Jumlah		999

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.3. Rekapitulasi Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Prioritas Tahun 2016

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Baseline Jumlah (Ekor)	Jumlah 2016 (Ekor)
1	2	3	4	5	6	7
1	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Riau, BBTN Kerinci Seblat, BBTN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Leuser, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Jambi, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Lampung, BKSDA Bengkulu, BTN Berbak, BTN Bukit Tigapuluh, BTN Batang Gadis, BTN Way Kambas	7	71	72
2	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	BBTN Bukit Barisan Selatan BBTN Gunung Leuser BKSDA Bengkulu	3	115	75
3	Badak	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Bukit Barisan Selatan	1	12	11
		<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	BBTN Gunung Leuser	1	7	12
4	Banteng	<i>Bos javanicus</i>	BBKSDA Jawa Timur, BTN. Baluran, BTN. Alas Purwo, BTN. Meru Betiri, BTN. Ujung Kulon	8	381	313
5	Owa	<i>Hylobates moloch</i>	BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Barat, BTN. Gunung Halimun Salak	6	119	139
		<i>Hylobates agilis albibarbis</i>	BTN. Gunung Palung	1	21	26
6	Orangutan	<i>Pongo pygmaeus</i>	BKSDA Kalimantan Tengah, BTN. Kutai, BTN. Bukit Baka Bukit Raya, BBTN. Gunung Leuser	8	1,090	2,395
		<i>Pongo pygmaeus wurmbii</i>	BTN Gunung Palung	1	63	56
7	Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>	BKSDA Kalimantan Selatan, BTN. Gunung Palung, BTN. Kutai	9	837	930
8	Komodo	<i>Varanus komodoensis</i>	BTN Komodo	1	2,919	2,100
9	Jalak Bali	<i>Leucopsar rothschildi</i>	BTN Bali Barat	3	38	30
10	Maleo	<i>Macrocephalon maleo</i>	BBTN Lore Lindu, BKSDA Sulawesi Tengah	3	557	828
11	Babi Rusa	<i>Babyrousa babyrussa</i>	BBTN Lore Lindu, BKSDA Sulawesi Tengah	2	68	77
12	Elang	<i>Nisaetus bartelsi</i>	BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Gunung Ciremai, BTN Gunung Merapi	8	35	47
		<i>Nisaetus floris</i>	BTN Gunung Rinjani	3	7	15
13	Kakatua	<i>Cacatua sulphurea</i>	BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Nusa Tenggara Barat	4	160	171

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Baseline Jumlah (Ekor)	Jumlah 2016 (Ekor)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cacatua sulphurea parvula</i>	BTN Komodo, BTN Manupeu Tanadaru	7	688	719
		<i>Cacatua moluccensis</i>	BTN Manusela	2	10	15
		<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	BTN Laiwangi Wanggameti	3	36	49
14	Macan Tutul Jawa	<i>Panthera pardus melas</i>	BTN Gunung Ciremai, BTN Gunung Halimun Salak		9	13
15	Rusa Bawean	<i>Axis kuhlii</i>	BBKSDA Jawa Timur	1	275	303
16	Cendrawasih	<i>Paradisaea spp</i>	BTN Wasur	3	0	0
		<i>Paradisaea apoda</i>	BTN Wasur	2	0	16
		<i>Paradisaea minor</i>	BBKSDA papua	2	25	30
17	Surili	<i>Presbytis fredericae</i>	BTN Gunung Merbabu	2	15	11
		<i>Presbytis comata</i>	BTN Gunung Ciremai	1	169	103
18	Tarsius	<i>Tarsius fuscus</i>	BTN Bantimurung Bulusaraung	1	82	90
19	Monyet Hitam Sulawesi	<i>Macaca maura</i>	BTN Bantimurung Bulusaraung	1	31	35
20	Julang sumba	<i>Rhyticeros everetii</i>	BTN Laiwangi Wanggameti, BTN Manupeu Tanadaru	5	30	32
21	Nuri kepala Hitam	<i>Lorius domicella</i>	BTN Manusela	2	8	9
22	Penyu	<i>Eretmochelys imbricata</i>	BTN Taka Bonerate, BTN Kepulauan Seribu, BTN Karimunjawa	4	463	299
		<i>Chelonia mydas</i>	BBTN Teluk Cenderawasih, BTN Meru Betiri	2	4,091	2,535
23	Kanguru Pohon	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	BTN Lorentz	1	10	10
24	Celepuk Rinjani	<i>Otus jolanodea</i>	BTN Gunung Rinjani	1	27	260

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.4. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Air, Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Air, Izin Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan s/d Tahun 2016

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan							
		Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUEA)	Izin Pemanfaatan Air (IPA)	Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA)	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BBKSDA. Riau	1	-	-	-	-	-	-	-
2	BBKSDA. Jawa Barat	10	81	-	-	-	-	-	-
3	BBKSDA Jawa Timur	1	-	-	1	12	-	-	-
4	BBKSDA Sulawesi Selatan	-	-	-	-	3	2	-	-
5	BKSDA Aceh	-	5	-	-	-	-	-	-
6	BKSDA Sumatera Selatan	1	-	-	-	1	-	-	-
7	BKSDA DKI Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-
8	BKSDA Jawa Tengah	1	11	-	-	2	-	-	-
9	BKSDA Bali	1	-	-	-	-	-	-	-
10	BKSDA Nusa Tenggara Barat	13	-	-	-	1	-	-	-
11	BKSDA Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BKSDA Kalimantan Timur	1	-	-	-	-	-	-	-
13	BKSDA Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	-	-	-
14	BBTN Kerinci Seblat	1	-	1	1	-	-	-	-
15	BBTN Bukit Barisan Selatan	1	1	-	-	4	13	-	-
16	BBTN Gunung Gede Pangrango	-	3	-	-	18	-	-	-
17	BBTN Bromo Tengger Semeru	1	-	-	-	3	-	-	-
18	BTN Ujung Kulon	1	-	-	-	-	-	-	-
19	BTN Kepulauan Seribu	-	1	-	-	-	-	-	-
20	BTN Gunung Halimun Salak	-	1	-	-	9	3	-	1
21	BTN Gunung Ciremai	-	42	1	-	12	-	-	-
22	BTN Karimun Jawa	-	1	-	-	1	-	-	-
23	BTN Gunung Merapi	-	-	-	-	2	-	-	-
24	BTN Alas Purwo	3	9	-	-	-	-	-	-
25	BTN Baluran	-	1	-	-	-	-	-	-
26	BTN Bali Barat	3	54	-	-	-	-	-	-
27	BTN Gunung Rinjani	-	-	-	-	12	-	-	-
28	BTN Komodo	2	1	-	-	-	-	-	-
29	BTN Manupeu Tanah Daru	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BTN Laiwangi Wanggameti	-	-	-	-	2	-	-	-
31	BTN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	1	3	-	-	-
32	BTN Bantimurung Bulusaraung	-	1	-	-	4	2	-	-
33	BBTN Lore Lindu	-	-	-	-	6	-	-	-
34	BTN Rawa Aopa Watumohai	-	-	-	-	4	-	-	-
35	BTN Gunung Palung	-	1	-	-	1	-	-	-
36	BTN Wakatobi	-	1	-	-	-	-	-	-
37	BTN Kelimutu	-	1	-	-	-	-	-	-
38	BTN Gn. Merbabu	1	-	-	-	2	-	-	-
39	BTN. Bunaken	1	-	-	-	-	-	-	-
40	BTN Aketajawe Lolobata	-	-	-	-	1	-	-	-
41	BTN Bukit 30	-	-	-	-	1	-	-	-
Total Jumlah Izin		45	215	2	3	104	20	0	1

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.5. Potensi Jasa Lingkungan Karbon Tahun 2016

No.	Nama Satuan Kerja	Nama Blok / Zona	Luas Blok/Zona (Ha)	Rerata Tahunan Penurunan Emisi GRK (TonCO ₂ e)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	BTN Berbak	TN Berbak	142,750	397,281	Kerjasama dengan Dinas Kehutanan Jambi - The Zoological Society of London (ZSL) Nomor : SP.427/BTNB-1/2011 dan Nomor : 26/BGR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, masa berlaku 4 tahun (2011-2014). Persetujuan DA REDD+ TN Berbak telah terbit melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.549/Menhut-II/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Persetujuan DA REDD+ pada Taman Nasional Berbak seluas ±142.750 Ha. Perpanjangan kerjasama MoU TN Berbak, Dishut Prov Jambi dan ZSL Nomor : PKS 01/BTNB-1/2015, Nomor : S.2923/Dishut-2.3/VI-2015, dan Nomor : 2014/BGR/VII-2015 Tanggal 17 Juni 2015. Program REDD+ Berbasis Lansekap Berbak Untuk Konservasi Habitat Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), masa berlaku 3 tahun (2015-2018)
2	BTN Sebangau	Rimba, Khusus dan Pemanfaatan	74,167	31,797	Luas Da REDD+ TN Sebangau sesuai SK.831/Menhut-II/2013 adalah 74.167. Lokasi karbon yang di hitung adalah 40.239 Ha

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE),

Tabel 2.6. Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi Tahun 2016

Jenis Kunjungan	Asal	TN	TWA	TB	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Penelitian & Pengembangan	DN	1,868	277	197	2,342
	LN	94	0	0	94
Rekreasi	DN	2,238,967	4,458,474	3,288	6,700,729
	LN	254,724	176,336	78	431,138
Pendidikan/Ilmu Pengetahuan	DN	23,267	839	658	24,764
	LN	66	1,401	0	1,467
Berkemah	DN	316,615	6,373	0	322,988
	LN	5,967	0	0	5,967
Lain-Lain	DN	112,011	135,776	0	247,787
	LN	7,752	505	0	8,257
JUMLAH	DN	2,692,728	4,601,739	4,143	7,298,610
	LN	268,603	178,242	78	446,923
	TOTAL	2,961,331	4,779,981	4,221	7,745,533

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.7. Jumlah Koleksi Spesies Kawasan Ekosistem Esensial di Taman Kehati s/d Tahun 2016

No	Nama Kabupaten / Provinsi	Nama Kawasan Ekonomi Esensial (KEE)	Jumlah Spesies
1	2	3	4
1	Taman Kehati Provinsi Sumatera Barat	Taman Kehati Provinsi Sumatera Barat	62
2	Taman Kehati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Taman Kehati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18
3	Taman Kehati Kabupaten Lampung Barat	Taman Kehati Kabupaten Lampung Barat	7
4	Taman Kehati Provinsi Jawa Barat	Taman Kehati Provinsi Jawa Barat	12
5	Taman Kehati Kabupaten Kuningan	Taman Kehati Kabupaten Kuningan	17
6	Taman Kehati Kabupaten Sumedang	Taman Kehati Kabupaten Sumedang	3
7	Taman Kehati Daerah Istimewa Yogyakarta	Taman Kehati Daerah Istimewa Yogyakarta	13
8	Taman Kehati Kabupaten Jombang	Taman Kehati Kabupaten Jombang	12
9	Taman Kehati Kota Banjarbaru	Taman Kehati Kota Banjarbaru	14
10	Taman Kehati Kabupaten Sekadau	Taman Kehati Kabupaten Sekadau	22
11	Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	Taman Kehati Badegung	32
12	Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tanan Kehati Pelawan	2
13	Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	Taman Kehati Puti Saloati	24
14	Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah	Taman Kehati Kokolomboi	9
15	Universitasi Tadulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Taman Kehati Universitas Tadulako	-
16	Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	Taman Kehati Ponorogo	45
Jumlah			292

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Tabel 2.8. Jenis Tumbuhan Penting di 6 (Enam) Lokasi Taman Kehati

No.	Nama Jenis	Suku	Jenis Tumbuhan Penting di 6 Lokasi Kehati				
			Muara Enim	Bangka Tengah	Kota Solok	Banggai Kepulauan	Kab. Ponorogo
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Acacia denticulosa</i>	Fabaceae			√		
2.	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.	Apocynaceae	√				√
3	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae			√		
4	<i>Annona reticulata</i>	Annonaceae					√
5	<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae	√				√
6	<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq.	Rubiaceae	√				
7	<i>Antidesma bunius</i>	Euphorbiaceae	√				
8	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Fabaceae			√		
9	<i>Artocarpus champeden</i> Merr.	Moraceae	√				
10	<i>Artocarpus communis</i>	Moraceae			√		
11	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae					√
12	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lamk.	Thymelaeaceae	√				
13	<i>Averrhoa bilimbi</i>	Oxalidaceae			√		
14	<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae			√		
15	<i>Baccaurea acemose</i> (Reinw.ex Blume) Mull. Arg	Euphorbiaceae	√				
16	<i>Barringtonia asiatica</i>	Lecythidaceae					√
17	<i>Bauhinia tomentosa</i>	Fabaceae					√
18	<i>Bombax ceiba</i>	Bombacaceae					√
19	<i>Callophyllum inophyllum</i>	Guttiferae					√
20	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f.& Thomson	Annonaceae					√
21	<i>Canarium commune</i> Linn.	Burseraceae	√				
22	<i>Capparis zeylanica</i> L.	Capparaceae			√		
23	<i>Cassia siamena</i>	Fabaceae					√
24	<i>Castanopsis sp.</i>	Caesalpiniaceae				√	
25	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae					√
26	<i>Ceiba pentandra</i>	Bombacaceae					√
27	<i>Cerbera manghas</i>	Apocynaceae					√
28	<i>Cinnamomum sp.</i>	Lauraceae				√	
29	<i>Citrus sp</i>	Rutaceae			√		√
30	<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae			√		
31	<i>Citrus x hystrix</i>	Rutaceae			√		
32	<i>Citrofortunella microcarpa</i>	Rutaceae			√		
33	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae			√		√
34	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniaceae					√
35	<i>Cyclea barbata</i>	Menispermaceae					√
36	<i>Dalbergia sp.</i>	Fabaceae				√	
37	<i>Dimocarpus longan</i>	Sapindaceae			√		
38	<i>Diospyros blancoi</i> A.DC	Ebenaceae					√
39	<i>Diospyros celebica</i> Bakh.	Ebenaceae				√	
40	<i>Dipterocarpus hasseltii</i> Blume	Dipterocarpaceae	√				
41	<i>Dyera costulata</i>	Apocynaceae	√				
42	<i>Elaeocarpus sphaericus</i> K. Schum	Elaeocarpaceae	√				
43	<i>Euphoria longan</i>	Sapindaceae					√
44	<i>Euphoria malajensis</i> (Griff.) Radlk.	Sapindaceae	√				
45	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb	Loganiaceae	√				
46	<i>Ficus benamina</i> L.	Moraceae	√				
47	<i>Flacourtia inermis</i> Roxb.	Flacoutiaceae	√				
48	<i>Flacourtia rukam</i> Z. & M.	Flacoutiaceae	√				
49	<i>Garcinia mangostana</i>	Clusiaceae			√		
50	<i>Gnetum gnemon</i> LINN	Gnetaceae	√				

No.	Nama Jenis	Suku	Muara Enim	Bangka Tengah	Kota Solok	Banggai Kepulauan	Kab. Ponorogo
1	2	3	4	5	6	7	8
51	<i>Hopea mangarawan</i> Miq	Dipterocarpaceae	√				
52	<i>Instia palembanica</i> Miq	Fabaceae	√				
53	<i>Lagersroemia mbellat</i> (L.) Pers.	Lythraceae					√
54	<i>Lansium domesticum</i> Corr.	Meliaceae	√				√
55	<i>Lithocarpus indutus</i> .	Fagaceae				√	
56	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae			√		√
57	<i>Mangifera odorata</i>	Anacardiaceae			√		
58	<i>Manilkara kauki</i> (L.) Dubard	Sapotaceae			√		√
59	<i>Manilkara achras</i> (Mill.) Fosberg	Sapotaceae					√
60	<i>Michelia alba</i> DC	Magnoliaceae					√
61	<i>Michelia champaca</i>	Magnoliaceae	√				
62	<i>Mimusops elengi</i> L	Sapotaceae					√
63	<i>Muntingia calabura</i>	Rosaceae			√		
64	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae					√
65	<i>Moringa pterygosperma</i> Gaertn.	Moringaceae					√
66	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae			√		√
67	<i>Nephelium mutabile</i> Bl.	Myrtaceae	√				
68	<i>Nepenthes ampularia</i>	Nepentheceae		√			
69	<i>Paladium</i> sp.	Sapotaceae				√	
70	<i>Pandanus</i> sp.	Pandanaceae				√	
71	<i>Pangium edule</i> Reinw.	Flacourtiaceae					√
72	<i>Parkia speciosa</i>	Fabaceae			√		√
73	<i>Peronema canescens</i> Jack	Verbenaceae	√				
74	<i>Persea americana</i> L.	Lauraceae			√		√
75	<i>Pometia pinnata</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Sapindaceae	√				√
76	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae					√
77	<i>Pterospermum javanicum</i> Jungh.	Malvaceae	√				
78	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.) Merr.	Meliaceae	√				
79	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae					√
80	<i>Schima walichii</i>	Theaceae					√
81	<i>Shorea javanica</i> Koord. & Valetton	Dipterocarpaceae	√				
	<i>Shorea leprosula</i> Miq.	Dipterocarpaceae	√				
82	<i>Shorea platyclados</i> Sloat. Ex Foxw.	Dipterocarpaceae	√				
83	<i>Shorea</i> sp.	Dipterocarpaceae				√	
84	<i>Spondias dulcis</i> Soland. Ex Park.	Anacardiaceae					√
85	<i>Stelechocarpus burahol</i> (Blume) Hook.f.&Thomson	Annonaceae					√
86	<i>Sterculia oblongata</i> R. Brown.	Sterculiaceae	√				
87	<i>Switenia mahagony</i>	Meliaceae				√	
88	<i>Syzygium aqueum</i>	Myrtaceae			√		√
89	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels.	Myrtaceae					√
90	<i>Syzygium malaccense</i>	Myrtaceae			√		
91	<i>Syzygium polyanthum</i> (Wight) Walp.	Myrtaceae	√				√
92	<i>Tamarindus indica</i> L.	Fabaceae					√
93	<i>Tectona grandis</i> L.	Verbenaceae					√
94	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae					√
95	<i>Tristania abafata</i>	Myrtaceae		√			
96	<i>Toona sureni</i> (Bl.) Merr.	Meliaceae	√		√		√
Total			32	2	24	9	45

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

3

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung



Program yang terkait dengan pembangunan kehutanan di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung (PDASHL) yaitu Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi DAS dan daya dukung DAS pada kawasan hutan lindung dan luar kawasan hutan melalui pengelolaan DAS secara lebih efisien, optimal, adil dan berkelanjutan untuk dapat mengelola sumber daya hutan dan lahan dengan tetap memenuhi kaidah *sustainable forest management* (SFM). Hasil yang diharapkan adalah berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas dan hutan lindung sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan.

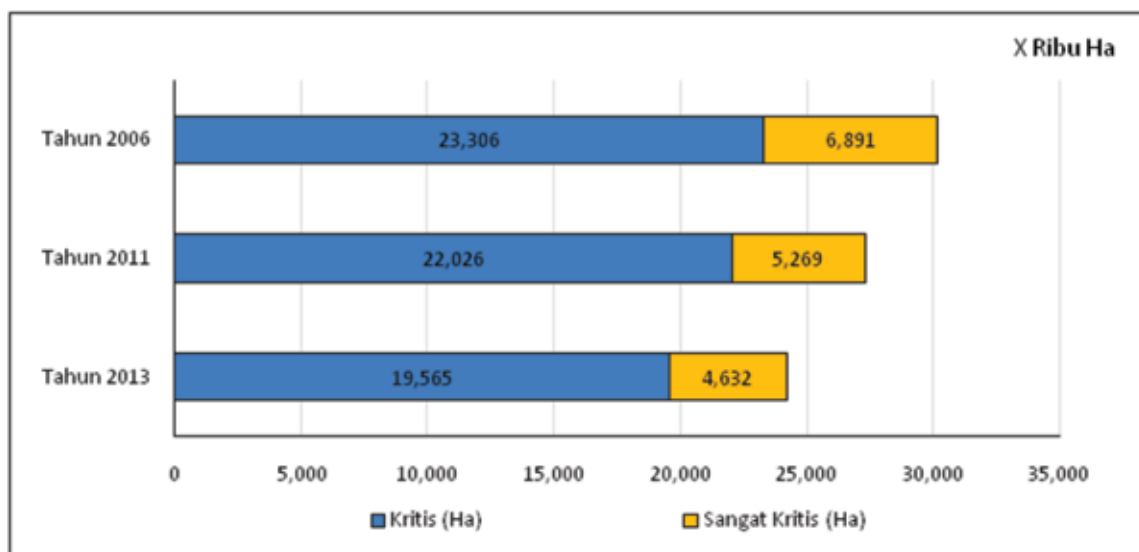
3.1. Perencanaandan Evaluasi Pengendalian DAS

Daerah aliran sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami (PP Nomor 37 Tahun 2012).

3.1.1. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

Penetapan lahan kritis menurut Perdirjen Nomor P.4/V-SET/2013 mengacu pada tutupan lahan, erosi, topografi dan manajemen. Lahan yang termasuk didalam kategori lahan kritis akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Kekritisan lahan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis.



Grafik 3.1. Luas Lahan Kritis Tahun 2006, 2011 dan 2013

Direktorat Jenderal PDASHL memprioritaskan penanganan lahan kritis pada lahan dengan kriteria kritis dan sangat kritis. Berdasarkan kriteria tersebut, luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia pada tahun 2016 tanpa DKI Jakarta seluas ± 24.303.294ha, yang terdiri dari :

- Kritis : 19.564.911Ha
- Sangat Kritis : 4.738.384Ha

Luas lahan kritis dan sangat kritis per provinsi di Indonesia berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2006, tahun 2011 dan tahun 2013.

3.1.2. Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS)

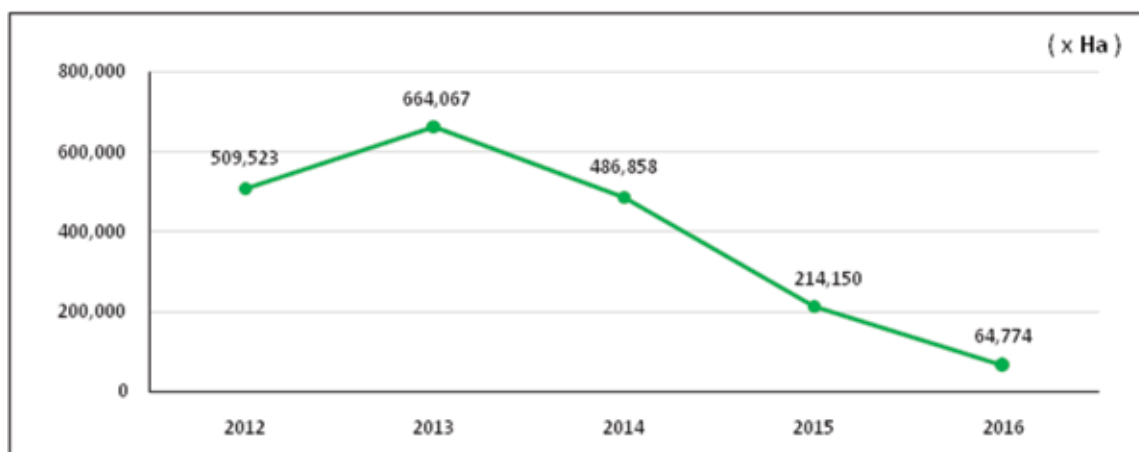
Pada daerah aliran sungai terdapat berbagai macam penggunaan lahan, misalnya hutan, lahan pertanian, pedesaan dan jalan. Dengan demikian DAS mempunyai berbagai fungsi sehingga perlu dikelola. Kemudian dampak dari kegiatan pengelolaan DAS perlu dievaluasi untuk melihat keberhasilan atau kekurangannya. Kegiatan difokuskan ke 108 DAS yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

3.1.3. Banjir dan Tanah Longsor

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, sedangkan longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

3.2. Konservasi Tanah dan Air

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Potret realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kurun waktu tahun 2012-2016 tergambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 3.2. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 - 2016

Rehabilitasi Hutan dan Lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

3.2.1. Rehabilitasi Hutan

Kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan tahun 2012-2016 lebih diprioritaskan pada lahan dengan kriteria sangat kritis dan kritis.

Rehabilitasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan rehabilitasi diprioritaskan pada kawasan hutan lindung.

Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan kurun waktu tahun 2012-2016 adalah seluas 250.379 Ha dan kegiatan rehabilitasi hutan tahun 2016 tercapai seluas 7.067 Ha.

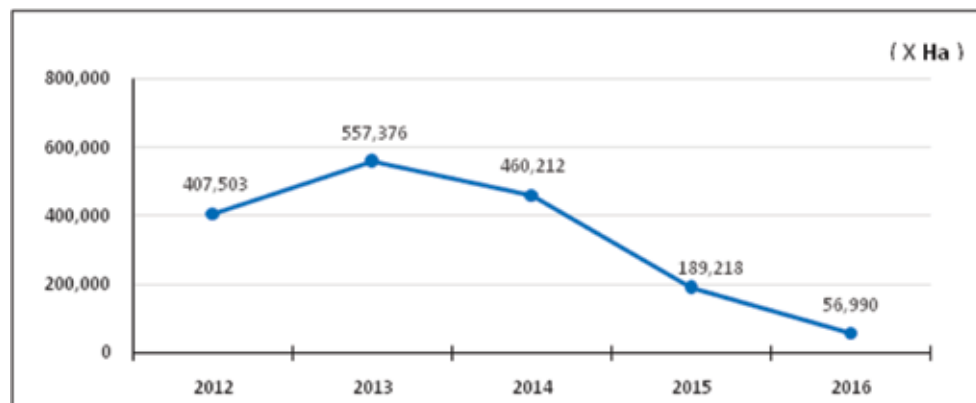
3.2.2 Rehabilitasi Lahan

Kegiatan rehabilitasi lahan tahun 2012-2016 dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan sangat kritis dan kritis di luar kawasan hutan. Realisasi kegiatan pada kurun waktu tahun 2012-2016 adalah seluas 1.688.003 Ha, dan realisasi tahun 2016 seluas 56.990 Ha. Rehabilitasi lahan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan luas minimum 0,25 ha. Pembangunan hutan rakyat diarahkan untuk mengembalikan produktivitas lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan melalui kegiatan hutan rakyat tahun 2012-2016 adalah seluas 1.671.298 Ha, sedangkan tahun 2016 adalah seluas 56.990 Ha.



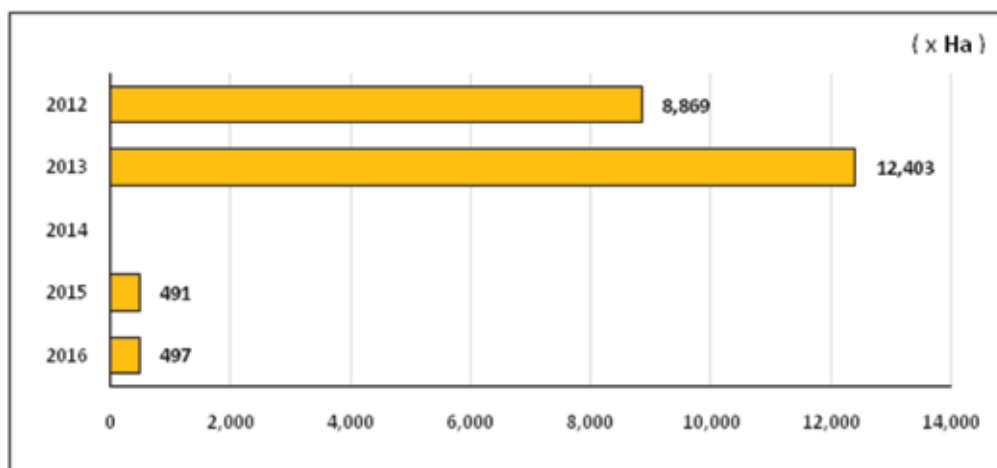
Grafik 3.3 Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2011-2016

b. Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan melalui hutan kota tahun 2016 tercapai seluas 220 Ha.

c. Rehabilitasi Mangrove

Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Kegiatan penanaman hutan mangrove/pantai yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2012-2016 seluas 22.261 Ha.



Grafik 3.4. Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2012 - 2016

3.2.3. Teknik Konservasi Tanah

Terhadap lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi dan terhadap lahan potensial kritis yang kondisinya masih baik perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan produksi. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan seperti di atas dilakukan melalui upaya konservasi tanah.

Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, menggunakan bahan baku alami, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bangunan teknik konservasi tanah dimaksud adalah:

a. Dam Pengendali

Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah

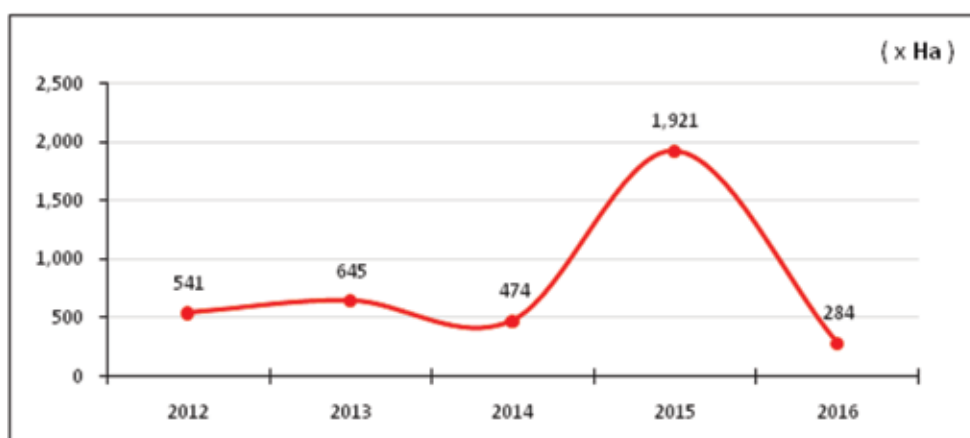
dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir dan dibuat pada alur jurang/sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 meter. Manfaat dari dam pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya, dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi.

Tahun 2016 tidak ada kegiatan pembangunan dam pengendali, sedangkan realisasi pembangunan dam pengendali tahun 2012-2016 adalah sebanyak 200 unit.

b. Dam Penahan

Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucus bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatnya permukaan air tanah di bagian hilirnya.

Pembangunan dam penahan selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 telah dilaksanakan sebanyak 3.865 unit, sedangkan tahun 2016 terbangun 284 unit.



Grafik 3.5. Grafik Pembangunan Dam Penahan Tahun 2012 - 2016

c. Pengendali Jurang (*Gully Plug*)

Bangunan pengendali jurang adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi bronjong batu, kayu atau bambu.

Pembangunan bangunan pengendali jurang tahun 2016 sebanyak 160 unit. Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 telah dilaksanakan sebanyak 1.489 unit.

d. Sumur Resapan

Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai

bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Pembangunan sumur resapan tahun 2016 sebanyak 755 unit. Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 telah dilaksanakan pembangunan sumur resapan sebanyak 8.054 unit.

e. Embung Air

Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.

Pada tahun 2016 tidak ada penambahan bangunan embung air. Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 telah dilaksanakan pembangunan embung air sebanyak 425 unit.

3.3. Perbenihan Tanaman Hutan

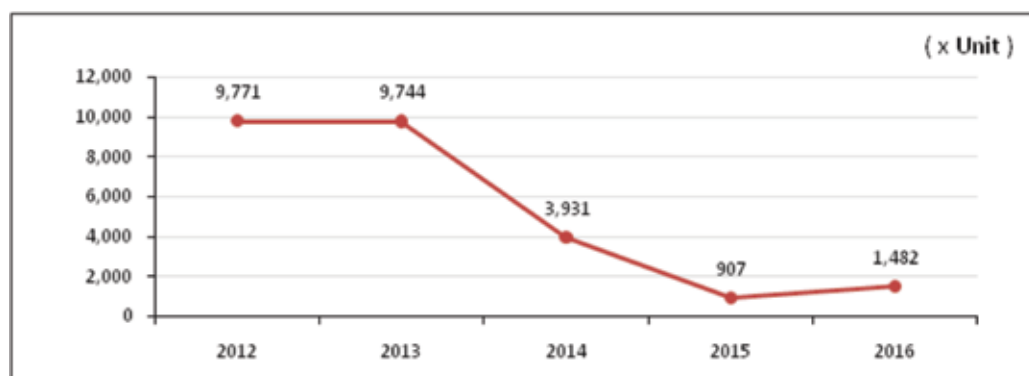
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.

Definisi bibit dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif.

3.3.1. Kebun Bibit Rakyat (KBR)

KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan atau tanaman serbaguna (MPTs) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah. (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012).

Jumlah KBR per BPDASHL tahun 2016 sebanyak 1.482 unit, sedangkan realisasi KBR tahun 2012-2016 sebanyak 25.835 unit.



Grafik 3.6. Grafik Pelaksanaan Pembangunan KBR Tahun 2012 - 2016

3.3.2. Persemaian Permanen

Persemaian permanen adalah persemaian yang dibangun pada lokasi yang tetap dan dilengkapi dengan sarana, prasarana produksi bibit yang lengkap dan modern. Persemaian permanen umumnya digunakan dalam jangka panjang, dengan kapasitas produksi bibit cukup besar dan lokasi yang cukup luas.

Sedangkan realisasi pembuatan bibit dari persemaian permanen tahun 2016 adalah 48.718.521 batang, dan progres produksi bibit persemaian permanen dari tahun 2012-2016 adalah sebanyak 160.826.535 batang.

3.3.3. *Seed for people*

Program *seed for people* didasari oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 973/Menhut-V/2001 tanggal 29 Juni 2001, tentang *seed for people*. Program ini bertujuan untuk :

- 1). Meningkatkan kualitas dan hasil tanaman hutan rakyat,
- 2). Sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 3). Mempercepat proses rehabilitasi lahan,
- 4). Penguatan kelembagaan masyarakat dalam membangun hutan.

Progress pembangunan *seed for people* tahun 2012-2016 adalah sebanyak 62 unit, sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada kegiatan pembangunan *seed for people*.

3.4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Pembangunan KPH secara eksplisit diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Kebijakan menuju pengelolaan hutan berbasis wilayah melalui KPH merupakan langkah besar menuju perbaikan tata kelola hutan di Indonesia dengan membangun prakondisi untuk pengelolaan hutan. Untuk tahun 2016 kegiatan KPHL yaitu Pembinaan KPHL dengan sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari dan Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 39 unit KPHL Model .

3.5. Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengendalian kerusakan perairan darat dilaksanakan dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Kegiatan bidang pengendalian kerusakan perairan darat:

- a. Rehabilitasi sempadan sungai, sempadan danau, DTA danau, daerah imbuhan mata air dan daerah imbuhan air tanah.

Untuk mencapai target IKK tersebut di atas, pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi di daerah tangkapan air Danau Limboto. Kegiatan rehabilitasi di daerah tangkapan air, di sempadan danau, sempadan sungai, daerah imbuhan mata air, dan sekitar mata air dilaksanakan disamping untuk mengurangi laju sedimentasi pada lima belas danau prioritas, juga dalam rangka memulihkan fungsi ekosistem sungai dan mata air pada lima belas DAS prioritas.

Pengaruh kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat diketahui dengan mengukur laju sedimentasi/laju erosi pada danau (DAS yang menjadi inlet/sumber air danau).

- b. Pemantauan Kualitas Air Danau dan Sungai Prioritas

Ditujukan untuk mengetahui pengaruh kegiatan yang dilaksanakan pada danau/sungai apakah kegiatan dimaksud dapat meningkatkan kualitas air atau sebaliknya.

Tabel 3.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2006, Tahun 2011 dan Tahun 2013

No	Provinsi	Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi					
		Tahun 2006			Tahun 2011		
		Tingkat Kekritisan Lahan			Tingkat Kekritisan Lahan		
		Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	395.680	67.343	463.023	623.665	121.290	744.954
2	Sumatera Utara	1.526.959	434.767	1.961.726	854.610	280.731	1.135.341
3	Sumatera Barat	239.433	169.598	409.031	419.524	90.453	509.977
4	Riau	2.306.659	108.356	2.415.015	739.935	100.723	840.658
5	Jambi	614.117	4.774	618.891	341.685	1.078.917	1.420.602
6	Sumatera Selatan	2.085.364	739.485	2.824.849	3.668.355	217.707	3.886.062
7	Bengkulu	545.219	163.730	708.949	531.470	111.117	642.587
8	Lampung	339.055	186.408	525.463	512.168	77.061	589.229
9	Kepulauan Riau	-	-	-	24.519	230.230	254.749
10	Bangka Belitung	261.615	314.843	576.458	88.212	26.624	114.836
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	140.895	19.487	160.382	415.806	68.139	483.944
13	Jawa Tengah	233.300	28.226	261.526	149.976	9.877	159.853
14	D.I. Yogyakarta	43.549	1.110	44.659	33.088	471	33.559
15	Jawa Timur	533.841	247.115	780.956	506.336	102.577	608.913
16	Banten	51.982	90.427	142.409	56.753	10.750	67.503
17	Bali	51.639	4.281	55.920	45.112	2.940	48.052
18	Nusa Tenggara Barat	236.899	68.833	305.732	68.611	23.248	91.859
19	Nusa Tenggara Timur	2.234.587	985.224	3.219.811	1.006.526	35.162	1.041.688
20	Kalimantan Barat	1.840.181	16.124	1.856.305	2.844.134	325.357	3.169.491
21	Kalimantan Tengah	1.939.144	1.267.743	3.206.887	3.498.036	1.138.854	4.636.890
22	Kalimantan Selatan	511.821	54.771	566.592	708.130	78.781	786.911
23	Kalimantan Timur	1.015.616	38.074	1.053.690	314.464	4.372	318.836
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	229.226	28.040	257.266	242.354	33.702	276.056
26	Sulawesi Tengah	113.179	103.308	216.487	293.638	24.131	317.769
27	Sulawesi Selatan	223.806	325.312	549.118	810.504	109.948	920.452
28	Sulawesi Barat	21.514	5.624	27.138	105.546	8.414	113.960
29	Sulawesi Tenggara	919.467	365.134	1.284.601	617.519	267.944	885.463
30	Gorontalo	202.790	62.988	265.778	184.652	72.524	257.176
31	Maluku	488.315	123.904	612.219	490.521	271.803	762.324
32	Maluku Utara	259.360	291.390	550.750	447.669	163.438	611.106
33	Papua	2.659.384	311.016	2.970.400	971.464	105.235	1.076.699
34	Papua Barat	1.041.638	263.132	1.304.770	410.601	76.742	487.343
Jumlah		23.306.233	6.890.568	30.196.802	22.025.581	5.269.260	27.294.842
							19.564.911
							4.631.520
							24.303.294

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Tabel 3.2. Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	15,629.00	19,984.00	7,806.00	3,762.00	1,719.57
		Wampu Sei Ular	-	-	-	2,260.00	110.00
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	12,710.00	15,422.00	6,596.00	3,521.00	4,290.86
		Asahan Barumon	23,826.00	18,867.72	11,075.20	2,255.46	2,462.42
		Agam Kuantan	6,465.00	6,712.61	6,425.00	2,038.00	5,397.93
3	Sumatera Barat	Indragiri Rokan	-	-	-	2,368.00	1,200.00
		Batanghari	-	-	-	1,158.00	50.00
4	Riau	Indragiri Rokan	9,627.00	20,729.00	11,100.00	2,606.00	4,386.46
5	Jambi	Batanghari	11,030.40	13,952.40	14,038.00	3,707.00	3,489.90
6	Sumatera Selatan	Musi	18,529.00	22,788.00	17,958.08	4,795.00	9,311.02
7	Bengkulu	Ketahun	19,849.00	15,112.00	14,075.00	5,005.00	6,308.46
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	35,482.00	55,652.00	33,734.00	14,701.00	12,410.92
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	5,124.00	5,732.72	1,953.60	894.00	1,952.98
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	1,105.00	2,576.00	1,333.00	1,318.30	398.00
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	285.10	-	8.00	-	-
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	12,117.00	11,410.00	4,679.00	6,100.00	9,933.45
		Cimanuk Citanduy	17,690.00	27,842.77	9,715.00	4,812.23	9,919.09
		Cimanuk Citanduy	102.00	5,855.23	1,722.00	1,214.24	875.00
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	11,551.70	31,956.00	29,519.00	12,178.00	9,116.10
		Serayu Opak Progo	16,214.70	38,772.96	20,550.00	15,346.90	5,342.63
		Solo	13,086.00	3,436.90	3,849.08	2,374.70	5,471.61
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	125.00	21,412.75	30.00	5,294.29	52.16
		Solo	15.60	11,665.60	12,203.00	4,833.40	-
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	19,695.60	26,322.00	25,026.00	12,033.83	13,232.55
		Sampean (Brantas Sampean)	14,525.00	15,900.00	13,265.00	4,830.00	

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	Citarum Ciliwung	237.00	8,340.00	11,771.30	-	7.00
17	Bali	Unda Anyar	2,351.00	8,850.00	15,317.50	6,115.00	4,259.11
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	14,925.00	25,714.00	18,464.00	7,140.00	6,220.48
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	21,121.00	24,623.33	35,057.00	10,360.00	8,562.32
20	Kalimantan Barat	Kapuas	14,030.00	15,694.00	10,748.50	5,157.93	5,397.19
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	14,380.00	11,640.00	5,094.00	1,938.00	3,538.61
22	Kalimantan Selatan	Barito	15,209.40	8,669.48	6,656.00	2,769.00	18,732.39
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	7,623.00	9,968.00	7,868.00	2,845.00	4,074.48
24	Kalimantan Utara	Mahakam Berau	-	-	-	480.00	-
25	Sulawesi Utara	Tondano	20,741.00	17,533.90	16,070.00	7,220.00	4,287.11
26	Sulawesi Tengah	Palu Poso	22,348.00	15,534.00	7,211.00	2,718.00	3,485.11
27	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	14,411.00	13,255.00	10,545.00	8,166.00	11,384.52
		Saddang (Jeneberang Saddang)	7,467.00	16,642.00	15,349.00	4,585.00	
28	Sulawesi Tenggara	Sampara	19,640.00	21,241.00	11,168.00	9,809.00	3,657.86
29	Gorontalo	Bone Bolango	16,990.00	11,804.00	6,778.00	3,636.00	3,556.36
30	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	8,922.00	23,017.00	21,298.00	6,263.90	3,128.11
		Saddang (Jeneberang Saddang)	-	-	-	300.00	344.00
31	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	4,954.00	6,778.00	4,192.00	873.00	2,598.54
32	Maluku Utara	Ake Malamo	5,607.00	5,324.00	7,280.00	3,848.00	978.29
33	Papua Barat	Remu Ransiki	19,353.00	11,015.00	10,465.73	4,169.59	1,919.62
34	Papua	Membramo	14,429.00	16,321.70	18,865.00	6,350.00	4,784.11
Jumlah			509,522.50	664,067.07	486,857.99	214,149.77	198,346.29

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan :

(-) Tidak ada data

Sumber dana = APBN

Tabel 3.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi) Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	5,000.00	500.00	500.00	900.00	575.00
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	3,000.00	5,000.00	800.00	-	-
		Asahan Barumon	4,005.00	1,500.00	250.00	800.00	-
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	745.00	1,500.00	200.00	180.00	-
		Batanghari	-	-	-	175.00	50.00
		Indragiri Rokan	-	-	-	718.00	400.00
4	Riau	Indragiri Rokan	2,562.00	1,500.00	850.00	0.00	375.00
5	Jambi	Batanghari	7,750.00	6,350.00	800.00	0.00	-
6	Sumatera Selatan	Musi	5,000.00	3,500.00	400.00	200.00	107.00
7	Bengkulu	Kelahun	5,000.00	6,000.00	2,050.00	200.00	325.00
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	8,800.00	8,300.00	1,750.00	900.00	604.04
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	-	-	-	-	150.00
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	-	850.00	100.00	200.00	258.00
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	270.00	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	1,825.00	1,250.00	175.00	-	-
		Cimanuk Citanduy	1,124.00	500.00	175.00	-	-
		Cimanuk Citanduy	102.00	100.00	-	-	-
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	533.00	200.00	-	-	-
		Serayu Opak Progo	322.00	320.88	70.00	-	-
		Solo	406.00	200.00	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	Serayu Opak Progo	125.00	134.75	30.00	-	-
		Solo	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	500.00	200.00	-	-	-
		Sampean (Brantas Sampean)	150.00	300.00	100.00	-	-

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	Citarum Ciliwung	175.00	1,250.00	225.00	-	-
17	Bali	Unda Anyar	200.00	1,000.00	300.00	300.00	300.00
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	3,000.00	4,000.00	550.00	1,125.00	330.00
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	4,552.00	3,900.00	700.00	900.00	350.00
20	Kalimantan Barat	Kapuas	5,000.00	7,000.00	800.00	-	-
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	5,000.00	6,000.00	750.00	900.00	97.00
22	Kalimantan Selatan	Barito	666.00	1,300.00	500.00	300.00	-
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	2,000.00	2,700.00	800.00	200.00	400.00
24	Sulawesi Utara	Tondano	1,100.00	1,300.00	700.00	-	252.00
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	3,000.00	2,750.00	425.00	-	106.00
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Wanae (Jeneberang Saddang)	5,000.00	5,200.00	2,500.00	-	-
		Saddang (Jeneberang Saddang)	1,000.00	5,800.00	3,000.00	150.00	-
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	6,425.00	7,000.00	2,000.00	460.00	400.00
28	Gorontalo	Bone Bolango	2,650.00	2,500.00	500.00	200.00	-
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	500.00	6,750.00	2,037.00	800.00	200.00
		Saddang	-	-	-	300.00	344.00
30	Maluku	Waehapu Batu Merah	3,000.00	1,500.00	300.00	-	275.00
31	Maluku Utara	Ake Malamo	500.00	500.00	250.00	-	218.00
32	Papua Barat	Remu Ransiki	5,000.00	3,000.00	1,000.00	400.00	400.62
33	Papua	Membramo	5,000.00	4,000.00	575.00	200.00	550.00
Jumlah			100,987.00	105,655.63	26,162.00	10,508.00	7,066.66

Keterangan :

(-) Tidak Ada Data

Sumber dana = APBN

Tabel 3.4. Perkembangan Rehabilitasi Lahan Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Lahan				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh Wampu Sei Ular	10,629.00	19,484.00	7,306.00	2,862.00	1,144.57
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular Asahan Barumon	9,710.00	10,422.00	5,796.00	3,501.00	4,140.86
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan Indragiri Rokan Batanghari	19,821.00	17,367.72	10,825.00	1,455.46	2,462.42
4	Riau	Indragiri Rokan	5,720.00	5,212.61	6,225.00	1,858.00	5,397.93
5	Jambi	Batanghari	-	-	-	1,650.00	800.00
6	Sumatera Selatan	Musi	-	-	-	983.00	-
7	Bengkulu	Ketahun	7,065.00	19,229.00	10,250.00	2,606.00	4,011.46
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	3,280.40	7,602.40	13,238.00	3,707.00	3,489.90
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	13,529.00	19,288.00	17,558.00	4,595.00	9,204.02
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	14,849.00	9,112.00	12,025.00	4,805.00	5,983.46
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	26,682.00	47,352.00	31,984.00	13,801.00	11,793.88
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy	5,124.00	5,732.72	1,954.00	874.00	1,772.98
13	Jawa Tengah	Cimanuk Citanduy Penali Jratun Serayu Opak Progo Solo	1,105.00	1,726.00	1,233.00	1,118.30	140.00
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo Solo	15.10	-	8.00	-	-
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean) Sampean (Brantas Sampean)	10,292.00	10,160.00	4,504.00	6,100.00	9,933.45
			16,566.00	27,342.77	9,540.00	4,812.23	9,919.09
			-	5,755.23	1,722.00	1,214.24	875.00
			11,018.70	31,756.00	29,519.00	12,143.00	9,116.10
			15,892.70	38,452.08	20,480.00	15,346.90	5,342.63
			12,680.00	3,236.90	3,849.00	2,374.70	5,471.61
			-	21,278.00	-	5,294.29	52.16
			15.60	11,665.60	12,203.00	4,833.40	-
			19,195.60	26,122.00	25,026.00	12,033.83	13,232.55
			14,375.00	15,600.00	13,165.00	4,830.00	

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Lahan				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	Citarum Ciliwung	62.00	7,090.00	11,546.00	-	2.00
17	Bali	Unda Anyar	2,151.00	7,850.00	15,018.00	5,815.00	3,959.11
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	11,925.00	21,714.00	17,914.00	6,015.00	5,890.48
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmima	16,569.00	20,723.33	34,357.00	9,460.00	8,212.32
20	Kalimantan Barat	Kapuas	9,030.00	8,694.00	9,949.00	5,077.93	5,397.19
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	9,380.00	5,640.00	4,344.00	1,038.00	3,441.61
22	Kalimantan Selatan	Barito	14,543.40	7,369.48	6,156.00	2,469.00	18,732.39
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	5,623.00	7,268.00	7,068.00	2,645.00	3,674.48
24	Kalimantan Utara	Mahakam Berau	-	-	-	480.00	-
25	Sulawesi Utara	Tondano	19,641.00	16,233.90	15,370.00	7,210.00	4,035.11
26	Sulawesi Tengah	Palu Poso	19,348.00	12,784.00	6,786.00	2,683.00	3,379.11
27	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	9,411.00	8,055.00	8,045.00	8,166.00	11,374.52
		Saddang (Jeneberang Saddang)	6,467.00	10,842.00	12,349.00	4,435.00	
28	Sulawesi Tenggara	Sampara	13,215.00	14,241.00	9,168.00	9,148.00	3,107.86
29	Gorontalo	Bone Bolango	14,340.00	9,304.00	6,278.00	3,436.00	3,556.36
30	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	8,422.00	16,267.00	19,261.00	5,463.90	2,809.11
31	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	1,954.00	5,278.00	3,892.00	803.00	2,323.54
32	Maluku Utara	Ake Malamo	5,107.00	4,824.00	7,030.00	3,828.00	739.82
33	Papua Barat	Remu Ransiki	14,353.00	8,015.00	9,466.00	3,769.59	1,519.00
34	Papua	Membrano	9,429.00	12,321.70	18,290.00	6,150.00	4,234.11
Jumlah			408,535.50	558,411.44	460,697.00	203,150.77	190,782.16

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan :

(-) Tidak ada data

Sumber dana = APBN

Tabel 3.5. Perkembangan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat (Ha)				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh Wampu Sei Ular	10,623.00	19,464.00	7,296.00	2,862.00	1,144.57
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular Asahan Barumon	9,710.00 19,821.00	10,407.00 17,367.72	5,741.00 10,820.20	3,491.00 1,455.46	4,120.86 2,422.42
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan Indragiri Rokan Batanghari	5,705.00 - -	5,187.61 - -	6,215.00 - -	1,858.00 1,650.00 973.00	5,397.93 800.00 -
4	Riau	Indragiri Rokan	7,024.00	19,159.00	10,250.00	2,596.00	4,001.16
5	Jambi	Batanghari	3,265.00	7,572.40	13,238.00	3,707.00	3,489.90
6	Sumatera Selatan	Musi	13,514.00	19,278.00	17,548.08	4,585.00	9,204.02
7	Bengkulu	Ketahun	14,814.00	9,077.00	12,000.00	4,800.00	5,983.46
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	26,682.00	47,352.00	31,984.00	13,801.00	11,793.88
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	5,099.00	5,697.92	1,953.60	874.00	1,720.98
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	1,095.00	1,726.00	1,233.00	1,118.30	125.00
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy	10,254.00 16,545.00	10,120.00 27,336.77	4,487.00 9,540.00	- 4,812.23	9,933.45 9,919.09
13	Jawa Tengah	Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo	- 10,994.00 15,875.00 12,680.00	5,755.23 31,731.00 38,442.08 3,236.90	1,722.00 29,509.00 20,480.00 3,849.08	1,214.24 6,069.00 15,075.90 1,996.70	875.00 9,116.10 5,342.63 5,471.61
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo Solo	- -	21,263.00 11,655.60	- 12,183.00	5,284.29 4,833.40	52.16 -
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean) Sampean (Brantas Sampean)	19,173.00 14,375.00	26,102.00 15,600.00	25,006.00 13,137.00	11,528.83 4,830.00	13,232.55 -

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Rehabilitasi Laham/Hutan Rakyat (Ha)				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	Citarum Ciliwung	-	7,080.00	11,546.30	-	-
17	Bali	Unda Anyar	2,151.00	7,850.00	15,017.50	5,815.00	3,959.11
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	11,915.00	21,704.00	17,904.00	6,005.00	5,890.48
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	16,503.00	20,673.33	34,337.00	9,450.00	8,202.32
20	Kalimantan Barat	Kapuas	8,980.00	8,674.00	9,937.50	5,077.93	5,397.19
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	9,320.00	5,580.00	4,284.00	1,028.00	3,441.61
22	Kalimantan Selatan	Barito	14,507.00	7,329.48	6,136.00	2,469.00	18,732.39
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	5,608.00	7,203.00	7,068.00	2,645.00	3,674.48
	Kalimantan Utara	Mahakam Berau	-	-	-	475.00	-
24	Sulawesi Utara	Tondano	19,596.00	16,204.00	15,360.00	7,200.00	4,009.11
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	19,278.00	12,714.00	6,786.00	2,663.00	3,374.11
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	9,375.00	8,025.00	8,025.00	8,156.00	11,364.52
		Saddang (Jeneberang Saddang)	6,457.00	10,832.00	12,349.00	4,225.00	
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	13,175.00	14,136.00	9,088.00	9,088.00	3,102.86
28	Gorontalo	Bone Bolango	14,285.00	9,249.00	6,273.00	3,286.00	3,556.36
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	8,402.00	16,247.00	19,261.00	5,438.90	2,809.11
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	1,900.00	5,228.00	3,877.00	793.00	2,313.54
31	Maluku Utara	Ake Malamo	5,097.00	4,809.00	7,030.00	3,828.00	739.82
32	Papua Barat	Remu Ransiki	14,313.00	8,000.00	9,455.73	3,759.59	1,509.00
33	Papua	Membramo	9,393.00	12,306.70	18,285.00	6,150.00	4,234.11
Jumlah			407,503.00	557,375.74	460,211.99	189,217.77	190,566.86

Sumber : Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

eterangan :

tidak ada data

31 dana = APBN

Tabel 3.6. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan / Hutan Kota Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	BPDASHL	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Kota				
			2012 (Ha) 4	2013 (Ha) 5	2014 (Ha) 6	2015 (Ha) 7	2016 (Ha) 8
1	2	3					
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	6.00	20.00	10.00	10.00	-
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	-	15.00	55.00	10.00	20.00
		Asahan Barumun	-	-	5.00	-	40.00
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	15.00	25.00	10.00	10.00	-
4	Riau	Indragiri Rokan	41.00	70.00	-	10.00	10.00
5	Jambi	Batanghari	15.40	30.00	-	-	-
6	Sumatera Selatan	Musi	15.00	10.00	10.00	10.00	-
7	Bengkulu	Ketahun	35.00	35.00	25.00	5.00	-
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	-	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	25.00	34.80	-	-	52.00
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	10.00	-	-	-	15.00
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	15.10	0.00	8.00	-	-
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	38.00	40.00	17.00	-	-
		Cimanuk Citanduy	21.00	6.00	-	-	-
13	Jawa Tengah	Cimanuk Citanduy	-	-	-	-	-
		Pemali Jratun	24.70	25.00	10.00	5.00	-
		Serayu Opak Progo	17.70	10.00	-	-	-
		Solo	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	-	15.00	-	10.00	-
15	Jawa Timur	Solo	15.60	10.00	20.00	-	-
		Brantas (Brantas Sampean)	22.60	20.00	20.00	5.00	-
		Sampean (Brantas Sampean)	-	-	28.00	-	-
16	Banten	Citarum Ciliwung	62.00	10.00	-	-	2.00
17	Bali	Unda Anyar	-	-	-	-	-

No	Provinsi	BPDASHL	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Kota				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	10.00	10.00	10.00	10.00	-
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	66.00	50.00	20.00	10.00	10.00
20	Kalimantan Barat	Kapuas	50.00	20.00	11.00	-	-
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	60.00	60.00	60.00	10.00	-
22	Kalimantan Selatan	Barito	36.40	40.00	20.00	-	-
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	15.00	65.00	-	-	-
24	Kalimantan Utara	Mahakam Berau				5.00	-
25	Sulawesi Utara	Tondano	45.00	29.90	10.00	10.00	26.00
26	Sulawesi Tengah	Palu Poso	70.00	70.00	-	20.00	5.00
27	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	36.00	30.00	20.00	10.00	10.00
		Saddang (Jeneberang Saddang)	10.00	10.00	-	10.00	-
28	Sulawesi Tenggara	Sampara	40.00	105.00	80.00	60.00	5.00
29	Gorontalo	Bone Bolango	55.00	55.00	5.00	-	-
30	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	20.00	20.00	-	-	-
31	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	54.00	50.00	15.00	10.00	10.00
32	Maluku Utara	Ake Malamo	10.00	15.00	-	-	-
33	Papua Barat	Remu Ransiki	40.00	15.00	10.00	10.00	10.00
34	Papua	Membramo	36.00	15.00	5.00	-	-
Jumlah			1,032.50	1,035.70	484.00	240.00	215.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan :

(-) Tidak ada data

Sumber dana = APBN

Tabel 3.7. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	-	650.00	-	-	-
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	888.00	400.00	-	20.00	150.00
		Asahan Barumun	20.98	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	-	300.00	-	-	-
4	Riau	Indragiri Rokan	554.00	600.00	-	-	-
5	Jambi	Batanghari	-	150.00	-	-	-
6	Sumatera Selatan	Musi	-	400.00	-	-	-
7	Bengkulu	Ketahun	-	100.00	-	-	-
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	-	400.00	-	-	13.00
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	5.00	193.00	-	20.00	30.00
10	Kep. Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	360.00	480.00	-	-	-
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	401.00	140.00	-	-	-
		Cimanuk Citanduy	236.00	100.00	-	-	-
13	Jawa Tengah	Cimanuk Citanduy	-	-	-	-	-
		Penali Jratun	1,323.00	400.00	-	35.00	-
		Serayu Opak Progo	-	70.00	-	-	-
		Solo	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	-	30.00	-	-	-
		Solo	-	200.00	-	-	-
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	150.00	700.00	-	-	-
		Sampean (Brantas Sampean)	610.00	350.00	-	-	-
16	Banten	Citarum Ciliwung	409.00	-	-	-	5.00
17	Bali	Unda Anyar	-	-	-	-	-

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut				
			2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	140.00	140.00	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	-	150.00	-	-	-
20	Kalimantan Barat	Kapuas	-	1,000.00	-	80.00	-
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	Barito	134.00	300.00	-	-	-
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	1,420.00	800.00	-	-	-
24	Sulawesi Utara	Tondano	-	400.00	-	10.00	-
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	-	200.00	-	35.00	-
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang) Saddang (Jeneberang Saddang)	- 520.00	400.00 100.00	- -	- -	10.00 -
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	200.00	460.00	-	201.00	150.00
28	Gorontalo	Bone Bolango	135.00	400.00	-	-	-
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	120.00	150.00	-	-	119.00
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	42.00	100.00	-	70.00	-
31	Maluku Utara	Ake Malamo	112.00	140.00	-	20.00	20.00
32	Papua Barat	Remu Ransiki	938.00	1,000.00	-	-	-
33	Papua	Memberamo	562.00	1,000.00	-	-	-
Jumlah			9,279.98	12,403.00	0.00	491.00	497.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan : Tahun 2014 tidak ada kegiatan penanaman hutan mangrove yang dibiayai oleh APBN

(-) Tidak ada data

Sumber dana = APBN

Tabel 3.8. Bangunan DAM Pengendali Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan DAM Pengendali				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	1	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	1	1	0	0	0
3	Sumatera Barat	Asahan Barumun	2	6	3	0	0
4	Riau	Agam Kuantan	2	3	0	0	0
5	Jambi	Indragiri Rokan	0	3	0	0	0
6	Sumatera Selatan	Batanghari	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	Musi	1	1	1	0	0
8	Lampung	Ketahun	3	2	6	0	0
9	Bangka Belitung	Way Seputih Sekampung	0	1	2	0	0
10	Kepulauan Riau	Baturusa Cerucuk	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	0	0	0	2	0
		Citarum Cilanduy	7	7	40	0	0
		Cimanuk Citanduy	22	5	1	0	0
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	0	0	0	0	0
		Serayu Opak Progo	0	0	1	0	0
		Solo	13	17	11	0	0
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	0	0	0	0	0
		Solo	2	6	5	0	0
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	1	1	0	0	0
		Sampean (Brantas Sampean)	0	0	0	0	0
16	Banten	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
17	Bali	Unda Anyar	0	0	0	0	0

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan DAM Pengendali				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	4	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	3	2	2	0	0
20	Kalimantan Barat	Kapuas	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	Barito	1	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	Tondano	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	0	1	1	0	0
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	4	0	2	0	0
		Saddang (Jeneberang Saddang)	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	Bone Bolango	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	0	0	0	0	0
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	Ake Malamo	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	Remu Ransiki	0	0	0	0	0
33	Papua	Memberamo	0	0	0	0	0
Jumlah			67	56	75	2	0

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan : () Tidak ada data

Sumber dana = semua sumber dana

Tabel 3.9. Bangunan DAM Penahan Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan DAM Penahan				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	4	9	3	100	0
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	18	12	10	100	0
		Asahan Barumun	11	19	2	0	0
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	0	0	0	0	0
4	Riau	Indragiri Rokan	0	0	0	0	0
5	Jambi	Batanghari	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	Musi	1	2	1	0	0
7	Bengkulu	Ketahun	11	4	3	0	0
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	9	12	4	0	0
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
		Citarum Ciliwung	0	0	0	226	55
12	Jawa Barat	Cimanuk Citanduy	32	70	34	500	32
		Cimanuk Citanduy	18	21	14	0	0
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	75	74	78	6	0
		Serayu Opak Progo	39	46	43	30	0
		Solo	13	29	13	181	40
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	12	11	13	0	45
		Solo	40	76	38	237	0
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	106	28	106	215	70
		Sampean (Brantas Sampean)	18	34	44	74	0
16	Banten	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
17	Bali	Unda Anyar	3	0	3	50	0

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan DAM Penahan				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	24	0	20	7	0
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	0	0	1	0	0
20	Kalimantan Barat	Kapuas	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	Barito	1	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	0	0	0	105	0
24	Sulawesi Utara	Tondano	47	19	0	5	0
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	0	10	1	5	0
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	51	0	43	150	0
		Saddang (Jeneberang Saddang)	0	0	0	10	12
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	Bone Bolango	0	0	0	14	30
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	0	0	0	0	0
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	Ake Malamo	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	Remu Ransiki	0	0	0	0	0
33	Papua	Memberamo	8	169	0	0	0
		Jumlah	541	645	474	2,015	284

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan : () Tidak ada data

Sumber dana = semua sumber dana

Tabel 3.10. Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	0	0	0	0	0
		Asahan Barumun	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	0	0	0	0	0
4	Riau	Indragiri Rokan	0	0	0	0	0
5	Jambi	Batanghari	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	Musi	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	Ketahun	0	0	0	0	0
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	0	0	0	575	0
		Cimanuk Citanduy	0	0	29	0	0
		Cimanuk Citanduy	0	0	8	0	0
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	0	0	21	0	0
		Serayu Opak progo	78	78	73	70	0
		Solo	0	0	0	150	0
14	D.I. Yogyakarta	Serayu Opak progo	28	49	43	0	100
		Solo	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	20	10	12	0	0
		Sampean (Brantas Sampean)	6	20	16	0	0
16	Banten	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
17	Bali	Unda Anyar	0	0	0	0	0

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	0	1	9	0	0
20	Kalimantan Barat	Kapuas	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	Barito	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	Tondano	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	0	0	0	0	0
		Saddang (Jeneberang Saddang)	0	0	0	25	0
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	Bone Bolango	0	0	0	6	60
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	0	0	0	0	0
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	Ake Malamo	2	0	0	0	0
32	Papua Barat	Remu Ransiki	0	0	0	0	0
33	Papua	Membramo	0	0	0	0	0
Jumlah			134	158	211	826	160

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber dana = Semua Sumber Dana

Tabel 3.11. Bangunan Sumur Resapan Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Sumur Resapan				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	20	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	45	40	0	50	0
		Asahan Barumun	4	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	0	0	0	0	0
4	Riau	Indragiri Rokan	0	118	0	0	0
5	Jambi	Batanghari	5	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	Musi	12	1	0	0	0
7	Bengkulu	Ketahun	26	54	0	0	0
8	Lampung	Way Seputh Sekampung	32	84	0	0	0
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	90	0	0	2,745	651
		Cimanuk Citanduy	94	102	122	0	0
		Cimanuk Citanduy	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	Penali Jratun	291	171	127	0	0
		Serayu Opak Progo	78	102	14	181	0
		Solo	125	77	37	280	0
14	D.I. Yogyakarta	Serayu Opak Progo	28	17	45	69	104
		Solo	196	70	88	0	0
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	102	0	256	0	0
		Sampean (Brantas Sampean)	14	47	122	0	0
16	Banten	Citarum Ciliwung	10	0	0	0	0
17	Bali	Unda Anyar	185	100	200	0	0

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Sumur Resapan				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	3	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	68	67	61	0	0
20	Kalimantan Barat	Kapuas	0	3	3	0	0
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	Barito	15	19	0	0	0
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	Tondano	119	15	15	0	0
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang) Saddang (Jeneberang Saddang)	45 0	0 0	30 0	0 100	0 0
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	Bone Bolango	0	0	0	18	0
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	0	0	0	0	0
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	Ake Malamo	15	0	0	0	0
32	Papua Barat	Remu Ransiki	0	0	0	0	0
33	Papua	Memberamo	19	8	0	0	0
Jumlah			1,641	1,095	1,120	3,443	755

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDASHL) 2016

Keterangan : () Tidak ada data

Sumber dana = Semua Sumber Dana

Tabel 3.12. Bangunan Embung Air Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Embung Air				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Krueng Aceh	0	2	0	0	0
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	0	0	0	0	0
		Asahan Barumon	2	22	0	0	0
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	0	0	0	0	0
4	Riau	Indragiri Rokan	0	0	0	0	0
5	Jambi	Batanghari	1	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	Musi	3	16	1	0	0
7	Bengkulu	Ketahun	2	0	0	0	0
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	0	2	0	0	0
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau (Sei Jang Duriangkang)	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
		Cimanuk Citanduy	19	15	0	0	0
		Cimanuk Citanduy	6	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	3	9	0	0	0
		Serayu Opak Progo	3	3	2	0	0
		Solo	0	0	0	0	0
14	D.I. Yogyakarta	Serayu Opak Progo	4	2	3	0	0
		Solo	0	1	0	0	0
15	Jawa Timur	Brantas (Brantas Sampean)	22	0	12	0	0
		Sampean (Brantas Sampean)	6	5	26	0	0
16	Banten	Citarum Ciliwung	0	0	0	0	0
17	Bali	Unda Anyar	14	11	16	0	0

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Jumlah Bangunan Embung Air				
			2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	13	0	9	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	39	25	23	0	0
20	Kalimantan Barat	Kapuas	0	5	9	0	0
21	Kalimantan Tengah	Kahayan	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	Barito	7	11	0	0	0
23	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	Tondano	5	4	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	Jeneberang Walanae (Jeneberang Saddang)	19	0	23	0	0
		Saddang (Jeneberang Saddang)	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	Sampara	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	Bone Bolango	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	0	0	0	0	0
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	Ake Malamo	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	Remu Ransiki	0	0	0	0	0
33	Papua	Memberamo	0	0	0	0	0
Jumlah			168	133	124	0	0

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2016

Keterangan : (-) Tidak ada kegiatan

Sumber dana = Semua Sumber Dana

Tabel 3.13. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Pembangunan Kebun Bibit Rakyat											
			2012		2013		2014		2015		2016			
			(Unit)	(Batang)	(Unit)	(Batang)	(Unit)	(Batang)	(Unit)	(Batang)	(Unit)	(Batang)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Nanggroe Aceh Darussalaam	Krueng Aceh	360	9,000,000	175	4,375,000	70	1,750,000	5	125,000	10	200,000		
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	227	5,675,000	295	7,375,000	120	3,000,000	49	625,000	39	780,000		
3	Sumatera Barat	Asahan Barumun	300	7,500,000	300	7,500,000	120	3,000,000	25	625,000	39	780,000		
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	105	2,625,000	150	3,750,000	60	1,500,000	0	0	15	300,000		
4	Riau	Indragiri Rokan	433	10,825,000	250	6,250,000	100	2,500,000	5	125,000	28	560,000		
5	Jambi	Batanghari	211	5,275,000	293	7,325,000	117	2,925,000	10	250,000	26	520,000		
6	Sumatera Selatan	Musi	306	7,650,000	300	7,500,000	80	2,000,000	5	125,000	65	1,300,000		
7	Bengkulu	Ketahun	384	9,600,000	300	7,500,000	120	3,000,000	40	1,000,000	18	360,000		
8	Lampung	Way Seputih Sekampung	655	16,375,000	667	16,675,000	240	6,000,000	5	125,000	17	340,000		
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	75	1,875,000	75	1,875,000	40	1,000,000	15	375,000	5	100,000		
10	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	74	1,850,000	76	1,900,000	20	500,000	55	1,375,000	25	500,000		
11	DKI Jakarta	Citarum Ciliwung	430	17,200,000	400	16,000,000	200	8,000,000	90	3,600,000	100	3,000,000		
12	Jawa Barat	Cimanuk Cilanduy	474	18,960,000	200	8,000,000	80	3,200,000	90	3,600,000	134	4,020,000		
13	Jawa Tengah	Pemali Jratun	517	20,680,000	500	20,000,000	200	8,000,000	75	3,000,000	110	3,300,000		
14	DI Yogyakarta	Serayu Opak Progo	446	17,840,000	366	14,640,000	200	8,000,000	71	2,840,000	62	1,860,000		
		Solo	493	19,720,000	400	16,000,000	160	6,400,000	109	4,360,000	102	3,060,000		
15	Jawa Timur	Brantas Sampean	477	19,080,000	300	12,000,000	120	4,800,000	30	1,200,000	212	6,360,000		
16	Kalimantan Barat	Kapuas	214	5,350,000	248	6,200,000	99	2,475,000	0	0	30	600,000		
17	Kalimantan Tengah	Kahayan	96	2,400,000	100	2,500,000	40	1,000,000	6	150,000	20	400,000		
18	Kalimantan Selatan	Barito	200	5,000,000	200	5,000,000	82	2,050,000	50	1,250,000	63	1,260,000		
19	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	183	4,575,000	200	5,000,000	80	2,000,000	15	375,000	40	800,000		
20	Bali	Unda Anyar	157	3,925,000	167	4,175,000	69	1,725,000	41	1,025,000	50	1,000,000		
21	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	300	7,500,000	300	7,500,000	120	3,000,000	10	250,000	10	200,000		
22	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	352	8,800,000	600	15,000,000	210	5,250,000	5	125,000	10	200,000		
23	Sulawesi Utara	Tondano	224	5,600,000	378	9,450,000	191	4,775,000	10	250,000	5	100,000		
24	Gorontalo	Bone Bolango	166	4,150,000	175	4,375,000	70	1,750,000	60	1,500,000	5	100,000		
25	Sulawesi Tengah	Palu Poso	238	5,950,000	152	3,800,000	61	1,525,000	0	0	10	200,000		
26	Sulawesi Barat	Lariang Mamasa	279	6,975,000	350	8,750,000	140	3,500,000	3	75,000	5	100,000		
27	Sulawesi Selatan	Jeneberang Sadding	221	5,525,000	250	6,250,000	100	2,500,000	7	175,000	108	2,160,000		
28	Sulawesi Tenggara	Sampara	247	6,175,000	400	10,000,000	160	4,000,000	5	125,000	18	360,000		
29	Maluku Utara	Ake Malamo	109	2,725,000	150	3,750,000	90	2,250,000	5	125,000	8	160,000		
30	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	100	2,500,000	125	3,125,000	50	1,250,000	5	125,000	8	160,000		
31	Papua Barat	Remu Ransiki	128	3,200,000	152	3,800,000	60	1,500,000	0	0	43	860,000		
32	Papua	Memberamo	200	5,000,000	470	11,750,000	150	3,750,000	15	375,000	42	840,000		
Jumlah			9,381	277,080,000	9,464	269,090,000	3,819	109,875,000	916	29,275,000	1,482	36,840,000		

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDASH) 2016

4

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, berdasarkan mandate Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

4.1. Pemanfaatan Hutan Alam

Pemanfaatan hutan alam adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan alam memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Hingga tahun 2015 tercatat ada sebanyak 265 unit manajemen pemegang IUPHHK-HA. Nilai investasi IUPHHK-HA pada tahun 2016 mencapai Rp11 triliun. Pemegang IUPHHK-HA yang bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mencapai 118 unit, dengan rincian 87 unit berpredikat baik dan 31 unit berpredikat sedang.

4.2. Pemanfaatan Hutan Tanaman

Pemanfaatan hutan tanaman adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan tanaman dengan produk berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal. Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut HT adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau korporasi untuk meningkatkan potensi, kualitas, dan produktivitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Hingga tahun 2016 tercatat ada sebanyak 286 unit manajemen pemegang IUPHHK-HT. Nilai investasi IUPHHK-HT pada tahun 2016 mencapai Rp42 triliun. Realisasi luas penanaman hutan tanaman mencapai 300.076 Ha.

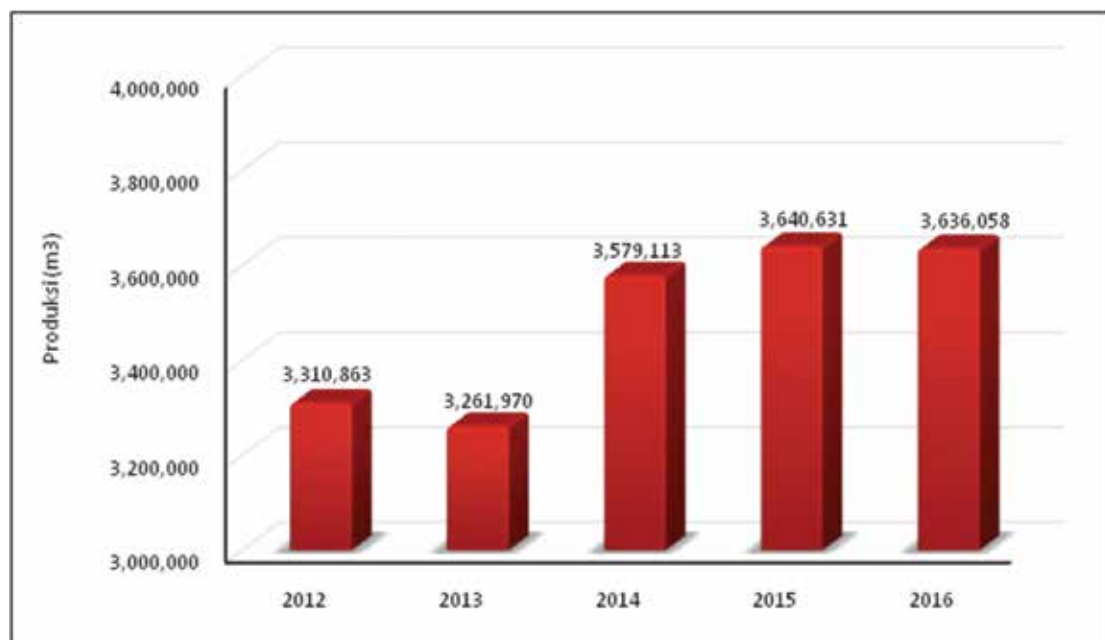
4.3. Industri Primer Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis barang-barang produksi hasil industri primer hasil hutan kayu antara lain kayu gergajian (*sawn timber*), serpih kayu (*chipwood*), bubur kayu (*pulp*), kayu lapis/triplek (*plywood*), vinir, dan LVL (*laminated veneer lumber*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis barang-barang produksi hasil industri primer hasil hutan bukan kayu antara lain minyak kemiri, madu, minyak kayu putih, dan lain-lain.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Hingga tahun 2016 produksi *Plywood* dan LVL mencapai 3.636.058,22 m³ atau mengalami penurunan dari produksi tahun 2015.



Grafik 4.1. Produksi Plywood dan LVL dari IPHHK di atas 6000 M³/Th Tahun 2012 - 2016

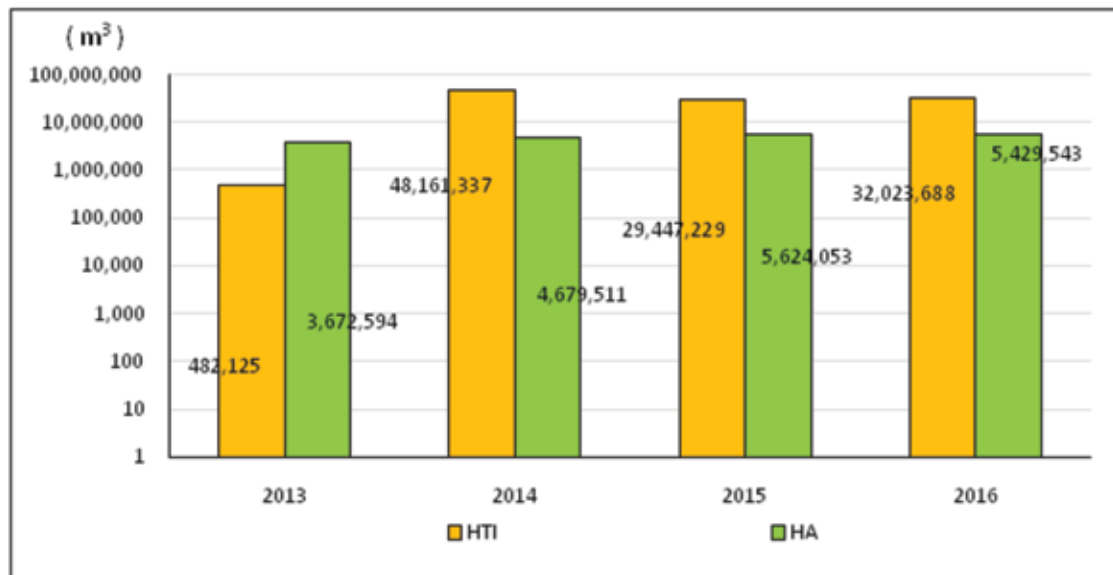
Hingga tahun 2016 produksi *Veneer* mencapai 793.587,61 m³ atau mengalami penurunan dari produksi tahun 2015 yang mencapai 983.072,96 m³. Sementara di tahun 2015 produksi kayu gergajian mencapai 1.765.080,49 m³ hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari produksi tahun 2014 yang sebelumnya hanya 1.458.623,77m³.

Di tahun 2016 produksi serpih kayu mencapai 25.898.573,06 m³ atau meningkat dari produksi tahun 2015 yang mencapai 25.856.152,52 m³.

4.4. Produksi Hasil Hutan

Produksi kayu bulat berasal dari hutan alam, terdiri atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sedangkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman terdiri atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Perusahaan Umum Hutan Negara (Perhutani).

Produksi kayu bulat dari IUPHHK-HT pada tahun 2016 mencapai 32.023.688 m³, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan alam mencapai 5.429.543 m³.



Grafik 4.2. Produksi Kayu Bulat dari IUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 - 2016

Tabel 4.1. Luas Arahkan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibeberikan Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan

No	Provinsi	Alokasi Pemanfaatan Melalui HKM, HD & HTR (Ha)	Alokasi Pemanfaatan melalui UPHHK				Jumlah
			UPHHK-HA (Ha)	UPHHK-RE (Ha)	UPHHK-HTI (Ha)	Jumlah Alokasi untuk UPHHK (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	249,825.00	0.00	155,975.00	17,800.00	173,775.00	423,600.00
2	Sumatera Utara	639,975.00	12,565.00	67,160.00		79,725.00	719,700.00
3	Sumatera Barat	128,230.00	9,060.00	71,330.00	19,970.00	100,360.00	228,590.00
4	Riau	706,245.00	0.00	40,965.00		40,965.00	747,210.00
5	Jambi	215,090.00	0.00	50,710.00	25,540.00	76,250.00	291,340.00
6	Sumatera Selatan	116,010.00	0.00	18,475.00	0.00	18,475.00	134,485.00
7	Bengkulu	84,580.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	89,780.00
8	Lampung	37,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,155.00
9	Kep. Bangka Belitung	107,395.00	0.00	0.00	56,610.00	56,610.00	164,005.00
10	Kep. Riau	187,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,045.00
11	Nusa Tenggara Barat	52,855.00	0.00	109,385.00	0.00	109,385.00	162,240.00
12	Nusa Tenggara Timur	296,125.00	0.00	6,700.00	45,120.00	51,820.00	347,945.00
13	Kalimantan Barat	504,200.00	119,700.00	102,915.00	127,125.00	349,740.00	853,940.00
14	Kalimantan Tengah	922,220.00	330,120.00	163,390.00	322,390.00	815,900.00	1,738,120.00
15	Kalimantan Selatan	155,050.00		20,920.00	0.00	20,920.00	175,970.00
16	Kalimantan Timur & Utara	456,580.00	198,300.00	189,860.00	40,580.00	428,740.00	885,320.00
17	Sulawesi Utara	80,595.00	60,140.00	26,805.00	0.00	86,945.00	167,540.00
18	Sulawesi Tengah	263,700.00	169,170.00	54,165.00	4,550.00	227,885.00	491,585.00
19	Sulawesi Selatan	283,975.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	296,710.00
20	Sulawesi Tenggara	248,780.00	22,670.00	0.00	0.00	22,670.00	271,450.00
21	Gorontalo	22,530.00	22,140.00	3,100.00	6,515.00	31,755.00	54,285.00
22	Sulawesi Barat	80,210.00	19,400.00	20,240.00	0.00	39,640.00	119,850.00
23	Maluku	209,060.00	290,790.00	163,485.00	74,180.00	528,455.00	737,515.00
24	Maluku Utara	87,010.00	195,620.00	52,365.00	34,645.00	282,630.00	369,640.00
25	Papua Barat	98,890.00	86,465.00	4,565.00	8,580.00	99,610.00	198,500.00
26	Papua	598,035.00	615,265.00	597,085.00	67,900.00	1,280,250.00	1,878,285.00
Total		6,831,365.00	2,156,605.00	1,932,330.00	851,505.00	4,940,440.00	11,771,805.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari 2016

* Luas hasil perhitungan secara digital

Catatan :

HP dalam areal KPH yang telah disahkan RPHJP-nya seluas 1.850.370 ha

HP dalam PIPPIB (revisi XI) seluas 9.168.325 ha

Tabel 4.2. Luas Hutan Produksi yang Dibeabani Hak Tahun 2016

No	Provinsi	Luas Hutan Produksi (Ha)	Luas Hutan Produksi yang Dibeabani Hak										Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)	Jumlah
			Hutan Alam		Hutan Tanaman	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)			Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK) Sylvo Pastura	(Ha)	(Ha)	(Ha)		
			Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA)	Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)		Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu-Hutan Alam (IUPHHBK-HA)	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu- Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Aceh	711.835,00	125.204,00	-	232.401,00	4.740,00	-	-	-	362.345,00				
2	Sumatera Utara	1.421.905,00	343.603,00	-	368.650,00	-	-	73,00	-	712.326,00				
3	Sumatera Barat	781.448,00	183.705,00	-	51.464,90	-	-	-	-	235.169,90				
4	Riau	4.542.329,00	183.238,00	149.807,00	1.606.766,00	8.000,00	21.418,00	-	-	1.969.229,00				
5	Kepulauan Riau	272.174,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
6	Jambi	1.233.476,00	56.045,00	85.050,00	707.862,00	-	-	-	-	848.957,00				
7	Bengkulu	210.916,00	56.070,00	12.672,00	-	-	-	-	-	68.742,00				
8	Sumatera Selatan	2.088.794,00	56.000,00	60.470,00	1.333.925,00	-	-	-	22.800,00	1.473.195,00				
9	Kep. Bangka Belitung	433.577,00	-	-	244.322,00	-	-	-	-	244.322,00				
10	Lampung	225.090,00	-	-	115.834,00	-	-	543,00	-	116.377,00				
11	DKI Jakarta	158,35	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
12	Jawa Barat	393.117,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
13	Banten	76.437,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
14	Jawa Tengah	546.290,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
15	D.I Yogyakarta	13.851,28	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
16	Jawa Timur	782.772,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
17	Bali	8.626,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
18	NTB	437.309,00	28.644,00	-	68.590,00	-	-	-	-	97.234,00				
19	NTT	536.415,00	-	-	54.175,00	-	-	-	-	54.175,00				
20	Kalimantan Barat	4.457.681,00	1.058.930,00	14.080,00	1.900.638,00	-	-	-	-	2.973.648,00				
21	Kalimantan Tengah	9.742.813,00	4.126.776,00	214.546,00	752.766,00	-	-	-	25.800,00	5.119.888,00				
22	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	9.302.924,00	5.169.541,00	86.450,00	1.916.211,00	-	-	-	-	7.172.202,00				
23	Kalimantan Selatan	1.040.272,00	231.066,00	-	552.522,00	-	-	-	-	783.588,00				
24	Sulawesi Utara	287.990,00	26.800,00	-	7.500,00	-	-	-	-	34.300,00				
25	Gorontalo	423.407,00	-	-	75.920,00	-	-	-	-	75.920,00				
26	Sulawesi Tengah	2.010.107,00	409.255,00	-	73.320,00	-	-	-	-	482.575,00				
27	Sulawesi Tenggara	962.006,00	-	-	54.280,00	-	434,00	-	-	54.714,00				
28	Sulawesi Selatan	641.846,00	-	-	21.430,00	-	-	-	-	21.430,00				
29	Sulawesi Barat	425.156,00	114.565,00	-	47.610,00	-	-	-	-	162.175,00				
30	Maluku	2.862.823,00	733.645,00	-	66.205,00	-	-	-	-	799.850,00				
31	Maluku Utara	1.712.663,00	633.181,00	-	65.908,00	-	-	-	-	699.089,00				
32	Papua	14.816.932,00	2.676.535,00	-	424.695,00	-	101.580,00	-	-	3.202.810,00				
33	Papua Barat	5.441.290,00	3.062.978,00	-	99.980,00	-	165.055,00	-	-	3.328.013,00				
Jumlah		68.844.433,35	19.275.781,00	623.075,00	10.842.974,90	279.375,00	21.852,00	616,00	48.600,00	31.092.273,90				

Sumber : Direktorat Jendral Pengolahan Hutan Produksi Lestari 2016

Tabel 4.3. Nilai Investasi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) Tahun 2016

No	Provinsi	Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA)			Nilai Investasi					Total Aset (Rp)
		Jumlah (UM)	Jumlah Yang Lapor (UM)	Luas (Ha)	Rencana Investasi		Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)		
					(Rp.)	(USD)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aceh	2	0	125,204.00	-	100,635,520	-	-	-	
2	Sumatera Utara	7	4	343,603.00	-	339,257,851	69,231,175,778	26,591,639,731	134,287,471,483	
3	Sumatera Barat	4	3	183,705.00	-	121,877,487	131,240,698,258	55,217,840,405	170,163,388,586	
4	Riau	3	3	183,238.00	-	92,971,674	38,499,354,534	11,003,359,846	275,955,018,017	
5	Jambi	2	1	56,045.00	-	51,402,690	10,299,489,509	5,613,434,924	7,936,675,955	
6	Sumatera Selatan	1	1	56,000.00	-	-	631,627,755	101,999,079	30,598,853,507	
7	Bengkulu	2	0	56,070.00	-	43,926,900	-	-	-	
8	Kalimantan Barat	23	9	1,058,930.00	-	720,305,834	763,133,959,508	286,903,487,121	1,647,191,591,951	
9	Kalimantan Tengah	59	47	4,001,846.00	323,797,922,302	2,278,849,899	2,695,858,874,904	784,095,141,182	3,744,975,789,430	
10	Kalimantan Selatan	4	3	231,066.00	-	127,006,062	59,052,170,033	3,162,810,533	156,298,155,581	
11	Kalimantan Timur	56	42	3,303,760.00	9,682,042,393,500	2,540,762,152	1,442,636,063,241	523,551,267,982	2,183,475,106,203	
12	Kalimantan Utara	25	15	1,865,781.00	-	1,094,660,434	503,259,427,043	75,795,833,369	698,954,604,081	
13	Sulawesi Utara	1	0	26,800.00	-	9,005,500	-	-	-	
14	Gorontalo	0	0	0.00	-	-	-	-	-	
15	Sulawesi Tengah	8	3	409,255.00	-	228,587,183	88,470,725,397	25,307,953,762	112,530,681,017	
16	Sulawesi Tenggara	0	0	0.00	-	-	-	-	-	
17	Sulawesi Barat	2	2	114,565.00	-	116,389,000	32,570,887,628	9,208,183,770	42,376,635,765	
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	28,644.00	-	-	-	-	-	
19	Maluku	13	4	733,645.00	210,380,710,800	142,185,500	82,154,808,057	28,230,053,048	182,724,709,226	
20	Maluku Utara	12	8	633,181.00	-	442,097,181	158,067,210,757	77,261,315,598	299,480,748,648	
21	Papua	18	7	2,675,535.00	-	1,048,860,268	141,670,885,559	68,687,146,505	231,851,516,019	
22	Papua Barat	22	16	3,062,978.00	4,038,889,660,280	1,130,092,399	436,066,831,006	178,325,977,449	1,184,925,842,824	
Jumlah		265	168	19,149,851.00	14,255,110,686,882	10,628,873,534	6,652,844,188,967	2,159,057,444,304	11,103,726,788,293	

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2016

Tabel 4.4. Pengayaan dan Penanaman Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu--Hutan Alam (IUPHHK-HA) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

No	Provinsi	Kegiatan Tebang Pilih Tanamn Indonesia (TPTI)		Kegiatan Non Tebang Pilih Tanamn Indonesia (TPTI)				Total Realisasi Penanaman (Ha)
		Pengayaan & Penanaman Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 (Et + 3)		Penananaman Tanah Kosong		Penanaman Kanan Kiri Jalan		
		Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SUMATERA UTARA	310.72	75.00	139.60	30.00	336.00	29.00	134.00
3	SUMATERA BARAT	733.12	48.58	257.00	30.00	62.26	18.68	97.26
4	RIAU	280.00	40.90	287.00	0.00	98.50	0.00	40.90
5	JAMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SUMATERA SELATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	BENGKULU	780.00	0.00	15.60	0.00	15.00	0.00	0.00
8	KALIMANTAN BARAT	7,473.79	0.00	239.67	0.00	379.28	0.00	0.00
9	KALIMANTAN TENGAH	26,722.10	11,058.67	5,191.95	1,343.57	3,156.85	1,508.03	13,910.27
10	KALIMANTAN SELATAN	9,593.32	205.00	50.00	10.50	97.00	9.80	225.30
11	KALIMANTAN TIMUR	7,632.20	5,336.45	1,934.00	671.50	1,079.25	436.00	6,443.95
12	KALIMANTAN UTARA	3,519.65	0.00	2,304.00	30.00	130.00	30.00	60.00
13	SULAWESI UTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GORONTALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	SULAWESI TENGAH	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	0.00	0.00
16	SULAWESI TENGGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SULAWESI BARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MALUKU	7,380.42	0.00	1,494.00	0.00	572.96	0.00	0.00
20	MALUKU UTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PAPUA	1,890.25	255.00	618.50	88.33	5,936.25	85.00	428.33
22	PAPUA BARAT	165.06	0.00	25.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Jumlah		66,480.63	17,019.59	12,606.32	2,203.90	11,886.35	2,116.51	21,340.00

Catatan : Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI Perusahaan IUPHHK-HA, BPHP, dan Dinas Kehutanan Provinsi

Tabel 4.5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang Bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

No	Provinsi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA)			Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (RKUPHHK-HA)			Rencana Kerja Tahunan (RKT)				Sertifikat-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari			
		Jml Unit (UM)	Luas (Ha)	Jml Unit (UM)	Jml Unit (UM)	Etat (M ³)	Jml RKT (UM)	Target (M ³)	Realisasi (M ³)	Jml Unit (UM)	Luas (Ha)	Jml Unit (UM)	Luas (Ha)	Jml Unit (UM)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Aceh	2	125,204	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
2	Sumatera Utara	7	343,603	6	2,826,335	3	246,017.00	62,489.86	0	-	-	0	-	0	-
3	Sumatera Barat	4	183,705	4	2,432,174	4	172,551.20	89,412.69	1	48,420	0	0	-	0	-
4	Riau	3	183,238	3	527,197	2	581,275.71	30,158.92	2	135,551	0	0	-	0	-
5	Jambi	2	56,045	2	655,410	1	-	4,044.78	0	-	-	0	-	0	-
6	Sumatera Selatan	1	56,000	1	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-
7	Bengkulu	2	56,070	1	646,500	1	36,390.89	4,367.71	1	33,070	0	0	-	0	-
8	Kalimantan Barat	23	1,088,930	22	9,380,302	17	539,050.00	114,079.14	5	323,730	0	0	-	0	-
9	Kalimantan Tengah	59	4,126,776	57	48,504,365	48	2,456,924.52	1,888,573.36	29	2,510,181	9	9	502,405	9	502,405
10	Kalimantan Selatan	4	231,066	4	798,942	4	7,408.96	17,356.18	0	-	2	2	174,636	2	174,636
11	Kalimantan Timur	56	3,303,760	55	32,745,043	41	905,639.87	1,148,031.07	17	1,310,163	7	7	331,560	7	331,560
12	Kalimantan Utara	25	1,865,781	25	2,366,280	21	731,891.74	755,278.51	17	1,557,461	1	1	55,150	1	55,150
13	Sulawesi Utara	1	26,800	1	466,481	1	-	789.64	0	-	0	0	-	0	-
14	Sulawesi Tengah	8	409,255	7	2,266,021	3	75,604.61	3,539.19	0	-	0	0	-	0	-
15	Sulawesi Barat	2	114,565	2	1,409,432	1	-	-	0	-	0	0	-	0	-
16	Nusa Tenggara Barat	1	28,644	1	100,251	1	74,441.00	11,792.00	0	-	0	0	-	0	-
17	Maluku	13	733,645	11	5,873,140	9	300,021.49	267,017.62	2	211,890	2	2	133,900	2	133,900
18	Maluku Utara	12	633,181	10	4,537,694	7	63,358.82	120,402.70	1	63,405	2	2	81,290	2	81,290
19	Papua	18	2,675,535	16	15,229,489	13	2,627,178.24	525,314.23	4	792,980	2	2	308,640	2	308,640
20	Papua Barat	22	3,062,978	20	24,270,491	15	1,077,738.40	408,388.09	8	1,210,860	6	6	684,180	6	684,180
Jumlah		265	19,274,781	248	172,770,895	192	9,895,492.45	5,451,035.69	87	8,197,711	31	31	2,271,761	31	2,271,761

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (31 Desember 2016)

Tabel 4.6. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)

Unit Manajemen/Perusahaan						
No	Provinsi	Nama Perusahaan	Jml UM (Unit)	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Nomor SK IUPHHK-RE
1	2	3	4	5	6	7
1	Riau	1. PT Gemilang Cipta Nusantara	5	20,265.00	Pelawan, Riau	KepMenhut No. SK.395/Menhut-II/2012
		2. PT Gemilang Cipta Nusantara		20,450.00	Kepulauan Meranti, Riau	KepMenhut No. SK.825/Menhut-II/2013
		3. PT Sinar Mutiara Nusantara		32,830.00	Pelawan, Riau	KepMenhut No. SK.162/Menhut-II/2014
		4. PT Global Alam Nusantara		36,850.00	Pelawan, Riau	KepMenhut No. SK.230Menhut-II/2014
		5. PT The Best One Unitimber		39,412.00	Pelawan, Riau	KepMenhut No. SK.747Menhut-II/2014
2	Bengkulu	1. PT Sipef Biodiversity Indonesia	1	12,672.00	Mukomuko, Bengkulu	KepMenhut No. SK.622Menhut-II/2013
3	Jambi	1. PT Restorasi Ekosistem Indonesia	2	46,385.00	Batanghari, Jambi	KepMenhut No. SK.327/Menhut-II/2010
		2. PT Alam Bukit Tiga Puluh		38,665.00	Tebo, Jambi	Kep. Ka. BKPM a.n. Menlhk No. 7/1/IUPHHK-RE/PMDN/2015
4	Sumatera Selatan	1. PT Restorasi Ekosistem Indonesia	2	52,170.00	Musi Banyuasin, Sumsel	KepMenhut No. SK.293/Menhut-II/2007
		2. PT Karawang Ekawana Nugraha		8,300.00	Ogan Komering Ilir, Sumsel	KepMenhut No. SK.142Menhut-II/2014
5	Kalimantan Barat	1.PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari	1	14,080.00	Kubu Raya	KepMenhut No. SK.560/Menhut-II/2011
6	Kalimantan Tengah	1. PT Rimba Raya Conservation	4	37,151.00	Seruyan, Kalimantan Tengah	KepMenhut No. SK.735/Menhut-II/2013
		2. PT Rimba Makmur Utama		108,255.00	Katingan, Kalimantan Tengah	KepMenhut No. SK.734/Menhut-II/2013
		3. PT Alam Sukses Lestari		19,520.00		
		4. PT Rimba Makmur Utama		49,620.00	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	
7	Kalimantan Timur	1. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, PT (Eks PT Mugitriman Intercontinental)	1	86,450.00	Kutai Timur, Kaltim	KepMenhut No. SK.464/Menhut-II/2010
Total			16	623,075.00		

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelaaan Hutan Produksi Lestari 2016

Tabel 4.7. Investasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (RE)

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Luas (Ha)	SK Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)			Investasi 2016	
				Nomor SK	Tanggal SK	Rp	USD	
1	2	3	4		5	6	7	
1	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	Sumatera Selatan	52,170.00	SK. 293/Menhut-II/2007	28 Agustus 2007	53,995,894,661	-	-
2	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	Jambi	46,385.00	SK. 327/Menhut-II/2010	25 Juli 2010	120,034,490,417	-	-
3	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia	Kalimantan Timur	86,450.00	SK. 464/Menhut-II/2010	18 Agustus 2012	12,875,102,620	959,397	
4	PT. Ekosistem Katulistiwa Lestari	Kalimantan Barat	14,080.00	SK. 560/Menhut-II/2011	30 September 2011	4,556,250,000	-	-
5	PT. Gemilang Cipta Nusantara	Riau	20,265.00	SK. 395/Menhut-II/2012	24 Juli 2012	217,694,080,000	-	-
6	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	Bengkulu	12,672.00	SK.622/Menhut-II/2013	17 September 2013	494,869,657,616	-	-
7	PT. Rimba Makmur Utama	Kalimantan Tengah	108,255.00	SK.734/Menhut-II/2013	25 Oktober 2013	43,632,075,000	-	-
8	PT. Rimba Raya Conservation	Kalimantan Tengah	37,151.00	SK. 735/Menhut-II/2013	25 Oktober 2013		30,532,500	
9	PT. Gemilang Cipta Nusantara	Riau	20,450.00	SK. 825/Menhut-II/2013	19 November 2013	239,451,896,000	-	-
10	PT. Karawang Ekawana Nugraha	Sumsel	8,300.00	SK. 142/Menhut-II/2014	11 Februari 2014	900,000,000	-	-
11	PT. Sinar Mutiara Nusantara	Riau	32,830.00	SK. 162/Menhut-II/2014	18 Februari 2014	437,300,000,000	-	-
12	PT. Global Alam Nusantara	Riau	36,850.00	SK. 230/Menhut-II/2014	14 Maret 2014	39,905,375,000	-	-
13	PT. The Best One Unitimber	Riau	39,412.00	SK. 747/Menhut-II/2014	15 September 2014	79,052,895,000	-	-
14	PT. Alam Bukit Tigapuluh	Jambi	38,665.00	Keputusan Kepala BKPM an. MenLHK No.7/IUPHHK-HA/PMDN/2015	24 Juli 2015	386,310,094,000	-	-
15	PT Alam Sukses Lestari	Kalimantan Tengah	19,520.00			-	-	-
16	PT Rimba Makmur Utama	Kalimantan Tengah	49,620.00			-	-	-
Total Investasi			623,075.00			2,130,577,810,314	31,491,897	

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.8. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK) Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nomor / Tanggal SK	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	PT. Sumatera Dairy Farm	Sumatera Utara	Tanah Karo	SK.605/Menhut-II/2011 12 Oktober 2011	73.00
2	PT. Penyelamat Alam Nusantara	Lampung	Lampung Selatan	SK.834/Menhut-II/2014 26 September 2014	543.00
Jumlah					616.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.9. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJL) s/d Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nomor / Tanggal SK	Luas (Ha)
1	2	3	4	6	5
1	PT. Global Alam Lestari	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	SK. 492/Menhut-II/2013 12 Juli 2013	22,280.00
2	PT. Hutan Amanah Lestari	Kalimantan Tengah	Barito Selatan dan Barito Timur	SK. 475/Menhut-II/2013 3 Juli 2013	25,800.00
Jumlah					48,080.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.10. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Definitif s/d Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	SK Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)		Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas (Ha)	Kabupaten / Kota	Masa Berlaku	Keterangan
		Nomor SK	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	National Sago Prima, PT.	IUPHHBK-HT SK.380/Menhut-II/2009 Jo SK.77/Menhut-II/2013	25-06-2009 04-02-2013	Sagu	21,418.00	Bengkalis/ Riau	25 Tahun	Telah mendapat pengesahan RKUPHHBK
2	Agrindo Indonesia Jaya, PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati Nomor 63 Tahun 2009 Tgl 20-10-2009, jo. SK Nomor : 522.5/90/BUP/IX/2013	13-09-2013	Sagu	39,920.00	Mamberamo Raya/ Papua	8 Tahun	Revisi SK Bupati No.63 Tahun 2009 Luas 327.421 ha
3	Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Papua, PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No. 86 Tahun 2010	12 Mei 2010	Sagu	40,000.00	Sorong Selatan/ Papua Barat	25 Tahun	
4	Nusantara Sago Prima, Divisi Kaureh PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati No.231 Tahun 2010	6-09-2010	Sagu	51,000.00	Jayapura/Papua	20 Tahun	Telah mendapat pengesahan RKUPHHBK
5	Nusantara Sago Prima, PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati No.45 Tahun 2011	25-03-2011	Sagu	10,660.00	Jayapura/ Papua	20 Tahun	
6	Tunas Pangan Saguindo, PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati No.5/2011	24-01-2011	Sagu	54,000.00	Teluk Bintuni / Papua Barat	25 Tahun	
7	Tugu Palma Sejati, PT.	IUPHHBK-HA SK Bupati No.6/2011	24-9-2011	Sagu	55,000.00	Teluk Bintuni/ Papua Barat	25 Tahun	
8	Tunas Sari, KUD	IUPHHBK-HT SK. Bupati Konawe Nomor 475 Tahun 2011	05-08-2011	Getah Pinus	30.00	Konawe / Sulawesi Tenggara	10 Tahun	
9	Perum PERHUTANI	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No.522.223/B55/XII Tahun 2012	14-12-2012	Sagu	16,055.00	Sorong Selatan/ Papua Barat	25 Tahun	
10	Sinar Beru-beru, PT	IUPHHBK-HA SK. Bupati Nomor : 522.22/KPTS-182/XII/2012	18-12-2012	Rolan	-	Mamasa/Sulawesi Barat	10 Tahun	
11	Dimitra Jaya, CV.	IUPHHBK-HT SK. Bupati Konawe Nomor 340 Tahun 2013.	11-05-2013	Getah Pinus	27.00	Konawe/Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
12	Tunas Sari, KUD	IUPHHBK-HT SK. Bupati Muna Nomor 427 Thn 2013	22-07-2013	Getah Pinus	30.00	Muna/Sulawesi Tenggara	10 Tahun	
13	First Flower, PT	IUPHHBK-HA SK. Bupati Kep. Meranti Nomor 132 Tahun 2013	01-08-2013	Nipah	8,000.00	Kepulauan Meranti/ Riau	10 Tahun	
14	Star Borneo Coal, PT	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2013	23-09-2013	Getah Pinus	28.56	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
15	PT. Biz Trans Indonesia	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2013	23-09-2013	Getah Pinus	29.14	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	

No	Nama Perusahaan	SK Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)		Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas (Ha)	Kabupaten / Kota	Masa Berlaku	Keterangan
		Nomor SK	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	CV. Dimitra Jaya	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2013	23-09-2013	Getah Pinus	29.83	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
17	Matahari, KSU	IUPHHBK-HT SK. Bupati Konawe Nomor 565 Tahun 2013	25-11-2013	Getah Pinus	30.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
18	Gerbang Biotek Sejahtera, PT	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 522.4/706/ Tahun 2013	25-11-2013	Getah Pinus	29.56	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
19	Victoria Nuansa Karya, PT	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 552.4/707/ Tahun 2013	25-11-2013	Getah Pinus	29.80	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
20	Gerbang Citra Sarana, PT	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 552.4/708/ Tahun 2013	25-11-2013	Getah Pinus	29.58	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
21	PD. Pembangunan Tanah Gayo	IUPHHBK-HA SK Gubernur No. 522.614/BP2T/1046/IUPHHBK/V/2014	23-05-2014	Getah Pinus	4,740.00	Aceh Tengah/ Aceh	25 Tahun	
22	Karya Nusantara Indah, CV	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2014	07-03-2014	Getah Pinus	30.00	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
23	Tunas Karya Mandiri, CV	IUPHHBK-HT SK. Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2014	07-03-2014	Getah Pinus	30.00	Kolaka Timur/ Sulawesi Tenggara	5 Tahun	
24	Sdr. Harapin	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/01/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
25	Sdr. Rusli	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/02/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
26	Sdr. Muhammad Anas	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/03/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
27	Sdr. Nusul	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/04/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
28	Sdr. Nusul	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/05/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
29	Sdr. Dwi Rathaningsih	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/06/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
30	Sdr. Akib	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/07/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
31	Sdr. Leni	IUPHHBK-HT SK. Nomor : 517/08/BPTSP/Tahun 2014	20-05-2014	Getah Pinus	10.00	Konawe/ Sulawesi Tenggara	3 Tahun	
Total Luas					301,226.47			

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) Tahun 2011 s/d 2015

No	Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)											
		2012		2013		2014		2015		2016			
		Jumlah UM (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah UM (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah UM (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah UM (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah UM (Unit)	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Aceh	5	226,820.00	6	237,214.00	6	237,204.00	6	232,401.00	6	232,401.00		
2	Sumatera Utara	8	371,700.00	7	365,950.00	8	368,650.00	8	368,650.00	8	368,650.00		
3	Sumatera Barat	3	50,649.00	3	49,881.00	4	51,464.90	4	51,464.90	4	51,465.00		
4	Riau	50	1,657,051.00	56	1,656,897.00	56	1,653,184.00	55	1,631,304.00	53	1,606,766.00		
5	Kep Riau	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
6	Jambi	17	644,134.00	17	666,954.00	18	694,657.00	18	694,657.00	20	707,862.00		
7	Sumatera Selatan	19	1,337,492.00	19	1,330,270.00	19	1,303,010.00	19	1,303,010.00	19	1,333,925.00		
8	Bengkulu	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
9	Bangka Belitung	5	122,193.00	6	188,653.00	7	214,912.00	8	244,322.00	8	244,322.00		
10	Lampung	4	114,444.00	4	114,444.00	4	115,834.00	4	115,834.00	4	115,834.00		
11	DKI Jakarta	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
12	Jawa Barat	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
13	Banten	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
14	Jawa Tengah	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
15	DI Yogyakarta	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
16	Jawa Timur	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
17	Bali	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
18	Nusa Tenggara Barat	3	68,590.00	3	68,590.00	3	68,590.00	3	68,590.00	3	68,590.00		
19	Nusa Tenggara Timur	0	0.00	1	41,515.00	2	54,175.00	2	54,175.00	2	54,175.00		
20	Kalimantan Barat	34	1,731,706.00	36	1,756,491.00	41	1,901,491.00	42	1,922,136.00	42	1,900,638.00		
21	Kalimantan Tengah	19	554,579.43	21	583,074.43	23	623,884.43	23	623,884.43	27	752,766.00		
22	Kalimantan Selatan	13	497,560.00	15	529,660.00	17	552,255.00	17	552,255.00	17	552,522.00		
23	Kalimantan Timur dan Utara	41	1,746,393.00	43	1,809,174.00	47	1,902,791.00	48	1,918,291.00	48	1,916,211.00		
24	Sulawesi Utara	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00		
25	Gorontalo	2	75,920.00	2	75,920.00	2	75,920.00	2	75,920.00	2	75,920.00		
26	Sulawesi Tengah	1	13,400.00	1	13,400.00	2	73,320.00	2	73,320.00	2	73,320.00		
27	Sulawesi Tenggara	0	0.00	0	0.00	2	29,865.00	3	54,280.00	3	54,280.00		
28	Sulawesi Selatan	1	18,350.00	1	18,350.00	1	18,350.00	1	18,350.00	2	21,430.00		
29	Sulawesi Barat	2	23,900.00	2	20,240.00	3	47,610.00	3	47,610.00	3	47,610.00		
30	Maluku	3	87,470.00	2	66,205.00	2	66,205.00	2	66,205.00	2	66,205.00		
31	Maluku Utara	4	44,643.00	5	65,908.00	5	65,908.00	5	65,908.00	5	65,908.00		
32	Papua	3	440,250.00	3	440,250.00	2	233,450.00	5	524,675.00	4	424,695.00		
33	Papua Barat	0	0.00	0	0.00	2	178,980.00	0	0.00	1	99,980.00		
Jumlah		238	9,834,744.43	254	10,106,540.43	277	10,539,210.33	281	10,714,742.33	286	10,842,975.00		

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.12. Nilai Investasi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Berdasarkan Laporan Keuangan s/d Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah (UM)	Luas (Ha)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Total Asset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	6	232,401.00	94,590,205,514	97,870,652,809	106,925,342,025
2	Sumatera Utara	8	368,650.00	643,242,346,577	489,755,001,614	1,883,394,144,618
3	Sumatera Barat	4	51,464.90	124,402,654,358	84,908,603,203	273,884,369,652
4	Riau	53	1,606,766.00	1,783,670,881,049	702,519,239,943	10,551,647,398,050
5	Bangka Belitung	8	244,322.00	5,264,772,074	3,897,574,490	1,921,675,376,494
6	Jambi	20	707,862.00	1,123,254,610,132	577,748,901,834	4,898,399,349,142
7	Sumatera Selatan	19	1,333,925.00	873,329,767,503	612,525,793,691	6,407,623,164,624
8	Bengkulu	0	0.00	-	-	-
9	Lampung	4	115,834.00	218,483,983,291	100,034,765,338	267,089,210,270
10	Kalimantan Barat	42	1,900,638.00	429,274,034,513	271,078,339,583	5,162,547,511,009
11	Kalimantan Tengah	27	752,766.00	63,097,092,258	52,152,816,430	591,118,045,591
12	Kalimantan Selatan	17	552,522.00	201,548,503,641	23,605,474,908	951,631,363,504
13	Kalimantan Timur	44	1,654,240.00	1,433,579,051,214	1,187,121,916,375	6,337,342,480,649
14	Kalimantan Utara	4	261,971.00	287,685,559,349	229,299,180,626	1,013,267,322,051
15	Sulawesi Utara	1	7,500.00	11,009,123,374	7,864,701,726	51,486,034,025
16	Sulawesi Tengah	2	73,320.00	-	-	-
17	Sulawesi Tenggara	3	54,280.00	-	-	-
18	Sulawesi Selatan	2	21,430.00	-	-	196,766,000,000
19	Sulawesi Barat	3	47,610.00	-	-	103,338,909,000
20	Gorontalo	2	75,920.00	-	-	435,647,206,000
21	Nusa Tenggara Barat	3	68,590.00	-	-	47,639,091,000
22	Nusa Tenggara Timur	2	54,175.00	-	-	349,220,000,000
23	Maluku	2	66,205.00	-	-	349,220,000,000
24	Maluku Utara	5	65,908.00	10,380,783,526	843,157,933	302,110,893,112
25	Papua	4	424,695.00	-	-	755,097,000,000
26	Papua Barat	1	99,980.00	-	-	-
Total		286	10,842,974.90	7,302,813,368,373	4,441,226,120,503	42,957,070,210,816

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.13. Penanaman pada Hutan Tanaman Industri (HTI)

No	Provinsi	Rekapitulasi Penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) IUPHHK-HTI Pulp/Kertas, Pertukangan & Energi (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	27,251.80	13,001.40	17,193.44	16,635.00	18,317.00
3	Sumatera Barat	2,419.00	317.00	1,500.00	250.70	0.00
4	Riau	125,701.06	142,703.28	299,567.00	126,903.00	118,345.00
5	Jambi	37,824.39	38,795.17	39,093.00	36,726.00	34,747.00
6	Sumatera Selatan	85,411.05	115,433.66	72,679.00	63,730.00	92,230.00
7	Lampung	1,928.00	2,342.70	443.30	916.00	3,030.00
8	Bangka Belitung	10.00	1,524.23	135.29	0.00	396.00
9	Kalimantan Barat	17,167.00	16,327.13	17,021.00	3,668.00	7,428.00
10	Kalimantan Tengah	7,261.00	10,488.24	8,903.88	11,541.47	10,386.00
11	Kalimantan Selatan	6,955.00	6,985.80	2,264.00	1,432.00	1,765.00
12	Kalimantan Timur dan Utara	44,837.77	42,449.01	48,238.00	31,954.00	45,724.00
13	Sulawesi Utara	0.00	72.98	181.51	0.00	0.00
14	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	181.51	0.00	0.00
15	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Gorontalo	415.00	1,421.12	1,276.47	5,375.00	3,670.00
18	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
19	Nusa Tenggara Barat	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Maluku	67.00	68.00	135.29	0.00	0.00
22	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Papua	1,028.00	526.00	114.00	0.00	487.26
24	Perum Perhutani	47,259.00	39,683.00	55,949.00	52,305.00	30,230.00
Jumlah		405,557.07	432,138.72	564,875.69	351,436.17	367,125.26

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi (PHPL) 2016

Tabel 4.14. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2016

No	Provinsi	Sumber Bahan Baku											Pedagang	Impor	Lelang	Jumlah
		Stok Awal Tahun di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) (M ³)	Izin Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) (M ³)	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) (M ³)	Izin Pemanfaatan Kayu (M ³)	Land Cruising Hutan Tanaman Industri (HTI) (M ³)	Kayu Rakyat (M ³)	Perkebunan (M ³)	Perhutani (M ³)	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Lain (M ³)	(M ³)	(M ³)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Aceh	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000		
2	Sumatera Utara	83,322	193,678	1,020,500	70,572	5,000	528,845	176,121	-	2,301	-	-	-	2,080,339		
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Riau	1,116,826	51,409	26,101,656	5,424	63,627	208,045	74,645	-	-	-	1,053,000	-	28,674,632		
5	Jambi	347,567	925	6,279,447	250	11,100	814,348	304,900	-	-	-	-	200	7,758,737		
6	Sumatera Selatan	402,344	-	3,842,336	-	15,652	1,309,126	331,453	-	-	-	330,000	-	6,230,911		
7	Bengkulu	312	36,000	-	-	-	55,400	-	-	-	-	-	-	91,712		
8	Lampung	456	-	-	-	-	-	112,178	-	-	-	-	-	112,634		
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	DKI Jakarta	-	7,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,224		
12	Jawa Barat	27,304	7,000	-	-	-	223,795	79,787	7,200	7,145	8,226	1,000	-	361,457		
13	Jawa Tengah	116,748	735,620	-	18,767	13,164	4,430,072	46,000	53,854	263,188	100,911	25,071	-	5,803,395		
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Jawa Timur	248,262	855,629	5,200	38,048	6,545	3,270,147	15,500	307,654	265,002	324,200	4,199	-	5,340,386		
16	Banten	12,985	6,000	-	-	-	250,600	21,300	8,000	-	-	-	-	298,885		
17	Bali	9,151	15,680	-	-	-	4,450	-	-	7,150	-	-	-	36,431		
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Kalimantan Barat	88,421	828,473	55,723	-	227,290	9,000	43,000	-	73,379	-	-	-	1,325,286		
21	Kalimantan Tengah	65,473	203,210	808,688	60,790	22,600	6,225	-	-	-	-	-	-	1,166,986		
22	Kalimantan Selatan	188,470	916,405	2,000	10,800	22,209	96,648	13,350	-	79,361	-	476	-	1,329,719		
23	Kalimantan Timur	944,941	272,748	1,873,022	88,383	160,430	101,041	-	-	-	-	-	-	3,440,565		
24	Kalimantan Utara	40,827	381,756	183,952	13,387	30,000	-	-	-	-	-	-	-	649,922		
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Sulawesi Selatan	14,446	199,927	-	38,500	10,000	136,010	-	-	-	-	-	-	398,883		
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Maluku	-	2,871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,871		
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Papua	137,860	817,279	-	151,889	594,299	-	-	-	-	-	-	-	1,701,327		
34	Papua Barat	35,630	437,414	-	43,192	-	-	-	-	-	-	-	-	516,236		
	Jumlah	3,209,152	6,641,441	40,172,524	540,002	1,181,916	11,478,752	1,218,234	376,708	697,526	433,337	1,413,746	200	67,363,538		

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi (PHPL) 2016

Tabel 4.15. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Kapasitas Industri di Atas 6000 M3/Th Tahun 2016

No	Provinsi	Sumber Bahan Baku											Lelang	Jumlah
		Stok Awal Tahun di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) (M ³)	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) (M ³)	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) (M ³)	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (M ³)	Land Cruising Hutan Tanaman (LC HTI) (M ³)	Kayu Rakyat (M ³)	Perkebunan (M ³)	Perhutani (M ³)	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Lain (M ³)	Pedagang (M ³)	Impor (M ³)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	83,322	90,581	1,016,039	43,670	3,637	289,661	110,185	-	2,344	-	-	-	1,639,429
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1,116,826	46,073	23,793,567	3,043	37,991	122,646	39,528	-	-	-	545,940	156	25,705,770
5	Jambi	347,567	676	3,965,862	250	178	90,850	83,869	-	-	-	-	-	4,489,252
6	Sumatera Selatan	402,344	-	1,607,402	-	14,320	772,002	294,081	-	-	-	327,987	-	3,418,136
7	Bengkulu	312	4,144	-	-	-	4,375	-	-	-	-	-	-	8,831
8	Lampung	456	-	-	-	-	-	38,882	-	-	-	-	-	39,338
9	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27,304	4,566	-	-	-	124,681	29,769	4,808	3,756	8,171	-	-	203,055
13	Jawa Tengah	117,125	680,560	-	18,148	13,164	1,807,247	25,844	10,595	200,384	82,680	13,416	-	2,969,163
14	D.I Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	247,882	787,349	5,142	37,137	5,639	1,486,952	6,872	94,691	178,117	243,043	4,197	-	3,097,021
16	Banten	12,985	2,577	-	-	-	143,669	3,610	136	-	-	-	-	162,977
17	Bali	9,151	15,292	-	-	-	3,067	-	-	7,065	-	-	-	34,575
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	88,421	678,638	44,705	-	16,385	-	30,915	-	-	-	-	-	896,926
21	Kalimantan Tengah	65,473	155,358	689,514	56,744	22,078	5,307	-	-	37,862	-	-	-	994,474
22	Kalimantan Selatan	188,470	824,751	1,543	10,800	22,209	51,664	4,078	-	71,631	-	324	-	1,175,470
23	Kalimantan Timur	272,748	824,746	1,455,850	85,908	76,937	55,141	-	-	-	-	-	-	2,771,330
24	Kalimantan Utara	40,827	303,838	5,176	10,530	31,231	-	-	-	-	-	-	-	391,602
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	14,446	148,387	-	27,368	5,152	59,700	-	-	-	-	-	-	255,053
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	2,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,504
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	137,860	519,177	-	136,977	-	-	-	-	-	-	-	-	794,014
34	Papua Barat	35,630	203,619	-	6,442	-	-	-	-	-	-	-	-	245,691
Jumlah		3,209,149	5,292,836	32,584,800	437,017	248,921	5,016,952	667,633	110,230	501,159	333,894	891,864	156	49,294,611

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.16. Rencana Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2016

No	Provinsi	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah	Limbah
		Kayu Alam (M ³)	Kayu Tanaman (M ³)	Kayu Perkebunan (M ³)	Jumlah (M ³)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	240,517.00	1,598,650.00	241,171.00	2,080,338.00	32,620.00	30,960.00
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	230,676.00	28,305,434.00	138,722.00	28,674,832.00	19,900.00	671.00
5	Jambi	277,255.00	7,161,749.00	319,534.00	7,758,538.00	113,938.00	0.00
6	Sumatera Selatan	30,418.00	5,501,316.00	699,177.00	6,230,911.00	65,567.00	0.00
7	Bengkulu	36,000.00	28,355.00	27,357.00	91,712.00	0.00	0.00
8	Lampung	0.00	0.00	112,634.00	112,634.00	0.00	0.00
9	Kep. Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Kep. Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DKI Jakarta	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00	0.00	0.00
12	Jawa Barat	26,731.00	244,727.00	90,000.00	361,458.00	22,672.00	0.00
13	Jawa Tengah	1,234,116.00	4,515,985.00	53,295.00	5,803,396.00	280,712.00	768.00
14	D.I Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Jawa Timur	1,584,793.00	3,739,992.00	15,600.00	5,340,385.00	367,724.00	3,513.00
16	Banten	6,000.00	271,303.00	21,582.00	298,885.00	323,431.00	0.00
17	Bali	31,836.00	4,595.00	0.00	36,431.00	0.00	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	1,220,252.00	62,035.00	43,000.00	1,325,287.00	45,149.00	11,000.00
21	Kalimantan Tengah	340,266.00	820,760.00	5,960.00	1,166,986.00	2,000.00	15,000.00
22	Kalimantan Selatan	1,213,557.00	102,395.00	13,766.00	1,329,718.00	19,415.00	192,000.00
23	Kalimantan Timur	1,334,344.00	2,106,222.00	0.00	3,440,566.00	8,197.00	2,217.00
24	Kalimantan Utara	465,110.00	184,812.00	0.00	649,922.00	40.00	0.00
25	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Selatan	259,205.00	130,563.00	9,115.00	398,883.00	35,652.00	18,333.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00
32	Maluku Utara	1,701,327.00	0.00	0.00	1,701,327.00	0.00	0.00
33	Papua	516,235.00	0.00	0.00	516,235.00	0.00	16,742.00
34	Papua Barat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		10,788,733.00	54,778,893.00	1,795,913.00	67,363,539.00	1,337,017.00	291,204.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.17. Realisasi Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2016

No	Provinsi	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah	Limbah
		Kayu Alam (M ³)	Kayu Tanaman (M ³)	Kayu Perkebunan (M ³)	Jumlah (M ³)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	109,421.00	1,337,163.00	101,241.00	1,547,825.00	22,458.00	16,255.00
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	142,557.00	24,444,642.00	75,578.00	24,662,777.00	8,719.00	25.00
5	Jambi	27,527.00	4,154,627.00	88,968.00	4,271,122.00	23,264.00	0.00
6	Sumatera Selatan	24,964.00	2,565,734.00	325,122.00	2,915,820.00	24,147.00	0.00
7	Bengkulu	2,775.00	2,480.00	2,208.00	7,463.00	0.00	0.00
8	Lampung	0.00	0.00	39,313.00	39,313.00	0.00	0.00
9	Kep. Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Kep. Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Jawa Barat	14,697.00	130,245.00	36,845.00	181,787.00	6,624.00	0.00
13	Jawa Tengah	732,345.00	1,759,372.00	23,306.00	2,515,023.00	115,772.00	0.00
14	D.I Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Jawa Timur	1,018,874.00	1,528,834.00	6,898.00	2,554,606.00	190,939.00	13.00
16	Banten	2,088.00	145,571.00	3,892.00	151,551.00	127,670.00	0.00
17	Bali	25,524.00	3,128.00	0.00	28,652.00	0.00	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	592,269.00	47,307.00	28,840.00	668,416.00	22,555.00	0.00
21	Kalimantan Tengah	269,319.00	701,494.00	5,133.00	975,946.00	2,000.00	6,204.00
22	Kalimantan Selatan	855,963.00	50,042.00	4,035.00	910,040.00	10,065.00	0.00
23	Kalimantan Timur	1,012,450.00	1,627,541.00	0.00	2,639,991.00	4,319.00	1,681.00
24	Kalimantan Utara	341,755.00	5,591.00	0.00	347,346.00	40.00	0.00
25	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Selatan	183,075.00	58,624.00	497.00	242,196.00	29,533.00	8,158.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
32	Maluku Utara	701,491.00	0.00	0.00	701,491.00	0.00	0.00
33	Papua	224,518.00	0.00	0.00	224,518.00	0.00	7,616.00
34	Papua Barat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		6,284,116.00	38,562,395.00	741,876.00	45,588,387.00	588,105.00	39,952.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.18. Jumlah dan Kapasitas Izin Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Atas 6000 M3/Th s/d Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah IUP/HK (Unit)	Jumlah Industri, Jenis dan Kapasitas Produksi (m3/tn)										Jumlah Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Investasi (Rp)									
			Kayu Lapis		Penggergajian Kayu		Veneer		Serpih Kayu		LVL				Pellet Kayu		Barecore		Blockboard		Particle Board		
			Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)			Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M3/Th)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	ACEH	1	0	0	1	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	10,000,000,000
2.	SUMATERA UTARA	35	4	289,000	32	719,130	3	32,500	2	1,071,672	0	0	1	32,500	0	0	0	0	0	0	0	13,285	1,697,636,768,816
3.	RIAU	23	7	601,150	17	311,560	2	62,000	5	22,352,683	1	72,000	1	15,000	0	0	0	0	0	0	0	26,509	19,211,396,394,395
4.	SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	JAMBI	25	14	1,195,700	19	309,400	11	279,000	3	6,553,420	1	214,000	1	10,000	1	16,000	1	15,000	1	6,000	18,551	2,700,624,822,421	
6.	SUMATERA SELATAN	16	3	165,000	7	209,000	5	175,000	6	10,799,416	2	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,866	6,202,335,013,016
7.	KEPULAUAN RIAU	1	1	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578	212,002,700,000	
8.	BENGKULU	2	1	24,000	1	18,000	1	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	105,000,000,000	
9.	BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	LAMPUNG	4	1	85,500	1	24,000	2	60,000	1	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966	384,000,000,000	
11.	BANTEN	5	3	505,000	3	128,210	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,760	248,947,827,148	
12.	JAVA BARAT	19	9	208,000	12	175,700	7	154,500	1	82,000	2	12,250	0	0	0	0	0	2	64,750	0	9,089	444,895,686,277	
13.	DKI JAKARTA	1	0	0	1	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	92,091,600,000	
14.	JAVA TENGAH	81	43	1,654,500	58	2,098,300	28	770,750	0	0	6	50,000	2	123,333	2	39,000	4	164,500	0	0	56,648	3,609,605,700,137	
15.	DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	JAVA TIMUR	109	45	1,818,648	93	2,346,670	44	886,650	0	0	6	32,750	3	55,700	3	88,000	8	259,700	0	0	66,287	3,284,968,924,562	
17.	BALI	1	1	6,000	1	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	7,509,500,000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	KALIMANTAN BARAT	15	7	733,753	11	355,250	1	12,000	3	670,240	0	0	1	189,360	0	0	0	0	0	0	16,163	1,049,411,215,538	
21.	KALIMANTAN SELATAN	30	17	1,572,095	16	352,600	11	276,000	3	1,850,200	2	135,000	2	67,800	0	0	0	0	0	0	26,808	1,960,198,855,695	
22.	KALIMANTAN TENGAH	19	3	327,680	16	329,900	10	400,900	1	963,636	0	0	1	225,000	0	0	0	0	0	0	8,729	1,923,083,781,811	
23.	KALIMANTAN TIMUR	41	20	1,920,827	33	880,726	7	280,645	5	7,189,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,438	11,249,276,445,600	
24.	KALIMANTAN UTARA	7	2	181,000	5	151,600	1	12,000	2	1,480,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573	966,567,576,501	
25.	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	SULAWESI TENGAH	1	0	0	1	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	6,736,025,379	
28.	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	SULAWESI SELATAN	6	3	390,360	6	162,800	4	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,569	407,082,683,521	
31.	MALIKU UTARA	2	2	370,800	2	140,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504	238,553,093,360	
32.	MALIKU	4	3	335,700	3	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889	673,265,447,000	
33.	PAPUA	10	4	450,000	9	309,500	2	29,900	1	2,178,000	0	0	1	242,000	0	0	0	0	0	0	6,197	2,193,633,716,300	
34.	PAPUA BARAT	9	1	792,000	7	296,000	1	76,000	1	193,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,016	818,328,845,019	
Jumlah		467	194	13,745,713	355	9,595,946	141	3,672,845	34	55,387,748	20	576,000	13	960,693	6	143,000	15	503,950	1	6,000	323,413	59,697,162,622,497	

Sumber : Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.19. Rencana Penggunaan Bahan Baku Industri Kapasitas di Atas 6000 M³/Th Tahun 2016

No	Provinsi	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah	Limbah
		Kayu Alam (M ³)	Kayu Tanaman (M ³)	Kayu Perkebunan (M ³)	Jumlah (M ³)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2	Sumatera Utara	240.517,00	1.598.650,00	241.171,00	2.080.338,00	32.620,00	30.960,00
3	Sumatera Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Riau	230.676,00	28.305.434,00	138.722,00	28.674.832,00	19.900,00	671,00
5	Jambi	277.255,00	7.161.749,00	319.534,00	7.758.538,00	113.938,00	0,00
6	Sumatera Selatan	30.418,00	5.501.316,00	699.177,00	6.230.911,00	65.567,00	0,00
7	Bengkulu	36.000,00	28.355,00	27.357,00	91.712,00	0,00	0,00
8	Lampung	0,00	0,00	112.634,00	112.634,00	0,00	0,00
9	Kep. Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kep. Riau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	26.731,00	244.727,00	90.000,00	361.458,00	22.672,00	0,00
13	Jawa Tengah	1.234.116,00	4.515.985,00	53.295,00	5.803.396,00	280.712,00	768,00
14	D.I Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jawa Timur	1.584.793,00	3.739.992,00	15.600,00	5.340.385,00	367.724,00	3.513,00
16	Banten	6.000,00	271.303,00	21.582,00	298.885,00	323.431,00	0,00
17	Bali	31.836,00	4.595,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kalimantan Barat	1.220.252,00	62.035,00	43.000,00	1.325.287,00	45.149,00	11.000,00
21	Kalimantan Tengah	340.266,00	820.760,00	5.960,00	1.166.986,00	2.000,00	15.000,00
22	Kalimantan Selatan	1.213.557,00	102.395,00	13.766,00	1.329.718,00	19.415,00	192.000,00
23	Kalimantan Timur	1.334.344,00	2.106.222,00	0,00	3.440.566,00	8.197,00	2.217,00
24	Kalimantan Utara	465.110,00	184.812,00	0,00	649.922,00	40,00	0,00
25	Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sulawesi Selatan	259.205,00	130.563,00	9.115,00	398.883,00	35.652,00	18.333,00
28	Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Maluku	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00
32	Maluku Utara	1.701.327,00	0,00	0,00	1.701.327,00	0,00	0,00
33	Papua	516.235,00	0,00	0,00	516.235,00	0,00	16.742,00
34	Papua Barat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.788.733,00	54.778.893,00	1.795.913,00	67.363.539,00	1.337.017,00	291.204,00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.20. Produksi Kayu Bulat Bersumber dari Hutan Tanaman Industri (HTI) Tahun 2013 s/d 2016

No	Provinsi	Produksi Kayu Bulat Bersumber dari Hutan Tanaman			
		2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)	2016 (M ³)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	393,567.88	0.00	2,275,515.00	1,526,498.92
3	Sumatera Barat	2,105.88	0.00	117,405.00	33,812.56
4	Riau	13,507,694.19	15,608,661.28	14,126,049.25	16,991,098.75
5	Jambi	2,026,688.47	2,195,535.00	3,602,604.52	3,611,675.07
6	Sumatera Selatan	4,720,731.33	1,613,548.38	7,489,082.05	3,927,863.53
7	Lampung	0.00	76,347.04	3,557.37	0.00
8	Bangka Belitung	558.07	1,639,505.58	3,005.00	0.00
9	Kalimantan Barat	152,319.49	10,902.29	13,355.41	787,014.10
10	Kalimantan Tengah	4,432,554.77	2,322,523.82	1,873,737.44	1,178,489.70
11	Kalimantan Selatan	9,051.25	1,802,173.91	131,329.10	102,509.56
12	Kalimantan Timur	2,197,283.10	0.00	2,442,579.12	2,788,167.75
13	Kalimantan Utara	0.00	9,838.07	0.00	643,052.00
14	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	5,265.00
19	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	3,149.00
21	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Perum Perhutani	0.00	0.00	791,345.00	548,096.92
Jumlah		27,442,554.43	25,279,035.37	32,869,564.26	32,146,692.86

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.21. Produksi Kayu Bulat dari RKTUPHHK Hutan Alam (HA) Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Produksi Kayu Bulat dari RKTUPHHK Hutan Alam				
		2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)	2016 (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	48,560.00	65,072.76	57,037.69	177,133.69	62,489.86
3	Sumatera Barat	68,667.51	58,846.11	123,689.73	121,924.39	89,412.69
4	Riau	719,132.20	28,708.00	57,306.79	89,591.38	30,158.92
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	26,737.52	7,435.35	20,383.27	0.00	4,045.00
7	Sumatera Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	6,015.55	0.00	3,165.54	4,737.30	4,367.71
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Jawa Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jawa Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	1,198.88	11,792.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	274,662.59	125,549.24	194,430.25	173,822.29	112,099.26
21	Kalimantan Tengah	2,227,911.95	1,701,658.03	2,109,439.11	2,115,109.71	1,840,707.86
22	Kalimantan Selatan	18,866.29	9,050.72	19,985.19	13,993.49	17,356.18
23	Kalimantan Timur	1,894,850.17	1,259,078.44	1,434,845.52	1,516,722.78	1,151,449.47
24	Kalimantan Utara	0.00	0.00	550,536.70	679,068.10	755,278.51
25	Sulawesi Utara	16,153.61	0.00	4,204.21	2,684.10	789.64
26	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Tengah	8,516.00	0.00	14,770.99	12,175.08	3,539.19
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sulawesi Barat	17,318.00	7,180.55	0.00	0.00	0.00
31	Maluku	194,517.11	241,503.00	217,249.18	173,822.29	267,017.62
32	Maluku Utara	55,741.00	63,942.00	96,306.00	37,704.87	120,402.70
33	Papua	672,269.29	394,577.93	475,434.06	617,007.99	525,314.23
34	Papua Barat	287,276.38	434,164.18	469,328.92	258,173.89	408,388.09
Jumlah		6,537,195.17	4,396,766.31	5,848,113.15	5,994,870.23	5,404,608.93

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.22. Produksi Plywood dan LVL yang Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Lebih dari 6000 M3/Th Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Produksi Plywood dan Laminated Veneer Lumber (LVL)				
		2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)	2016 (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	45,417.48	44,755.82	23,857.97	27,833.41	34,663.20
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	105,079.16	106,735.94	116,331.44	90,797.72	103,383.88
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	82,318.87	83,222.07	93,822.96	105,327.00	87,227.49
7	Sumatera Selatan	17,046.51	0.00	25,416.64	26,723.53	22,121.00
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Banten	289,326.72	218,335.62	218,036.35	176,183.01	145,447.23
12	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Barat	2,811.08	5,907.64	10,143.33	13,587.53	32,658.11
14	Jawa Tengah	369,818.85	463,639.94	559,625.00	649,351.13	735,101.63
15	DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jawa Timur	689,439.57	705,518.61	767,848.94	742,113.98	721,127.33
17	Bali	1,395.75	0.00	5,995.39	5,998.18	5,122.79
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	297,374.99	270,288.72	247,267.92	253,732.80	246,510.11
21	Kalimantan Tengah	150,400.95	153,734.51	169,041.60	164,783.27	122,209.23
22	Kalimantan Selatan	361,222.74	397,108.83	410,729.82	416,112.57	472,545.56
23	Kalimantan Timur	531,715.17	506,147.89	558,654.97	583,172.81	462,794.45
24	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	138,768.73
25	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Sulawesi Selatan	136,217.65	122,580.58	127,281.17	103,546.83	81,620.30
30	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku	400.38	109.74	305.70	1,010.84	1,470.44
32	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Papua	229,263.96	181,935.49	243,660.31	279,573.63	222,240.49
34	Papua Barat	1,613.52	2,058.56	1,093.18	782.64	1,046.25
Jumlah		3,310,863.35	3,261,970.22	3,579,112.69	3,640,630.89	3,636,058.22

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (31 Desember 2016)

Tabel 4.23. Produksi Veneer Berasal dari Industri Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Produksi Veneer				
		2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)	2016 (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	12,015.54	1,354.63	676.10	1,307.58	6,611.70
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	11,306.85	13,268.57	24,916.47	32,697.02	25,112.11
7	Sumatera Selatan	23,657.12	24,232.01	30,825.59	47,921.03	31,320.42
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	6,427.57	9,045.08	11,593.40	14,484.03	2,629.41
10	Lampung	37,258.12	29,092.27	34,095.70	37,295.98	22,956.02
11	Banten	259.24	182.89	1,413.44	1,592.15	10,708.85
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	23,621.01	22,524.38	21,269.64	30,341.40	30,107.20
14	Jawa Tengah	323,157.30	323,466.18	287,685.48	274,068.56	236,597.45
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	300,960.41	303,622.68	348,881.92	319,617.11	243,827.73
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	45,002.01	41,587.29	36,868.11	28,332.31
21	Kalimantan Tengah	24,150.96	29,884.11	23,707.99	21,877.49	13,254.78
22	Kalimantan Selatan	12,643.09	13,548.81	28,310.90	42,227.67	43,076.70
23	Kalimantan Timur	7,805.48	367.92	157.89	215.66	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	404.83	329.65
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Selatan	75,052.85	71,146.99	72,907.59	79,746.53	66,958.16
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	5,352.34	3,297.35	4,421.09	584.09	1,234.12
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	9,449.83
34	Papua Barat	27,167.87	24,091.76	33,330.13	41,823.72	21,081.17
Jumlah		890,835.75	913,576.83	965,780.62	983,072.96	793,587.61

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (31 Desember 2016)

Tabel 4.24. Produksi Kayu Gergajian yang Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2011 s/d 2015

No	Provinsi	Produksi Kayu Gergajian				
		2011 (M ³)	2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	114,755.92	101,651.15	99,278.05	129,878.62	118,496.23
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	31,072.37	48,225.19	40,513.47	46,996.51	49,495.76
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	3,620.19	3,901.19	2,315.84	1,678.46	2,575.78
7	Sumatera Selatan	19,200.23	15,483.91	9,418.54	21,349.12	30,534.48
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Banten	5,752.56	2,962.88	1,670.80	14,894.70	18,690.48
12	DKI Jakarta	8,424.57	7,141.81	5,441.00	0.00	1,621.03
13	Jawa Barat	1,737.61	4,022.46	4,498.25	8,255.06	15,498.90
14	Jawa Tengah	149,388.02	241,288.65	215,854.79	371,903.21	366,885.51
15	DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jawa Timur	347,616.02	394,736.87	357,607.49	555,321.80	490,649.89
17	Bali	15,028.82	15,464.23	12,055.12	11,978.19	11,971.24
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	25,128.61	23,069.06	17,802.19	14,145.28	10,880.23
21	Kalimantan Tengah	8,349.91	10,683.51	4,772.63	11,183.86	12,617.10
22	Kalimantan Selatan	86,451.45	100,776.17	93,376.63	121,274.80	5,774.82
23	Kalimantan Timur	5,912.29	8,823.47	7,271.19	5,689.43	118,450.46
	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Selatan	2,423.63	2,460.56	8,388.87	4,662.41	8,379.63
29	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku	0.00	0.00	485.05	225.05	0.00
31	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua	59,543.47	61,172.65	44,430.05	93,225.83	113,729.38
33	Papua Barat	82,581.70	58,232.17	67,687.23	45,961.44	54,965.67
Jumlah		967,318.23	1,100,095.93	992,867.19	1,458,623.77	1,431,216.60

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.25. Produksi Serpih Kayu Yang Berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas di Atas 6000 M3/Th Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Produksi Serpih Kayu (M ³)				
		2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015 (M ³)	2016 (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	1,226,427.91	1,090,432.05
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	17,555,597.33	14,701,646.74	17,598,027.62	18,490,453.68	18,453,548.28
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	2,774,090.97	3,101,532.27	2,900,163.97	3,242,513.35
7	Sumatera Selatan	200,690.01	280,898.70	488,624.51	1,374,823.10	1,473,891.67
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	83,631.24	13,222.02	18,061.77	16,891.22	33,160.95
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	96,429.18	86,278.08	84,992.55	69,446.00	56,497.55
21	Kalimantan Tengah	-	181,550.09	817,014.39	506,836.97	573,706.36
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	1,563,368.40	1,274,940.22	1,559,280.69	1,208,952.73	910,478.32
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	78,180.45	56,759.83	-	-	-
34	Papua Barat	84,853.75	42,365.56	94,743.95	62,156.94	64,344.53
Jumlah		19,662,750.36	19,411,752.21	23,762,277.75	25,856,152.52	25,898,573.06

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.26. Produksi Pulp Tahun 2012 s/d 2016

No.	Provinsi	Produksi Pulp				
		2012 (Ton)	2013 (Ton)	2014 (Ton)	2015 (Ton)	2016 (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	176,080.67	182,418.56	187,609.49	171,270.36	167,985.56
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	4,046,485.76	3,987,390.28	4,218,946.73	4,364,376.69	4,398,794.80
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	788,386.39	895,607.18	852,794.85	840,572.11	997,778.24
7	Sumatera Selatan	416,255.56	347,648.05	376,345.13	439,015.77	439,015.77
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Jawa Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jawa Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Kalimantan Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Kalimantan Timur	10,516.04	10,488.23	0.00	0.00	0.00
24	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		5,437,724.42	5,423,552.30	5,635,696.20	5,815,234.93	6,003,574.37

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.27. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2016

No	Produksi	Jenis Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Volume)																		
		Kelompok Batang				Kelompok Minyak			Kelompok Resin					Kelompok Getah				Kelompok Kulit		
		Rotan (Btg)	Rotan (Ton)	Bambu (Btg)	Sagu (Ton)	Daun Kayu Pulih (Ton)	Kemiri (Ton)	Damar Kopal (Ton)	Damar Mata Kucing (Ton)	Gaharu Buaya (Ton)	Cendana (Ton)	Kemadang (Ton)	Getah Karet (Ton)	Getah Pinus (Ton)	Kulit Kayu Manis (Ton)	Masohi (Ton)	Kulit Gemor (Ton)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Aceh	61,867.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.69	0.00	0.00	0.00		
2	Sumatera Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.17	1,944.15	0.00	0.00	0.00		
3	Sumatera Barat	70,350.00	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.15	0.00	0.00	0.00		
4	Riau	2,500.00	429.81	0.00	10,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Jambi	237,000.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.73	79.67	0.00	0.00	0.00		
6	Sumatera Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00		
8	Lampung	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	Jawa Barat	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.09	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	12,530.76	0.00	0.00	0.00		
14	DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	Jawa Tengah	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	6,018.19	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	42,765.95	0.00	0.00	0.00		
16	Jawa Timur	0.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00	19,946.38	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,952.08	0.00	0.00	0.00		
17	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00		
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	757.46	0.00	0.00	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Kalimantan Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	Kalimantan Tengah	0.00	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	Gorontalo	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.40	0.00	0.00	0.00		
27	Sulawesi Tengah	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.70	0.00	0.00	0.00		
28	Sulawesi Selatan	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.35	0.00	0.00	0.00		
29	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00		
30	Sulawesi Tenggara	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.36	0.00	0.00	0.00		
31	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.75	1,320.00		
34	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00		
Realisasi		373,808.00	6,358.69	642,090.00	10,135.58	37,651.66	757.46	6,586.68	22.00	42.50	30.73	14.43	20,898.36	101,913.63	4.05	155.03	1,320.00	0.00		

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

Tabel 4.28. Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2016

No	Produk	Ekspor Produk Industri Kehutanan	
		Nilai Transaksi (USD)	Berat (Ton)
1	2	3	4
1	Prefabrikasi	3,593,631.49	2,131.09
2	Serpih Kayu	110,952,464.41	1,442,340.42
3	Furnitur Kayu	862,783,803.73	265,409.38
4	Kerajinan Kayu	66,750,824.99	20,188.48
5	Panel	2,460,468,307.88	2,893,312.81
6	Kertas	3,117,147,973.94	8,276,194.88
7	Pulp	1,620,210,530.10	3,663,512.33
8	Veneer	54,302,143.09	33,213.46
9	Woodworking	971,857,326.38	865,343.81
Jumlah		9,268,067,006.01	17,461,646.66

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2016

5

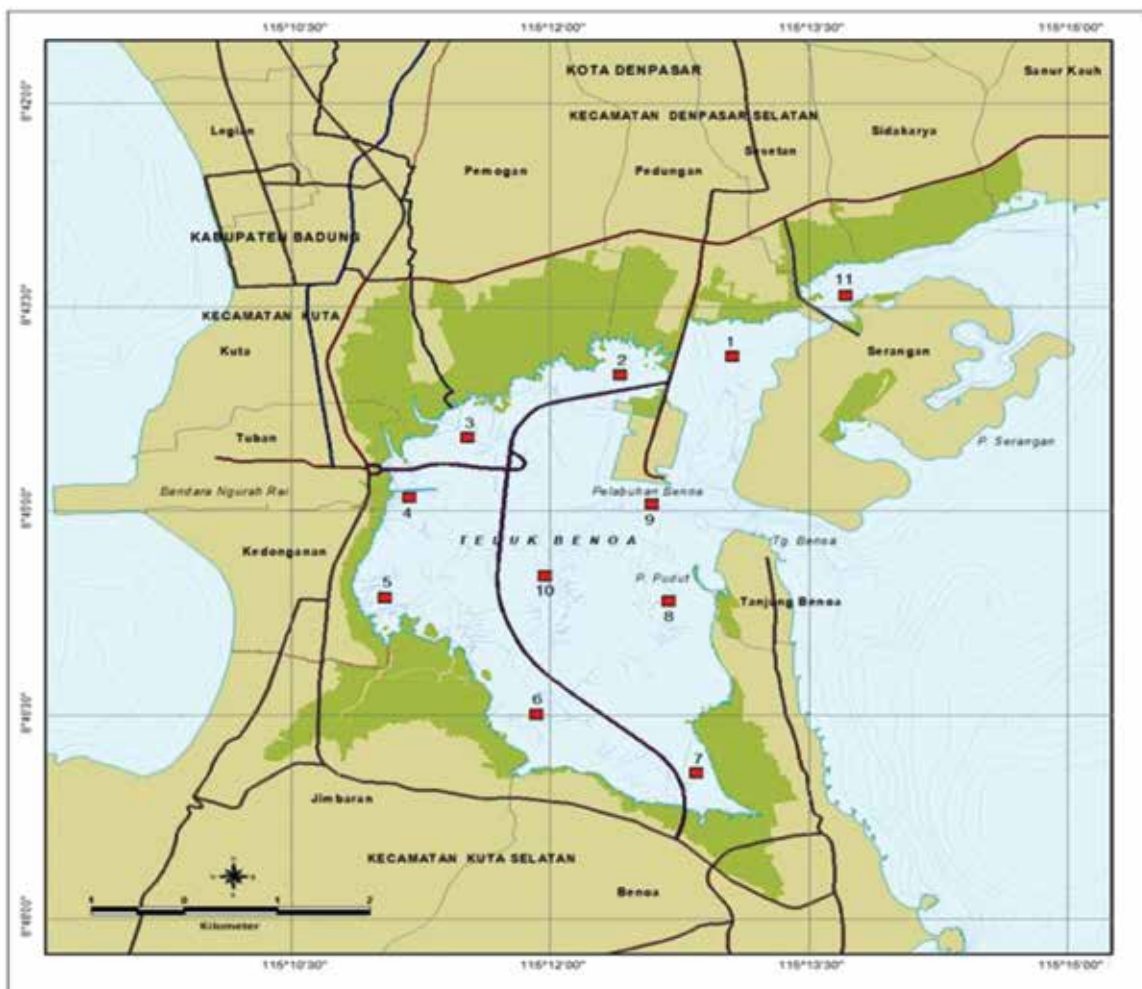
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, dan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Status Mutu Laut Teluk Benoa

Untuk mengetahui status mutu air laut Teluk Benoa dilakukan pengukuran kualitas air Teluk Benoa pada 11 lokasi titik pantau (11 stasiun titik pantau) yang meliputi lokasi sekitar muara sungai, sekitar pelabuhan dan sekitar ekosistem mangrove yang berada sekitar pesisir Teluk Benoa. Berikut disampaikan peta lokasi pengambilan sampel air laut untuk status mutu Teluk Benoa.



Gambar 5.1 Peta Lokasi Sampling Air Laut Teluk Benoa

Berdasarkan hasil analisis dari data kualitas air laut yang telah dilakukan pada tahun 2016 di Teluk Benoa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu kualitas air laut, diantaranya parameter Kecerahan, Kadmium (Cd), Nitrat, Surfaktan (deterjen) dan BOD5. Dari semua parameter yang melebihi baku mutu (kecuali BOD5) ditemukan pada semua lokasi titik pantau pada area wisata di Teluk Benoa.

Kondisi status mutu air teluk Benoa setelah dilakukan analisis status mutu air menggunakan metode STORET. Hasil analisis STORET diperoleh total skor STORET (-)51. Angka ini berarti bahwa status mutu air laut Teluk Benoa berada dalam kondisi “buruk” atau “cemar berat”. Parameter kualitas air yang nilai rata-ratanya melampaui baku mutu air laut untuk wisata bahari yaitu kecerahan, kadar timbal, kadmium, deterjen, amonia dan penol. Hal ini menunjukkan bahwa air laut Teluk Benoa telah tercemar oleh beberapa logam berat dan senyawa toksis. Sementara itu, kadar bahan-bahan sebagai penurun kadar oksigen dan kadar coliform relatif rendah.

Tabel 5.1. Analisis Storet Status Mutu Air Laut Teluk Benoa

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Wisata Bahari	Nilai			Skor		
				Rata-Rata	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Minimal	Maksimal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Suhu	°C	Alami	28.1	26.9	29.5	0	0	0
2	Kecerahan	m	> 6	1.9	5.5	1	-3	-1	-1
3	pH	-	7 - 8,5	8.27	8.16	8.35	0	0	0
4	Salinitas	0/00	Alami	32.3	31.4	32.8	0	0	0
5	DO	mg/l	> 5	5.3	6.65	4.41	0	0	-2
6	COD	mg/l		13.59	9.33	21.65			
7	BOD	mg/l	10	6.79	5.38	10.09	0	0	-2
8	Timbal (Pb)	mg/l	0.005	0.164	0	0.196	-6	0	-2
9	Kadmium (Cd)	mg/l	0.002	0.0051	0	0.0222	-6	0	-2
10	Besi (Fe)	mg/l		0.142	0.009	0.287			
11	Nitrat (NO ₃)	mg/l	0.008	0.005	0.001	0.014	0	0	0
12	Detergen	mg/l	0.001	0.274	0	0.484	-6	0	-2
13	Sulfida (H ₂ S)	mg/l	Nihil	0	0	0	0	0	0
14	Amonia (NH ₃)	mg/l	Nihil	0.001	0	0.003	-6	0	-2
15	Sianida (CN)	mg/l		0	0	0			
16	Minyak Lemak	mg/l	1	0.015	0.003	0.069	0	0	0
17	Phenol	mg/l	Nihil	4272	3.119	5.881	-6	-2	-2
18	TSS	mg/l	20	6.51	1.2109	11.518	0	0	0
19	E, Coli	MPN/100 ml	200	0	0	0	0	0	0
20	Coliform	MPN/100 ml	1000	1	0	7	0	0	0
Jumlah Skor							-33	-3	-15
Total Skor							-51		
Status Mutu							Buruk/Cemar Berat		

Keterangan: Baku Mutu Wisata Bahari Menurut Pergub Bali No. 8 Tahun 2008

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.2. Status Mutu Air Tahun 2013 - 2016

No	Provinsi	Sungai	Titik Pantau	Status Mutu Air			
				2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAD	KRUENG TAMIANG	7	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		KRUENG BAROE	5	Cemar Berat		Cemar Berat	Cemar Berat
2	SUMUT	BATAHAN	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		ASAHAN	6	-	-	-	Cemar Sedang-Cemar Berat
3	RIAU	INDRAGIRI	13	-	-	Cemar Berat	Cemar Berat
		SIAK	17	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		ROKAN	13			Cemar Berat	Cemar Berat
		KAMPAR	17	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
4	SUMBAR	BATANGHARI	10	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		BATANG KAMPAR	8	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		BATANG KUANTAN	10	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
5	BABEL	BATURUSA	8	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang	Cemar Berat
		BUDING	8	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Berat
6	JAMBI	BATANGHARI	16	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
7	SUMSEL	MUSI	21	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
8	LAMPUNG	MESUJI	7	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
9	BENGKULU	MUSI	12	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan - Cemar Sedang
10	KEPRI	DAM DURIANGKANG	6	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Memenuhi - Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Sedang-Cemar Berat
11	BANTEN	CIDURIAN	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Memenuhi-Cemar Ringan
		CISADANE	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Memenuhi-Cemar Ringan
		CILIWUNG	24	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
12	DKI JAKARTA	CIPINANG	6	Cemar Berat	-	Cemar Berat	-
		SUNTER	4	Cemar Berat	-	Cemar Berat	-
13	JAWA BARAT	CILIWUNG	5	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		CITARUM	7	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		CISADANE	5	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		CITANDUY	3	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	-
14	JATENG	BENGAWAN SOLO	5	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		CISANGGARUNG	2	-	-	Cemar Berat	Cemar Berat
		CITANDUY	2	-	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		PROGO	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
15	D.I. YOGYAKARTA	PROGO	8	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		KRASAK (AS PROGO)	1	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		TINALAH (AS PROGO)	1	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		SUDU (AS PROGO)	1	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		OPAK	10	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		SERANG	3	Cemar Berat	Cemar Berat	-	Cemar Berat

No	Provinsi	Sungai	Titik Pantau	Status Mutu Air			
				2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
16	JAWA TIMUR	BENGAWAN SOLO	16	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		MADIUN	7	Cemar Berat	Cemar Berat	-	-
		KALI SURABAYA	9	Cemar Berat	Cemar Berat	-	-
		KALI TENGAH	3	Cemar Berat	Cemar Berat	-	-
		KALI PORONG	3	Cemar Berat	Cemar Berat	-	-
17	BALI	KALI MAS	4	Cemar Berat	Cemar Berat	-	-
		BRANTAS	11	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		TUKAD AYUNG	6	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Memenuhi - Cemar Sedang	Memenuhi - Cemar Berat	Memenuhi-Cemar Berat
		TUKAD HO	6	Memenuhi - Cemar Sedang	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan-Cemar Sedang
		TUKAD SABA	6	-	Cemar Ringan - Cemar Berat	Memenuhi - Cemar Berat	Memenuhi-Cemar Berat
18	NTB	TUKAD DAYA	6	-	-	Memenuhi - Cemar Ringan	Memenuhi-Cemar Ringan
		ANCAR	6	-	-	Cemar Berat	-
		DODOKAN	6	-	-	Cemar Berat	-
		BABAK	6	-	-	Cemar Berat	-
		BRANGBIJI	6	-	-	Cemar Ringan - Cemar Berat	-
19	NTT	JANGKOK	8	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		MENINTING	8	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		ASESA	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		NOELMINA	6	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		LILIBA	3	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
20	KALBAR	BENANAIN	8	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	-	-
		DENDENG	6	Cemar Berat	Cemar Berat	-	Cemar Sedang-Cemar Berat
		KAPUAS	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		JELAJ	6	Cemar Sedang	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan-Cemar Sedang
		BARITO	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
21	KALSEL	MARTAPURA	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		RIAM KIWA	6	Cemar Berat	-	Cemar Berat	Cemar Berat
		NAGARA	9	Cemar Berat	-	Cemar Berat	Cemar Berat
		BARITO	21	Cemar Sedang - Cemar Berat	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		JELAY	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
22	KALTENG	KAHAYAN	12	-	-	Cemar Berat	-
		LAMANDAU	6	-	-	Cemar Ringan - Cemar Sedang	-
		MAHAKAM	9	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		S.SESAYAP	10	-	-	-	Cemar Ringan-Cemar Sedang
		RANDANGAN	6	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
23	GORONTALO	ANDAGILE	6	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		LARIANG	6	Memenuhi - Cemar Sedang	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		MAKAPA	1	Cemar Ringan	Cemar Berat	Cemar Berat	-
		ROMPO	1	Memenuhi	Cemar Berat	Cemar Sedang	-
		TORIRE	1	Cemar Sedang	Cemar Berat	Cemar Berat	-

No	Provinsi	Sungai	Titik Pantau	Status Mutu Air			
				2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
26	SULSEL	JENERANG	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		LARONA	6	-	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Memenuhi-Cemar Ringan-Cemar Berat
		SA'ADAN	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan-Cemar Berat
		WALANAE	7	-	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		TANGKA	7	-	-	-	Cemar Ringan-Cemar Berat
27	SULTRA	GILIRANG	6	-	-	-	Cemar Ringan-Cemar Berat
		LALINDU	4	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Ringan-Cemar Berat
		LASOLO	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan- Cemar Sedang
28	SULUT	TELAWAAN	6	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		SANGKUP	7	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		DUMOGA	6	-	-	-	Cemar Berat
29	SULBAR	LARIANG	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat
		MANDAR	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar sedang-Cemar Berat
		MAMASA	6	Cemar Sedang	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar sedang-Cemar Berat
		SANGGORA	1	-	Cemar Berat	Cemar Berat	-
		BATU GAJAH	6	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Berat
30	MALUKU	WAI SIAH	6	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Sedang-Cemar Berat
		BOMAKI	6	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Ringan - Cemar Berat	Memenuhi - Cemar Sedang	Cemar Berat
		WAI BATU GANTUNG	6	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Memenuhi - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		WAY BATU MERAH	6	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Memenuhi - Cemar Berat	Cemar Berat
		WAY TOMU	6	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Berat
		WAI APO	6	-	-	Memenuhi - Cemar Sedang	Cemar Berat
		TABOBO	6	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
31	MALUKU UTARA	TANJUNG BULI	6	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang-Cemar Berat
		AKETAJAWE	6	-	-	Cemar Ringan - Cemar Sedang	Cemar Berat
32	PAPUA	FLY	3	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
33	PAPUA BARAT	REMU	6	-	Cemar Sedang - Cemar Berat	Cemar Ringan - Cemar Berat	-
		MARUNI	6	-	-	Cemar Ringan - Cemar Berat	Cemar Berat

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.3. Indeks Kualitas Udara Tahun 2011 s/d 2016

No	Provinsi	Indeks Kualitas Udara					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	90.96	89.65	91.28	91.20	89.44	86.30
2	Sumatera Utara	89.60	85.50	87.81	87.23	88.15	79.20
3	Sumatera Barat	91.05	86.02	86.41	89.16	88.48	82.90
4	Riau	67.07	51.91	52.89	60.30	-	72.40
5	Jambi	90.33	84.49	85.46	91.26	82.93	88.10
6	Sumatera Selatan	89.34	84.06	83.86	89.25	79.64	81.60
7	Bengkulu	87.80	87.26	87.61	86.48	92.51	85.40
8	Lampung	87.23	78.44	79.19	85.98	82.26	77.50
9	Bangka Belitung	89.52	83.93	84.36	90.39	95.61	80.40
10	Kepulauan Riau	90.82	89.46	94.45	95.53	86.61	78.60
11	DKI Jakarta	47.21	44.31	41.51	46.28	78.78	56.40
12	Jawa Barat	71.03	65.53	65.56	59.24	74.63	78.60
13	Jawa Tengah	81.93	79.27	79.43	82.64	81.32	77.30
14	DI Yogyakarta	78.51	83.65	86.04	82.01	90.58	87.60
15	Jawa Timur	73.84	68.88	72.45	73.20	89.21	83.20
16	Banten	74.05	53.13	57.79	53.15	50.65	58.80
17	Bali	80.15	83.64	82.80	86.61	92.35	88.30
18	Nusa Tenggara Barat	89.51	86.20	86.82	92.83	92.27	81.20
19	Nusa Tenggara Timur	92.19	87.84	83.51	77.13	-	82.70
20	Kalimantan Barat	95.38	89.19	87.74	84.57	91.57	81.50
21	Kalimantan Tengah	93.26	88.48	88.92	92.69	89.87	83.80
22	Kalimantan Selatan	88.69	77.46	81.83	88.35	87.60	85.60
23	Kalimantan Timur	87.35	83.94	84.79	83.96	96.20	80.20
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-		89.10
25	Sulawesi Utara	90.77	84.90	83.97	88.55	92.72	86.70
26	Sulawesi Tengah	89.07	87.96	87.96	85.99	89.12	87.90
27	Sulawesi Selatan	91.42	87.98	87.98	90.43	76.80	85.80
28	Sulawesi Tenggara	90.00	84.65	86.50	92.56	83.61	83.50
29	Gorontalo	95.06	89.17	90.24	96.20	-	88.30
30	Sulawesi Barat	88.89	87.03	86.58	92.23	89.21	86.40
31	Maluku	95.01	89.71	90.90	91.81	82.33	87.30
32	Maluku Utara	96.94	96.94	96.94	96.94	-	86.20
33	Papua Barat	92.51	91.03	91.03	91.03	-	93.40
34	Papua	91.07	90.19	88.67	84.24	-	89.60

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2011 s/d 2016

No	Provinsi	Indeks Tutupan Lahan					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	75.06	72.67	72.17	72.17	73.26	73.20
2	Sumatera Utara	47.20	46.15	45.89	45.89	45.83	45.57
3	Sumatera Barat	67.24	65.51	65.13	65.13	64.90	64.67
4	Riau	60.49	50.65	50.60	50.60	47.61	46.31
5	Jambi	51.85	48.77	47.09	47.09	48.05	47.75
6	Sumatera Selatan	34.52	37.54	37.47	37.47	38.15	35.08
7	Bengkulu	59.14	55.66	55.03	55.03	54.06	53.84
8	Lampung	30.19	30.96	30.92	30.92	31.18	30.74
9	Bangka Belitung	39.44	36.76	36.77	36.77	36.41	35.35
10	Kepulauan Riau	57.23	53.63	53.30	53.30	53.08	52.93
11	DKI Jakarta	32.06	32.06	31.99	31.99	31,99*	31.99
12	Jawa Barat	38.24	38.96	38.98	38.98	38.39	38.25
13	Jawa Tengah	48.27	51.37	51.33	51.33	48.69	48.54
14	DI Yogyakarta	34.15	33.07	33.08	33.08	32.75	32.74
15	Jawa Timur	51.72	49.54	49.47	49.47	49.59	49.45
16	Banten	37.92	37.16	37.16	37.16	37.52	37.34
17	Bali	39.32	38.91	38.90	38.90	39.07	39.03
18	Nusa Tenggara Barat	62.83	63.76	63.72	63.72	60.54	60.05
19	Nusa Tenggara Timur	57.31	60.26	60.23	60.23	61.08	60.81
20	Kalimantan Barat	64.87	60.45	58.73	58.73	58.58	58.33
21	Kalimantan Tengah	76.58	70.06	69.53	69.54	69.23	68.11
22	Kalimantan Selatan	45.15	44.71	44.51	44.51	45.17	44.00
23	Kalimantan Timur	82.36	81.31	80.93	80.93	82.73	82.26
24	Sulawesi Utara	63.54	60.31	60.30	60.30	58.17	58.08
25	Sulawesi Tengah	91.11	81.48	81.01	81.01	81.77	81.45
26	Sulawesi Selatan	50.21	50.16	50.10	50.10	50.85	50.64
27	Sulawesi Tenggara	87.08	69.95	69.87	69.87	71.44	71.26
28	Gorontalo	83.83	80.69	80.28	80.28	76.63	75.49
29	Sulawesi Barat	69.75	67.72	67.59	67.59	67.30	67.18
30	Maluku	81.45	82.06	82.04	82.04	82.23	82.14
31	Maluku Utara	80.98	82.39	82.22	82.22	83.22	82.87
32	Papua Barat	98.91	99.61	99.51	99.51	99,51*	99.51
33	Papua	92.54	97.48	97.44	97.44	97,44*	97.44

Keterangan:

ITL 2015 menggunakan data penutupan lahan tahun 2014 dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (data terbaru publikasi 2016).

* ITL 2015 menggunakan data sebelumnya (ITL 2013-2014), karena perhitungannya tidak menggunakan rumus sebagaimana dalam metodologi

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.5. Indeks Kualitas Air Tahun 2011 s/d 2016

No	Provinsi	Indeks Kualitas Air					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	53.68	57.00	51.54	54.57	49.62	51.93
2	Sumatera Utara	60.19	62.00	60.67	56.67	46.00	53.33
3	Sumatera Barat	61.90	59.29	52.71	53.71	40.71	43.28
4	Riau	55.60	54.30	48.71	47.53	47.65	46.73
5	Jambi	58.86	55.00	51.00	52.75	53.75	55.61
6	Sumatera Selatan	60.80	55.00	63.20	66.19	69.36	64.52
7	Bengkulu	64.10	57.40	64.12	62.67	61.67	60.33
8	Lampung	62.96	53.29	62.00	60.86	52.96	53.81
9	Bangka Belitung	61.85	59.50	64.25	61.30	64.69	62.05
10	Kepulauan Riau	60.88	61.00	58.67	64.29	62.00	58.00
11	DKI Jakarta	35.65	41.05	34.71	34.00	30.51	22.31
12	Jawa Barat	46.27	43.75	41.80	39.00	55.25	41.33
13	Jawa Tengah	48.23	52.40	45.47	51.03	50.91	46.15
14	DI Yogyakarta	42.03	49.04	42.57	39.00	33.07	60.22
15	Jawa Timur	57.94	57.09	49.10	49.11	50.33	49.07
16	Banten	51.04	53.50	47.10	42.86	51.75	70.00
17	Bali	56.15	61.50	57.00	60.89	61.25	61.39
18	Nusa Tenggara Barat	47.25	54.00	54.13	53.50	42.46	33.13
19	Nusa Tenggara Timur	56.73	54.82	50.14	52.48	52.35	37.10
20	Kalimantan Barat	63.63	63.25	61.00	64.81	54.33	52.92
21	Kalimantan Tengah	54.69	54.25	50.13	49.17	55.33	57.44
22	Kalimantan Selatan	54.32	53.26	46.16	44.00	46.95	49.30
23	Kalimantan Timur	50.88	51.39	48.67	54.80	57.97	55.29
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	52.86
25	Sulawesi Utara	55.95	53.85	47.54	50.00	47.54	49.52
26	Sulawesi Tengah	59.93	70.00	65.56	60.67	53.89	46.67
27	Sulawesi Selatan	53.44	61.00	57.14	56.29	56.29	55.95
28	Sulawesi Tenggara	54.75	56.50	49.38	54.74	50.00	52.00
29	Gorontalo	53.50	52.19	50.00	48.49	50.67	54.00
30	Sulawesi Barat	55.84	60.84	57.11	58.63	53.37	44.16
31	Maluku	48.93	48.67	45.67	48.11	43.11	42.50
32	Maluku Utara	54.63	57.57	51.67	50.83	52.96	50.95
33	Papua Barat	64.50	54.50	54.44	58.00	55.33	55.33
34	Papua	49.43	55.00	58.00	54.67	61.11	50.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 5.6. Rata-Rata Karbon Monoksida (CO) Tahun 2011 s/d 2016

No	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)						
			Rata-Rata CO						Baku Mutu ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	Metropolitan	4,684	–	3,734	3,601	4,827	–	10,000
2	BEKASI	Metropolitan	5,157	–	4,876	4,269	5,875	–	10,000
3	DEPOK	Metropolitan	4,968	–	4,728	3,943	6,010	–	10,000
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	5,820	4,663	3,786	3,470	6,679	4,129	10,000
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	4,987	5,248	2,914	1,815	6,045	5,415	10,000
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	4,700	4,307	3,239	1,251	5,946	1,637	10,000
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	4,885	6,253	1,467	4,823	6,041	1,183	10,000
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	5,497	4,922	2,720	–	6,079	–	10,000
9	MAKASSAR	Metropolitan	5,247	4,328	4,136	4,962	3,436	1,634	10,000
10	MEDAN	Metropolitan	5,250	5,093	6,157	5,824	3,146	2,602	10,000
11	PALEMBANG	Metropolitan	4,814	461	3,721	1,207	–	1,146	10,000
12	SEMARANG	Metropolitan	5,307	2,122	4,358	5,310	5,890	3,526	10,000
13	SURABAYA	Metropolitan	4,664	5,788	4,000	1,033	3,207	–	10,000
14	TANGERANG	Metropolitan	5,304	3,242	4,858	5,240	4,754	–	10,000
15	BALIK PAPAN	Besar	4,844	3,055	5,207	4,466	4,661	1,909	10,000
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	4,515	3,437	6,448	4,281	3,703	–	10,000
17	BANJARMASIN	Besar	4,766	2,573	3,444	6,357	–	1,269	10,000
18	BOGOR	Besar	4,864	–	4,086	5,598	5,361	–	10,000
19	DENPASAR	Besar	4,892	1,145	5,983	5,726	2,989	2,882	10,000
20	KOTA BATAM	Besar	4,559	4,073	6,067	6,796	2,214	4,387	10,000
21	MALANG	Besar	4,394	3,924	3,417	4,520	4,288	–	10,000
22	MANADO	Besar	–	5,000	5,000	–	–	5,197	10,000
23	PADANG	Besar	4,607	4,281	5,816	7,062	2,516	878	10,000
24	PEKAN BARU	Besar	5,120	5,728	6,648	7,699	–	–	10,000
25	PONTIANAK	Besar	–	7,857	2,670	5,356	1,183	1,363	10,000
26	SAMARINDA	Besar	4,800	2,546	4,687	4,581	3,149	2,672	10,000
27	SURAKARTA	Besar	4,386	2,912	7,078	4,470	3,054	2,251	10,000
28	TANGERANG SELATAN	Besar	–	–	–	2,733	4,640	–	10,000
29	YOGYAKARTA	Besar	4,260	483	394	754	865	655	10,000
30	AMBON	Sedang	–	–	3,669	3,139	4,491	4,361	10,000
31	BANDA ACEH	Sedang	–	16,616	5,604	5,017	4,867	3,856	10,000
32	BENGKULU	Sedang	–	4,476	7,951	4,138	2,317	344	10,000
33	GORONTALO	Sedang	–	12,309	3,819	4,987	3,685	4,688	10,000
34	JAMBI	Sedang	–	3,048	6,237	7,445	–	611	10,000
35	JAYAPURA	Sedang	–	4,515	1,150	3,452	3,024	–	10,000
36	KENDARI	Sedang	–	2,737	5,704	3,133	931	–	10,000
37	KOTA TERNATE	Sedang	–	4,582	5,000	–	1,689	–	10,000
38	KUPANG	Sedang	–	2,617	4,227	3,373	790	573	10,000
39	MAMUJU	Kecil	–	4,964	3,746	3,544	4,540	3,490	10,000
40	MANOKWARI	Kecil	–	–	–	–	–	–	10,000
41	MATARAM	Sedang	–	1,145	4,975	8,665	3,665	2,754	10,000
42	PALANGKA RAYA	Sedang	–	2,424	5,997	7,840	–	–	10,000
43	PALU	Sedang	–	5,346	4,126	4,766	4,670	3,563	10,000
44	PANGKAL PINANG	Sedang	–	4,380	4,948	7,234	1,878	–	10,000
45	SERANG	Sedang	–	3,120	4,330	3,379	4,941	–	10,000
46	TANJUNG PINANG	Sedang	–	4,964	4,698	5,568	1,683	3,822	10,000

Keterangan : Simbol "–" : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.7. Rata-Rata Nitrogen Dioksida (NO₂) Tahun 2011 s/d 2016

No	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)						
			Rata-Rata NO ₂						Baku Mutu
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	(µg/Nm ³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	Metropolitan	55	-	25	21	31	-	150
2	BEKASI	Metropolitan	49	-	28	17	43	-	150
3	DEPOK	Metropolitan	56	-	31	30	41	-	150
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	49	66	74	19	47	100	150
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	51	73	71	8	42	-	150
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	50	70	68	6	39	85	150
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	55	83	71	20	43	32	150
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	53	75	75	-	47	-	150
9	MAKASSAR	Metropolitan	50	132	61	17	34	-	150
10	MEDAN	Metropolitan	49	65	79	47	41	-	150
11	PALEMBANG	Metropolitan	54	51	124	45	-	46	150
12	SEMARANG	Metropolitan	50	28	77	39	46	88	150
13	SURABAYA	Metropolitan	57	63	78	11	25	-	150
14	TANGERANG	Metropolitan	48	17	27	19	35	-	150
15	BALIK PAPAN	Besar	52	132	68	57	91	14	150
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	57	66	28	4	77	11	150
17	BANJARMASIN	Besar	49	91	61	9	-	19	150
18	BOGOR	Besar	51	-	31	31	34	-	150
19	DENPASAR	Besar	52	45	39	13	36	70	150
20	KOTA BATAM	Besar	57	106	42	13	33	87	150
21	MALANG	Besar	57	55	72	5	31	-	150
22	MANADO	Besar	-	31	21	-	-	-	150
23	PADANG	Besar	55	88	73	46	44	12	150
24	PEKAN BARU	Besar	46	52	50	20	-	-	150
25	PONTIANAK	Besar	-	87	26	81	12	9	150
26	SAMARINDA	Besar	55	180	57	40	95	14	150
27	SURAKARTA	Besar	55	26	27	25	13	76	150
28	TANGERANG SELATAN	Besar	-	-	-	10	34	-	150
29	YOGYAKARTA	Besar	52	23	51	18	25	32	150
30	AMBON	Sedang	-	-	21	6	32	32	150
31	BANDA ACEH	Sedang	-	103	11	16	132	23	150
32	BENGKULU	Sedang	-	61	56	16	28	20	150
33	GORONTALO	Sedang	-	32	18	15	30	29	150
34	JAMBI	Sedang	-	51	36	20	-	16	150
35	JAYAPURA	Sedang	-	56	46	44	49	-	150
36	KENDARI	Sedang	-	89	44	145	8	-	150
37	KOTA TERNATE	Sedang	-	51	20	-	59	-	150
38	KUPANG	Sedang	-	-	56	34	8	40	150
39	MAMUJU	Kecil	-	54	23	13	21	26	150
40	MANOKWARI	Kecil	-	-	-	-	-	-	150
41	MATARAM	Sedang	-	35	122	19	109	34	150
42	PALANGKA RAYA	Sedang	-	86	26	24	-	-	150
43	PALU	Sedang	-	62	20	18	27	22	150
44	PANGKAL PINANG	Sedang	-	24	49	29	12	-	150
45	SERANG	Sedang	-	15	27	18	33	-	150
46	TANJUNG PINANG	Sedang	-	55	49	44	28	59	150

Keterangan : Simbol "-" : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.8. Rata-Rata Hidro Karbon (HC) Tahun 2011 s/d 2016

No	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)						
			Rata-Rata HC						Baku Mutu ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	Metropolitan	170	-	122	111	124	-	160
2	BEKASI	Metropolitan	315	-	155	129	137	-	160
3	DEPOK	Metropolitan	228	-	135	124	129	-	160
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	378	-	148	69	142	64	160
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	247	-	152	122	146	-	160
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	222	-	130	37	139	28	160
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	197	-	-	106	142	7	160
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	303	-	130	-	146	-	160
9	MAKASSAR	Metropolitan	308	-	215	193	133	74	160
10	MEDAN	Metropolitan	305	-	201	245	155	260	160
11	PALEMBANG	Metropolitan	251	-	83	48	-	42	160
12	SEMARANG	Metropolitan	315	-	189	281	132	123	160
13	SURABAYA	Metropolitan	180	-	148	23	107	-	160
14	TANGERANG	Metropolitan	307	-	122	261	126	-	160
15	BALIK PAPAN	Besar	249	-	189	143	122	94	160
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	181	-	227	200	82	-	160
17	BANJARMASIN	Besar	218	-	189	182	-	111	160
18	BOGOR	Besar	247	-	126	135	131	-	160
19	DENPASAR	Besar	244	-	180	-	129	128	160
20	KOTA BATAM	Besar	186	-	183	189	142	132	160
21	MALANG	Besar	185	-	143	24	129	-	160
22	MANADO	Besar	-	-	-	-	-	109	160
23	PADANG	Besar	202	-	169	-	131	76	160
24	PEKAN BARU	Besar	316	-	159	176	-	-	160
25	PONTIANAK	Besar	-	-	193	146	119	107	160
26	SAMARINDA	Besar	196	-	184	194	96	88	160
27	SURAKARTA	Besar	141	-	144	156	113	136	160
28	TANGERANG SELATAN	Besar	-	-	-	78	126	-	160
29	YOGYAKARTA	Besar	145	-	154	50	38	-	160
30	AMBON	Sedang	-	-	100	118	126	129	160
31	BANDA ACEH	Sedang	-	-	-	181	40	32	160
32	BENGKULU	Sedang	-	-	178	204	102	94	160
33	GORONTALO	Sedang	-	-	129	111	113	113	160
34	JAMBI	Sedang	-	-	-	432	-	65	160
35	JAYAPURA	Sedang	-	-	137	212	79	-	160
36	KENDARI	Sedang	-	-	189	145	109	-	160
37	KOTA TERNATE	Sedang	-	-	-	-	113	-	160
38	KUPANG	Sedang	-	-	-	7	146	64	160
39	MAMUJU	Kecil	-	-	122	94	131	111	160
40	MANOKWARI	Kecil	-	-	-	-	-	-	160
41	MATARAM	Sedang	-	-	202	249	140	84	160
42	PALANGKA RAYA	Sedang	-	-	206	157	-	-	160
43	PALU	Sedang	-	-	126	133	137	103	160
44	PANGKAL PINANG	Sedang	-	-	178	196	131	-	160
45	SERANG	Sedang	-	-	97	96	131	-	160
46	TANJUNG PINANG	Sedang	-	-	168	177	117	86	160

Keterangan : Simbol "-" : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5.9. Rata-Rata Ozone (O₃) Tahun 2011 s/d 2016

No	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)						
			Rata-Rata O ₃						Baku Mutu (µg/Nm ³)
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	Metropolitan	279.16	-	43	47	34	-	235
2	BEKASI	Metropolitan	162.12	-	39	56	55	-	235
3	DEPOK	Metropolitan	191.12	-	39	42	43	-	235
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	181.64	-	171	32	47	-	235
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	348.6	-	153	32	40	-	235
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	183.28	-	160	39	38	-	235
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	186.84	-	54	32	40	-	235
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	162.6	-	156	-	37	-	235
9	MAKASSAR	Metropolitan	164.76	-	84	88	78	-	235
10	MEDAN	Metropolitan	169.44	-	24	23	58	-	235
11	PALEMBANG	Metropolitan	174.76	-	136	43	-	-	235
12	SEMARANG	Metropolitan	170.4	-	147	106	70	-	235
13	SURABAYA	Metropolitan	166.24	-	121	23	53	-	235
14	TANGERANG	Metropolitan	214.8	-	23	58	43	-	235
15	BALIK PAPAN	Besar	164.96	-	153	203	72	-	235
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	161.328	-	89	11	109	-	235
17	BANJARMASIN	Besar	162.68	-	113	82	-	-	235
18	BOGOR	Besar	168.44	-	42	42	33	-	235
19	DENPASAR	Besar	157.08	-	162	180	31	-	235
20	KOTA BATAM	Besar	172	-	118	181	47	-	235
21	MALANG	Besar	167.72	-	118	32	43	-	235
22	MANADO	Besar	-	-	10	-	-	-	235
23	PADANG	Besar	156.56	-	130	136	95	-	235
24	PEKAN BARU	Besar	140.84	-	139	88	-	-	235
25	PONTIANAK	Besar	-	-	108	109	64	-	235
26	SAMARINDA	Besar	179.08	-	135	122	67	-	235
27	SURAKARTA	Besar	145.84	-	120	64	44	-	235
28	TANGERANG SELATAN	Besar	-	-	-	27	46	-	235
29	YOGYAKARTA	Besar	176.2	-	16	22	18	-	235
30	AMBON	Sedang	-	-	50	33	36	-	235
31	BANDA ACEH	Sedang	-	-	9	129	33	-	235
32	BENGKULU	Sedang	-	-	154	78	42	-	235
33	GORONTALO	Sedang	-	-	27	33	40	-	235
34	JAMBI	Sedang	-	-	68	82	-	-	235
35	JAYAPURA	Sedang	-	-	99	25	43	-	235
36	KENDARI	Sedang	-	-	155	142	61	-	235
37	KOTA TERNATE	Sedang	-	-	10	-	92	-	235
38	KUPANG	Sedang	-	-	92	36	35	-	235
39	MAMUJU	Kecil	-	-	37	29	33	-	235
40	MANOKWARI	Kecil	-	-	-	-	-	-	235
41	MATARAM	Sedang	-	-	97	95	72	-	235
42	PALANGKA RAYA	Sedang	-	-	96	133	-	-	235
43	PALU	Sedang	-	-	47	34	44	-	235
44	PANGKAL PINANG	Sedang	-	-	120	36	61	-	235
45	SERANG	Sedang	-	-	43	19	41	-	235
46	TANJUNG PINANG	Sedang	-	-	122	119	41	-	235

Keterangan : Simbol “-” : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 5.10. Rata-Rata Partikulat 10 (PM₁₀) Tahun 2011 s/d 2016

No	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)							Baku Mutu ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
			Rata-Rata PM ₁₀							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	BANDUNG	Metropolitan	137	–	82	99	66	–	150	
2	BEKASI	Metropolitan	136	–	87	39	108	–	150	
3	DEPOK	Metropolitan	155	–	110	74	89	–	150	
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	147	–	94	122	127	102	150	
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	160	–	91	104	120	89	150	
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	167	–	90	135	100	69	150	
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	162	–	46	79	130	–	150	
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	168	–	93	–	124	–	150	
9	MAKASSAR	Metropolitan	141	–	70	36	92	43	150	
10	MEDAN	Metropolitan	142	–	59	109	45	136	150	
11	PALEMBANG	Metropolitan	141	–	77	54	–	51	150	
12	SEMARANG	Metropolitan	143	–	114	32	74	69	150	
13	SURABAYA	Metropolitan	146	–	121	10	65	–	150	
14	TANGERANG	Metropolitan	137	–	37	222	79	–	150	
15	BALIK PAPAN	Besar	115	–	51	49	44	49	150	
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	120	–	19	69	19	75	150	
17	BANJARMASIN	Besar	140	–	68	62	–	11	150	
18	BOGOR	Besar	149	–	75	77	60	–	150	
19	DENPASAR	Besar	149	–	56	75	29	128	150	
20	KOTA BATAM	Besar	155	–	234	29	50	106	150	
21	MALANG	Besar	149	–	99	98	137	–	150	
22	MANADO	Besar	–	–	23	–	57	45	150	
23	PADANG	Besar	146	–	102	101	100	127	150	
24	PEKAN BARU	Besar	141	–	70	99	–	–	150	
25	PONTIANAK	Besar	–	–	78	58	122	11	150	
26	SAMARINDA	Besar	164	–	20	10	33	38	150	
27	SURAKARTA	Besar	148	–	128	33	53	57	150	
28	TANGERANG SELATAN	Besar		–	–	57	67	–	150	
29	YOGYAKARTA	Besar	144	–	88	193	69	133	150	
30	AMBON	Sedang	–	–	54	28	52	64	150	
31	BANDA ACEH	Sedang	–	–	44	56	48	118	150	
32	BENGKULU	Sedang	–	–	60	30	119	89	150	
33	GORONTALO	Sedang	–	–	41	19	28	30	150	
34	JAMBI	Sedang	–	–	31	16	–	33	150	
35	JAYAPURA	Sedang	–	–	32	65	58	–	150	
36	KENDARI	Sedang	–	–	80	40	62	–	150	
37	KOTA TERNATE	Sedang	–	–	37	–	123	–	150	
38	KUPANG	Sedang	–	–	12	70	54	74	150	
39	MAMUJU	Kecil	–	–	19	35	48	36	150	
40	MANOKWARI	Kecil	–	–	–	–	–	–	150	
41	MATARAM	Sedang	–	–	63	57	125	38	150	
42	PALANGKA RAYA	Sedang	–	–	59	47	–	–	150	
43	PALU	Sedang	–	–	105	52	76	33	150	
44	PANGKAL PINANG	Sedang	–	–	79	83	34	–	150	
45	SERANG	Sedang	–	–	89	48	100	–	150	
46	TANJUNG PINANG	Sedang	–	–	81	24	51	72	150	

Keterangan : Simbol “-” : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 5.11. Rata-Rata Sulfur Dioksida (SO₂) Tahun 2011 s/d 2016

NO	Kota	Kategori Kota	Kualitas Udara Tepi Jalan Raya (<i>Roadside Monitoring</i>)						
			Rata-Rata SO ₂						Baku Mutu (µg/Nm ³)
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	Metropolitan	44	-	29	23	35	-	365
2	BEKASI	Metropolitan	54	-	39	64	49	-	365
3	DEPOK	Metropolitan	58	-	36	31	51	-	365
4	JAKARTA BARAT	Metropolitan	58	-	67	18	53	63	365
5	JAKARTA PUSAT	Metropolitan	48	-	60	7	44	17	365
6	JAKARTA SELATAN	Metropolitan	46	-	59	6	41	82	365
7	JAKARTA TIMUR	Metropolitan	55	-	198	6	45	14	365
8	JAKARTA UTARA	Metropolitan	56	-	65	-	42	-	365
9	MAKASSAR	Metropolitan	52	-	45	53	90	-	365
10	MEDAN	Metropolitan	53	-	47	74	238	20	365
11	PALEMBANG	Metropolitan	50	-	183	41	-	82	365
12	SEMARANG	Metropolitan	52	-	141	21	144	75	365
13	SURABAYA	Metropolitan	43	-	70	9	125	-	365
14	TANGERANG	Metropolitan	52	-	37	92	38	-	365
15	BALIK PAPAN	Besar	47.70	-	62.34	100.11	174.53	44	365
16	BANDAR LAMPUNG	Besar	52.49	-	145.06	47.48	127.57	25	365
17	BANJARMASIN	Besar	44.38	-	53.46	42.62	-	108	365
18	BOGOR	Besar	49.20	-	33.37	25.53	41.00	-	365
19	DENPASAR	Besar	47.34	-	70.71	92.93	136.33	19	365
20	KOTA BATAM	Besar	46.62	-	204.59	41.42	119.61	136	365
21	MALANG	Besar	53.59	-	67.74	5.00	33.67	-	365
22	MANADO	Besar	-	-	20.00	-	-	-	365
23	PADANG	Besar	55.88	-	41.52	49.82	143.15	82	365
24	PEKAN BARU	Besar	49.09	-	70.48	132.82	-	-	365
25	PONTIANAK	Besar	-	-	68.79	66.30	43.08	28	365
26	SAMARINDA	Besar	43.89	-	66.98	98.70	78.97	-	365
27	SURAKARTA	Besar	57.18	-	49.99	21.52	139.86	68	365
28	TANGERANG SELATAN	Besar	-	-	-	8.67	36.33	-	365
29	YOGYAKARTA	Besar	40.86	-	21.01	18.20	18.62	19	365
30	AMBON	Sedang	-	-	28.86	46.98	38.33	37	365
31	BANDA ACEH	Sedang	-	-	12.30	58.34	245.00	-	365
32	BENGKULU	Sedang	-	-	79.76	12.62	54.49	39	365
33	GORONTALO	Sedang	-	-	26.05	21.99	29.67	29	365
34	JAMBI	Sedang	-	-	41.62	83.20	-	-	365
35	JAYAPURA	Sedang	-	-	55.78	50.00	50.37	-	365
36	KENDARI	Sedang	-	-	89.89	42.66	74.12	-	365
37	KOTA TERNATE	Sedang	-	-	20.00	-	62.44	-	365
38	KUPANG	Sedang	-	-	45.16	37.60	126.19	40	365
39	MAMUJU	Kecil	-	-	22.60	15.82	32.67	26	365
40	MANOKWARI	Kecil	-	-	-	-	-	-	365
41	MATARAM	Sedang	-	-	67.11	47.87	173.38	80	365
42	PALANGKA RAYA	Sedang	-	-	33.95	86.05	-	-	365
43	PALU	Sedang	-	-	30.08	32.71	35.00	22	365
44	PANGKAL PINANG	Sedang	-	-	205.57	45.78	57.99	-	365
45	SERANG	Sedang	-	-	45.54	28.11	35.00	-	365
46	TANJUNG PINANG	Sedang	-	-	212.02	18.28	149.31	98	365

Keterangan : Simbol “-” : tidak ada data

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

6

Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3



Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdiri atas Direktorat Pengelolaan Sampah, Direktorat Pengelolaan B3, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan B3 dan Limbah Non B3, dan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3.

Direktorat Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Di dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Pengelolaan Sampah antara lain menghasilkan data kota/kabupaten penerima penghargaan adipura, pemberian penghargaan adipura tersebut terbagi atas 4 kategori yaitu : kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

Direktorat Pengelolaan B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengelolaan B3 menghimpun data pelaksanaan registrasi B3, pelaksanaan notifikasi B3, dan rekomendasi pengangkutan B3. Data-data tersebut berupa surat permohonan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor import B3.

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3. Dalam implementasinya Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 mengukur jumlah timbulan limbah B3 yang bersumber dari sumber spesifik dan non spesifik. Rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan dikategorikan menjadi data limbah B3 yang dikelola, sedangkan kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan perolehan kembali dikategorikan menjadi data limbah yang dimanfaatkan.

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi, dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah B3, dan limbah non B3. Sesuai tugas dan fungsinya Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 menghimpun data berdasarkan pelaksanaan evaluasi verifikasi pengelolaan limbah B3 dan limbah B3, yaitu berupa izin atau rekomendasi yang sudah dalam proses, telah terbit izin, ditolak atau dikembalikan dan permohonan yang masih belum memenuhi persyaratan administrasi.

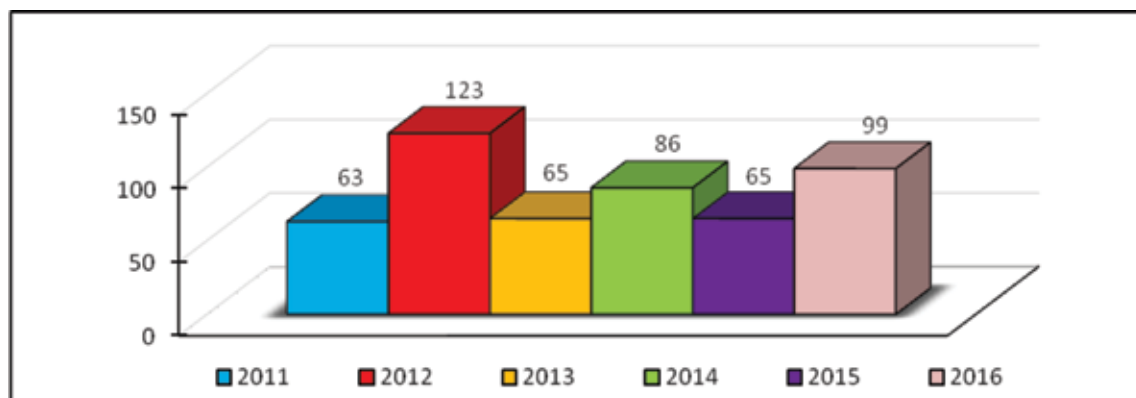
Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan,

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah B3 serta tanggap darurat. Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dibentuk untuk menjawab tantangan bahwa semakin banyaknya lahan terkontaminasi limbah B3 yang ditemukan di Indonesia, serta untuk memberikan unit yang lebih fokus dalam menangani keadaan darurat limbah B3.

6.1. Pengelolaan Sampah

Program Adipura dilaksanakan setiap tahun sejak 1986. Namun, pada tahun 1998 program ini sempat terhenti dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2002. Melalui Penghargaan Adipura, program kerja Kementerian LHK ini bertujuan mendorong kepemimpinan kabupaten/kota dalam membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penilaian untuk Penghargaan Adipura dilakukan dalam lingkup perkotaan, yaitu wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian dan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Harapannya, program Adipura ini dapat mendorong peningkatan kota yang berskala baik.



Grafik 6.1. Perkembangan Jumlah Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2011 - 2016

Salah satu kriteria penilaian Penghargaan Adipura adalah daerah tersebut memiliki Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang setidaknya dioperasikan dengan sistem *controlled landfill* atau lahan uruk terkontrol. Sistem *controlled land fill* dapat memaksimalkan proses dekomposer sampah agar gas metan dapat terbentuk dengan maksimal. Sehingga, penurunan kualitas TPA pun dapat diminimalisir. Selain kriteria itu, ada beberapa faktor pertimbangan lain yang dapat memengaruhi penilaian, yaitu kejadian kebakaran hutan dan lahan, atau bencana lingkungan akibat pertambangan yang menyebabkan kematian. Sementara itu, Penghargaan Adipura Kencana diberikan kepada kota

yang memenuhi kriteria TPA yang dioperasikan dengan *sanitary landfill*, kota yang berkelanjutan, serta inklusif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Dari tahun ke tahun, tantangan pengelolaan lingkungan hidup khususnya sampah terus berkembang. Untuk mewujudkan manajemen program Adipura yang lebih baik, kami mengembangkan aplikasi sistem informasi pengelolaan sampah yang dapat menampilkan data akurat dari kota-kota peserta program Adipura. Sistem informasi pengelolaan sampah ini setidaknya dapat memberikan informasi mengenai sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakter sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.

6.2 Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

Di era modern ini, globalisasi ekonomi merupakan hal yang tak dapat dihindari. Kondisi ini meningkatkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Bagi sektor bisnis, perdagangan, manufaktur, maupun pembangunan, impor maupun ekspor barang atau komoditas dari negara lain merupakan aktivitas yang penting. Tak terkecuali aktivitas impor maupun ekspor bahan-bahan kimia yang tergolong B3.

Menurut OSHA (*Occupational Safety & Health of the United State Government*), B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

6.3. Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, sehingga jumlah industri di Indonesia semakin bertambah. Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang diakibatkan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 dan limbah non B3. Lebih jauh lagi pencemaran akibat limbah B3 akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Dalam rangka menekan laju pencemaran akibat limbah B3 dan limbah non B3 perlu dilakukan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 untuk menekan angka pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan industri serta menurunkan resiko paparan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan dapat bersumber dari sumber spesifik dan non spesifik. Selain pelaku industri yang disebut sebagai penghasil, terdapat pelaku lain dalam pengelolaan limbah B3, yaitu pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3. Seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut wajib mengelola limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan memiliki izin. Dalam rangka melihat kinerja pengelolaan limbah

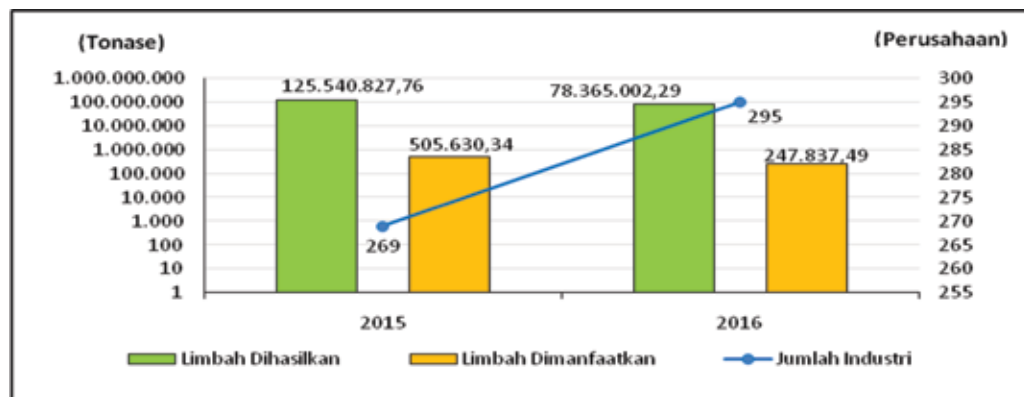
B3 dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha dan pengelola limbah B3 yang memiliki izin dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK, baik izin pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, serta dumping limbah B3.

6.3.1. Limbah B3 Dikelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014).

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Pemantauan pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui mekanisme pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung.

Hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 125.540.827,76 ton dari 269 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 periode tahun 2016 terdapat 247.837,49 ton (0,32%) limbah B3 yang dimanfaatkan dari 78.365.002,29 ton jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 295 perusahaan yang dipantau baik secara langsung, tidak langsung.



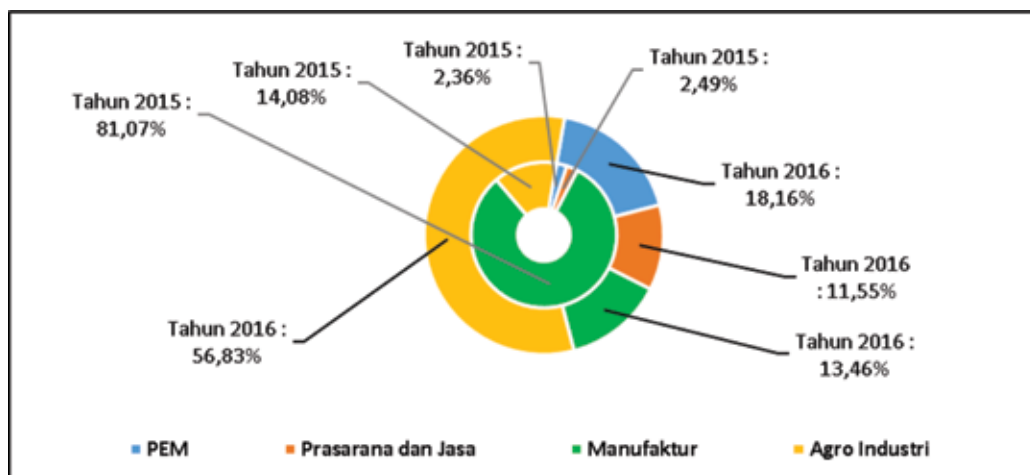
Grafik 6.2. Jumlah Industri dan Pengelolaan Limbah Tahun 2015 - 2016

6.3.2. Limbah B3 Yang Dimanfaatkan

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 PP No. 101 tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 dimaksud adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dimanfaatkan pada tahun 2015 sebesar 11.928,85 ton (2,36%), sektor manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 409.914,70 ton (81,07%), sektor agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 71.214,67 ton (14,08%) dan sektor prasarana dan jasa sebesar 12.572,12 ton (2,49%). Sementara tahun 2016 limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dimanfaatkan sebesar 45.013,82 ton (18,16%), sektor manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 33.358,93 ton (13,46%), sektor agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 140.835,67 ton (56,83%) dan sektor prasarana dan jasa sebesar 28.629,07 ton (11,55%).

Secara umum limbah B3 dimanfaatkan sebagai batako, *cone block*, batubata, substitusi bahan bakar, substitusi bahan baku semen, substitusi produk beton siap pakai, substitusi *bahan sand blasting* dan lain-lain.



Grafik 6.3. Persentase Jumlah B3 Dimanfaatkan Per Sektor tahun 2015 dan 2016

Pemanfaatan limbah B3 masih sedikit dilakukan baik oleh industri penghasil maupun jasa pemanfaat limbah B3. Hal ini disebabkan karena:

- Sosialisasi bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum banyak diketahui oleh industri-industri penghasil limbah B3;
- Panduan teknis bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum lengkap diterbitkan oleh Kementerian LHK. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3 berisi persyaratan dan ketentuan teknis pemanfaatan limbah B3 khusus untuk industri semen dan jasa pengumpul limbah B3 sebagai *platform* sebelum limbah B3 diserahkan ke industri semen untuk dimanfaatkan, sedangkan panduan teknis untuk bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 lainnya seperti: pemanfaatan abu terbang (*fly ash*) sebagai material beton, material jalan, dan sebagai pembenah tanah masih belum tersedia.
- Industri yang melakukan pemanfaatan limbah B3 secara termal seperti: pemanfaatan *sludge* IPAL sebagai substitusi bahan bakar di boiler, pemanfaatan *oil sludge* sebagai bahan bakar di industri kapur,

dan pemanfaatan limbah B3 di kiln semen belum dilengkapi dengan parameter dan baku mutu emisi yang spesifik untuk kegiatan tersebut. Selama ini parameter dan baku mutu masih menggunakan ketentuan sebagaimana Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 sehingga terdapat beberapa parameter yang tidak dapat dicapai dalam pemenuhan baku mutunya.

- d. Industri yang melakukan pemanfaatan abu batubara sebagai substitusi bahan baku dalam pembuatan batako belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hasil penilaian kinerja terhadap industri-industri ini, pemanfaatan limbah B3 hanya mencapai maksimal 10% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan sehingga masih terdapat potensi pembuangan abu batubara secara langsung ke lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembuatan batako dari limbah dibatasi hanya untuk keperluan internal perusahaan saja sebagaimana tertuang dalam izin.

6.4. Verifikasi Pengelolaan B3 dan Limbah Non B3

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan produk-produk industri memakai bahan kimia yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Namun, pemakaian produk berbasis kimia serta B3 telah meningkatkan produksi sampah dan limbah B3. Kondisi tersebut menuntut dikembangkannya sistem tata kelola yang aman, dengan risiko kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkup tanggung jawab Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 terdiri dari pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, *dumping*, penetapan, dan notifikasi limbah B3 serta limbah non B3. *Dumping* B3 ke laut adalah alternatif pembuangan limbah B3 terakhir dan hanya dapat dilakukan jika limbah yang dihasilkan tidak dapat dikelola di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi. Jenis limbah B3 yang dapat dibuang dengan cara *dumping* ke laut pun terbatas untuk menghindari penyebaran polutan dan zat pencemar demi melindungi ekosistem laut.

Dalam upaya mengelola limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 333 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, beberapa peraturan telah dirancang sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri LHK. Permohonan pengelolaan limbah B3 yang diajukan melalui Unit Pelayanan Terpadu KLHK harus melalui proses verifikasi administrasi dan validasi administrasi. Verifikasi dilakukan melalui rapat pembahasan teknis dan verifikasi lapangan. Proses penerbitan dilakukan setelah semua tahap administrasi dan teknis ditandatangani Dirjen. Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, dan diserahkan kepada Sekjen Kementerian LHK. Permohonan pengelolaan limbah B3 terdiri dari beberapa izin sebagai berikut: (1) Pengumpulan, (2) Pemanfaatan, (3) Pengolahan, (4) Penimbunan, (5) *Dumping*, (6) Pengangkutan, (7) Eksport Limbah B3, dan (7) Impor Limbah Non B3.

Kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3). Hal yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, dan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi yang akan digunakan, standar produk hasil pemanfaatan, dan standar kualitas lingkungan hidup yang berlaku.

Perizinan yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan limbah B3, jenis izinnya meliputi:

1. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku,
2. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi,
3. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku,

Kegiatan verifikasi lapangan Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh pemohon usaha atau kegiatan ke Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. Verifikasi lapangan dilakukan setelah proses pembahasan teknis kegiatan Pengolahan Limbah B3 antara KLHK dengan pemohon usaha dan/atau kegiatan.

Sementara itu, jenis perizinan pengolahan limbah B3 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Insinerator; 2) *Boiler*; 3) Elektrokoagulasi; 4) Bioremediasi; 5) *Tank Cleaning*; dan 6) *Sludge Oil Recovery*.

Jenis perizinan penimbunan limbah B3 meliputi perizinan penimbunan limbah B3 di fasilitas penimbunan akhir (*landfill*), dan *tailing*, penempatan kembali di area bekas tambang (*backfilling*), dan sumur injeksi (*reinjection*).

Jenis perizinan *dumping* limbah B3 meliputi izin pembuangan *tailing* dari kegiatan pertambangan dan izin *dumping* serbuk bor dari hasil pemboran, kegiatan eksplorasi, dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (*synthetic-based mud*).

Salah satu layanan kegiatan pengangkutan limbah B3 adalah analisis dan pencetakan *barcode* (*QR Code*) untuk pengangkutan limbah B3. *Review* terhadap permohonan dilakukan melalui verifikasi dokumen dengan mengundang pihak pemohon di kantor Kementerian LHK.

Permohonan rekomendasi terdiri dari perpanjangan rekomendasi yang telah habis masa berlakunya, penambahan alat angkut baru bagi perusahaan yang telah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan perusahaan pengangkutan limbah B3 baru. Tumbuhnya jumlah rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagian disebabkan perubahan legalitas perusahaan pengangkut limbah B3 dari bentuk badan usaha ke bentuk badan hukum, sehingga memiliki identitas baru dan mendapatkan kode manifes yang baru. Diantara pemohon rekomendasi pengangkutan limbah B3 terdapat 5 perusahaan penghasil limbah B3. Alasan mereka melakukan upaya pengangkutan limbah B3 sendiri antara lain karena di daerahnya tidak tersedia jasa pengangkut limbah B3 atau untuk mempermudah proses pelaksanaan izin pemanfaatan limbah B3 yang telah dimiliki perusahaan.

Dalam hal importasi limbah non B3 dan notifikasi ekspor limbah B3, kami merujuk pada Konvensi Basel, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Pada tahun 2015, delegasi Indonesia hadir pada COP (*Conference of The Parties*) ke-12 di Jenewa, Swiss. Rujukan pelaksanaan ekspor limbah B3 juga sesuai dengan *Annex VA* dan *Annex VB* dalam Konvensi Basel.

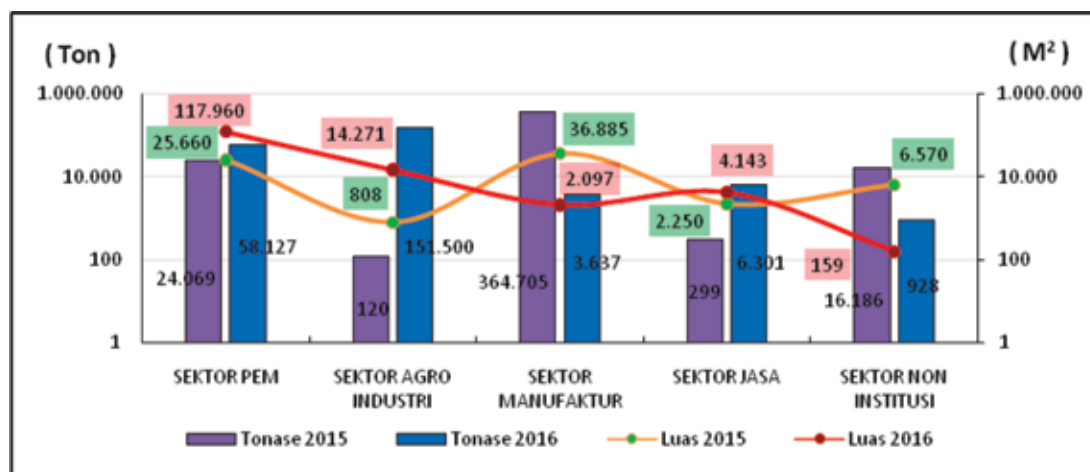
Setiap eksportir yang akan melakukan ekspor limbah B3 wajib mengajukan permohonan notifikasi, mengisi formulir notifikasi ekspor limbah B3 dan memiliki izin ekspor limbah B3, memiliki kerja sama dengan importir di negara tujuan, dan memiliki asuransi untuk menjamin bila terjadi kecelakaan, penahanan, atau keharusan reeksport terhadap limbah B3 tersebut. Untuk permohonan ekspor limbah B3 yang disetujui, pemerintah akan mengeluarkan surat notifikasi yang merupakan surat pemberitahuan ekspor limbah B3 dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah negara tujuan ekspor tersebut.

Dasar hukum rekomendasi impor limbah non B3 adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Impor Limbah Non B3 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Dalam Permendag Nomor 39 Tahun 2009, disebutkan bahwa limbah non B3 yang dapat diimpor hanya yang berupa *iron/metal scrap, paper scrap, plastic scrap, glass scrap, cotton scrap, dan latex scrap*. Sementara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (pasal 74-75 dan pasal 123-124), setiap orang yang menghasilkan limbah B3, namun tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dan tidak tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 tersebut di dalam negeri, maka dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya ke negara lain yang dapat mengolah limbah B3 itu.

6.5. Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3

Data rekapitulasi hasil pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 berdasarkan penerbitan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT) pada tahun 2015 dan 2016 tergambar secara sederhana pada grafik berikut ini.



Grafik 6.4. Total Tonase dan Luas Lahan Terkontaminasi per-Sektor Tahun 2015 - 2016

Tabel 6.1. Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2011

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Kategori
1	2	3	4
1	Surabaya	Kota Surabaya	Kota Metropolitan
2	Palembang	Kota Palembang	Kota Metropolitan
3	Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Besar
4	Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kota Besar
5	Jepara	Kabupaten Jepara	Kota Sedang
6	Pare Pare	Kota Pare-Pare	Kota Sedang
7	Kendari	Kota Kendari	Kota Sedang
8	Gresik	Kabupaten Gresik	Kota Sedang
9	Probolinggo	Kota Probolinggo	Kota Sedang
10	Ternate	Kota Ternate	Kota Sedang
11	Pasuruan	Kota Pasuruan	Kota Sedang
12	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Kota Sedang
13	Manado	Kota Manado	Kota Sedang
14	Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau	Kota Sedang
15	Bontang	Kota Bontang	Kota Sedang
16	Bitung	Kota Bitung	Kota Sedang
17	Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Sedang
18	Palopo	Kota Palopo	Kota Sedang
19	Blitar	Kota Blitar	Kota Sedang
20	Tanjung Pinang	Kabupaten Tanjung Pinang	Kota Sedang
21	Banjarbaru	Kota Banjar Baru	Kota Sedang
22	Pangkajene	Kabupaten Pangkep	Kota Kecil
23	Pangkalan Bun	Kabupaten Kota Waringin Barat	Kota Kecil
24	Pati	Kabupaten Pati	Kota Kecil
25	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	Kota Kecil
26	Kolaka	Kabupaten Kolaka	Kota Kecil
27	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kota Kecil
28	Lamongan	Kabupaten Lamongan	Kota Kecil
29	Limboto	Kabupaten Gorontalo	Kota Kecil
30	Donggala	Kabupaten Donggala	Kota Kecil
31	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	Kota Kecil
32	Barru	Kabupaten Barro	Kota Kecil
33	Caruban	Kabupaten Madiun	Kota Kecil
34	Pinrang	Kabupaten Pinrang	Kota Kecil
35	Masamba	Kabupaten Luwu Utara	Kota Kecil
36	Sanana	Kabupaten Kepulauan Sula	Kota Kecil
37	Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Kota Kecil
38	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	Kota Kecil
39	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Kota Kecil
40	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Kota Kecil
41	Sibolga	Kota Sibolga	Kota Kecil
42	Stabat	Kabupaten Langkat	Kota Kecil
43	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun	Kota Kecil
44	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kota Kecil
45	Malili	Kabupaten Luwu Timur	Kota Kecil
46	Tilamuta	Kabupaten Boalemo	Kota Kecil
47	Kepanjen	Kabupaten Malang	Kota Kecil
48	Temanggung	Kabupaten Temanggung	Kota Kecil

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Kategori
1	2	3	4
49	Sumenep	Kabupaten Sumenep	Kota Kecil
50	Amlapura	Kabupaten Karangasem	Kota Kecil
51	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara	Kota Kecil
52	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Kota Kecil
53	Watansoppeng	Kabupaten Soppeng	Kota Kecil
54	Sengkang	Kabupaten Wajo	Kota Kecil
55	Solok	Kota Solok	Kota Kecil
56	Bangko	Kabupaten Merangin	Kota Kecil
57	Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Kota Kecil
58	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Kota Kecil
59	Sragen	Kabupaten Sragen	Kota Kecil
60	Bangli	Kabupaten Bangli	Kota Kecil
61	Tidore	Kota Tidore Kepulauan	Kota Kecil
62	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu Asin	Kota Kecil
63	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Kota Kecil

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.2. Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2012

No	Kota	Kabupaten/Kota	Kategori
1	2	3	4
1	Tangerang	Kota Tangerang	Kota Metropolitan
2	Palembang	Kota Palembang	Kota Metropolitan
3	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Metropolitan
4	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Metropolitan
5	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Metropolitan
6	Semarang	Kota Semarang	Kota Metropolitan
7	Medan	Kota Medan	Kota Metropolitan
8	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Metropolitan
9	Malang	Kota Malang	Kota Besar
10	Balikpapan	Kota Balikpapan	Kota Besar
11	Manado	Kota Manado	Kota Besar
12	Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Besar
13	Jombang	Kabupaten Jombang	Kota Sedang
14	Jepara	Kabupaten Jepara	Kota Sedang
15	Lumajang	Kabupaten Lumajang	Kota Sedang
16	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Kota Sedang
17	Madiun	Kota Madiun	Kota Sedang
18	Gresik	Kabupaten Gresik	Kota Sedang
19	Lahat	Kabupaten Lahat	Kota Sedang
20	Probolinggo	Kota Probolinggo	Kota Sedang
21	Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Sedang
22	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Sedang
23	Kediri	Kota Kediri	Kota Sedang
24	Metro	Kota Metro	Kota Sedang
25	Bontang	Kotamadya Bontang	Kota Sedang
26	Pasuruan	Kota Pasuruan	Kota Sedang
27	Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau	Kota Sedang
28	Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Kota Sedang
29	Cimahi	Kota Cimahi	Kota Sedang
30	Magelang	Kota Magelang	Kota Sedang
31	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Kota Sedang
32	Tarakan	Kotamadya Tarakan	Kota Sedang
33	Kendari	Kota Kendari	Kota Sedang
34	Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	Kota Sedang
35	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kota Sedang
36	Palopo	Kota Palopo	Kota Sedang
37	Kudus	Kabupaten Kudus	Kota Sedang
38	Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sedang
39	Cilacap	Kabupaten Cilacap	Kota Sedang
40	Blitar	Kota Blitar	Kota Sedang
41	Banjarbaru	Kotamadya Banjarbaru	Kota Sedang
42	Pare Pare	Kota Pare Pare	Kota Sedang
43	Cirebon	Kota Cirebon	Kota Sedang
44	Bitung	Kota Bitung	Kota Sedang
45	Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kota Sedang
46	Ternate	Kota Ternate	Kota Sedang
47	Lamongan	Kabupaten Lamongan	Kota Kecil
48	Tuban	Kabupaten Tuban	Kota Kecil

No	Kota	Kabupaten/Kota	Kategori
1	2	3	4
49	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kota Kecil
50	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Kota Kecil
51	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Kota Kecil
52	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Kota Kecil
53	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	Kota Kecil
54	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Kota Kecil
55	Magetan	Kabupaten Magetan	Kota Kecil
56	Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Kota Kecil
57	Temanggung	Kabupaten Temanggung	Kota Kecil
58	Sumenep	Kabupaten Sumenep	Kota Kecil
59	Kepanjen	Kabupaten Malang	Kota Kecil
60	Caruban	Kabupaten Madiun	Kota Kecil
61	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kota Kecil
62	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo	Kota Kecil
63	Pare	Kabupaten Kediri	Kota Kecil
64	Amlapura	Kabupaten Karangasem	Kota Kecil
65	Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Kota Kecil
66	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Kota Kecil
67	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Kota Kecil
68	Sampang	Kabupaten Sampang	Kota Kecil
69	Slawi	Kabupaten Tegal	Kota Kecil
70	Pangkalan Bun	Kabupaten Kota Waringin Barat	Kota Kecil
71	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	Kota Kecil
72	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun	Kota Kecil
73	Bangil	Kabupaten Pasuruan	Kota Kecil
74	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Kota Kecil
75	Ngawi	Kabupaten Ngawi	Kota Kecil
76	Badung	Kabupaten Badung	Kota Kecil
77	Pati	Kabupaten Pati	Kota Kecil
78	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	Kota Kecil
79	Kolaka	Kabupaten Kolaka	Kota Kecil
80	Pangkajene	Kabupaten Pangkep	Kota Kecil
81	Gianyar	Kabupaten Gianyar	Kota Kecil
82	Sibolga	Kota Sibolga	Kota Kecil
83	Situbondo	Kabupaten Situbondo	Kota Kecil
84	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Kota Kecil
85	Sanana	Kabupaten Kepulauan Sula	Kota Kecil
86	Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kota Kecil
87	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Kota Kecil
88	Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	Kota Kecil
89	Pinrang	Kabupaten Pinrang	Kota Kecil
90	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu Asin	Kota Kecil
91	Donggala	Kabupaten Donggala	Kota Kecil
92	Bangko	Kabupaten Merangin	Kota Kecil
93	Wlingi	Kabupaten Blitar	Kota Kecil
94	Tidore	Kota Tidore Kepulauan	Kota Kecil
95	Menggala	Kabupaten Tulang Bawang	Kota Kecil
96	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kota Kecil
97	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Kota Kecil
98	Stabat	Kabupaten Langkat	Kota Kecil
99	Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Kota Kecil

No	Kota	Kabupaten/Kota	Kategori
1	2	3	4
100	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kota Kecil
101	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara	Kota Kecil
102	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	Kota Kecil
103	Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kota Kecil
104	Malili	Kabupaten Luwu Timur	Kota Kecil
105	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kota Kecil
106	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Kota Kecil
107	Rembang	Kabupaten Rembang	Kota Kecil
108	Solok	Kota Solok	Kota Kecil
109	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	Kota Kecil
110	Prabumulih	Kota Prabumulih	Kota Kecil
111	Barru	Kabupaten Barru	Kota Kecil
112	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Kota Kecil
113	Limboto	Kabupaten Gorontalo	Kota Kecil
114	Bangli	Kabupaten Bangli	Kota Kecil
115	Watansoppeng	Kabupaten Soppeng	Kota Kecil
116	Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kota Kecil
117	Sengkang	Kabupaten Wajo	Kota Kecil
118	Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kota Kecil
119	Singaraja	Kabupaten Buleleng	Kota Kecil
120	Martapura	Kabupaten Banjar	Kota Kecil
121	Sampit	Kabupaten Kota Waringin Timur	Kota Kecil
122	Tabanan	Kabupaten Tabanan	Kota Kecil
123	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	Kota Kecil

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.3. Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2013

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
1	Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Metropolitan
2	Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Metropolitan
3	Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	Metropolitan
4	Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat	Metropolitan
5	Makasar	Kota Makasar	Sulawesi Selatan	Metropolitan
6	Malang	Kota Malang	Jawa Timur	Besar
7	Denpasar	Kota Denpasar	Bali	Besar
8	Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Besar
9	Jambi	Kota Jambi	Jambi	Sedang
10	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Sedang
11	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	Sedang
12	Palopo	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	Sedang
13	Probolinggo	Kota Probolinggo	Jawa Timur	Sedang
14	Tulungagung	Kabupaten Tulung Agung	Jawa Timur	Sedang
15	Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	Sedang
16	Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo	Sedang
17	Pasuruan	Kota Pasuruan	Jawa Timur	Sedang
18	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Sedang
19	Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	Sedang
20	Pare Pare	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	Sedang
21	Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur	Sedang
22	Jepara	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	Sedang
23	Kudus	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	Sedang
24	Bau-Bau	Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	Sedang
25	Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Sedang
26	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sedang
27	Cimahi	Kota Cimahi	Jawa Barat	Sedang
28	Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Sedang
29	Lahat	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	Sedang
30	Blitar	Kota Blitar	Jawa Timur	Sedang
31	Magelang	Kota Magelang	Jawa Tengah	Sedang
32	Bontang	Kota Bontang	Jawa Tengah	Sedang
33	Jayapura	Kota Jayapura	Papua	Sedang
34	Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Kecil
35	Badung	Kabupaten Badung	Bali	Kecil
36	Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	Kecil
37	Turikale	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	Kecil
38	Pati	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Kecil
39	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	Kecil
40	Liwa	Kabupaten Lampung Barat	Lampung	Kecil
41	Ciamis	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	Kecil
42	Martapura	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	Kecil
43	Tuban	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Kecil
44	Watansoppeng	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	Kecil
45	Sragen	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	Kecil
46	Kepanjen	Kabupaten Malang	Jawa Timur	Kecil
47	Prabumulih	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Kecil
48	Enrekang	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	Kecil

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
49	Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Kecil
50	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Kecil
51	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	Kecil
52	Marisa	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	Kecil
53	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	Kecil
54	Batang	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	Kecil
55	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	Sulawesi Selatan	Kecil
56	Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	Kecil
57	Bangko	Kabupaten Merangin	Jambi	Kecil
58	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Kecil
59	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	Kecil
60	Indramayu	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Kecil
61	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	Kecil
62	Banjar	Kota Banjar	Jawa Barat	Kecil
63	Kolaka	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	Kecil
64	Bintan Timur	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	Kecil
65	Biak	Kabupaten Biak Numfor	Papua	Kecil

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.4. Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2014

No	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
1	Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	Metropolitan
2	Medan	Kota Medan	Sumatera Utara	Metropolitan
3	Denpasar	Kota Denpasar	Bali	Besar
4	Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Riau	Besar
5	Manado	Kota Manado	Sulawesi Utara	Besar
6	Jepara	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	Sedang
7	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Sedang
8	Bontang	Kota Bontang	Kalimantan Timur	Sedang
9	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sedang
10	Lumajang	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	Sedang
11	Pasuruan	Kota Pasuruan	Jawa Timur	Sedang
12	Gresik	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Sedang
13	Lahat	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	Sedang
14	Curup	Kabupaten Rejang Linggau	Bengkulu	Sedang
15	Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	Sedang
16	Kediri	Kota Kediri	Jawa Timur	Sedang
17	Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Sedang
18	Sukabumi	Kota Sukabumi	Jawa Barat	Sedang
19	Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu	Sedang
20	Blitar	Kota Blitar	Jawa Timur	Sedang
21	Jambi	Kota Jambi	Jambi	Sedang
22	Jayapura	Kota Jayapura	Papua	Sedang
23	Ternate	Kota Ternate	Maluku Utara	Sedang
24	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Aceh	Sedang
25	Cilacap	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	Sedang
26	Ambon	Kota Ambon	Maluku	Sedang
27	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	Sedang
28	Badung	Kabupaten Badung	Bali	Kecil
29	Temanggung	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Kecil
30	Penajam	Kabupaten Penajam Paser	Kalimantan Timur	Kecil
31	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	Kecil
32	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	Kecil
33	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Kecil
34	Pinrang	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	Kecil
35	Sampit	Kabupaten Kota Waringin Timur	Kalimantan Tengah	Kecil
36	Benteng	Kabupaten Selayar	Sulawesi Selatan	Kecil
37	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Kecil
38	Pangkalan Bun	Kabupaten Kota Waringin Barat	Kalimantan Tengah	Kecil
39	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	Kecil
40	Ngawi	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	Kecil
41	Banjar	Kota Banjar	Jawa Barat	Kecil
42	Amlapura	Kabupaten Karangasem	Bali	Kecil
43	Sumenep	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Kecil
44	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu Asin	Sumatera Selatan	Kecil

No	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
45	Turikale	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	Kecil
46	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	Kecil
47	Pangajene Rapang	Kabupaten Sidrap	Sulawesi Selatan	Kecil
48	Marisa	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	Kecil
49	Caruban	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	Kecil
50	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Riau	Kecil
51	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	Kecil
52	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	Kecil
53	Magetan	Kabupaten Magetan	Jawa Timur	Kecil
54	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	Kecil
55	Donggala	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	Kecil
56	Sragen	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	Kecil
57	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	Kecil
58	Sampang	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	Kecil
59	Pangkajene	Kabupaten Pangkep	Sulawesi Selatan	Kecil
60	Kepanjen	Kabupaten Malang	Jawa Timur	Kecil
61	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	Kecil
62	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Kecil
63	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	Kecil
64	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Kecil
65	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	Kecil
66	Sanana	Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	Kecil
67	Malili	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Kecil
68	Prabumulih	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Kecil
69	Kolaka	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	Kecil
70	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	Kecil
71	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	Kecil
72	Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	Kecil
73	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Kecil
74	Tenggarong	Kabupaten Kutai Kertagera	Kalimantan Timur	Kecil
75	Biak	Kabupaten Biak Numfor	Papua	Kecil
76	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Kecil
77	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	Kecil
78	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	Kecil
79	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Sumatera Barat	Kecil
80	Fak-Fak	Kabupaten Fak-Fak	Papua Barat	Kecil
81	Sumber	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	Kecil
82	Situbondo	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Kecil
83	Lasusua	Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Kecil
84	Stabat	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	Kecil
85	Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	Kecil
86	Manokwari	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	Kecil

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.5. Kota-Kota Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2015

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
1	Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Metropolitan
2	Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Metropolitan
3	Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	Metropolitan
4	Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat	Metropolitan
5	Makasar	Kota Makasar	Sulawesi Selatan	Metropolitan
6	Malang	Kota Malang	Jawa Timur	Besar
7	Denpasar	Kota Denpasar	Bali	Besar
8	Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Besar
9	Jambi	Kota Jambi	Jambi	Sedang
10	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Sedang
11	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	Sedang
12	palopo	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	Sedang
13	Probolinggo	Kota Probolinggo	Jawa Timur	Sedang
14	Tulungagung	Kabupaten Tulung Agung	Jawa Timur	Sedang
15	Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	Sedang
16	Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo	Sedang
17	Pasuruan	Kota Pasuruan	Jawa Timur	Sedang
18	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Sedang
19	Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	Sedang
20	Pare Pare	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	Sedang
21	Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur	Sedang
22	Jepara	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	Sedang
23	Kudus	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	Sedang
24	Bau-Bau	Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	Sedang
25	Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Sedang
26	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sedang
27	Cimahi	Kota Cimahi	Jawa barat	Sedang
28	Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Sedang
29	Lahat	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	Sedang
30	Blitar	Kota Blitar	Jawa Timur	Sedang
31	Magelang	Kota Magelang	Jawa Tengah	Sedang
32	Bontang	Kota Bontang	Jawa Tengah	Sedang
33	Jayapura	Kota Jayapura	Papua	Sedang
34	Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Kecil
35	Badung	Kabupaten Badung	Bali	Kecil
36	Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	Kecil
37	Turikale	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	Kecil
38	Pati	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Kecil
39	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	Kecil
40	Liwa	kabupaten Lampung Barat	Lampung	Kecil
41	Ciamis	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	Kecil
42	Martapura	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	Kecil
43	Tuban	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Kecil
44	Watansoppeng	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	Kecil
45	Sragen	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	Kecil
46	Kepanjen	Kabupaten Malang	Jawa Timur	Kecil
47	Prabumulih	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Kecil
48	Enrekang	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	Kecil

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori
1	2	3	4	5
49	Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangehe	Sulawesi Utara	Kecil
50	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Kecil
51	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	Kecil
52	Marisa	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	Kecil
53	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	Kecil
54	Batang	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	Kecil
55	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	Sulawesi Selatan	Kecil
56	Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	Kecil
57	Bangko	Kabupaten Merangin	Jambi	Kecil
58	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Kecil
59	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	Kecil
60	Indramayu	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Kecil
61	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	Kecil
62	Banjar	Kota Banjar	Jawa Barat	Kecil
63	Kolaka	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	Kecil
64	Bintan Timur	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	Kecil
65	Biak	Kabupaten Biak Numfor	Papua	Kecil

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.6. Kota-Kota Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2016

No	Nama Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori Kota	Keterangan (Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Surabaya	Kota Surabaya	Jawa Timur	Metropolitan	Adipura Paripurna
2	Balikpapan	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	Besar	Adipura Paripurna
3	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Sedang	Adipura Paripurna
1	Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Metropolitan	Adipura Kirana
2	Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	Metropolitan	Adipura Kirana
3	Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Metropolitan	Adipura Kirana
4	Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat	Metropolitan	Adipura Kirana
5	Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Metropolitan	Adipura Kirana
6	Jakarta Pusat	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Metropolitan	Adipura Kirana
7	Malang	Kota Malang	Jawa Timur	Besar	Adipura Kirana
8	Cimahi	Kota Cimahi	Jawa Barat	Besar	Adipura Kirana
9	Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Besar	Adipura Kirana
10	Denpasar	Kota Denpasar	Bali	Besar	Adipura Kirana
11	Jambi	Kota Jambi	Jambi	Besar	Adipura Kirana
12	Surakarta	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Besar	Adipura Kirana
13	Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur	Sedang	Adipura Kirana
14	Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	Sedang	Adipura Kirana
15	Pasuruan	Kota Pasuruan	Jawa Timur	Sedang	Adipura Buana
16	Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	Sedang	Adipura Kirana
17	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	Sedang	Adipura Kirana
18	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sedang	Adipura Kirana
19	Sukabumi	Kota Sukabumi	Jawa Barat	Sedang	Adipura Buana
20	Magelang	Kota Magelang	Jawa Tengah	Sedang	Adipura Kirana
21	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Sedang	Adipura Buana
22	Probolinggo	Kota Probolinggo	Jawa Timur	Sedang	Adipura Kirana
23	Ambon	Kota Ambon	Maluku	Sedang	Adipura Buana
24	Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	Sedang	Adipura Buana
25	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Sedang	Adipura Buana
26	Lahat	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	Sedang	Adipura Buana
27	Bau-Bau	Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	Sedang	Adipura Buana
28	Jayapura	Kota Jayapura	Papua	Sedang	Adipura Kirana
29	Blitar	Kota Blitar	Jawa Timur	Sedang	Adipura Buana
30	Mojokerto	Kota Mojokerto	Jawa Timur	Sedang	Adipura Kirana
31	Tanjung Balai Karimun	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	Sedang	Adipura Kirana
32	Kudus	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	Sedang	Adipura Kirana
33	Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	Sedang	Adipura Buana
34	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Aceh	Sedang	Adipura Kirana
35	Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	Sedang	Adipura Buana
36	Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Sedang	Adipura Kirana
37	Salatiga	Kota Salatiga	Jawa Tengah	Sedang	Adipura Kirana
38	Jepara	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	Sedang	Adipura Kirana
39	Bontang	Kota Bontang	Kalimantan Timur	Sedang	Adipura Kirana

No	Nama Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori Kota	Keterangan (Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
40	Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	Sedang	Adipura Buana
41	Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo	Sedang	Adipura Kirana
42	Pare-Pare	Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan	Sedang	Adipura Kirana
43	Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Sedang	Adipura Buana
44	Pati	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
45	Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	Kecil	Adipura Kirana
46	Martapura	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	Kecil	Adipura Kirana
47	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
48	Prabumulih	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Kecil	Adipura Kirana
49	Pangkalan Bun	Kabupaten Kota Waringin Barat	Kalimantan Tengah	Kecil	Adipura Buana
50	Kijang	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	Kecil	Adipura Buana
51	Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	Kecil	Adipura Buana
52	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	Kecil	Adipura Buana
53	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Kecil	Adipura Kirana
54	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Kecil	Adipura Buana
55	Biak	Kabupaten Biak Numfor	Papua	Kecil	Adipura Buana
56	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
57	Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	Kecil	Adipura Buana
58	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu Asin	Sumatera Selatan	Kecil	Adipura Buana
59	Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Kecil	Adipura Buana
60	Tabanan	Kabupaten Tabanan	Bali	Kecil	Adipura Buana
61	Pacitan	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
62	Indramayu	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Kecil	Adipura Buana
63	Turikale	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	Kecil	Adipura Buana
64	Stabat	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	Kecil	Adipura Buana
65	Ciamis	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	Kecil	Adipura Kirana
66	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	Kecil	Adipura Buana
67	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	Kecil	Adipura Buana
68	Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	Kecil	Adipura Buana
69	Sragen	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
70	Tanjung	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	Kecil	Adipura Buana
71	Caruban	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
72	Rantau	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	Kecil	Adipura Buana
73	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Kecil	Adipura Buana
74	Bangli	Kabupaten Bangli	Bali	Kecil	Adipura Buana
75	Kepanjen	Kabupaten Malang	Jawa Timur	Kecil	Adipura Kirana
76	Tuban	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Kecil	Adipura Kirana
77	Bangko	Kabupaten Merangin	Jambi	Kecil	Adipura Buana
78	Siak Sri Indrapura	Kabupaten Siak	Riau	Kecil	Adipura Buana
79	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Kirana
80	Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Kecil	Adipura Buana
81	Tidore	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Kecil	Adipura Buana
82	Banjar	Kota Banjar	Jawa Barat	Kecil	Adipura Kirana
83	Pinrang	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	Kecil	Adipura Buana

No	Nama Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kategori Kota	Keterangan (Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
84	Sumenep	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
85	Amlapura	Kabupaten Karangasem	Bali	Kecil	Adipura Buana
86	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
87	Penajam	Kabupaten Panajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Kecil	Adipura Buana
88	Unaaha	Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara	Kecil	Adipura Buana
89	Temanggung	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
90	Lasusua	Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Kecil	Adipura Buana
91	Bangil	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Kecil	Adipura Buana
92	Boyolali	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
93	Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	Kecil	Adipura Buana
94	Singaraja	Kabupaten Buleleng	Bali	Kecil	Adipura Buana
95	Blora	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	Kecil	Adipura Buana
96	Langsa	Kota Langsa	Aceh	Kecil	Adipura Buana

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.7. Pelaksanaan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Kegiatan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SK Registrasi B3 Baru	379	1,624	1,612	1,820	804	771
2	SK Registrasi B3 Perpanjangan					879	1,365
3	SK tidak diregistrasi	25	205	185	86	82	29
4	SK Perubahan	-	37	69	146	84	102
5	SK Penolakan	14	15	60	88	79	6
6	SK Penggabungan	-	-	76	31	65	24
	Jumlah	418	1,881	2,002	2,171	1,993	2,297

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.8. Pelaksanaan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Kegiatan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persetujuan impor	8	19	27	55	35	57
2	Penolakan impor	1	5	15	22	18	62
3	Masih dalam proses	17	6	13	10	15	15
	Jumlah	26	30	55	87	68	134

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.9. Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kegiatan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rekomendasi diterbitkan	72	66	63	-	53	48
2	Surat Keterangan diterbitkan	2	2	18	-	7	11
3	Masih dalam proses	5	13	8	-	4	12
	Jumlah	79	81	89	0	64	71

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.10. Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pemantauan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Metode

No.	Sub Sektor	2015		2016	
		Pemantauan Langsung	Pemantauan Tidak Langsung	Pemantauan Langsung	Pemantauan Tidak Langsung
1	2	3	4	5	6
1	Pertambangan, Energi dan Migas (PEM)	18	15	26	42
2	Prasarana dan Jasa	42	66	30	52
3	Manufaktur	23	49	20	48
4	Agro Industri	12	24	35	42
	Jumlah	95	154	111	184

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.11. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola

No.	Sub Sektor	2015		2016	
		Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola (Ton)	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola (Ton)
1	2	3	4	5	6
1	PEM	34	89,349,113.09	68	70,084,545.58
2	Prasarana dan Jasa	108	32,177,291.19	82	1,079,659.07
3	Manufaktur	91	2,165,722.85	68	5,515,539.26
4	Agro Industri	36	1,848,700.63	77	1,685,258.38
	Jumlah	269	125,540,827.76	295	78,365,002.29

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.12. Jumlah Limbah B3 Yang Termanfaatkan

No.	Sub Sektor	2015		2016	
		Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Limbah B3 Yang Dimanfaatkan (Ton)	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Limbah B3 Yang Dimanfaatkan (Ton)
1	2	3	4	5	6
1	PEM	34	11,928.85	68	45,013.82
2	Prasarana dan Jasa	108	12,572.12	82	28,629.07
3	Manufaktur	91	409,914.70	68	33,358.93
4	Agro Industri	36	71,214.67	77	140,835.67
	Jumlah	269	505,630.34	295	247,837.49

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.13. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2015

No.	Jenis Perizinan/Notifikasi/Rekomendasi	Jumlah				
		Permohonan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi & Teknis	SK, Rekomendasi dan Notifikasi Dalam Proses	Penerbitan SK, Notifikasi dan Rekomendasi	Permohonan Ditolak/ Dikembalikan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengumpulan	41	2	6	31	2
2	Pemanfaatan	169	25	33	88	23
3	Pengolahan	65	19	3	35	8
4	Penimbunan	20	8	2	9	1
5	Dumping	19	6	1	12	0
6	Pengangkutan	287	12	17	238	20
7	Ekspor Limbah B3*	37	1	1	35	0
8	Impor Limbah Non B3	144	7	3	134	0
	Jumlah	782	80	66	582	54

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.14. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2016

No.	Jenis Perizinan/Notifikasi/Rekomendasi	Jumlah				
		Permohonan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi & Teknis	SK, Rekomendasi dan Notifikasi Dalam Proses	Penerbitan SK, Notifikasi dan Rekomendasi	Permohonan Ditolak/ Dikembalikan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengumpulan	47	-	-	44	3
2	Pemanfaatan	181	21	7	140	13
3	Pengolahan	69	-	3	51	15
4	Penimbunan	29	-	7	18	4
5	Dumping	23	-	3	17	3
6	Pengangkutan	259	-	2	250	7
7	Ekspor Limbah B3*	37	-	3	33	1
8	Impor Limbah Non B3	86	-	-	86	-
	Jumlah	731	21	25	639	46

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.15. Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Tahun 2015

No.	Provinsi	Lokasi	Jenis Limbah B3 Sumber Kontaminasi	Luas (m ²)	Tonase (ton)
1	2	3	4	5	6
A	Sektor PEM				
1	Riau	Kab. Bengkalis, Riau	Heavy Oil	10,000.00	2,872.80
2	Riau	Kab. Siak, Provinsi Riau	Crude Oil Contaminated	1,086.00	1,935.50
3	Riau	Kab. Rokan Hilir, Riau	Crude Oil Contaminated	219	156.8
4	Riau	Kab. Bengkalis, Riau	Crude Oil Contaminated	12,260.00	4,779.60
5	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Drilling Cutting	140	237
6	Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan	Sludge Oil	1,443.00	8,447.11
7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi	Sludge Oil	512	5,639.90
B	Sektor Agroindustri				
1	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan	Spent Earth	808	119.97
C	Sektor Manufaktur				
1	Sumatera Selatan	Kota Palembang, Sumatera Selatan	Katalis bekas	10	29.87
2	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	<i>Fly ash dan Bottom ash</i>	120	255.17
3	Jawa Barat	Kota Depok, Jawa Barat	Pasir silika terkontaminasi (pasir foundry), batu tahan api dan sludge	11,620.00	38,020.00
4	Jawa Barat	Kab. Purwakarta, Jawa Barat	<i>Fly ash dan Bottom ash</i>	25,135.11	326,400.10
D	Sektor Jasa				
1	Riau	Kota Dumai, Riau	<i>Oil Sludge</i>	2,250.00	299
E	Sektor Non Institusi				
1	Jawa Barat	Kab. Bogor, Jawa Barat	Sisa peleburan aki bekas yang mengandung timbal (Pb)	6,500.00	15,726.00
2	DKI Jakarta	Kota Administratif Jakarta Timur, DKI Jakarta	Metil Merkaptan	70	460.25

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Tabel 6.16. Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Tahun 2016

No.	Provinsi	Lokasi	Jenis Limbah B3 Sumber Kontaminasi	Luas (m2)	Tonase (Ton)
1	2	3	4	5	6
A.	SEKTOR PEM				
1	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	<i>Oil Sludge</i>	12,578.00	1,373.83
2	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	<i>Crude Oil</i>	1,460.00	474.00
3	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	<i>Crude Oil</i>	700.00	588.00
4	Riau	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	9,564.00	6,139.00
5	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	<i>Crude Oil</i>	1,081.00	4,140.00
6	Riau	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	14,712.00	11,095.00
7	Riau	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	14,711.00	3,255.00
8	Riau	Kabupaten Kampar	<i>Crude Oil</i>	500.00	256.50
9	Riau	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	7,170.00	1,294.00
10	Riau	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	8,304.00	1,104.00
11	Kalimantan Timur	Kabupaten Siak	<i>Crude Oil</i>	39,868.00	7,407.00
12	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	<i>Acid Sludge</i>	2,244.17	16,455.50
13	Kepulauan Riau	Kota Batam	<i>Sludge Oil, Sludge Oil Contaminated Soil dan Kayu Terkontaminasi Sludge Oil</i>	5,068.00	4,545.41
B.	SEKTOR AGROINDUSTRI				
1	Lampung	Kabupaten Lampung Timur	<i>Humic, Dialite, Gypsum, Karbon Aktif</i>	14,270.50	151,500.00
C.	SEKTOR MANUFAKTUR				
1	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	<i>Fly ash dan Bottom ash</i>	220.00	59.27
2	Sumatera Barat	Kota Padang	<i>Copper Slag dan batu tahan api (refractory) bekas</i>	1,877.00	3,577.58
D.	SEKTOR JASA				
1	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	Karung bekas kemasan Sludge IPAL, <i>Fly ash dan Bottom ash</i>	3,200.00	4,694.60
2	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	<i>Sand Foundry</i>	943.00	1606.48
E.	SEKTOR NON INSTITUSI				
1	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Slag Timbal dari Peleburan Aki Bekas	159.00	928.00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

7

Pengendalian Perubahan Iklim

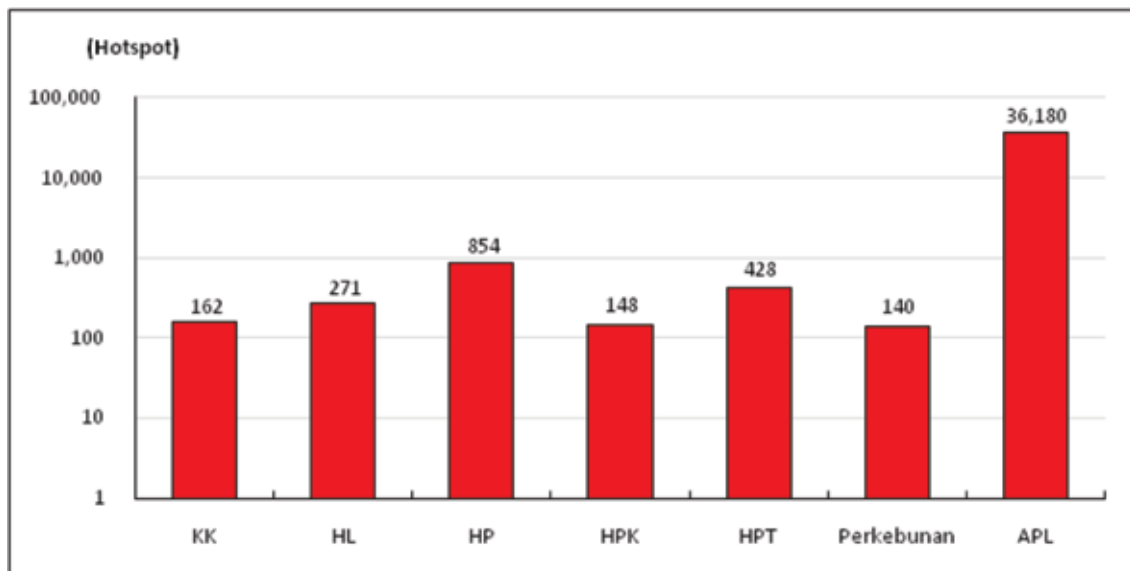


Berlandaskan pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim, Program Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim adalah meningkatkan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui 5 sasaran dan indikator capaian yang terukur yaitu:

1. **Adaptasi Perubahan Iklim**, yaitu meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah. Indikator capaian dari sasaran kegiatan ini yaitu: wilayah yang difasilitasi pengembangan skenario iklim sebanyak 15 wilayah; wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan (*downscaling*) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah sebanyak 15 wilayah; fasilitasi wilayah dalam pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di 15 wilayah rentan; fasilitasi desa/kelurahan yang menerapkan Program Kampung Iklim (Proklam) sebanyak 2.000 desa/kelurahan.
2. **Mitigasi Perubahan Iklim**, yaitu tersedianya kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah, dengan indikator capaian yaitu: (1.a) kebijakan yang termutakhirkan dalam penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah; (1.b) perangkat mitigasi perubahan iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut (baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, dan *safeguards*); dan (1.c) provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut dan limbah; konsumsi bahan perusak ozon menurun, dengan indikator tercapainya persentase tingkat penurunan konsumsibahan perusak ozon enis HCFC dari 403,9 ODP ton tahun 2013 menjadi 282,71 ODP ton atau 30%.
3. **Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi**, yaitu terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi yang dilaporkan secara berkala setiap tahun. Indikator capaian sasaran kegiatan ini yaitu: laporan hasil inventarisasi GRK, laporan Komunikasi Nasional (*National Communication*) perubahan iklim dan laporan terkait; bidang mitigasi yang telah diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV); dan bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam *Sistem Registry Nasional*.
4. **Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim**, yaitu meningkatnya insentif dalam penanganan perubahan iklim. Indikator capaian dari sasaran kegiatan ini yaitu: diterapkannya mekanisme pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan di 25 lokasi; kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait perdagangan karbon, teknologi rendah karbon dan sains perubahan iklim sebanyak 15 kerja sama; kegiatan/proyek yang mendapat rekomendasi teknis untuk investasi penurunan emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak 200 yang akan dibiayai melalui pusat pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan; dan d) perjanjian dan forum internasional bidang perubahan iklim (termasuk kebakaran hutan dan lahan) yang dikoordinasikan sebagai pelaksanaan fungsi *National Focal Point* sebanyak 7 perjanjian/forum.

5. **Kebakaran Hutan dan Lahan**, yaitu menurunkan luas areal kebakaran hutan dengan empat sasaran dan indikator capaian yang terukur yaitu terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla, dengan indikator capaian yaitu: jumlah hotspot pada kawasan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019; penurunan luas kebakaran hutan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas

kebakaran hutan dan lahan dari 498.736 ha menjadi 448.863 ha pada tahun 2019; SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala Agni dan MPA) sebanyak 5.000 orang; dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 brigade.



Grafik 7.1. Jumlah Sebaran Hotspot NOAA18/19 Tahun 2016

Tabel 7.1. Konsumsi Bahan Perusak Ozone (BPO) Tahun 2012 s/d 2016

Nama Hydrochloroflourocarbon (HCFC)	Nilai Ozone Depletion Potential (ODP)	Konsumsi Bahan Perusak Ozone (BPO)									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Metric Ton	ODP Ton	Metric Ton	ODP Ton	Metric Ton	ODP Ton	Metric Ton	ODP Ton	Metric Ton	ODP Ton
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HCFC-22	0.055	3,662.39	201.43	2,977.06	163.74	2,944.17	161.93	1,892.90	104.11	3,254.06	178.97
HCFC-123	0.02	190.93	3.82	100.46	2.01	108.82	2.18	101.90	2.04	123.63	2.47
HCFC-124	0.022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCFC-141b	0.11	1,096.40	120.60	1,300.00	143.00	843.00	92.73	420.00	46.20	83.60	9.20
HCFC-142b	0.065	24.86	1.62	6.41	0.42	4.46	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
HCFC-225	0.02	27.29	0.55	19.37	0.39	12.23	0.24	4.56	0.09	3.13	0.06
R-406A (HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b) (55%/4%/41%)		0	0	0	0	0	0	0	0	24.48	1.39
Total Konsumsi HCFC		5,001.87	328.02	4,403.30	309.55	3,912.68	257.37	2,419.35	152.44	3,488.90	192.10
Methyl Bromide	0.6	202.00	121.20	254.00	152.40	256.00	153.60	224.00	134.40	101.79	61.08
Total Konsumsi		5,203.87	449.22	4,657.30	461.95	4,168.68	410.97	2,643.35	286.84	3,590.69	253.17

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2016)

Tabel 7.2. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Aksi Mitigasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Pemantauan Tahun 2016

No	Provinsi	Lokasi Pemantauan / Perhitungan Lcapanan Mitigasi PI	Tahun	Tingkat Emisi Bau (Ton CO ₂ e)	Tingkat Emisi Setelah Mitigasi (Ton CO ₂ e)	Total Reduksi Emisi (Ton CO ₂ e)	Kegiatan Mitigasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	TPA Gampong Jawa	2015	40,486.07	40,482.70	3.37	pengomposan
			2016	44,135.61	43,980.67	154.95	SRT, pengomposan
2	Sumatera Selatan	TPA Sukowinatan	2009	67,623.99	67,622.51	1.48	pengomposan
			2010	79,853.89	79,851.54	2.35	pengomposan
			2011	91,457.61	91,454.52	3.09	pengomposan
			2012	104,818.33	104,814.62	3.71	pengomposan
			2013	116,112.47	116,108.23	4.23	pengomposan
			2014	125,957.52	125,952.12	5.40	pengomposan
			2015	134,105.66	134,099.44	6.22	pengomposan
3	Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> TPA Babagan TPA Pasir Impun TPA Gedebage TPA Cikundul 	Tidak ada kegiatan mitigasi di TPA Babagan dan TPA Pasir Impun. Biodigester Gedebage tidak beroperasi dan rusak. Aksi mitigasi pengomposan, biogas dan piliris di TPA Cikundul masih pada tahap uji coba.				
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	TPA Banyuroto	2014	3,791.59	3,536.19	255.41	LFG rec, pengomposan
			2015	4,275.75	3,822.34	453.41	LFG rec, pengomposan
			2016	4,709.82	4,120.25	589.57	LFG rec, pengomposan
		TPA Piyungan	2015	84,100.47	83,594.76	505.71	pengomposan, 3R kertas
			2016	89,569.20	88,595.07	974.13	pengomposan, 3R kertas
5	Nusa Tenggara Barat	TPA Kebun Kongok	2015	23,427.62	23,425.77	1.86	pengomposan
			2016	24,187.93	24,185.10	2.83	pengomposan
6	Kalimantan Timur	TPA Manggar	2010	68,248.50	68,238.89	9.61	pengomposan
			2011	72,670.56	72,652.70	17.86	pengomposan
			2012	74,459.65	69,120.25	5,339.40	LFG rec, pengomposan, 3R kertas
			2013	77,963.55	52,839.98	25,123.58	LFG rec, pengomposan, 3R kertas
			2014	82,395.32	49,580.66	32,814.66	LFG rec, pengomposan, 3R kertas
			2015	87,665.94	17,924.24	69,741.70	LFG rec, pengomposan, 3R kertas
7	Kalimantan Tengah	TPA Tjilik Riwt	2002	7,150.59	7,146.42	4.18	3R kertas
			2003	8,403.55	8,395.48	8.07	3R kertas
			2004	9,373.43	9,361.73	11.70	3R kertas
			2005	10,149.36	10,134.28	15.08	3R kertas
			2006	10,791.64	10,773.40	18.24	3R kertas
			2007	11,340.34	11,319.16	21.18	3R kertas
			2008	11,823.31	11,799.38	23.92	3R kertas
			2009	12,259.92	12,233.44	26.48	3R kertas
			2010	12,663.47	12,634.60	28.87	3R kertas
			2011	13,054.45	13,023.36	31.09	3R kertas
			2012	13,452.10	13,418.94	33.16	3R kertas
			2013	13,855.27	13,820.18	35.10	3R kertas
			2014	14,263.43	14,226.53	36.90	3R kertas
			2015	14,676.43	14,637.85	38.58	3R kertas
			2016	15,074.31	15,034.16	40.15	3R kertas
8	Sulawesi Utara	TPA Aertembaga	2011	15,463.04	15,442.21	20.83	pengomposan
			2012	16,331.31	16,299.55	31.76	pengomposan
			2013	16,986.82	16,947.42	39.40	pengomposan
			2014	19,117.40	19,072.60	44.80	pengomposan
			2015	20,652.34	20,603.67	48.66	pengomposan

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Catatan : angka penurunan emisi GRK dari aktivitas pemanfaatan gas metan atau LFG recovery (LFG rec.) melalui pipa Sambungan Rumah Tangga (SRT) belum dikoreksi dengan emisi CO₂ dari pembakaran metan.

Tabel 7.3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Kehutanan pada Tahun Pemantauan 2016

No	Provinsi	Lokasi Pemantauan Lapangan	Kegiatan Mitigasi	Emisi / Serapan GRK (tCO ₂ e)	Penurunan Emisi / Peningkatan Serapan GRK (tCO ₂ e)					Keterangan
					2013 (tCO ₂ e)	2014 (tCO ₂ e)	2015 (tCO ₂ e)	2016 (tCO ₂ e)	Agregat (tCO ₂ e)	
1	Aceh	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Aceh	Tahura Poecut Merah Intan dan Desk Reviu	PPCK Provinsi Aceh	9,466,712.8	0.0	6,928,170.6	7,870,185.0	n/a		Secara agregat PPCK Provinsi Aceh tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK KPHL Model III Aceh dan Tahura Poecut Merah Intan Aceh
			PPCK KPHL Model III Aceh	668,085.9	0.0	130,094.5	908,904.6	n/a	908,904.6	
			PPCK Tahura Poecut Merah Intan	2,839.8	2,839.8	2,839.8	2,839.8	n/a	2,839.8	
			PCK Tahura Poecut Merah Intan	19.1	198.5	427.9	903.2	1,222.5	2,752.1	
			PCK Hutan Lindung	1,674.3	27,984.0	29,108.5	31,217.5	33,874.8	122,184.8	
2.	Sumatera Utara	Tahura Bukit Barisan Sumut dan Desk Reviu	PCK Taman Buru	1,133.0	25,770.9	26,901.9	26,901.9	26,901.9	106,476.6	Secara agregat PPCK Provinsi Sumut tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Tahura Bukit Barisan Sumut
			PCK Mangrove	248.9	2,738.1	2,738.1	2,738.1	2,738.1	10,952.4	
			Jumlah						1,154,110.3	
			PPCK Provinsi Sumut	8,669,049.9	1,843,088.4	6,653,876.4	2,105,221.1	n/a		
			PPCK Tahura Bukit Barisan Sumut	21,007.6	0.0	21,007.6	21,007.6	n/a	21,007.6	
3.	Riau	Tahura Sultan Syarif Hasim Riau dan Desk Reviu	PCK Tahura Bukit Barisan Sumut	33.0	0.0	0.0	156.1	156.1	312.2	Secara agregat PPCK Provinsi Sumut tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Tahura Bukit Barisan Sumut
			Jumlah						21,319.8	
			PPCK Tahura SSH Riau	23,817.9	23,817.9	23,817.9	23,817.9	n/a	23,817.9	
			PCK Tahura SSH Riau	0.0	0.0	0.0	0.0	152.5	152.5	
			Jumlah						23,970.4	
4.	Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Bentayan, Balai KSDA Sumsel dan Desk Reviu	PPCK Prov. Sumsel	14,238,774.0	0.0	12,706,838.8	0.0	n/a	0.0	Secara agregat PPCK Provinsi Sumut tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Tahura Bukit Barisan Sumut
			PCK Balai KSDA Sumsel	340.6	425.7	425.7	851.4	851.4	2,554.2	
			Jumlah						2,554.2	
			PPCK Prov. Jambi	21,461,636.4	0.0	12,823,578.4	14,700,751.8	n/a	14,700,751.8	
			PCK						14,700,751.8	
6.	Jawa Tengah	Kabupaten Pekalongan dan Desk Review	PPCK Prov. Jateng	4,617,107.2	3,680,763.1	1,194,833.6	4,199,579.7	n/a	4,199,579.7	Secara agregat PPCK Provinsi DIY tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Balai TN Merapi dan PPCK Hutan Rakyat Dishut Prov.Jateng
			PCK KBR BPDAS Pemali Jratun Semarang	31,735.0	73,535.0	114,785.0	130,872.5	130,872.5	450,065.0	
			PCK Hutan Rakyat Dishut Prov.Jateng	55.6	187.9	341.0	400.7	400.7	1,330.3	
			Jumlah						4,650,975.0	
			PPCK Prov. DIY	16,223.0	16,223.0	15,681.5	16,223.0	n/a		
7.	D.I. Yogyakarta	Balai Taman Nasional Merapi dan Desk Review	PPCK Balai TN Merapi	21,569.1	21,569.1	20,221.9	21,569.1	n/a	21,569.1	Secara agregat PPCK Provinsi DIY tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Balai TN Merapi Sumut
			PCK Hutan Lindung	2,743.0	15,337.6	16,650.9	16,948.6	17,845.3	66,782.4	
			PCK Mangrove	113.0	796.9	1,571.5	1,571.5	1,571.5	5,511.4	
			Jumlah						93,862.9	
			PPCK Prov Bali	281,619.4	258,094.1	265,731.7	n/a	n/a	265,731.7	
8.	Bali	Desk Review							265,731.7	
9.	Nusa Tenggara Barat	KPHL Rinjani Barat, NTB dan Desk Reviu	PPCK Prov. NTB	3,779,250.2	291,671.9	714.8	10,082,085.8	n/a	10,082,085.8	Secara agregat PPCK Provinsi Sumut tidak dihitung, karena sudah diwakili oleh PPCK Balai TN Merapi Sumut
			PCK KPHL Rinjani Barat	0.0	93.3	117.9	125.0	197.1	533.3	
			Jumlah						10,082,619.1	
			PPCK Prov Kalimantan	19,881,129.1	0.0	8,285,536.2	0.0	n/a	0.0	
			Hutan Kota pada Kota							
10.	Kalimantan Barat									

No	Provinsi	Lokasi Pemantauan Lapangan	Kegiatan Mitigasi	Emisi / Serapan GRK (tCO ₂ e)	Penurunan Emisi / Peningkatan Serapan GRK (tCO ₂ e)					Agregat (tCO ₂ e)	Keterangan
					2013 (tCO ₂ e)	2014 (tCO ₂ e)	2015 (tCO ₂ e)	2016 (tCO ₂ e)	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pontianak dan Kab. Kubu Raya, serta Desk Reviu	PCK Hutan Kota pada Kota Pontianak	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9	17.8		
			PCK Hutan Kota pada Kab. Kubu Raya	0.0	22.0	22.0	22.0	22.0	88.0		
					Jumlah				105.8		
11.	Kalimantan Tengah	TWA Tangkiling, BKSDA Kalteng dan Desk Reviu	PPCK Prov Kalteng	48,678,396.3	10,002,370.1	0.0	0.0	n/a	0.0		
			PCK BPDAS Kahaya Kalteng	7,905.3	5,700.8	10,853.2	12,417.7	13,933.1	42,904.8		
					Jumlah				42,904.8		
12.	Kalimantan Timur	Tahura Bukit Suharto Kaltim dan Desk Review	PPCK Prov Kaltim	47,856,470.6	12,893,172.1	28,796,600.8	1,381,990.3	n/a	1,381,990.3		
			PCK pada Tahura Bukit Suharto Kaltim	822.9	2,206.7	4,124.3	4,124.3	4,124.3	14,579.6		
			PCK pada Mangrove Kaltim	438.2	0.0	2,421.7	2,421.7	2,421.7	7,265.1		
			PCK Pada Arboretum di Tahura Bukit Suharto kaltim	0.0	74.9	74.9	74.9	74.9	299.6		
					Jumlah				1,404,134.6		
13.	Sulawesi Utara	Plot Sampling Permanen (PSP) BPKH Wilayah IV Manado di wilayah kerja Balai	PPCK Prov. Sulut	3,418,445.9	3,413,339.4	1,149,399.1	0.0	n/a	0.0		
			PCK								
					Jumlah				0.0		
14.	Sulawesi Selatan	Hutan rakyat pada Ds. Lekopancing, Tanralili dan Desk Review	PPCK Prov. Sulselbar	14,238,774.0	0.0	12,706,838.8	0.0	n/a	0.0		
			PCK pada Konservasi dan Lindung	340.6	425.7	425.7	851.4	851.4	2,554.2		
					Jumlah				2,554.2		
15.	Papua Barat	Hutan Lindung Kabupaten Papua Barat dan Desk Reviu	PPCK Prov Papua Barat	9,476,136.0	0.0	7,805,196.8	0.0	m/a	0.0		
			PCK Hutan Lindung Kab. Papua Barat	6,622.0	11,192.4	19,735.9	33,405.6	51,064.3	115,398.2		
					Jumlah				115,398.2		
Total Penurunan Emisi GRK					32,110,927.8						

Tabel 7.4. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektoral Periode Tahun 2000 s/d 2014

Tahun	Emisi GRK Sektoral Periode Tahun 2000 s/d 2014						Total Gg CO ₂ e
	1	2	3	4	5	6	
		Energi Gg CO ₂ e	Industrial Processes and Product Use (IPPU) Gg CO ₂ e	Agriculture Gg CO ₂ e	Waste Gg CO ₂ e	Land use, land-use change and forestry (LULUCF) Gg CO ₂ e	Peat Fire Gg CO ₂ e
2000		298,412	42,534	99,717	60,107	343,797	161,571
2001		327,938	46,987	97,789	62,820	329,243	50,885
2002		340,323	40,518	97,479	65,430	373,189	301,753
2003		350,244	40,263	98,547	68,252	328,958	132,075
2004		368,508	42,047	100,299	70,260	475,851	232,018
2005		372,891	41,196	102,419	72,311	439,638	258,887
2006		391,424	37,504	101,819	77,445	479,246	510,710
2007		386,593	34,788	105,757	78,704	553,803	62,747
2008		409,736	35,366	103,030	79,045	513,712	81,744
2009		398,639	36,396	107,733	83,430	620,566	299,920
2010		453,178	36,146	108,487	86,341	383,405	51,383
2011		488,936	35,768	108,718	90,920	427,310	189,026
2012		508,120	40,199	112,727	94,660	487,928	207,050
2013		546,398	38,993	112,104	97,545	402,252	205,076
2014		577,334	39,702	113,441	98,406	480,033	499,389

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.5. Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi Tahun 2000 s/d 2014

Source of GHG Emissions		Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi														
		2000 (Gg CO2e)	2001 (Gg CO2e)	2002 (Gg CO2e)	2003 (Gg CO2e)	2004 (Gg CO2e)	2005 (Gg CO2e)	2006 (Gg CO2e)	2007 (Gg CO2e)	2008 (Gg CO2e)	2009 (Gg CO2e)	2010 (Gg CO2e)	2011 (Gg CO2e)	2012 (Gg CO2e)	2013 (Gg CO2e)	2014 (Gg CO2e)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
By Type of Fuel																
	155,515	159,934	174,080	173,785	188,172	191,501	170,507	170,041	158,206	188,034	187,820	189,793	183,924	183,762	191,432	
	52,998	67,474	69,393	77,206	85,518	101,838	117,410	145,686	163,786	133,421	158,793	188,555	194,682	231,681	280,909	
	67,748	79,664	86,497	89,883	89,971	72,003	90,821	49,182	52,524	63,433	82,855	76,427	76,019	81,586	87,190	
Total by type of fuel		276,262	307,071	329,971	340,874	363,661	365,341	378,738	364,910	384,889	429,467	454,775	454,625	497,029	559,531	
By Sector/Sources																
	89,716	110,764	119,793	130,188	129,518	127,816	137,094	124,026	124,485	136,599	144,526	173,803	187,631	189,860	223,213	
	62,030	76,614	80,964	90,946	93,516	101,948	108,930	121,696	121,940	136,058	130,886	160,771	174,873	177,294	208,671	
	27,686	34,151	38,829	39,242	36,002	25,867	28,049	2,211	2,442	395	13,449	12,988	12,672	12,529	14,503	
	-	-	-	-	-	-	115	119	103	146	192	44	86	37	39	
	72,300	77,379	77,393	74,019	88,365	94,005	108,118	111,441	134,824	99,255	132,306	133,226	123,738	151,256	171,593	
	58,916	62,158	64,636	67,601	72,841	74,947	73,120	76,219	81,367	96,352	108,745	117,518	131,458	136,646	116,122	
	3,489	3,483	3,572	3,632	3,819	3,271	3,979	3,946	3,732	3,668	3,798	3,438	3,541	3,259	2,899	
	33,167	34,381	35,836	36,930	36,930	36,449	34,340	34,699	32,397	29,379	28,299	27,842	28,865	32,303	32,720	
	11,421	11,742	11,996	12,120	12,286	12,276	11,372	10,828	10,787	11,423	12,496	10,743	11,301	10,045	8,687	
	269,009	299,907	313,227	324,491	343,759	348,764	368,023	361,158	387,591	376,676	430,171	466,571	486,534	523,369	555,233	
	29,404	28,031	27,096	25,753	24,749	24,127	23,401	25,435	22,145	21,963	23,007	22,365	21,586	23,028	22,518	
	374	449	501	554	642	738	940	1,054	1,110	1,242	1,334	1,713	1,871	2,178	2,221	
	29,030	27,582	26,595	25,199	24,107	23,389	22,461	24,381	21,034	20,721	21,673	20,652	19,714	20,851	20,296	
Total Sectoral		298,412	327,938	340,323	350,244	368,508	372,891	391,424	409,736	398,639	453,178	488,936	508,120	546,398	577,751	

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.6. Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor IPPU Tahun 2000 s/d 2014

Code	Emisi	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor IPPU														
		2000 (Gg CO2 eq.)	2001 (Gg CO2 eq.)	2002 (Gg CO2 eq.)	2003 (Gg CO2 eq.)	2004 (Gg CO2 eq.)	2005 (Gg CO2 eq.)	2006 (Gg CO2 eq.)	2007 (Gg CO2 eq.)	2008 (Gg CO2 eq.)	2009 (Gg CO2 eq.)	2010 (Gg CO2 eq.)	2011 (Gg CO2 eq.)	2012 (Gg CO2 eq.)	2013 (Gg CO2 eq.)	2014 (Gg CO2 eq.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mineral																
2.A.1	Cement	16,436	18,489	18,144	17,806	19,038	18,557	19,084	19,599	20,535	19,427	19,672	20,507	22,912	24,041	24,192
2.A.2	Lime	3,688	7,037	2,078	2,059	2,115	2,121	2,316	2,512	1,714	916	211	128	128	128	153
2.A.3	Glass	245	147	134	169	158	185	72	57	41	43	49	49	38	102	31
2.A.4.a	Ceramics	5	5	7	5	7	6	4	4	5	5	6	6	6	3	0
2.A.4.b	Other Uses of Soda Ash	8,410	8,410	7,521	6,066	7,445	5,453	2,978	2,075	2,082	2,038	1,596	1,596	1,596	1,703	221
Chemical																
2.B.1	Ammonia	8,926	7,989	8,640	8,787	7,999	9,497	7,879	5,583	5,924	6,062	7,329	5,906	5,969	5,412	6,358
2.B.2	Nitric Acid	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	90	89	377	519	524
2.B.5	Carbide	24	76	83	83	22	22	38	36	34	32	30	28	23	24	29
2.B.8.a	Methanol	344	404	340	343	341	366	293	293	368	297	215	221	198	284	282
2.B.8.b	Ethylene	1,154	919	990	1,101	1,075	1,126	1,133	1,230	1,128	1,051	1,311	1,081	1,228	1,377	1,297
2.B.8.c	Ethylene Dichloride and VCM	150	155	154	157	157	143	151	125	121	123	218	206	227	234	231
2.B.8.f	Carbon Black	248	257	238	251	288	322	322	322	337	342	337	231	635	181	203
Metal																
2.C.1	Iron and Steel	1,302	1,491	734	1,677	1,819	1,752	1,435	1,118	1,075	2,846	2,946	2,897	3,004	2,717	3,143
2.C.3	Aluminium	384	384	384	384	384	384	400	386	388	385	406	394	407	411	320
2.C.5	Lead	19	17	13	14	13	14	19	23	45	28	12	13	13	79	113
2.C.6	Zinc	124	170	95	97	70	106	75	51	33	28	28	21	16	8	10
Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use																
2.D.1	Lubricant Use	218	209	150	179	189	191	216	229	250	226	166	245	222	220	206
2.D.2	Paraffin Wax Use	613	594	585	855	696	722	859	915	1,060	2,315	1,439	2,062	3,108	1,596	2,284
Others																
2.H.1	Pulp and Paper	78	78	78	78	78	78	78	78	74	81	88	89	94	95	99
2.H.2	Food and Beverages	14	5	3	1	4	1	2	1	2	1	0	1	1	0	5
Total		42,534	46,987	40,518	40,263	42,047	41,196	37,504	34,788	35,366	36,396	36,146	35,768	40,199	39,135	39,702

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPP) 2016

Tabel 7.7. Emisi dari Sektor Pertanian Menurut Kategori Tahun 2000 s/d 2014

Kategori	Emisi dari Sektor Pertanian Menurut Kategori														
	2000 (Gg CO2 eq) 2	2001 (Gg CO2 eq) 3	2002 (Gg CO2 eq) 4	2003 (Gg CO2 eq) 5	2004 (Gg CO2 eq) 6	2005 (Gg CO2 eq) 7	2006 (Gg CO2 eq) 8	2007 (Gg CO2 eq) 9	2008 (Gg CO2 eq) 10	2009 (Gg CO2 eq) 11	2010 (Gg CO2 eq) 12	2011 (Gg CO2 eq) 13	2012 (Gg CO2 eq) 14	2013 (Gg CO2 eq) 15	2014 (Gg CO2 eq) 16
1 Enteric fermentation (3A1)	12,570	12,585	12,813	12,351	12,339	12,239	12,597	13,129	13,697	14,212	15,024	15,590	16,828	14,247	16,084
Manure Management (3A2a)	1,422	1,429	1,549	1,575	1,545	1,659	1,595	1,693	1,758	1,811	1,910	1,995	2,103	1,937	2,031
Biomass Burning Cropland (3C1b)	1,098	1,100	1,152	1,166	1,146	1,213	1,235	1,318	1,397	1,488	1,532	1,537	1,761	1,657	1,664
Biomass Burning Grassland (3C1c)	1,224	1,084	1,084	1,112	1,140	1,153	1,109	1,162	1,072	1,043	1,106	1,002	1,112	1,172	989
Direct N2O Manure Management (3A2b)	5,265	5,259	5,378	5,331	5,348	5,448	5,611	5,876	6,046	6,292	6,630	6,821	7,371	6,953	7,625
Indirect N2O Manure Management (3C6)	751	773	850	824	826	836	861	915	931	978	1,007	1,084	1,162	1,117	1,202
Liming (3C2)	872	933	976	1,001	1,057	1,091	1,146	1,200	1,275	1,441	1,515	1,631	1,771	1,858	1,920
Urea Fertilization (3C3)	3,900	3,562	3,547	3,809	4,056	4,210	4,124	4,440	4,581	4,865	4,709	4,813	4,853	4,619	4,836
Direct N2O Soils (3C4)	26,775	26,237	25,366	26,839	27,758	28,546	27,876	29,102	30,641	32,454	31,731	31,780	32,646	33,624	32,575
Indirect N2O Soils (3C5)	7,254	7,108	6,951	7,167	7,405	7,514	7,383	7,651	7,953	8,372	8,333	8,331	8,479	8,691	8,520
Rice Cultivation (3C7)	38,587	37,720	37,813	37,374	37,679	38,510	38,283	39,272	33,679	34,776	34,990	34,134	34,641	36,230	35,994
Total Net (in Gg CO2e)	99,717	97,789	97,479	98,547	100,299	102,419	101,819	105,757	103,030	107,733	108,487	108,718	112,727	112,104	113,441

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.8. Emisi Dari Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya Tahun 2000 s/d 2014

Code		Source Category	Emisi Dari Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya													
			2000 (Gg CO2 eq)	2001 (Gg CO2 eq)	2002 (Gg CO2 eq)	2003 (Gg CO2 eq)	2004 (Gg CO2 eq)	2005 (Gg CO2 eq)	2006 (Gg CO2 eq)	2007 (Gg CO2 eq)	2008 (Gg CO2 eq)	2009 (Gg CO2 eq)	2010 (Gg CO2 eq)	2011 (Gg CO2 eq)	2012 (Gg CO2 eq)	2013 (Gg CO2 eq)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3B1a	Forest remaining Forest	20.678	17.537	37.002	7.495	56.129	35.824	51.523	61.158	27.65	66.632	-17.655	77	-11.839	-192.135	-127.701
3B1b	Non-Forest to Forest	-1.26	-1.274	-1.32	-1.187	-2.647	-2.805	-2.603	-2.152	-2.225	-2.734	-5.183	-4.819	-4.095	-4.909	-3.675
3B2a	Cropland remaining Cropland	-41.587	-41.626	-41.541	-41.595	-41.45	-41.219	-40.778	-39.835	-38.855	-37.671	-37.464	-36.985	-36.758	-35.886	-33.729
3B2b	Non-Cropland to Cropland	29.609	22.931	36.709	29.186	93.413	71.68	90.222	140.197	131.466	167.58	38.641	45.658	95.266	197.494	141.481
3B3a	Grassland remaining Grassland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B3b	Non-Grassland to Grassland	36.335	32.319	40.338	36.348	34.802	30.338	34.659	40.477	36.592	47.774	18.164	21.088	25.342	-69.383	17.118
3B4a	Wetland remaining Wetland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B4b	Non-Wetland to Wetland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B5a	Settlement remaining Settlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B5b	Non-Settlement to settlement	1.863	2.199	1.775	1.614	1.482	971	1.348	1.24	931	1.39	1.37	1.677	1.753	1.975	10.257
3B6a	Otherland remaining Otherland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B6b	Non-Otherland to Otherland	29.585	29.626	31.679	27.448	59.692	64.031	58.587	59.892	60.804	74.028	72.564	78.02	89.692	163.653	134.546
	Other :															
	Dekomposisi Gambut	268.575	267.531	268.545	269.65	274.431	280.818	286.289	292.825	297.349	303.567	312.968	322.595	328.567	341.443	341.735
	Kebakaran Gambut	161.571	50.885	301.753	132.075	232.018	258.887	510.71	62.747	81.744	299.92	51.383	189.026	207.05	205.076	499.389
	Total	505.368	380.129	674.941	461.034	707.87	698.525	989.956	616.55	595.456	920.485	434.788	616.335	694.978	607.328	979.422
	Rata-rata	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878	658.878

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.9. Emisi dari Sektor Limbah Tahun 2000 s/d 2014

Kode	Kategori	Emisi dari Sektor Limbah														
		2000 (Gg CO2 eq.)	2001 (Gg CO2 eq.)	2002 (Gg CO2 eq.)	2003 (Gg CO2 eq.)	2004 (Gg CO2 eq.)	2005 (Gg CO2 eq.)	2006 (Gg CO2 eq.)	2007 (Gg CO2 eq.)	2008 (Gg CO2 eq.)	2009 (Gg CO2 eq.)	2010 (Gg CO2 eq.)	2011 (Gg CO2 eq.)	2012 (Gg CO2 eq.)	2013 (Gg CO2 eq.)	2014 (Gg CO2 eq.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 A 2	TPA (un-managed)	23,769	24,614	25,365	26,046	26,674	27,262	27,819	28,350	28,440	29,009	29,543	30,677	31,619	32,410	33,123
4 B	Komposting	98	110	123	138	155	174	194	218	244	273	306	437	623	889	1,269
4 C	Open Burning	3,880	3,923	3,967	4,011	4,055	4,100	4,145	4,108	4,255	4,302	4,696	4,748	4,801	4,153	3,060
4 D 1	Limbah Cair Domestik	11,725	11,896	12,310	12,529	12,682	12,894	13,012	13,381	13,569	13,624	13,854	14,040	14,189	14,358	14,592
4 D 2	Limbah Cair Industri:															
	Alcohol refining	16	16	16	16	16	16	16	7	8	6	5	28	28	24	24
	Beer & Malt	5	5	5	5	6	6	6	7	9	8	7	8	8	10	10
	Coffee	46	48	50	51	53	55	57	58	60	63	78	83	90	94	95
	Dairy Products	8	9	9	10	10	10	11	12	13	14	15	17	17	18	19
	Fish Processing	91	95	98	101	105	109	109	109	109	348	219	219	219	542	546
	Meat & Poultry	563	614	711	745	789	753	843	845	860	875	911	945	972	645	553
	Organic Chemicals	813	813	813	813	813	813	937	1,062	892	2,316	1,250	1,456	1,456	2,694	2,694
	Petroleum Refineries	133	133	132	132	135	132	117	116	113	115	109	112	105	108	111
	Plastics & Resins	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Pulp & Paper (combined)	4,269	4,472	4,684	4,907	5,075	5,385	5,855	5,892	5,576	6,234	6,916	7,712	8,268	8,400	8,533
	Soap & Detergents	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	8	11	11	11
	Starch Production	5,068	5,372	5,328	5,835	6,119	6,086	6,296	6,296	6,853	6,942	7,534	7,574	7,616	7,540	7,389
	Sugar Refining	3	5	8	10	12	22	34	44	38	57	71	66	75	92	83
	Vegetable Oils	671	660	659	703	739	773	785	815	861	900	883	906	949	997	1,028
	Vegetable, Fruits & Juices	2,438	2,610	2,880	3,308	3,607	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726	4,878	4,878	4,878	4,878
	Wine & Vinegar	3	3	3	3	3	5	6	7	6	5	3	3	3	3	3
	CPO	4,410	5,290	6,062	6,578	6,823	7,473	10,931	11,129	11,050	12,174	13,834	14,551	16,390	17,503	18,445
	Sugar (Cane)	31	32	30	28	36	39	40	42	40	45	38	39	45	44	45
	Crumb Rubber	577	585	644	742	815	947	989	989	876	982	982	1,074	1,082	1,163	1,132
	Total Limbah Cair Industri	19,160	20,776	22,147	24,003	25,169	26,365	30,774	31,171	31,106	34,827	36,596	39,687	42,219	44,773	45,608
4 E	Untreated waste	1,475	1,500	1,517	1,524	1,524	1,516	1,499	1,475	1,431	1,394	1,346	1,331	1,208	961	753
	Total	60,234	60,107	62,820	65,430	68,252	70,260	72,311	71,445	78,704	79,045	83,430	86,341	90,920	94,660	97,545

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.10. Target dan Realisasi Jumlah Hotspot NOAA-18/19 pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

No	Provinsi	Target dan Realisasi Jumlah Hotspot NOAA-18/19 pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	
		Toleransi	Realisasi
1	2	3	4
1	Aceh	586	148
2	Sumatera Utara	847	320
3	Sumatera Barat	661	84
4	Riau dan Kepulauan Riau	4,567	356
5	Jambi	2,364	54
6	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	6,823	263
7	Bengkulu	295	34
8	Lampung	864	26
9	Kalimantan Barat	6,288	1,560
10	Kalimantan Tengah	3,973	259
11	Kalimantan Selatan	975	56
12	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1,813	390
13	Sulawesi Utara dan Gorontalo	61	9
14	Sulawesi Tengah	209	32
15	Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan	345	95
16	Sulawesi Tenggara	358	29
JUMLAH		31,030	3,715

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.11. Jumlah Hotspot Terbanyak di Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di 10 Provinsi pada Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Hotspot Terbanyak di Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di 10 Provinsi
1	2	3
1	Kalimantan Barat	1,560
2	Riau	345
3	Sumatera Utara	320
4	Kalimantan Timur	301
5	Kalimantan Tengah	259
6	Sumatera Selatan	170
7	Aceh	148
8	Bangka Belitung	93
9	Sulawesi Selatan	92
10	Kalimantan Utara	89
Jumlah		3,377

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.12. Jumlah Hotspot Terbanyak Semua Fungsi Kawasan pada Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Hotspot Terbanyak Semua Fungsi Kawasan
1	2	3
1	Kalimantan Barat	1,576
2	Riau	383
3	Sumatera Utara	339
4	Kalimantan Timur	329
5	Kalimantan Tengah	263
6	Sumatera Selatan	171
7	Aceh	161
8	Bangka Belitung	95
9	Sulawesi Selatan	93
10	Kalimantan Utara	91
Jumlah		3,481

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.13. Hotspot di Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan di 3 Pulau Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Hotspot										Prosentase Hutan dan Non Hutan	
		Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan											
		Kawasan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Perkebunan	Areal Penggunaan Lain	Total	% Hutan	% Non Hutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Aceh	13	33	24	0	4	15	72	161	45.96	54.04		
2.	Sumatera Utara	19	33	97	1	66	7	116	339	63.72	36.28		
3.	Sumatera Barat	7	17	6	10	11	3	37	91	56.04	43.96		
4.	Riau	38	16	127	33	84	41	44	383	77.81	22.19		
5.	Kepulauan Riau	0	4	0	2	1	2	2	11	63.64	36.36		
6.	Jambi	5	0	23	0	8	1	22	59	61.02	38.98		
7.	Sumatera Selatan	1	0	7	0	2	3	158	171	5.85	94.15		
8.	Bangka Belitung	2	4	31	0	0	0	58	95	38.95	61.05		
9.	Bengkulu	1	5	3	0	7	0	19	35	45.71	54.29		
10.	Lampung	9	0	0	0	0	4	22	35	25.71	74.29		
11.	Kalimantan Barat	16	79	299	14	174	33	961	1,576	36.93	63.07		
12.	Kalimantan Tengah	4	7	81	67	40	9	55	263	75.67	24.33		
13.	Kalimantan Selatan	0	1	25	1	1	5	23	56	50.00	50.00		
14.	Kalimantan Timur	28	7	91	11	11	15	166	329	44.98	55.02		
15.	Kalimantan Utara	2	1	26	5	2	0	55	91	39.56	60.44		
16.	Gorontalo	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100.00		
17.	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	0	8	9	11.11	88.89		
18.	Sulawesi Tengah	1	2	4	1	6	1	18	33	42.42	57.58		
19.	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	2	3	33.33	66.67		
20.	Sulawesi Selatan	1	57	3	0	5	0	27	93	70.97	29.03		
21.	Sulawesi Tenggara	6	3	7	3	5	0	11	35	68.57	31.43		
Jumlah		154	269	854	148	428	140	1,876	3,869	47.89	52.11		

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.14. Sebaran Hotspot di 6 Provinsi Prioritas Tahun 2016

No	Provinsi	Sebaran Hotspot di 6 Provinsi Prioritas												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Riau	4	22	54	33	21	15	37	137	16	30	1	12	382
2.	Jambi	-	3	1	-	8	6	10	13	6	3	1	8	59
3.	Sumatera Selatan	1	3	-	2	14	17	17	52	47	4	8	6	171
4.	Kalimantan Barat	2	2	6	1	7	4	25	780	666	69	3	11	1,576
5.	Kalimantan Tengah	6	-	1	-	-	4	9	37	82	106	11	7	263
6.	Kalimantan Selatan	13	-	-	-	-	1	1	15	12	12	2	-	56
Jumlah Total		175	166	165	112	107	155	247	1,267	1,029	346	67	79	3,915

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

Tabel 7.15. Jumlah Sebaran Hotspot NOAA18/19 Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Sebaran Hotspot										
		Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan									Prosentase Hutan dan Non Hutan	
		Kawasan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lain	Perkebunan	Areal Penggunaan Lain	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aceh	13	33	24	0	4	0	15	72	161	45.96	54.04
2	Sumatera Utara	19	33	97	1	66	0	7	116	339	63.72	36.28
3	Sumatera Barat	7	17	6	10	11	0	3	37	91	56.04	43.96
4	Riau	38	16	127	33	84	0	41	44	383	77.81	22.19
5	Kepulauan Riau	0	4	0	2	1	0	2	2	11	63.64	36.36
6	Jambi	5	0	23	0	8	0	1	22	59	61.02	38.98
7	Sumatera Selatan	1	0	7	0	2	0	3	158	171	5.85	94.15
8	Bangka Belitung	2	4	31	0	0	0	0	58	95	38.95	61.05
9	Bengkulu	1	5	3	0	7	0	0	19	35	45.71	54.29
10	Lampung	9	0	0	0	0	0	4	22	35	25.71	74.29
11	Banten	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.00	100.00
12	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0.00	100.00
13	Jawa Barat	0	1	0	0	0	0	0	6	7	14.29	85.71
14	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.00	100.00
16	Jawa Timur	8	1	0	0	0	0	0	29	38	23.68	76.32
17	Ball	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	16	79	299	14	174	0	33	961	1.576	36.93	63.07
21	Kalimantan Tengah	4	7	81	67	40	0	9	55	263	75.67	24.33
22	Kalimantan Selatan	0	1	25	1	1	0	5	23	56	50.00	50.00
23	Kalimantan Timur	28	7	91	11	11	0	15	166	329	44.98	55.02

		Kawasan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lain	Perkebunan	Areal Penggunaan Lain	Total	% Hutan	% Non Hutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Kalimantan Utara	2	1	26	5	2	0	0	55	91	39.56	60.44
25	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	100.00
26	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	0	0	8	9	11.11	88.89
27	Sulawesi Tengah	1	2	4	1	6	0	1	18	33	42.42	57.58
28	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	2	3	33.33	66.67
29	Sulawesi Selatan	1	57	3	0	5	0	0	27	93	70.97	29.03
30	Sulawesi Tenggara	6	3	7	3	5	0	0	11	35	68.57	31.43
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pulau Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		162	271	854	148	428	0	140	1,924	3,927	47.44	52.56
34	Sem. Malaysia	0	0	0	0	0	0	0	845	845	0.00	100.00
35	Sabah & Serawak	0	0	0	0	0	0	0	435	435	0.00	100.00
36	Brunei	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.00	100.00
37	Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Philipina	0	0	0	0	0	0	0	805	805	0.00	100.00
39	Thailand	0	0	0	0	0	0	0	7,676	7,676	0.00	100.00
40	Komboja	0	0	0	0	0	0	0	5,852	5,852	0.00	100.00
41	Laos	0	0	0	0	0	0	0	3,891	3,891	0.00	100.00
42	Myanmar	0	0	0	0	0	0	0	11,125	11,125	0.00	100.00
43	Vietnam	0	0	0	0	0	0	0	3,617	3,617	0.00	100.00
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	34,256	34,256	0.00	100.00
Total		162	271	854	148	428	0	140	36,18	38,183	4.88	95.12

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPP) 2016

Tabel 7.16. Luas Kebakaran Hutan Tahun 2010 s/d 2016

No	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan						
		2010 (Ha)	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	5.00	-	13.00	-	155.66	-	-
2	Bali	10.10	-	250.00	60.50	30.00	8.50	-
3	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
4	Banten	-	-	-	-	2.00	-	-
5	Bengkulu	-	0.50	-	-	5.25	181.00	-
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	-	-	-	-	-	2,082.74	-
8	Jambi	2.50	89.00	11.25	199.10	3,470.61	19,528.00	36.80
9	Jawa Barat	-	1,278.55	1,945.50	252.80	552.69	3,292.40	-
10	Jawa Tengah	-	712.24	454.00	31.20	159.76	6,995.34	-
11	Jawa Timur	204.90	48.35	2,960.05	1,352.14	4,975.32	975.95	-
12	Kalimantan Barat	-	-	577.40	22.70	3,556.10	3,191.98	1,859.05
13	Kalimantan Selatan	-	-	60.50	417.50	341.00	1,714.89	160.00
14	Kalimantan Tengah	-	22.00	55.15	3.10	4,022.85	122,882.90	912.89
15	Kalimantan Timur	-	148.80	51.50	-	325.19	19,179.86	1,197.20
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	3.00
17	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
18	Lampung	106.00	31.00	-	-	22.80	19,695.86	-
19	Maluku	-	-	-	-	179.83	3,394.48	-
20	Maluku Utara	10.00	-	-	-	6.50	60.00	-
21	Nusa Tenggara Barat	2.00	-	-	12.00	3,977.55	1,462.04	-
22	Nusa Tenggara Timur	95.00	-	553.20	649.90	980.87	372.43	64.37
23	Papua	39.00	-	-	-	300.00	1,792.44	-
24	Papua Barat	1.12	-	-	-	-	-	-
25	Riau	26.00	74.50	1,060.00	1,077.50	6,301.10	4,040.50	1,928.26
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	28.00	31.75	45.30	40.50	483.10	720.40	18.91
28	Sulawesi Tengah	-	-	30.83	1.00	70.73	-	-
29	Sulawesi Tenggara	16.00	85.90	346.10	13.00	2,410.86	57.82	184.86
30	Sulawesi Utara	-	-	1.80	0.25	236.06	18,268.93	-
31	Sumatera Barat	56.00	-	3.50	-	120.50	-	-
32	Sumatera Selatan	-	84.50	-	484.15	8,504.86	30,984.98	266.49
33	Sumatera Utara	80.00	5.00	1,181.00	295.40	3,219.90	177.00	547.50
34	Yogyakarta	2,818.50	-	6.45	6.00	0.27	-	-

Sumber : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 2016

8

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan



Dalam upaya terwujudnya Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, ditopang dengan 3 Sasaran Program, yaitu : (1) Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, (2) Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan, (3) Meningkatnya perilaku peduli lingkungan hidup dan kehutanan.

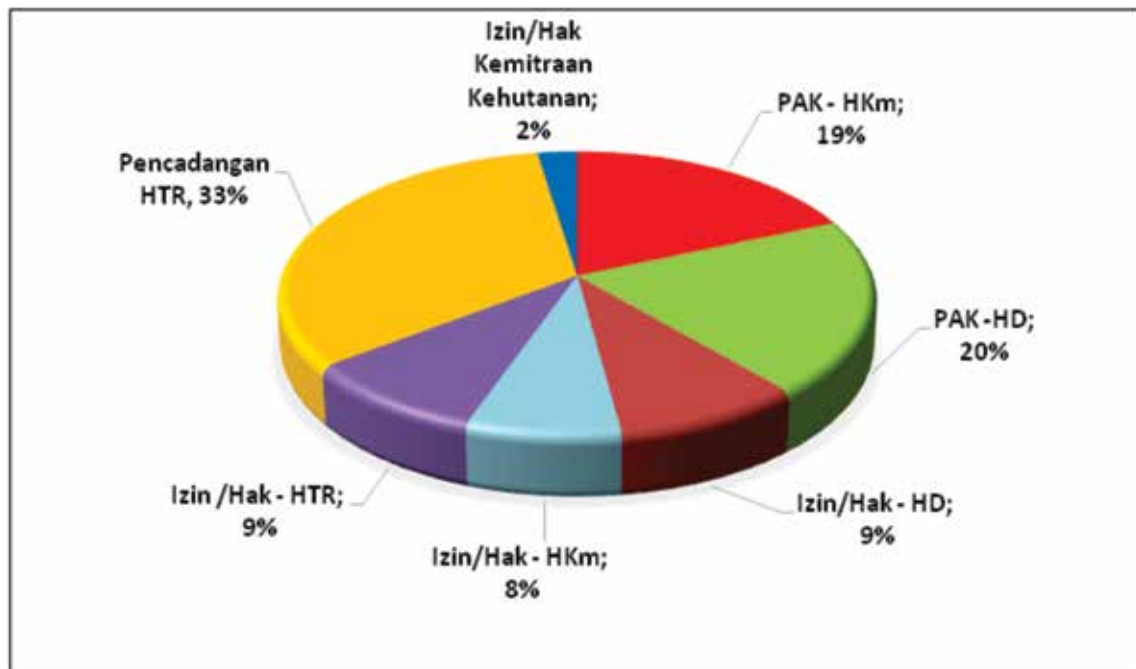
Dengan adanya sasaran program tersebut diharapkan akan membuahkan hasil nyata yang terukur. Guna mengukur sasaran program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, telah ditetapkan 3 Indikator Kinerja Program (IK-P), yaitu: (1) Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun, (2) Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun, (3) Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun.

Untuk mencapai sasaran program tersebut ditempuh melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon 2, yaitu:

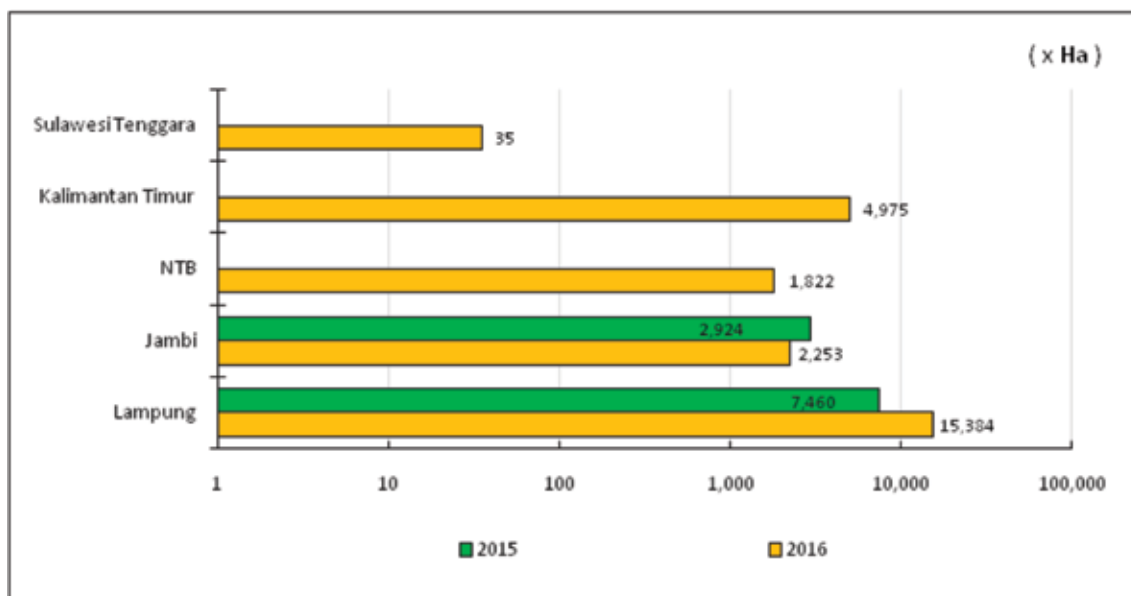
8.1. Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Penetapan Areal Kerja (PAK) Perhutanan Sosial dituangkan dalam keputusan Menteri LHK, yaitu PAK Hutan Kemasyarakatan, PAK Hutan Desa, Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.



Grafik 8.1. Capaian Perhutanan Sosial s/d Tahun 2016



Grafik 8.2. Luas Areal Kemitraan Tahun 2015 - 2016

8.2. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

8.3. Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan

Sasaran dengan indikator kinerja kegiatan jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam dan lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai, danau/ mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah komunitas masyarakat penyelamat sumber daya alam dan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, untuk mencapai meningkatnya role model komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan sumber daya alam dan ekosistem.

Tabel 8.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK HKm)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Fungsi Kawasan		Luas (Ha)	Jumlah Kelengkapan				Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Nomor SK	Tanggal
			Hutan Lindung (HL) (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Ha)		Kelompok Tani Hutan (K TH)	Koperasi	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACEH	PIDIE JAYA	1.900,00	-	1.900,00	1	-	-	528	SK.110/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-05	
2	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	2.284,00	-	2.284,00	2	1	1	785	SK.130/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-15	
		TAPANULI UTARA	533,00	-	533,00	-	-	1	433	SK.698/MenLHK/Setjen/PSL.0/9/2016	2016-09-08	
		LABUHANBATU	365,00	-	365,00	-	-	1	99	SK.716/MenLHK/Setjen/PSL.0/9/2016	2016-09-15	
		LANGKAT	-	-	410,00	-	-	-	-	SK.490/MenLHK/Setjen/PSL.0/6/2016	2016-06-29	
3	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	848,00	-	848,00	2	-	-	252	SK. 324 / Menlkh- Setjen/ PSL.0/4/2016	2016-04-20	
		PASAMAN BARAT	-	-	3.798,00	-	-	-	-	SK.516/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		SAWAHLUNTO	-	298,00	298,00	-	c	-	100	SK.638/MenLHK/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-12	
4	JAMBI	SAROLANGUN	-	1.095,00	1.095,00	-	1	-	226	SK.823/MenLHK/Setjen/PSL.0/11/2016	2016-11-02	
5	SUMATERA SELATAN	LAHAT	-	-	305,00	-	-	-	-	SK.507/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		LAHAT	-	-	786,00	-	-	-	-	SK.511/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		PAGAR ALAM	-	-	1.387,00	-	-	-	-	SK.509/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		PAGAR ALAM	-	-	2.490,00	-	-	-	-	SK.510/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
6	LAMPUNG	PRINGSEWU	976,00	-	976,00	7	-	-	614	SK.573/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-27	
7	KEP BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	-	465,00	465,00	3	-	-	346	SK.584/MenLHK/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-01	
		BELITUNG TIMUR	682,00	-	682,00	-	-	1	182	SK.85/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-05	
8	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	830,00	-	830,00	-	-	-	-	SK.565 / Menlkh- Setjen/ PSL.0/7/2016	2016-07-20	
		LOMBOK BARAT	162,00	-	162,00	-	-	1	358	SK.583/MenLHK/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-01	
		BIMA	1.220,00	35,00	1.255,00	-	-	-	-	SK.513 / Menlkh- Setjen/ PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		SUMBAWA BARAT	245,00	2.160,00	2.405,00	7	-	4	1.119	SK.88/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-05	
		SUMBAWA BARAT	251,00	940,00	1.191,00	5	-	-	398	SK.343 / Menlkh- Setjen/ PSL.0/5/2016	2016-05-02	
		LOMBOK UTARA	776,00	-	776,00	1	-	-	629	SK.586/MenLHK/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-01	
9	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	2.224,00	932,00	3.156,00	-	-	7	754	SK.334 / MenLHK-Setjen/PSL.0/5/2016	2016-04-29	
10	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	-	-	1.300,00	-	-	-	-	SK.525/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-12	
11	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	8.725,00	135,00	8.860,00	76	-	-	2.693	SK.134/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-15	
		TAPIN	855,00	-	855,00	-	-	-	-	SK.522/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-12	
		TABALONG	500,00	-	500,00	-	-	-	-	SK.532/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-13	
		TANAHBUMBU	-	-	600,00	-	-	-	-	SK.514/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		BALANGAN	-	-	765,00	-	-	-	-	SK.524/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-07-12	
		BALANGAN	920,00	-	920,00	1	-	-	132	SK.697/MenLHK/Setjen/PSL.0/9/2016	2016-09-08	
12	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	-	590,00	590,00	-	-	-	-	SK.426/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-06-07	
13	SULAWESI UTARA	MINHASA	814,00	-	814,00	-	-	-	-	SK.557 / MenLHK- Setjen/ PSL.0/7/2016	2016-07-19	
14	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	-	1.790,00	1.790,00	-	-	-	-	SK.517/ Menlkh- Setjen/ PSL.0/7/2016	2016-07-11	
		POSO	-	605,00	605,00	2	-	-	101	SK.333 / Menlkh- Setjen/ PSL.0/4/2016	2016-04-29	
		DONGGALA	270,00	3.000,00	3.270,00	-	-	-	-	SK.515/ Menlkh- Setjen/ PSL.0/7/2016	2016-07-11	
15	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	409,00	183,00	592,00	4	-	-	509	SK.715/MenLHK/Setjen/PSL.0/9/2016	2016-09-15	
		ENREKANG	3.200,00	-	3.200,00	26	-	-	605	SK.642/MenLHK/Setjen/PLA.28/2016	2016-08-16	
		LUWU TIMUR	395,00	280,00	675,00	4	-	-	274	SK.6/MenLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-01-11	
16	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	900,00	400,00	1.300,00	-	-	-	-	SK.526/MenLHK/Setjen/PSL.0/7/2016	2016-08-30	
Total			30.284,00	12.908,00	55.033,00	-	-	-	11.137			

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.2. Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm) Tahun 2016

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kec.	Desa	Nomor Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (PAK)	Surat Kerja Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)		Fungsi Kawasan		
						Nomor SK	Tanggal SK	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Tetap (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Ha)	Luas (Ha)
1	ACEH	ACEH BARAT DAYA	TANGAN 2	GAMPONG ADAN, GAMPONG PANTE GEULUMPANG	SK.78/MenLHK- II/2015	522.51/BP2T/135/I IUPHKm/II/2016	2016-02-15	200.00	-	200.00
2	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	ASOKA	KEL. JATIWANGI	SK.120/Menhut- II/2014	503/004/03/IUPHKm/BKPMPT/2016	2016-10-04	181.00	-	181.00
			ASAKOTA	KEL. JATIBARU	SK.120/Menhut- II/2014	503/005/03/IUPHKm/BKPMPT/2016	2016-10-04	55.00	-	55.00
			MPUNDA	DESA MATAKANDA	SK.120/Menhut- II/2014	503/003/03/IUPHKm/BKPMPT/2016	2016-10-04	145.00	-	145.00
3	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	KURUN	TUMBANG MIWAN		SK. 6601/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL. 0/12/2016	2016-12-15		1,885.00	1,885.00
Total								580.00	1,885.00	2,465.00

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.3. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK HD)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Fungsi Kawasan (Ha)				Surat Keputusan MenLHK		Tanggal
					HL	HP/HPT	HPK	Luas	Nomor SK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ACEH	ACEH TIMUR	Pantee Bidari	Gampoeng BelangSeunong	-	370	-	370	SK.852/MENLHK/Sejten/PSL.0/11/2016	11/2/2016	
2	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	247	-	-	247	SK.132/Menlhk/Sejten/PSL.0/2/2016	2/15/2016	
			Kamang Baru	Muaro Takung	1,182	-	-	1,182	SK.131/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/15/2016	
			Sumpur Kudus	Manganti	1,243	-	-	1,243	SK.99/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
			Kamang Baru	Sungai Batuang	-	595	-	595	SK.100/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Aie Angek	4,025	-	-	4,025	SK.101/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
	SOLOK SELATAN	Sangir Batanghari	Ranah Pantai Cermin	1,952	-	-	-	1,952	SK.97/Menlhk/Sejten/PSL.0/2/2016	2/5/2016	
			Padang Limau Sunday	2,244	-	-	-	2,244	SK.98/Menlhk/Sejten/PSL.0/2/2016	2/5/2016	
3	JAMBI	SAROLANGUN	Batang Asai	Bukit Berantai	-	3,281	-	3,281	SK.106/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Simpang Narso	-	2,606	-	2,606	SK.107/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Batu Empag	253	5,337	-	5,590	SK.108/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Sungai Keradak	1,386	1,855	-	3,241	SK.109/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Batin Pengambang	3,797	-	-	3,797	SK.103/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Tambak Ratu	1,640	-	-	1,640	SK.104/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Muaro Air Duo	2,120	-	-	2,120	SK.105/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016	
				Petaling	-	712	-	-	712	SK.506/Menlhk/Sejten/PSL.0/7/2016	9/14/2016
4	KEP BANGKA BELITUNG	BELITUNG	Sungai Selan								
5	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	Matan Hilir Selatan	Pematang Gadung	-	4,870	9,545	14,415	SK.133/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/15/2016	
		KUBU RAYA		Batu Ampar	31,550	1,590	-	33,140	SK.562/Menlhk-Sejten/2016	7/20/2016	
				Telok Nibung	2,595	-	305	2,900	SK.564/Menlhk-Sejten/2016	7/20/2016	
6	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	Lobu	Tanjung Harapan	14,315	395	2,735	17,445	SK.563/Menlhk-Sejten/2016	7/20/2016	
				Balean	-	1,536	-	-	1,536	SK.86/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016	2/5/2016
				DONGGALA	Banawa Tengah	Lampo	215	-	-	215	SK.87/Menlhk/Sejten/PSKL.0/2/2016
Total					68,764	23,147	12,585	104,496			

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.4. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Fungsi Kawasan				Surat Keputusan HPHD	
					HL (Ha)	HP/HPT (Ha)	HPK (Ha)	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUMATERA BARAT	SOLOK	HILIRAN GUMANTI	SUNGAI ABU	6,657.00	-	-	6,657.00	522.4-936-2016	7/12/2016
				SARIAK ALAHAN TIGO	4,138.00	-	-	4,138.00	522.4-935-2016	7/12/2016
			PAYUNG SEKAKI	SIRUKAM	1,790.00	-	-	1,790.00	522.4-934-2016	7/12/2016
				KATIAGAN	780.00	-	-	780.00	522.4-501-2016	5/4/2016
2	RIAU	PASAMAN BARAT	KINALI SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	2,664.00	-	-	2,664.00	522.4-492-2016	5/3/2016
				Sungai Tohor	-	2,940.00	-	2,940.00	SK.6722/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
				Sungai Tohor Barat	-	1,388.00	94.00	1,482.00	SK.6720/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
				Tanjung Sari	-	689.00	71.00	760.00	SK.6717/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
3	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	MENDAHARA ULU	Sendanu Darul Ihsan	-	650.00	-	650.00	SK.6718/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
				Nipah Sedanu	-	838.00	-	838.00	SK.6716/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
				Kepau Baru	-	844.00	-	844.00	SK.6721/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
				Lukun	-	2,446.00	-	2,446.00	SK.6719/MENLHK- PSKL/PSL.0/12/2016	12/23/2016
4	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT TENGAH	SINAR WAJO	5,088.00	-	-	5,088.00	16/KEP.BPMD- PPT.4/III/2016	2/18/2016
				SUNGAI BERAS	2,200.00	-	-	2,200.00	17/KEP.BPMD- PPT.4/III/2016	2/18/2016
				KOTA KANDIS DENDANG	4,405.00	-	-	4,405.00	18/KEP.BPMD- PPT.4/III/2016	2/18/2016
				MUARA TENANG	1,300.00	-	-	1,300.00	211/KPTS/DISHUT/201 6	3/24/2016
4	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT ULU	SEGAMIT	3,245.00	-	-	3,245.00	213/KPTS/DISHUT/201 6	3/24/2016

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Fungsi Kawasan				Surat Keputusan HPHD	
					HL (Ha)	HP/HPT (Ha)	HPK (Ha)	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TANJUNG AGUNG	1,400.00	-	-	1,400.00	212/KPTS/DISHUT/2016	3/24/2016
				CAHAYA ALAM	900.00	-	-	900.00	214/KPTS/DISHUT/2016	3/24/2016
5	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	Mandau Talawang	Lawang Tamang	-	419.00	7.00	426.00	SK. 6606/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Mandau Talawang	Tumbang Manyarung	-	2,161.00	-	2,161.00	SK. 6609/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Dadahup	Tambak Bajai	9,416.00	-	-	9,416.00	188.44/293/2016	5/9/2016
		PULANG PISAU	Banama Tingang	Tambak	590.00	-	-	590.00	SK. 6602/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Banama Tingang	Bawan	-	845.00	-	845.00	SK. 6604/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Panaman Tingang	Tangkehan	-	162.00	-	162.00	SK. 6607/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Banama Tingang	Tumbang Tarusan	-	419.00	-	419.00	SK. 6609/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
		GUNUNG MAS	Miri Manasa	Harowu	1,720.00	30.00	-	1,750.00	SK. 6603/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Rungan Barat	Rabambang	-	440.00	-	440.00	SK. 6605/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
			Miri Manasa	Rangan Hiran	865.00	-	-	865.00	SK. 6608/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016	12/15/2016
6	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	PARAMASAN	PARAMASAN ATAS	1,220.00	-	-	1,220.00	188.44/0259/KUMI/2016	4/29/2016
		HULU SUNGAI SELATAN	LOKSADO	ULANG	1,405.00	-	-	1,405.00	188.44/0151/KUMI/2016	3/10/2016

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Fungsi Kawasan				Surat Keputusan HPHD	
					HL (Ha)	HP/HPT (Ha)	HPK (Ha)	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TABALONG	JARO	LANO	1,005.00	-	-	1,005.00	188.44/0258/KUM/2016	4/29/2016
7	KALIMANTAN UTARA	MALINAU	MALINAU SELATAN	SETULANG	1,515.00	2,900.00	-	4,415.00	-KOSONG-	2016-10-06
8	PAPUA BARAT	SORONG	SAIFI	KAMPUNG MANGGRAHOLA, DISTRIK SAIFI	1,695.00	-	-	1,695.00		12/31/2016
Total					1,850.00	-	-	1,850.00		12/31/2016
					52,302.83	20,716.00	172.00	73,190.83		

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.5. Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	SK Pencadangan HTR		Fungsi Kawasan		
			Nomor SK	Tanggal SK	HPT (Ha)	HP (Ha)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SK 89/mENlhk/Setjen/PSKL.0/2/2016	2016-02-05	-	706.00	706.00
		TEBO	SK 662/Menlhk/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-26	5,645.00	-	5,645.00
2	KEP BANGKA BELITUNG	BANGKA	SK 679/Menlhk/Setjen/PSL.0/8/2016	2016-08-31	6,538.00	-	6,538.00
3	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	SK 824/MENLHK/SETJEN/PSL.0/11/2016	2016-11-02	1,376.00	-	1,376.00
4	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	SK 659/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016	2016-08-26	3,509.00	-	3,509.00
		KAPUAS	SK 483/mENlhk/Setjen/PSK.0/6/2016	2016-06-22	-	720.00	720.00
		LAMANDAU	SK 482/mENlhk/Setjen/PSK.0/6/2016	2016-06-22	-	4,224.00	4,224.00
5	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SK 486/mENlhk/Setjen/PSK.0/6/2016	2016-06-24	-	135.00	135.00
Total					17,068.00	5,785.00	22,853.00

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.6. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Rakyat (IUPHH-HTR)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	SK IUPHHK HTR		Fungsi Kawasan (Ha)		
			Nomor SK	Tanggal SK	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAMBI	BATANG HARI	95/KEP.KA.BPMD-PPT.4/IV/2016	2016-04-14	-	304.00	304.00
			96/KEP.KA.BPMD-PPT.4/IV/2016	2016-04-14	-	363.00	363.00
			97/KEP.KA.BPMD-PPT.4/IV/2016	2016-04-14	-	304.00	304.00
			98/KEP.KA.BPMD-PPT.4/IV/2016	2016-04-14	-	301.00	301.00
2	KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	607/EKBANG/2016	2016-08-15	-	382.00	382.00
		SANGGAU	238/EKBANG/2016	2016-04-21	-	674.00	674.00
3	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	SK. 6627/MENLHK-	2016-12-16	-	640.00	640.00
			SK. 6628/MENLHK-	2016-12-16	-	566.00	566.00
			SK. 6629/MENLHK-	2016-12-16	-	1,019.00	1,019.00
			SK. 6630/MENLHK-	2016-12-16	-	1,365.00	1,365.00
			SK. 6631/MENLHK-	2016-12-16	-	1,597.00	1,597.00
			SK. 6632/MENLHK-	2016-12-16	-	1,712.00	1,712.00
			SK. 6633/MENLHK-	2016-12-16	-	885.00	885.00
			SK. 6634/MENLHK-	2016-12-16	-	3,509.00	3,509.00
		PULANG PISAU	PK. 6573/MPNLH/-	2016-12-09	-	274.00	274.00
			PK. 6574/MENLHK-	2016-12-09	-	236.00	236.00
Total					-	14,131.00	14,131.00

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.7. Kemitraan Kehutanan Tahun 2016

No	Prov/insi	Kabupaten / Kecamatan / Desa	Jenis Pemegang	Jenis Kemitraan	Para Pihak			Produk Kemitraan
					Pemegang	Kelompok	Tanggal MOU	Luas (Ha)
1	Lampung	Way Kanan						
		Tanggamus/ Jati Agung/ Karang Rejo	KPHP	Denplot	KPHP Gedung Wani	Lekis Jaya	14 April 2016	499.90
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Bogor Rejo	Tahura	Tegakan HHBK	Tahura Wan	Koperasi PMPB	14 April 2016	801.43
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Tegakan HHBK	Abdul Rachman	Sungkai Terang	14 April 2016	321.53
		Pesawaran/ Geong Tataan/ Sungai Langka	Tahura	Tegakan HHBK	Abdul Rachman	Buana Jaya	27 April 2016	200.00
		Desa Wiyono/ Gedung Tataan/ Pesawaran	Tahura	Tegakan HHBK	Tahura Wan	Mulla Bathin	30 Agustus 2016	714.85
		Bandar Lampung/ Teluk Betung/ Desa Batuputu	Tahura	Tegakan HHBK	Abdul Rachman	Barokah Jaya	29 Januari 2016	250.00
		Pesawaran/ Teluk Pandan/ Talang Mulla	Tahura	Tegakan HHBK	Abdul Rachman	Raden Kambang	18 Agustus 2016	732.00
		Bandar Lampung/ Teluk Betung/ Desa Batuputu	Tahura	Tegakan HHBK, Jasing	Tahura Wan	Cipta Usaha	31 Agustus 2016	150.00
		Lampung/ Kemiling / Sumber Agung			Abdul Rachman	Muara Makmur	01 Agustus 2016	102.00
		Bandar Lampung/ Teluk Betung/ Desa Batuputu	Tahura	Tegakan HHBK, Jasing	Abdul Rachman	Sejahtera	09 Mei 2016	450.00
		Lampung/ Komling/ Pinang Jaya	Tahura	Pemantauan HHBK	Tahura Wan	Karya Makmur	30 Agustus 2016	850.00
		Pesawaran/ Teluk Pandan/ Harapan Jaya	Tahura	Pemantauan HHBK dan Jasa Wisata	Abdul Rachman	Agro Forest Park	08 Juli 1905	42.00
		Pesawaran/ Padang Cermin/ Padang Cermin	Tahura	Pemantauan HHBK dan Jasa Wisata	Tahura Wan	Wana Karya	06 Oktober 2016	450.00
		Pesawaran/ Teluk Pandan/ Hurun	Tahura	Pemantauan HHBK dan Jasa Wisata	Abdul Rachman	Enggal Makmur	06 Oktober 2016	398.78
		Pesawaran/ Teluk Pandan/ Cilimus	Tahura	Pemantauan HHBK dan Jasa Wisata	Tahura Wan	Wana Makmur	06 Oktober 2016	275.59
					Abdul Rachman	Karya Makmur	06 Oktober 2016	350.00
					Abdul Rachman	Parendean	06 Oktober 2016	50.00
					Abdul Rachman	Talang Mulla	06 Oktober 2016	1,118.50
					Abdul Rachman	GKKPH Sumber Agung	06 Oktober 2016	492.72
					Abdul Rachman			
					Abdul Rachman	Maju Lestari	06 Oktober 2016	33.00
					Abdul Rachman	Bina Lestari	06 Oktober 2016	453.00
					Abdul Rachman	Wana Harja	06 Oktober 2016	900.00
					Abdul Rachman	Sinar Lestari	06 Oktober 2016	700.00
					Abdul Rachman	Kerakyatan Lestari	06 Oktober 2016	625.00
					Abdul Rachman	Jaya Makmur	06 Oktober 2016	500.00

No	Provinsi	Kabupaten / Kecamatan / Desa	Jenis Pemegang	Jenis Kemitraan	Para Pihak				Produk Kemitraan
					Pemegang	Kelompok	Tanggal MOU	Luas (Ha)	
1	Jambi	Pesawaran/ Teluk Pandan/ Sidoradi	Tahura	Pemanfaatan an HHBK	Tahura Wan	Wana Lestari	06 Oktober 2016	350.00	10
		Pesawaran/ Way Rantai/ Harapan Jaya	Tahura	Pemanfaatan HHBK dan Jasa Wisata	Abdul Rachman	Wana Lestari	06 Oktober 2016	600.00	
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Pemanfaatan HHBK	Abdul Rachman	Karya Lestari	06 Oktober 2016	400.00	
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Pemanfaatan HHBK	Abdul Rachman	Wana Asri	06 Oktober 2016	600.00	
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Pemanfaatan HHBK	Abdul Rachman	Makmur Lestari	06 Oktober 2016	620.00	
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Pemanfaatan HHBK	Abdul Rachman	Tani Jaya	06 Oktober 2016	1,024.00	
		Pesawaran/ Gedung Tataan/ Kebagusan	Tahura	Pemanfaatan HHBK	Abdul Rachman	Harapan Maju	06 Oktober 2016	330.00	
		Batanghari/ Bajubang/ Bungku Batanghari	IUPHHK-RE	Penanaman	PT. REKI	RT 20, 21, 37, 38	16 Januari 2016	1,219.06	
		Batanghari/ Bajubang/ Bungku	IUPHHK-HTI	Penanaman	PT. Wana Perintis	Orang Rimba	18 Oktober 2016	114.00	
		Sarolangun/ Sarolangun/ Raden Anom	KPHP	Kerja sama Bagi Hasil	PT. REKI	KTH Bungin Mandiri	21 Nopember 2016	153.00	
2	NTB	Sarolangun/ Sarolangun/ Raden Anom	KPHP	Kerja sama Bagi Hasil	KPHP Limaau Unit VII-Hulu Sarolangun	Puding Emas	19 Desember 2016	181.15	
		Sarolangun/ Sarolangun/ Raden Anom	KPHP	Kerja sama Bagi Hasil	KPHP Limaau Unit VII-Hulu Sarolangun	Ketuk Jaya	19 Desember 2016	199.02	
		Sarolangun/ Sarolangun/ Raden Anom	KPHP	Kerja sama Bagi Hasil	KPHP Limaau Unit VII-Hulu Sarolangun	Tunas Berkenbang	19 Desember 2016	190.66	
		Sarolangun/ Sarolangun/ Raden Anom	KPHP	Kerja sama Bagi Hasil	KPHP Limaau Unit VII-Hulu Sarolangun	Talun Sakti	19 Desember 2016	196.18	
		Lombok Timur/ Sambel/ Sugian	KPHL	Penanaman	KPHL Rinjani Timur	KTH Harapan Bersama	01 Februari 2016	285.00	Sengon Laut
		Lombok Timur/ Sambel/ Belanting	KPHL	Pemanfaatan HHBK, Agrobrest y	KPHL Rinjani Timur	KTH Pada Pacu	19 Oktober 2016	50.00	Sengon Laut
		Lombok Timur/ Suela/ Mekar Sari	KPHL	Pengelolaan HHBK	KPHL Rinjani Timur	Gapoktan Puncak Semaring	06 Agustus 2016	320.00	Sengon Laut
		Sumbawa/ Batu Lanteh/ Batu Dulang	KPHL	Pemanfaatan HHBK, Pemanfaatan an Bawah Tegakan	KPHL Batu Lanteh	KT Rokan Bangkit	19 Oktober 2016	117.00	Kemiri, Kopi, Durian
		Sumbawa/ Empang/ Jolang	KPHL	Pemanfaatan HHBK	KPHL Ampang	KT. Alam Hiju	19 Oktober 2016	1,000.00	Sengon
		Sumbawa/ Tarano/ Labuan Pindang	KPHL	Pemanfaatan HHBK	KPHL Ampang	KT. Bako Romo	19 Oktober 2016	50.00	Sengon
4	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara/ Muara Kaman/ Menamang	IUPHHK-HTI	Penanaman	PT. Surya Hutani Jaya	Masyarakat desa Menamang Kiri	23 Maret 2016	1,103.52	Karet
		Kutai Timur/ Karangan/ Batu Lepoq	IUPHHK-HTI	Konservasi Karst	PT. Sumalindo	Batu Lepoq	16 September 2016	700.00	Konservasi Karst, Meranti
		Kutai Timur/ Karangan/ Batu Lepoq	IUPHHK-HTI	Konservasi Karst	Alam Lestari	Karangan Hilir	17 September 2016	537.00	Agrosilvopasture, Agrosilvofisher, Karet, Duku
		Kutai Timur	Litbang	Penanaman	PT. Sumalindo	Kitab Surat	28 Agustus 2016	1.00	Gaharu, Merica
					BB Litbanghut Dipterokarpa	Kasing Adjang	28 Agustus 2016	1.00	Gaharu, Merica
						Samuel Daud	28 Agustus 2016	1.00	Gaharu, Merica
						Bella Samuel	28 Agustus 2016	1.00	Duku, Merica
						Kabi Boro	28 Agustus 2016	1.00	Gaharu, Merica

No	Prov/insi	Kabupaten / Kecamatan / Desa	Jenis Pemegang	Jenis Kemitraan	Para Pihak			Produk Kemitraan
					Pemegang	Kelompok	Tanggal MOU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rustam Ncau	28 Agustus 2016	1.00
						Asep L. B. Yohana	28 Agustus 2016	1.00
						Niau Imang	28 Agustus 2016	1.00
						Kueng Ngang	28 Agustus 2016	1.00
						Alpius Niam Malis Ngau	28 Agustus 2016	1.00
						Irang Bawan	28 Agustus 2016	1.00
						Kajan T.	28 Agustus 2016	1.00
						Sudin Ncau	28 Agustus 2016	1.00
						Bilung Elita	28 Agustus 2016	1.00
						Rudiansyah	28 Agustus 2016	1.00
						Muyang	28 Agustus 2016	1.00
						Baun Niam Sem Kule	28 Agustus 2016	1.00
						Marten Along	28 Agustus 2016	1.00
						Peline	28 Agustus 2016	1.00
						Ingan Bit Mumiati	28 Agustus 2016	1.00
						Buring	28 Agustus 2016	1.00
						Yusak Eva	28 Agustus 2016	1.00
						Ngan Nita Febrina Yunani	28 Agustus 2016	1.00
						Adan Kule	28 Agustus 2016	1.00
						Mentan Samuel	28 Agustus 2016	1.00
					PT. Acacia Andalan Utama	Lembaga Adat Desa Miau	06 Desember 2016	2,609.00
5	Sulawesi Tenggara	Kutai Timur/ Kongbeng	IUPPHK-HTI	Konservasi	Tahura Nipa - Nipa	KTPH. Subur Makmur	22 Juni 2016	35.00
		Konawe Selatan/ Kendari Barat/ Watu-Watu	Tahura	Penanaman				
Total								24,468.89

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.8. Kelompok Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	SKEMA KPS/KUPS															Lain-Lain	Jumlah
			Hutan Adat (HA) (Unit)	Kelompok Perhutanan Sosial (Unit)	Hutan Kemasyarak atan (Unit)	Hutan Tanaman Rakyat (Unit)	Sentra Bambu (Unit)	Hutan Desa (Unit)	Hutan Rakyat (Unit)	Hutan Rakyat Sutera (Unit)	Hutan Rakyat Kebun (HRK) (Unit)	Kemitraan Kehutanan (Unit)	Peneliharaan Kebun (Unit)	Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Unit)	Masyarakat Hutan Adat (MHA) (Unit)	Kelompok Tani Hutan (KTH) (Unit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	ACEH	10		6	1	3												10	
2	BALI	20					1	1	9		2	1	2				3	19	
3	BANTEN	24	7								17							24	
4	BENGKULU	21		5	16													21	
5	DI YOGYAKARTA	37			36												1	37	
6	GORONTALO	23			13			6		4								23	
7	JAMBI	1							1									1	
8	JAWA BARAT	57							23	1	10	3	5				14	56	
9	JAWA TENGAH	45							45									45	
10	JAWA TIMUR	198							14		106	3					75	198	
11	KALIMANTAN BARAT	29	6		1			8	5								3	29	
12	KALIMANTAN SELATAN	32	2		11	2		6	2					1				32	
13	KALIMANTAN TENGAH	6			1			2	1								2	6	
14	KALIMANTAN TIMUR	7	1		1												1	7	
15	KALIMANTAN UTARA	9	6									3						9	
16	KEP. BANGKA BELITUNG	22		1	8				13									22	
17	LAMPUNG	85			43				31			5					6	85	
18	MALUKU	125			10				24			91						125	
19	MALUKU UTARA	17	2		4			1	4			6						17	
20	NUSA TENGGARA BARAT	136			1				127			7		1				136	
21	NUSA TENGGARA TIMUR	1							1									1	
22	PAPUA	56		22					41			15						56	
23	PAPUA BARAT	6										4						6	
24	RIAU	17				5		2				12						17	
25	SULAWESI BARAT	35			7	1			27								1	36	
26	SULAWESI SELATAN	438	11		218	15		50	85	47		2			4		7	439	
27	SULAWESI TENGAH	81	5		59			11		2					1			78	
28	SULAWESI TENGGARA	111			32	1			58			11				4	5	111	
29	SULAWESI UTARA	147			5				62	2		33						102	
30	SUMATERA BARAT	14		1	5			7									1	14	
31	SUMATERA UTARA	29		2	16	5		3									3	29	
Jumlah		1.842	44	20	494	39	9	110	583	67	147	223	21	17	21	21	140	1.956	

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.9. Penanganan Konflik dan Tenurial

No	Nama	Lokasi	Luas Klaim (Ha)	Luas Konsesi (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	PT. Diamon Raya Timber	Riau	90,956.00	90,956.00	Selesai dan Surat Dirjen PSKL ke Gakkum
2	PT. Riau Andalan Pulp & Paper (Desa Dayun)	Riau	2,000.00	338,536.00	Diserahkan ke Gakkum
3	PT. Gema Hutani Lestari (Raja Buru)	Maluku	148,450.00	148,450.00	Selesai, ND Dirjen PSKL ke Menteri LHK
4	DAS HL Manggar	Kaltim	300.00	4,999.00	BAP Asesmen, Surat ke BPKH
5	PT. Mardhika Insan Mulia (Kampung Long Duhung)	Kaltim	1,400.00	46,080.00	Proses kesepakatan
6	KPHP Sijorong	NTB	10,000.00	41,579.00	Selesai asesmen
7	PT. Reki	Jambi	2,440.06	46,385.00	Selesai dengan penandatanganan MoU
	a. Kel Gelinding	Kab. Batang hari	18.00		
	b. Kel Mitrazone	Kab. Batang hari	353.00		
	c. Kel Tanding	Kab. Batang hari	675.00		
	d. Kel Simp Macan	Kab. Batang hari	22.00		
	e. Kel Trimakno	Kab. Batang hari	1,219.06		
	f. Kelompok Tani Bungin Mandiri	Kab. Batang hari	153.00		
8	PT. Surya Hutani Jaya (Desa Menamang Kiri)	Kaltim	1,103.52	183,300.00	Selesai dengan penandatanganan MoU
9	PT. Fajar Surya Swadaya (Desa Muara Lambakan)	Kaltim	5,000.00	64,470.00	Selesai dengan penandatanganan MoU
10	PT. Asia Tani Persada (Masyarakat Labai Hilir)	Kalbar	7,707.19	20,740.00	Proses penandatanganan MoU
11	PT. Daya Tani Kalbar (Masyarakat Labai Hilir)	Kalbar	10,152.00	56,060.00	Proses penandatanganan MoU
12	PT. Bumi Mekar Hijau (Masyarakat Desa Riding)	Sumsel	10,000.00	250,370.00	Proses penandatanganan MoU
13	KPH Unit 7 Tuhara Pocut Meurah Intan dengan 6 Gampong	Aceh	700.00	6,300.00	Proses mediasi
14	KPHL Sijunjung	Sumbang		130,837.00	
	a. Nagari Sisawah	Kab. Sijunjung			Proses dialog multipihak
	b. Nagari Tanjung Labuah	Kab. Sijunjung	3,338.00		Proses dialog multipihak
	c. Tanjung Lolo	Kab. Sijunjung	7,620.00		Proses dialog multipihak
	d. Padang Laweh	Kab. Sijunjung	4,065.00		Proses dialog multipihak
15	PT. Arara Abadi	Riau		299,975.00	
	a. Masyarakat Suku Sakai		7,158.25		Pra mediasi
	b. Petani Sawit Delima Makmur		300.00		Surat ke Itjen dan rekomendasi penegakan hukum
16	PT. Nusantara Sentosa Raya (KUD PESA)	Riau	620.00	23,030.00	Proses penegakan hukum
17	PT. Musi Hutan Persada	Sumsel	1,500.00	183,300.00	Proses verifikasi
18	PT. Agronusa Alam Sejahtera	Jambi	1,294.00	22,525.00	Proses penanganan
19	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Kalbar	181,010.00	181,010.00	Selesai dengan penandatanganan MoU
Total			497,114.02	2,138,902.00	

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.10. Hutan Adat / Masyarakat Hutan Adat Yang Telah Diidentifikasi dan Dipetakan

No	Nama Hutan Adat (HA) / Masyarakat Hutan Adat (MHA)	Keterangan	Luas (Ha)	Jumlah HA / MHA (Unit)
1	2	3	4	5
1.	1. HA. Ammatoa Kajang (Sulsel)/ (313,99 Ha)	Sudah Ditetapkan 1 SK Penetapan HA Nomor: SK.6746/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 2 SK Penetapan Pencantuman HA Nomor: SK.6742/menlhk-pskl/kum.1/12/2016	313.99	1
2.	2. HA. Mukim Beungga (NAD)/ 10.9888 Ha.	Telah diverifikasi	10.99	1
3.	3. HA. Mukim Paloh (NAD)/ 2.921,00 Ha	Telah diverifikasi	2,921.00	1
4.	4. HA. Mukim Kunyet (NAD)/ 4.106,00 Ha	Telah diverifikasi	4,106.00	1
5.	5. HA. Malalo Tigo Jurai (Sumbar)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
6.	6. MHA Balaban Ella (Kalbar)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
7.	7. MHA Mentawai (Sumbar)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
8.	8. MHA Mutis (NTT)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
9.	9. MHA Wana Posangke (Sulteng)/6.291,00 Ha	Sudah Ditetapkan 1 SK Penetapan HA Nomor: SK.6747/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 2 SK Penetapan Pencantuman HA Nomor: SK.6743/menlhk-pskl/kum.1/12/2016	6,291.00	1
10.	10. MHA Kesepuhan Karang (Lebak, Banten)/ 485,39 Ha	Sudah Ditetapkan 1 SK Penetapan HA Nomor: SK.6748/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 2 SK Penetapan Pencantuman HA Nomor: SK.6744/menlhk-pskl/kum.1/12/2016	485.39	1
11.	11. MHA Nggorang (Manggarai Barat, NTT)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
12.	12. MHA Dayak Loksado (Kalsel)	Pendampingan Pengakuan Hutan Adat	-	1
13.	13. HA Marga Sawat (Papua)/ 1.296,6 Ha	Telah diverifikasi	1,296.60	1
14.	14. HA Marga Fadan (Papua)/ 1.260,21 Ha	Telah diverifikasi	1,260.21	1
15.	15. HA Marga Serampas (Jambi)/ 130,00 Ha	Sudah Ditetapkan 1 SK Penetapan HA Nomor: SK.6745/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 2 SK Penetapan Pencantuman HA Nomor: SK.6741/menlhk-pskl/kum.1/12/2016	130.00	1
16.	16. HA Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang (Jambi)/ 39,00 Ha	Sudah Ditetapkan SK Penetapan Pencantuman HA Nomor:	39.00	1
17.	17. HA Bukit Tinggi (Jambi)/ 41,00 Ha	Sudah Ditetapkan 1 SK Penetapan Pencantuman HA Nomor: SK.6738/menlhk-pskl/kum.1/12/2016	41.00	1
18.	18. HA Tigo Luhah Kemantan (Jambi)/ 452,00 Ha	Sudah Ditetapkan SK Penetapan Pencantuman HA Nomor:	452.00	1
19.	19. HA Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (Jambi)/ 276,00 Ha	Sudah Ditetapkan SK Penetapan Pencantuman HA Nomor:	276.00	1
Jumlah			17,623.18	19

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.11. Capaian Luas Wilayah Penyelesaian Konflik

No	Nama	Lokasi	Luas Area		Keterangan
			Konsesi (Ha)	Klaim (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Klaim serikat tani nasional jambi dengan PT. Wanakasta Nusantara dan PT. Agronusa Alam Sejahtera, Jambi	Jambi	31,308.62	1,294.00	Rapat
2	Klaim masyarakat desa Sujuk dengan KLHK, Bangka Belitung	Bangka Belitung	13,257.00	13,257.00	Surat ke Yang Bersangkutan
3	Klaim masyarakat adat serampas dengan TN Kerinci Seblat, Jambi	Jambi	14,000.00	4,000.00	Ke Gakum
4	Klaim Soleman Enuab dengan PT. Wapoga Mutiara Timber dan PT. Wijaya Sentosa, Papua	Papua	299,925.00		Surat ke Yang Bersangkutan
5	Klaim Sdr. Yunno Abeta Lahay dengan PT. Tybar, Sukabumi, Jawa Barat	Jawa Barat	1,126.00	292	Surat ke Yang Bersangkutan
6	Klaim Masyarakat Kaburai dengan PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	208,300.00	2,500.00	Surat ke Dishut
7	Klaim masyarakat Lamandau dengan PT. Korintiga Hutani, Lamandau, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	94,384.00	5,708.45	Masih menunggu laporan
8	Klaim forum kelompok tani Desa Ketapat Bening perjuangan dengan PT. Wahana Agro Mulia, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	6,290.00	1,473.75	Rencana Aksi
9	Klaim Bupati Merangin dengan KLHK (Suku Anak Dalam), Kab. Merangin, Jambi	Jambi	60,500.00	4,009.00	Surat ke Planologi KHDTK
10	Klaim Forum masyarakat sungai selan (Formaks) dengan PT. Agrindo Persada Lestari, Bangka Belitung	Bangka Belitung	26,259.00	26,259.00	Surat ke Planologi/Assesmen
11	Klaim Masyarakat Adat suku Nua ulu dengan PT. Bintang Lima Makmur, Maluku Tengah	Maluku	24,550.00	24,550.00	Surat ke ATR/Kapolri
12	Klaim FKW Maju bersama register A.13 Oku Timur dengan PT. Musi Hutan Persada, Sumsel	Sumatera Selatan	PT. MHP	406	Selesai
13	Klaim bupati Bungo dengan KLHK, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Jambi	5,901.00	1,850.00	Selesai ke Planologi
14	Klaim masyarakat adat Marga Suay Umpu dengan PT. Silva Inhutani, Lampung	Lampung	42,762.00	9,600.00	Rekomendasi
15	Klaim PT Solusi jaya perkasa dengan PT Wana Subur Lestari, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1,132.00	1,132.00	Surat ke Gakum
16	Klaim kepemilikan lahan Ir. T Mansuarman, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh	Aceh			Surat ke Planologi
17	PT. Bengkulu Raya Timber (Pangeran Balin)	Bengkulu	28,000.00	28,000.00	Surat ke Planologi
18	Klaim Lembaga Adat Bang Mawayka dengan PT. Inhutani V Register 44 Lampung	Lampung	55,157.00	14,975.00	Surat ke Inhutani V
19	Klaim Koperasi Sengkemang Jaya dengan PT. Duta Swakarya Indah, Kab. Siak, Provinsi Riau	Riau	13,532.00	3,000.00	Surat ke Yang Bersangkutan
20	Klaim masyarakat Desa Lomo dengan PT. Sinergi Hutan Sejati, Kab. Muara Teweh, Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	68,980.00	412	Surat ke Yang Bersangkutan
21	Klaim Masyarakat dengan PT. Supra Bara Energi Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	456	64	Surat ke Planologi
22	masyarakat Tanah Gunung Penggolong RTK 22, Desa Tumpak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	931.4	130	Surat ke Yang Bersangkutan
23	Pengembalian Tanah/Pinjam Pakai oleh Kehutanan Desa Mekarjaya, Kec. Gantar, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	Jawa Barat		700	Surat ke Planologi
24	PT. Sinar Belantara Indah dengan Masyarakat Dusun Bagan Toreh, Kab. Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara	5,197.36	2,226.00	Surat ke Gakum
25	PT. Central Pertiwi Bahari, Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 Kabupaten Tulang Bawang dengan Lembaga Adat Megou	Lampung	16,221.04	8,356.20	Surat ke Lembaga Adat Megou
26	PT. Musi Hutan Persada dengan masyarakat Desa Merbau, Kab. OKU, Prov. Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	296,400.00	3,800.00	Surat ke Bupati
27	Klaim Masyarakat dengan PT. Silva Inhutani di wilayah Register 45, Kabupaten Mesuji	Lampung	43,100.00	7,000.00	Laporan hasil Tim ke Lapangan
28	PT. Wana Perintis HTI Transmigrasi Suku Anak Dalam (SAD) Ketemenggungan Maritua, Jambi	Jambi	6,900.00	114	Sudah MOU
29	Pengaduan masyarakat Desa Pongkar, Kab. Karimun, Prov. Riau	Kepulauan Riau	1,837.00	80	Selesai Nota Dinas ke Dirjen
30	Permohonan dan Pengaduan Masyarakat Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kab. Bengkalis, Prov Riau dengan PT. Arara Abadi	Riau	299,975.00	400	Selesai
31	Kasus tanah Dukuh Pulangsari dan Dukuh Limbangan Kab. Pemalang, Jawa Tengah	Jawa Tengah		54.55	Surat ke Perhutani
32	Mohon Kapasitas Hukum dan atau Solusi lain tentang areal tanah Desa Ujung Rambun dan Desa Pancur Mas	Lampung		2,500.00	Nota Dinas ke Dirjen
33	Pengembalian lahan garapan seluas 810 Ha (63 tempat) yang telah disetujui Gubernur Jambi tahun 1987 ke Menteri LHK	Jambi	191,130.00	810	Nota Dinas ke Dirjen
34	Klaim Masyarakat dengan PT. Rimba Peranap, Pelalauan, Riau	Riau	14,434.00	600	Laporan Lapangan
35	PT. Musi Hutan Persada dengan Dusun Cawang Gumilir	Sumatera Selatan	PT. MHP	1,500.00	Selesai
36	Pengaduan Masyarakat Desa Gedung Agung dan Desa Arahan, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. MHP	Sumatera Selatan	PT. MHP	164	Nota Dinas dari TAM ke Menteri

No	Nama	Lokasi	Luas Area		Keterangan
			Konsesi (Ha)	Klaim (Ha)	
1	2	3	4	5	6
37	pengaduan masyarakat Desa Dayun dengan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper)	Riau	280,500.00	3,852.00	Fasilitasi
38	Alih Fungsi Hutan Blok Terbis, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah			Surat ke Perhutani
39	Pengaduan Saudara Mursal/Arjoni terhadap PT. Bumi Persada Permai, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	59,135.00		Nota Dinas ke Dirjen
40	Pengaduan Masyarakat Adat (Mataram Udik, Mataram Ilir, Surabaya Ilir) dan 10 Umbul dengan KPHP Register 47 Way Terusan Kab. Lampung Tengah	Lampung	13,749.30	3,239.30	Nota Dinas ke Dirjen
41	Permohonan Peninjauan Lapangan di Nagori Purba Tengah, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara	Sumatera Utara			Surat ke Planologi
42	Tuntutan masyarakat Desa Muara Megang dengan PT. Dwi Raksa Usaha Perkasa khusus kebun kelapa sawit, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	13,000.00		Nota Dinas ke Dirjen
43	Mohon Fasilitasi dialog penyelesaian konflik PIPA dan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser)	Sumatera Utara	0.7927		Surat ke BBTN Gunung Leuser
44	Pengaduan penambangan PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK) oleh masyarakat (Heldyonoe.K)	Kalimantan Tengah	431.3	431.3	Surat ke Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan
45	Konflik Agraria Serikat Petani Indonesia dengan Perhutani Kendal Desa Surokonto Wetan, Kab. Kendal	Jawa Tengah		127.82	Surat ke Perum Perhutani
46	Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap dengan PT. Rimba Lazuardi	Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau	23,340.00	8,201.00	Selesai
47	Pengaduan Masyarakat Adat Semangus dengan PT. Musi Hutan Persada, Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	PT. MHP		Rapat, Surat ke Bupati Musi Rawas
48	Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Petani di Areal HPT di Kab. Kampar seluas 5.000 Ha Desa Kepau Jaya, pada areal PT. Rimba Seraya Utama	Riau	12,600.00	5,000.00	Identifikasi lapangan
49	Permohonan agar lahan perkebunan masyarakat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan dikembalikan fungsinya sebagai budidaya perkebunan kelapa rakyat, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau	Riau		51,000.00	Identifikasi lapangan
50	Permohonan Surat Keterangan Lahan Garapan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Kerawang Baru Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, PT. Central Pertiwi Bahari	Provinsi Lampung	16,221.04	1,300.00	Surat kepada ketua FKM Kerawang Baru
51	Permohonan lahan kawasan hutan Desa Banyuanyar Banyuwangi	Banyuwangi, Jawa Timur		100	Surat ke Direktur Pengukuhan
52	Pengaduan Masyarakat Bantuan Penyelesaian Sengketa tanah antara masyarakat Desa Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Prov Lampung dengan PT. Inhutani V	Lampung	PT. Inhutani V	8,500.00	Nota Dinas ke Dirjen
53	Penanganan Konflik di Tahura Bonto Bahari, Bulukumba Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	3,475.00		Surat ke Bupati Bulukumba
54	Permohonana Penyelesaian Hak Guna Usaha PT. Surya Agrolika Reksa dan Adimulya Agrolestari Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau	Riau	17,065.00	558	Nota Dinas ke Dirjen, Surat ke ATR
55	PT. Kodeco Timber, Masyarakat Adat Dayak Batulasung, Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	12,280.00		Surat ke AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
56	Penyelesaian Dusun Cawang Gumilir Desa Pian Raya dengan PT. Musi Hutan Raya	Sumatera Selatan	PT. MHP	961.1	Nota Dinas ke Direktur
57	Penanganan Konflik Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Sei Mahato di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	Riau	28,800	4,950.00	Nota Dinas ke Dirjen
Jumlah			2,352,542.85	59,437.47	

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

Tabel 8.12. Pemenang Wana Lestari

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan / Desa	Kelompok	Nilai	Usulan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7
Kategori pemegang Hak Kelola HD						
1	Kalimantan Timur	Berau	Kelay/Merabu	LPHD Kerima Puri	98	I
2	Sumatera Barat	Solok Selatan	Pauh Duo/Alam Pauh Duo	LPHN Jorong Simancuang	98	II
3	Sulawesi Selatan	Luwu	Lat imojong/Tibussan	LPHD Tibussan	91.3	III
4	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Jongkong/Ujung Said	LPHD Mentari Kapuas	90	Harapan I
5	Bali	Buleleng	Sukasada/Selat	Bumdes Pandan Harum	76.99	Harapan II
6	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir/ Gohong	LPHD Gohong	76	Harapan III
Kategori Pemegang Penetapan Hutan Adat						
1	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Kajang	Amatoa Kajang		I
2	Sulawesi Tengah	Morowali Utara		Tau Taa Wana Posangke		II
3	Jambi			Serampas		III
4	Kalimantan Timur			Wehea		Harapan I
Kategori Kader Konservasi						
1	Bali			I Nyoman Rasna	94.92	I
2	Jawa Tengah			Mukidin	94.84	II
3	DI Yogyakarta			Suratimin	94.78	III
4	NTB			Herman, S.Pd	90.63	Harapan I
5	Jambi			Sopan Sofyan	89	Harapan II
6	Jawa Barat			Iwa Purwa Suganda	86.96	Harapan III
7	Bengkulu			M. Adli Burdani	83.12	
8	Banten			Yaya Jakaria, SS	80.12	
9	Lampung			Ichvan Sofyan	79.9	
10	Kepulauan Bangka Belitung			Ir. Dian Rossana Aggraini	78.26	
11	Sulawesi Tenggara			Anton T	76.1	
12	Sumatera Utara			M. Danil Saputra	74.1	
13	DKI Jakarta			Ahmad Baihaqi	72	
14	Papua Barat			Drs. A.H.P. Ompusunggu, MM	71.14	
15	Kalimantan Timur			Muhammad Saiful S.Hut	64.5	
Kategori Pecinta Alam						
1	Bali			SISPALA YOWANA GIRI SMKN 1 PETANG	95.65	I
2	Sulawesi Tenggara			ALGAPALA	95.42	II
3	NTB			MAPALA FKIP UNRAM	95.42	III
4	Banten			KAILASA	92.77	Harapan I
5	Jawa Tengah			OPA KOMANGJO	92.74	Harapan II
6	D.I. Yogyakarta			MATALABIOGAMA	91.17	Harapan III
7	Jawa Barat			LAWALATA IPB	90.95	
8	Kepulauan Bangka Belitung			ANIMAL LOVERS OF BANGKA ISLAND (ALOB)	87.37	
9	Jambi			MAPALA SINGINJAI	79	
10	DKI Jakarta			STACIA	78.39	
11	Sumatera utara	Medan	Padang bulan	KOMPAS USU	77.7	
12	Bengkulu			MAPETALA UNIB	77.56	
13	Papua Barat			PAPALA STARGEZER	63.57	
14	Kalimantan Timur			MAPALA PLANKTHOS	30.92	

Sumber : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 2016

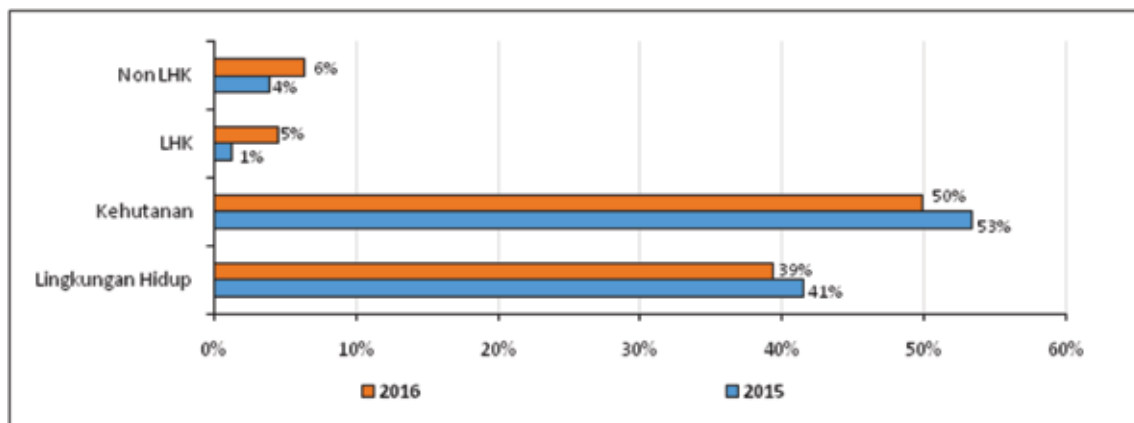
9

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan



Ancaman dan gangguan terhadap hutan berasal dari kegiatan perambahan, penebangan liar, pengambilan/perburuan fauna dan atau flora secara *illegal*, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutandan kegiatan-kegiatan liar lainnya. Tekanan yang semakin tinggi tersebut mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya semakin lama semakin tinggi dan masiv. Guna menahan laju tekanan terhadap daya dukung lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan upaya-upaya premitif, preventif, represif dan yustisi yang tertuang dalam Rencana Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

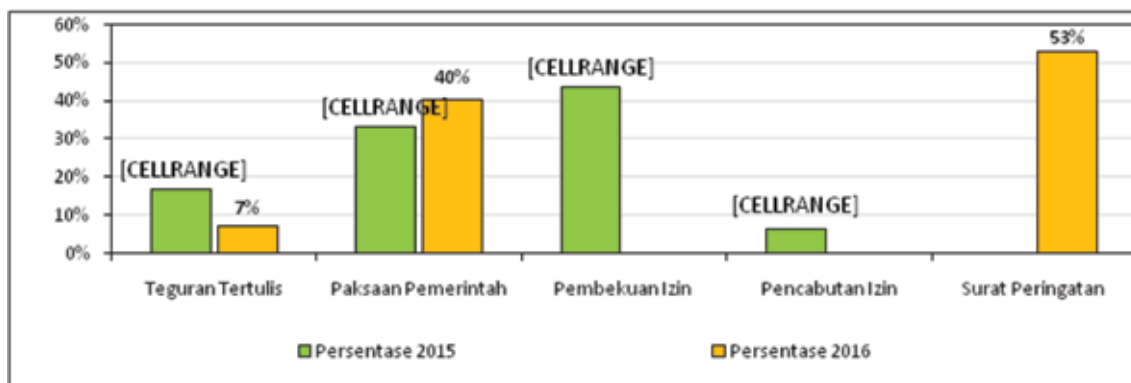
9.1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Aministrasi (PPSA)



Grafik 9.1. Persentase Kategori Pengaduan yang Diterima KLHK 2015 - 2016

Penanganan pengaduan adalah salah satu jenis pengawasan yang bersifat *impromptu* atau spontan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan diterima melalui beberapa media, yaitu surat, pengaduan langsung, pesan singkat (sms), email, website (pengaduan.menlhk.go.id), telpon, datang langsung, aplikasi Gakkum, media LAPOR dan Komnas HAM.

Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui proses telaah terhadap hasil pengawasan penataan perizinan dan hasil penanganan pengaduan. Berdasarkan telaahan dimaksud Kementerian LHK memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang telah melanggar peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan Pemerintah, teguran tertulis dan surat peringatan.



Grafik 9.2. Persentase Pengenaan Sanksi Administrasi Tahun 2015 dan 2016

9.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84 ayat (1) menjelaskan, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaannya penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi, fasilitasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa LH dilakukan terhadap industri, prasarana dan jasa dan pengelolaan sumber daya alam.

9.3. Penegakan Hukum Pidana (PHP)

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Salah satu permasalahan dan menjadi isu nasional adalah tindak kejahatan pembakaran lahan dan hutan. Untuk itu perlu adanya upaya sinkronisasi dan optimalisasi langkah-langkah penegakan hukum pidana sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan sumberdaya yang ada, terutama personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan PPNS Kehutanan yang saat ini masih mengemban undang-undang yang berbeda. Sehubungan hal tersebut, Direktorat Penegakan Hukum Pidana membentuk satuan tugas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembentukan satuan tugas ini diharapkan dapat menunjang pencapaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana mengingat luasnya cakupan ruang lingkup penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

9.4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH)

Permasalahan kehutanan di Indonesia semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman serta mengalami perubahan trend. Pada periode tahun 2005 s.d. 2009, permasalahan kehutanan yang sangat marak adalah adanya aktivitas illegal logging dan peredaran kayu ilegal dan telah menjadi perhatian

masyarakat global. Sampai kurun waktu akhir 2009, illegal logging skala besar dapat ditekan dan turun secara signifikan, meskipun dalam skala kecil masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Periode tahun 2010 s.d. 2014 perkembangan permasalahan selanjutnya adalah, meningkatnya tindak kejahatan kehutanan lain yaitu perambahan kawasan konservasi dan peredaran ilegal TSL. Sampai awal periode 2015–2019 perambahan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural masih banyak terjadi, disamping perburuan dan peredaran satwa liar ilegal serta kebakaran hutan dan lahan yang masih kerap terjadi.

Hasil pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama tahun 2015 s.d. 2016 secara rinci tersaji dalam beberapa tabel dibawah ini, seluruh tabel dimaksud merupakan rangkaian bisnis proses penegakan hukum, mulai dari prakondisi, upaya-upaya pencegahan, pengamanan dan pengawasan serta penegakan hukum baik secara administrasi, perdata maupun pidana.

Tabel 9.1. Kategori Pengaduan Yang Diterima Kementerian LHK Tahun 2015 - 2016

No	Kategori	2015	2016
1	Lingkungan Hidup	233	269
2	Kehutanan	300	341
3	LHK	7	31
4	Non LHK	22	43
Jumlah		562	684

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 9.2. Jumlah Pengaduan LHK Yang Diterima Melalui Media Pengaduan Tahun 2015 - 2016

No	Media Pengaduan	2015	2016
1	2	3	4
1	Surat	291	396
2	Langsung (datang langsung)	108	113
3	Pesan singkat (SMS)	65	30
4	Email	43	9
5	Website	13	1
6	Telepon	2	17
7	Komnas HAM	40	-
8	Aplikasi Gakum	-	12
9	Aplikasi Lapor	-	97
10	Lain-lain (WA)	-	9
Jumlah		562	684

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.3. Status Penanganan Pengaduan LHK Tahun 2015

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pengaduan selesai	114
2	Telah diverifikasi	101
3	Pelimpahan ke BLH & Dishut	123
4	Pelimpahan ke Dit. Konflik Tenurial & Hutan Adat	149
5	Pelimpahan ke Ditjen Planologi & Tata Lingkungan	2
6	Pelimpahan ke Ditjen KSDAE	1
7	Pelimpahan ke Dit. PPH	23
8	Dalam proses (penelaahan, persiapan verifikasi, pembahasan dan persiapan pelimpahan)	27
9	Non LHK	22
Jumlah		562

Tabel 9.4. Status Penanganan Pengaduan LHK Tahun 2016

No	Status	Jumlah	Total
1	2	3	4
A.	PROSES		80
1	Telaah	7	
2	Verifikasi	65	
3	Penyusunan rekomendasi	8	604
B.	SELESAI		
4	Penerapan sanksi administrasi	56	
5	Penyelesaian sengketa lingkungan	3	
6	Penegakan hukum pidana	21	
7	Sanksi administrasi dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum pidana	0	
8	Sanksi administrasi dan penyelesaian sengketa lingkungan	2	
9	Sanksi administrasi dan penegakan hukum pidana	5	
10	Penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum pidana	0	
11	Operasi/pulbaket (pencegahan dan pengamanan hutan)	27	
12	Penyerahan ke unit lain (Eselon I, UPT, Perum Perhutani, dan Kepolisian)	195	
13	PEMDA (BLH, Dishut, KPH)	170	
14	Data tidak lengkap	44	
15	Tidak terbukti	27	
16	Subdirektorat pengawasan	5	
17	Non LHK	49	
Jumlah			684

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.5. Distribusi Wilayah Pengawasan Tahun 2015 - 2016

No	Provinsi	IPJ		SDA	
		2015	2016	2015	2016
1	2	3	4	5	6
1	Bali	1	3	-	-
2	Bangka Belitung	-	2	-	2
3	Banten	-	7	-	6
4	DKI Jakarta	-	12	-	3
5	DIY	2	1	-	-
6	Jambi	-	-	9	3
7	Jawa Barat	8	38	-	8
8	Jawa Tengah	-	14	-	4
9	Jawa Timur	2	13	-	6
10	Kalimantan Barat	-	-	5	-
11	Kalimantan Timur	-	18	6	16
12	Kalimantan Selatan	-	1	1	3
13	Kalimantan Tengah	-	1	7	2
14	Kalimantan Utara	-	-	2	2
15	Maluku	-	2	-	1
16	NTB	-	3	-	3
17	Riau	2	4	11	20
18	Sulawesi Selatan	-	1	-	1
19	Sulawesi Utara	-	-	-	1
20	Sumatera Selatan	-	1	13	14
21	Sumatera Utara	-	3	1	2
22	Papua	-	-	-	9
23	Papua Barat	-	-	-	1
TOTAL		15	124	55	107

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.6. Jenis Pengenaan Sanksi Administrasi Tahun 2015 - 2016

No	Jenis Sanksi Administrasi	2015	2016
1	2	3	4
1	Teguran Tertulis	8	15
2	Paksaan Pemerintah	16	87
3	Pembekuan Izin	21	-
4	Pencabutan Izin	3	-
5	Surat Peringatan	0	115
	Jumlah	48	217

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.7. Distribusi Wilayah Pengenaan Sanksi Administrasi

No	Provinsi	2015	2016
1	2	3	
1	Banten	1	6
2	Bengkulu	-	2
3	D.I Yogyakarta	-	2
4	DKI Jakarta	-	11
5	Jambi	4	7
6	Jawa Barat	6	19
7	Jawa Tengah	-	1
8	Jawa Timur	4	3
9	Kalimantan Barat	4	-
10	Kalimantan Selatan	1	-
11	Kalimantan Tengah	6	2
12	Kalimantan Timur	3	17
13	Kalimantan Utara	1	-
14	Kepulauan Bangka Belitung	-	1
15	Kepulauan Riau	1	-
16	Papua	1	-
17	Papua Barat	2	-
18	Riau	6	18
19	Sulawesi Utara	-	1
20	Sumatera Barat	-	2
21	Sumatera Selatan	8	7
22	Sumatera Utara	-	3
	Jumlah	48	102

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.8. Pengenaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan Usaha	Jumlah
1	2	3
1	Pertambangan Batu Bara	1
2	Perkebunan tebu dan pabrik gula	1
3	Pembekuan udang dan ikan	1
4	Karton gelombang dan kertas	4
5	Pelabuhan	3
6	Pembuatan tempat telur (egg tray)	1
7	Makanan dan Minuman	1
8	Migas	1
9	Kelapa sawit	1
10	Pembangkit listrik	1
11	Tekstil	1
12	Logam dasar bukan besi	1
13	Jasa pengelola Limbah B3	1
14	Elektronik	1
15	Perkebunan	9
16	Kehutanan	20
Jumlah		48

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.9. Pengenaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Tahun 2016

NO	Jenis Kegiatan Usaha	Jumlah
1	2	3
1	Industri	31
2	Prasarana	10
3	Jasa	18
4	Manufaktur	2
5	Perkebunan, Pengolahan dan Pabrik	17
6	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (UPHHK-HT)	2
7	Hutan Tanaman Industri	11
8	Pertambangan	6
9	Migas	5
Jumlah		102

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.10. Status Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Tahun 2015 dan 2016

No	Status Sengketa	Jumlah Perusahaan	
		2015	2016
1	2	3	4
1	Belum verifikasi	32	1
2	Verifikasi	3	6
3	Perhitungan Kerugian	1	0
4	Klarifikasi	16	5
5	Negosiasi / Fasilitasi	9	10
6	Kesepakatan	25	46
7	Tidak terbukti SLH	8	4
Jumlah		94	72

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.11. Status Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Tahun 2015 dan 2016

No	Status Sengketa	Jumlah Perusahaan	
		2015	2016
1	2	3	4
1	Penyusunan Gugatan	5	0
2	Pendaftaran Gugatan	0	5
3	Persidangan PN	3	0
4	Putusan PN	0	0
5	Banding	0	3
6	Kasasi	3	2
	Peninjauan Kembali / PK	1	2
Jumlah		12	12

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.12. Rekapitulasi Tindak Pidana P-21 Tahun 2015 - 2016

No	Tipologi Kasus	2015	2016	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan	-	1	1
2	Pencemaran Lingkungan Hidup	4	3	7
3	Perambahan	28	30	58
4	TSL	43	51	94
	Pembalakan Liar	43	65	108
Total		118	150	268

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.13. Hasil Penanganan Kasus LHK Fasilitas POLRI dan Kejaksaan

No	Tipologi Kasus	2015	2016	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pembalakan Liar	6	0	6
2	Perambahan	2	7	9
3	Peredaran Illegal TSL	0	0	0
4	Pencemaran Lingkungan	10	12	22
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	34	26	60
6	Kerusakan Lingkungan	0	0	0
Total		52	45	97

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.14. Proses Penegakan Hukum Pidana Hasil Fasilitas

No	Status Penanganan Kasus	2015	2016	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Penyidikan	14	26	40
2	P. 19	5	7	12
3	P. 21	3	8	11
4	SP3	10	0	10
5	Proses Sidang	2	3	5
6	Putusan	7	1	8
Total		41	45	86

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.15. Tipologi Perkara Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 dan 2016

No	Tipologi Kasus	Tahun	
		2015	2016
1	2	3	4
1	Illegal Logging	47	66
2	Kebakaran Hutan	33	11
3	Pencemaran Lingkungan	34	36
4	Perambahan Hutan	76	52
5	TSL	52	51
Jumlah		242	216

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.16. Proses Penegakan Hukum Pidana Hasil Penyelidikan dan Penyidikan PPNS KLHK Tahun 2015 dan 2016

No	Status Penanganan	2015	2016
1	2	3	4
1	Penyelidikan	98	20
2	Penyidikan	21	39
3	P. 21	115	150
4	Proses Sidang	6	3
5	Putusan	2	4
Jumlah		242	216

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.17. Rekapitulasi Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2015 dan 2016

No	Jenis Operasi	2015		2016	
		Jumlah	Hasil	Jumlah	Hasil
1	2	3	4	5	6
1	Operasi pemulihan kawasan hutan	27	3.072.198 Ha	36	2.431.892,85 Ha
2	Operasi peredaran TSL	6	21 satwa dilindungi	65	6.122 ekor satwa
					4.577 lembar kulit satwa
					711 buah bagian satwa
3	Operasi pembalakan liar	16	4.240 batang	40	5.329 batang
					1.227,75 m3

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.18. Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Tahun 2015 dan 2016

No	Pelaksanaan Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)		
			2015	2016	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	BKSDA Bengkulu	Operasi Pengamanan hutan		483.00	483.00
2	BKSDA Lampung	71 kali patroli & 15 kali operasi	13,605.00		13,605.00
3	BKSDA DIY	Patroli 8 kali, Operasi 13 kali	100.00	632.73	732.73
4	BKSDA Sultra	Patroli dan operasi	270,170.00	276,978.96	547,148.96
5	BKSDA Sumbar	Patroli dan operasi	247,282.19		247,282.19
6	BKSDA Jateng	Patroli dan operasi	2,608.15	3,055.80	5,663.95
7	BKSDA Sulsel	Patroli dan operasi	0.50		0.50
8	BKSDA Bengkulu	Patroli dan operasi	159.47	25.00	184.47
9	BKSDA Kaltim	Patroli dan operasi	500.00		500.00
10	BKSDA Sumut	Patroli dan operasi	190.13	230.00	420.13
11	BKSDA Aceh	Operasi		4.00	4.00
12	BTN Komodo	Patroli dan operasi	173,000.00		173,000.00
13	BBTN Gunung Gede Pangrango	Patroli & Operasi	66,000.00		66,000.00
14	BBTN Gunung Leuser	Patroli dan operasi	838,872.00		838,872.00
15	BTN Ujung Kulon	Patroli dan operasi	105,694.46		105,694.46
16	BBTN Betung Kerihun	Patroli dan operasi	816,693.40		816,693.40
17	BTN Kutai	48 kali patroli, 5 kali operasi	240,050.00		240,050.00
18	BBTN Lore Lindu	Patroli dan operasi	60.00	70.00	130.00
19	BTN Bogani Nani Wartabone	Patroli dan operasi	90,270.00		90,270.00
20	BTN Berbak	Patroli dan operasi	47.50	16.50	64.00
21	BTN Bukit Barisan Selatan	Patroli dan operasi	8,055.00	20,795.00	28,850.00
22	BTN Kerinci Seblat	Patroli dan operasi	100.00	64.00	164.00
23	Dishut Prov. Bengkulu	Patroli dan operasi	77,924.00	257,847.00	335,771.00
24	Dishut Prov. Jambi	Patroli dan operasi	194.00	827.00	1,021.00
25	Dishut Prov. Lampung	Patroli dan Operasi		704,354.00	704,354.00
26	Dishut Prov. Bali	Patroli dan operasi	11,906.02		11,906.02
27	Dishut Prov. Sumatera Utara.	Patroli dan operasi	105.79	583.21	689.00
28	Dishut Prov. Sumbar	Patroli dan operasi		1,250.00	1,250.00
29	Dishut Prov. Sulawesi Utara	Patroli dan operasi	10.00		10.00
30	Dishut DIY	Patroli dan operasi	32,172.00		32,172.00
31	Dishut Sulawesi Tenggara	Patroli dan operasi	76,180.38		76,180.38
32	Direktorat PPH, BP2HLHK, BBKSDA Riau (CB GSKBB)	Operasi		336.00	336.00
33	BBKSDA Riau (SM Rimbang Baling)	Operasi		20.00	20.00

No	Pelaksanaan Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)		
			2015	2016	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
34	Dit. PPH, Balai P2HLHK Sumatera (HP Bagan Sinembah)	Operasi		420.00	420.00
35	Dit. PPH, Balai P2HLHK Sumatera, BTN Berbak	Patroli & Operasi		16,000.00	16,000.00
36	Dit. PPH, BBTN Bromo Tengger Semeru	Operasi		50.27	50.27
37	Dit. PPH, Perum Perhutani (PT. PL)	Operasi		377.60	377.60
38	BTN Bukit Tiga Puluh	Operasi		144.00	144.00
39	Dit. PPH, BTN TN, BPPHLHK Wil. Sumatera	Operasi		37.50	37.50
40	BP2HLHK Kalimantan & BTN Kutai	Patroli & Operasi		300.00	300.00
41	BP2HLHK Kalimantan & BKSDA Kalbar (CA Mandor)	Patroli & Operasi		2,880.70	2,880.70
42	BP2HLHK Jabalnusra (CA Papandayan)	Patroli & Operasi		14.50	14.50
43	BP2HLHK Sulawesi (CA Morowali)	Operasi		20.00	20.00
44	BP2HLHK Sulawesi (SM Lombuyan)	Operasi		20.00	20.00
45	BBKSDA Jawa Timur	Patroli & Operasi		575.00	575.00
46	BBKSDA Sulawesi Selatan	Patroli & Operasi		120.00	120.00
47	BBKSDA Papua	Patroli & Operasi		509,349.00	509,349.00
48	BTN Kelimutu	Patroli & Operasi		200.00	200.00
49	BTN Manusela	Patroli & Operasi		69,818.36	69,818.36
50	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Patroli & Operasi		8,024.60	8,024.60
51	BTN Rawa Aopa	Patroli & Operasi		105,194.00	105,194.00
52	BTN Tesso Nilo	Patroli & Operasi		19,350.00	19,350.00
53	BTN Wasur	Patroli & Operasi		431,425.12	431,425.12
TOTAL			3,071,949.99	2,431,892.85	5,503,842.84

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 9.19. Komposisi Distribusi Tenaga Teknis Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

SDM Bidang Kehutanan			SDM Bidang Lingkungan Hidup		
Tenaga Teknis	Pusat	Daerah	Tenaga Teknis	Pusat	Daerah
1	2	3	4	5	6
SPORC	842				
POLHUT	3,175	5,113	PPLH	152	973
PPNS	1,426		PPNS	96	320

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), merupakan institusi penting pada rantai nilai pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan P2SDM hadir sebagai supporting system dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi Kementerian LHK maupun instansi di tingkat pemerintah daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika pembangunan LHK.

Upaya peningkatan kualitas SDM LHK dalam mendukung keberhasilan pembangunan LHK harus dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang panjang dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Rantai nilai pengembangan SDM dimulai dari perencanaan pengembangan SDM yang matang, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan pengembangan generasi lingkungan.

Penyuluhan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jumlah tenaga penyuluh kehutanan saat ini ada 3.892 orang yang terdiri atas 19 orang penyuluh pusat (BP2SDM), 3.636 orang penyuluh daerah, dan 237 penyuluh lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE). Kegiatan penyuluhan LHK meliputi peningkatan kelas kelompok tani hutan (KTH) dari pemula menjadi madya, pembentukan lembaga pemagangan LP2UKS, fasilitasi pos penyuluhan kehutanan desa, pemberdayaan masyarakat desa konservasi, dan fasilitasi pembentukan koperasi KTH.

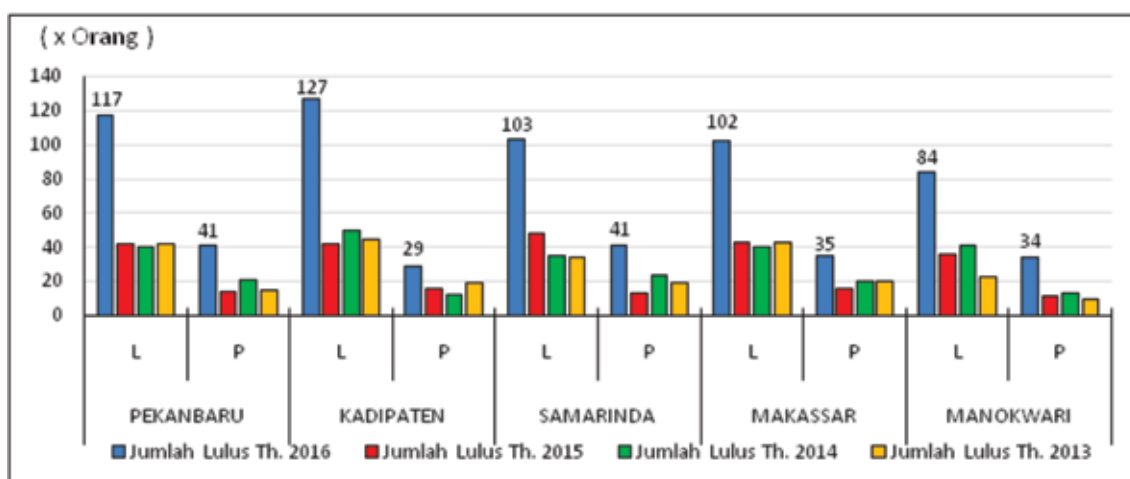
Semakin meningkatnya kebutuhan jumlah SDM yang kompeten di bidang LHK dalam mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak, telah diisi melalui Program Bakti Rimawan. Pemenuhan SDM secara kualitas dan kuantitas menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan LHK.

Penyelenggaraan kediklatan SDM LHK dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia. Penyelenggaraan kediklatan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pada tahun 2016, telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sejumlah 3.876 orang, meliputi Diklat Aparatur sejumlah 3.023 orang dan Diklat Non Aparatur sejumlah 853 orang.

Dalam upaya menciptakan tenaga teknis kehutanan tingkat menengah yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan siap untuk ditempatkan di lapangan, maka Kementerian LHK telah menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN).

Lulusan SMKKN dari tahun 2012 s.d. 2016 sebanyak 1.839 orang dan yang telah bekerja sebanyak 1.308 orang atau telah terserap 71%.

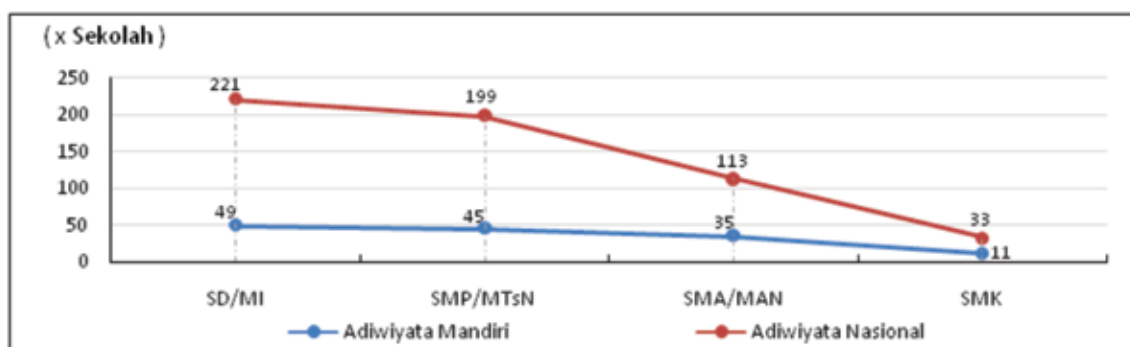
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM LHK. Penyelenggaraan kediklatan LHK dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.



Grafik 10.1. Rekapitulasi Lulusan Per- SMKKN Berdasarkan BDLHK Tahun 2016

Indonesia yang lebih lestari akan terwujud salah satunya dengan membentuk kader lingkungan. Pembentukan ini akan mewujudkan masyarakat yang cinta dan peduli lingkungan sehingga dapat berperan sebagai perintis, penyelamat, pengabdian dan pembina bagi masyarakat di sekitarnya agar peduli pada lingkungan dan berperan aktif dalam pelestarian alam.

Untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, dibentuk program adiwiyata yang bertujuan mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.



Grafik 10.2. Jumlah Sekolah Adiwiyata Menurut Tingkatan Tahun 2016

Tabel 10.1. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015 s/d 2016

No	Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)	
		2015 (Orang)	2016 (Orang)
1	2	3	4
1	Aceh	-	12
2	Sumatera Utara	1	1
3	Sumatera Barat	1	14
4	Riau	1	8
5	Kep. Riau	-	1
6	Jambi	-	8
7	Bangka Belitung	7	9
8	Sumatera Selatan	1	7
9	Bengkulu	1	2
10	Lampung	33	16
11	Banten	26	16
12	Jawa Barat	39	103
13	Jawa Tengah	29	34
14	Jawa Timur	44	66
15	DI Yogyakarta	29	22
16	Kalimantan Barat	5	8
17	Kalimantan Tengah	10	4
18	Kalimantan Selatan	13	12
19	Sulawesi Utara	1	15
20	Sulawesi Tengah	-	7
21	Sulawesi Selatan	59	15
22	Sulawesi Tenggara	13	18
23	Sulawesi Barat	1	11
24	Gorontalo	-	17
25	Maluku	6	4
26	Maluku Utara	-	9
27	Bali	18	9
28	NTB	7	12
29	NTT	-	11
30	Papua	-	3
Jumlah		345	474

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Tabel 10.2. Jumlah Penyuluh yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Penyuluh		
		Pegawai Negeri Sipil (Orang)	Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) (Orang)	Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) (Orang)
1	2	3	4	5
1	Aceh	54	101	1
2	Sumatera Utara	77	14	40
3	Sumatera Barat	70	47	-
4	Riau	37	98	29
5	Jambi	38	23	64
6	Sumatera Selatan	75	84	69
7	Bangka Belitung	30	5	-
8	Bengkulu	67	174	-
9	Kep. Riau	3	-	-
10	Lampung	157	55	3
11	Banten	39	79	2
12	DKI Jakarta	-	-	9
13	Jawa Barat	342	721	18
14	Jawa Tengah	580	215	16
15	D.I.Yogyakarta	51	5	5
16	Jawa Timur	475	274	16
17	Bali	91	132	-
18	NTB	146	92	-
19	NTT	104	2	-
20	Kalimantan Utara	17	-	-
21	Kalimantan Selatan	89	58	60
22	Kalimantan Tengah	49	17	2
23	Kalimantan Barat	41	110	64
24	Kalimantan Timur	52	1	10
25	Sulawesi Barat	41	104	-
26	Sulawesi Selatan	307	80	71
27	Sulawesi Utara	12	26	-
28	Sulawesi Tenggara	97	68	-
29	Sulawesi Tengah	58	108	-
30	Gorontalo	16	3	1
31	Maluku	46	1	31
32	Maluku Utara	58	3	-
33	Papua	34	2	-
34	Papua Barat	55	-	-
35	Pusat	261	-	-
Jumlah Tahun 2016		3,669	2,702	444
Jumlah Tahun 2015		3,892	5,115	69

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Tabel 10.3. Profesi yang Sudah Dilakukan Uji Kompetensi Tahun 2016

No	Provinsi	Peserta (Orang)	Profesi yang Sudah Dilakukan Uji Kompetensi										Jumlah	
			Polhut		Penyuluh Kehutanan		Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)		Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) / Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH)					
			Kompeten (K) (Orang)	Belum Kompeten (BK) (Orang)	Kompeten (K) (Orang)	Belum Kompeten (BK) (Orang)	Kompeten (K) (Orang)	Belum Kompeten (BK) (Orang)	Kompeten (K) (Orang)	Belum Kompeten (BK) (Orang)	Kompeten (K) (Orang)	Belum Kompeten (BK) (Orang)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Riau	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0		
2	DKI Jakarta	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0		
3	Jawa Barat	31	0	0	0	0	0	0	30	1	30	1		
4	Jawa Tengah	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0		
5	Kalimantan Timur	66	35	0	0	0	30	1	0	0	65	1		
6	Kalimantan Selatan	26	3	1	0	0	22	0	0	0	25	1		
7	Kalimantan Tengah	26	12	0	0	0	14	0	0	0	26	0		
8	Kalimantan Barat	73	44	0	1	0	28	0	0	0	73	0		
9	Sulawesi Selatan	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0		
10	Sulawesi Utara	24	10	1	1	0	12	0	0	0	23	1		
11	Sulawesi Tengah	41	17	1	0	0	23	0	0	0	40	1		
12	Sulawesi Tenggara	54	28	4	1	0	21	0	0	0	50	4		
13	Sulawesi Barat	64	17	0	2	0	45	0	0	0	64	0		
14	Gorontalo	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0		
15	Maluku	29	7	0	0	0	22	0	0	0	29	0		
16	Maluku Utara	17	6	0	0	0	11	0	0	0	17	0		
17	Papua	56	43	1	2	0	11	0	0	0	55	1		
18	Papua Barat	33	22	0	1	0	10	0	0	0	33	0		
Jumlah Tahun 2016		634	266	8	40	0	260	1	58	1	624	10		
Jumlah Tahun 2015		1181	381	21	226	29	-	-	465	59	1072	109		

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Tabel 10.4. Jumlah Bakti Rimbawan Tahun 2014 s/d 2016

No	Provinsi	Instansi Penempatan	Jumlah Bakti Rimbawan		
			2014 (Orang)	2015 (Orang)	2016 (Orang)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	KPHK, KPHL	-	20	39
2	Sumatera Utara	KPHK, KPHL, KPHP, BDLHK, KHDTK	2	41	15
3	Sumatera Barat	KPHK, KPHL	4	59	16
4	Riau	KPHK, KPHL, KPHP	7	52	24
5	Kep. Riau	KPHL	-	12	-
6	Jambi	KPHK, KPHL, KPHP	3	28	19
7	Sumatera Selatan	KPHK, KPHL, KPHP, KHDTK	1	65	42
8	Bangka Belitung	KPHP	-	20	19
9	Bengkulu	KPHK, KPHL, KPHP	1	30	14
10	Lampung	KPHL, KPHP	10	83	12
11	Banten	KPHK	-	5	3
12	DKI Jakarta	KPHK	-	-	3
13	Jawa Barat	KPHK	-	6	6
14	Jawa Tengah	KPHK	-	-	6
15	D.I.Yogyakarta	KPHK, KPHP	4	16	7
16	Jawa Timur	KPHK	-	-	6
17	Bali	KPHK, KPHL	8	37	11
18	NTB	KPHK, KPHL, KPHP	10	108	36
19	NTT	KPHK, KPHL, KPHP	1	43	37
20	Kalimantan Utara	KPHL	-	-	3
21	Kalimantan Selatan	KPHK, KPHL, KPHP	3	49	25
22	Kalimantan Tengah	KPHK, KPHL, KPHP	2	57	21
23	Kalimantan Barat	KPHK, KPHP	4	26	19
24	Kalimantan Timur	KPHK, KPHL, KPHP	4	62	20
25	Sulawesi Barat	KPHL, KPHP	11	55	22
26	Sulawesi Selatan	KPHK, KPHL, KPHP, BDLHK	7	64	26
27	Sulawesi Utara	KPHK, KPHL, KPHP	2	10	10
28	Sulawesi Tenggara	KPHK, KPHL, KPHP	4	62	38
29	Sulawesi Tengah	KPHK, KPHP	4	69	33
30	Gorontalo	KPHL, KPHP	3	39	14
31	Maluku	KPHK, KPHP	-	29	7
32	Maluku Utara	KPHP	-	30	5
33	Papua	KPHK, KPHL, KPHP	2	36	22
34	Papua Barat	KPHK, KPHL, KPHP	2	28	20
Jumlah			99	1,241	600

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Tabel 10.5. Rekapitulasi Diklat Aparatur dan Non Aparatur pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Tahun 2016

No	Instansi	Uraian Jenis Diklat	Peserta Diklat			Jumlah (Orang)
			L (Orang)	P (Orang)		
1	2	3	4	5	6	
1.	Pusdiklat SDM LHK	DIKLAT APARATUR				
		1 Diklat Pra Jabatan Golongan III	217	224		441
		2 Diklat Kepemimpinan Tk. II	11	4		15
		3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV	21	9		30
		4 Penilaian AMDAL	19	11		30
		5 ECSCS Test Preparation	36	24		60
		6 Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV	23	7		30
		7 Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Madya	14	16		30
		DIKLAT NON APARATUR				
		8 Diklat Kerjasama	208	45		253
2.	BDLHK Bogor	DIKLAT APARATUR				
		1 Aplikasi GPS Bagi Polhut	30	-		30
		2 Teknis Peta dan Bagi Penyuluh	26	4		30
		3 Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	24	6		30
		4 Pengelolaan Kolaborasi Kawasan Hutan	29	1		30
		5 Dasar-dasar AMDAL	17	18		35
		6 Pengendalian Pencemaran Air	15	20		35
		7 Penilaian AMDAL	15	16		31
		8 Komunikasi Interpersonal	22	8		30
		9 Pembentukan PEH Tk. Ahli	23	7		30
		10 Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	17	19		36
		11 Pendamping KTH	44	16		60
		DIKLAT NON APARATUR				
		12 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Bakti Rimbawan	159	91		250
3.	BDLHK Kadipaten	DIKLAT APARATUR				
		1 Penggunaan GPS dan Aplikasinya	25	5		30
		2 Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	24	6		30
		3 Budidaya Lebah Madu	22	8		30
		4 Pembuatan Rancangan Agroforestry	27	3		30
		5 Pengelolaan Hutan Mangrove	22	8		30
		6 Pembuatan Bokashi	30	-		30
		7 Pencegahan Kebakaran Hutan	26	4		30
		8 Teknis Penulisan Karya Ilmiah	20	10		30
		9 Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil ke Penyuluh Kehutanan Ahli	25	5		30
		10 Pendamping KTH (Diklat Pembuatan Bokasi)	24	6		30
		11 Pendamping KTH (Diklat Budidaya Tanaman dibawah Tegakan)	24	6		30

No	Instansi	Uraian Jenis Diklat	Peserta Diklat		
			L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2		4	5	6
			21	9	30
4.	BDLHK Pekanbaru	12 Pendamping KTH (Diklat Pendamping Masyarakat)			
		DIKLAT APARATUR			
		1 SIG Bagi Operator	24	6	30
		2 Pendamping SVLK Bagi Penyuluh	26	6	32
		3 Fasilitator Hutan Tanaman Rakyat	30	-	30
		4 Bina Cinta Alam	26	4	30
		5 Pelatihan kelompok Pencegah Kebakaran Lahan dan Hutan	30	-	30
		6 Valuasi Kawasan Hutan	21	9	30
		7 Analisis Stake Holder	26	2	28
		8 Pemetaan Konflik	30	-	30
		9 Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	16	14	30
		10 Pendamping KTH	25	5	30
		11 Pendamping KTH (Budidaya Bambu)	23	7	30
		DIKLAT NON APARATUR			
		12 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	50	10	60
5.	BDLHK Pematang Siantar	DIKLAT APARATUR			
		1 Aplikasi GPS Bagi Polhut	23	1	24
		2 SIG Bagi Operator	28	2	30
		3 SVLK Bagi Pendamping Lapangan	25	5	30
		4 Teknik Budidaya Kemenyan	30	-	30
		5 Teknis Pembuatan Kompos dan Bokashi	25	5	30
		6 Dasar-dasar Lingkungan bagi Guru	18	12	30
		7 Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan	30	-	30
		8 Manajemen Konflik	27	3	30
		9 Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	19	17	36
		10 Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan/KTH	28	2	30
		11 Teknik Budidaya Jamur Kayu/Tiram bagi KTH	29	1	30
		DIKLAT NON APARATUR			
		12 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	23	7	30
6.	BDLHK Samarinda	DIKLAT APARATUR			
		1 Aplikasi GPS untuk Survey Pemetaan	20	10	30
		2 Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	30	-	30
		3 Teknis Perpetaan Bagi Penyuluh	20	10	30
		4 Teknik Pengerangan dan Pengawetan Kayu	30	-	30
		5 Pengelolaan Hutan	27	3	30
		6 Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	30	-	30
		7 Diklat Masyarakat Peduli Api	30	-	30
		8 Desiminasi Diklat Lingkungan Bagi Guru, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Pegawai Daerah	21	9	30
		9 Perjenjangan Penyuluh Kehutanan Ahli Jenjang Muda	13	17	30

No	Instansi	Uraian Jenis Diklat	Peserta Diklat		
			L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5	6
		10 Pembuatan Kebun Bibit rakyat Bagi KTH	26	5	31
		11 Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH)	27	2	29
		DIKLAT NON APARATUR			
		12 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	52	28	80
7.	BDLHK Makassar	DIKLAT APARATUR			
		1 Penggunaan GPS dan Aplikasinya	16	4	20
		2 Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator	15	5	20
		3 Sistem Informasi Geografis (SIG) Analis	17	6	23
		4 Teknik Pembibitan Tanaman Hutan Bagi KPH	26	4	30
		5 Pencegahan Kebakaran Hutan	28	2	30
		6 Pemberkasan Perkaratan Bagi Polhut	30	-	30
		7 Pemandu Wisata Alam	27	-	27
		8 Dasar-dasar AMDAL	20	10	30
		9 Penilaian AMDAL	18	12	30
		10 Pemetaan Konflik	23	7	30
		11 Penulisan Karya Tulis Ilmiah	19	11	30
		12 Pembentukan PEH Tingkat Ahli	20	10	30
		13 Pendamping KTH (Diklat Pendamping Masyarakat)	32	28	60
		DIKLAT NON APARATUR			
		14 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	73	47	120
8.	BDLHK Kupang	DIKLAT APARATUR			
		1 Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator	26	4	30
		2 PUHH Bagi Polhut	28	2	30
		3 Survey Sosial Ekonomi Kehutanan	24	6	30
		4 Pejabat Penerbit SKAU	29	1	30
		5 Teknik Budidaya Cendana	25	5	30
		6 Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan	30	-	30
		7 Pemetaan Konflik	25	5	30
		8 Alih Tingkat Polhut Terampil ke Ahli	29	1	30
		9 Wanatani Konservasi	26	4	30
		DIKLAT NON APARATUR			
		10 Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	43	17	60
		Jumlah Peserta Diklat Tahun 2016	2,867	1,009	3,876
		Jumlah Peserta Diklat Tahun 2015	7,791	1,866	9,657

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPZSDM) 2016

Tabel 10.6. Jumlah Karyasiswa Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 s/d 2016

		Jumlah Karyasiswa Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin														
No	Program Studi	2012			2013			2014			2015			2016		
		L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	S-2 - Dalam Negeri	78	38	116	90	50	140	79	43	122	73	26	99	69	35	104
2.	- Luar Negeri	11	6	17	6	10	16	8	4	12	10	4	14	16	7	23
3.	S-3 - Dalam Negeri	8	5	13	7	2	9	7	1	8	8	5	13	10	5	15
4.	- Luar Negeri	4	4	8	3	3	6	2	1	3	1	1	2	0	3	3
Jumlah Lulusan		36	53	154	106	65	171	96	49	145	92	36	128	95	50	145

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Tabel 10.7. Rekapitulasi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) s/d Tahun 2016

Lulusan SMKKN														
No	Uraian	Pekanbaru		Kadipaten		Samarinda		Makassar		Manokwari		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
		(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Jumlah Lulus Th. 2012	41	15	45	18	45	18	40	20	27	10	198	81	279
2.	Jumlah Lulus Th. 2013	42	15	45	19	34	19	43	20	23	10	187	83	270
3.	Jumlah Lulus Th. 2014	40	21	50	12	35	24	40	20	41	13	206	90	296
4.	Jumlah Lulus Th. 2015	42	14	42	16	48	13	43	16	36	11	211	70	281
5.	Jumlah Lulus Th. 2016	117	41	127	29	103	41	102	35	84	34	533	180	713
	Jumlah Lulusan s/d Th. 2016	282	106	309	94	265	115	268	111	211	78	1,335	504	1,839
	Jumlah yang telah bekerja	315		306		256		282		149			1,308	71%

Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

Keterangan :

L : Laki-Laki

P : Perempuan

Tabel 10.8. Jumlah Sekolah Adiwiyata Menurut Tingkatan Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Sekolah Adiwiyata Menurut Tingkatan								Jumlah
		Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah		Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah Negeri (MAN)		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
		Adiwiyata Mandiri (AM)	Adiwiyata Nasional (AN)	Adiwiyata Mandiri (AM)	Adiwiyata Nasional (AN)	Adiwiyata Mandiri (AM)	Adiwiyata Nasional (AN)	Adiwiyata Mandiri (AM)	Adiwiyata Nasional (AN)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	2	-	2	3	2	-	-	2	11
2	Sumatera Utara	4	7	5	8	6	3	2	2	37
3	Sumatera Barat	5	9	3	6	-	5	1	-	29
4	Riau	2	15	1	10	2	6	-	2	38
5	Jambi	-	2	1	2	-	1	-	-	6
6	Sumatera Selatan	-	1	-	3	1	1	-	1	7
7	Bangka Belitung	-	9	1	5	-	-	-	1	16
8	Bengkulu	-	1	-	1	2	1	-	-	5
9	Kep. Riau	-	-	-	1	-	1	-	-	2
10	Lampung	-	6		1	-	-	-	-	7
11	Banten	3	4	2	8	1	4	-	-	22
12	DKI Jakarta	3	2	1	6	2	4	-	-	18
13	Jawa Barat	1	7	3	7	5	5	-	1	29
14	Jawa Tengah	1	20	2	26	3	16	1	6	75
15	D.I.Yogyakarta	-	3	1	3	-	3	-	-	10
16	Jawa Timur	6	38	10	50	8	17	3	10	142
17	Bali	-	5	-	4	-	5	-	-	14
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	NTT	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20	Kalimantan Utara	1	5	1	3	-	1	-	1	12
21	Kalimantan Selatan	3	19	-	9	-	5	-	-	36
22	Kalimantan Tengah	1	7	-	3	1	7	2	2	23
23	Kalimantan Barat	2	2	-	3	-	-	-	-	7
24	Kalimantan Timur	7	19	5	8	-	4	1	1	45
25	Sulawesi Barat	-	1	-	2	-	4		1	8
26	Sulawesi Selatan	4	23	4	18	1	10	1	2	63
27	Sulawesi Utara	-	1	-	1	-	-	-	-	2
28	Sulawesi Tenggara	1	5	1	1	-	1	-	-	9
29	Sulawesi Tengah	1	2	-	-	-	2	-	-	5
30	Gorontalo	1	7	1	3	1	3	-	1	17
31	Maluku	-	1	-	-	-	1	-	-	2
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	Papua	1	-	1	4	-	2	-	-	8
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		49	221	45	199	35	113	11	33	706

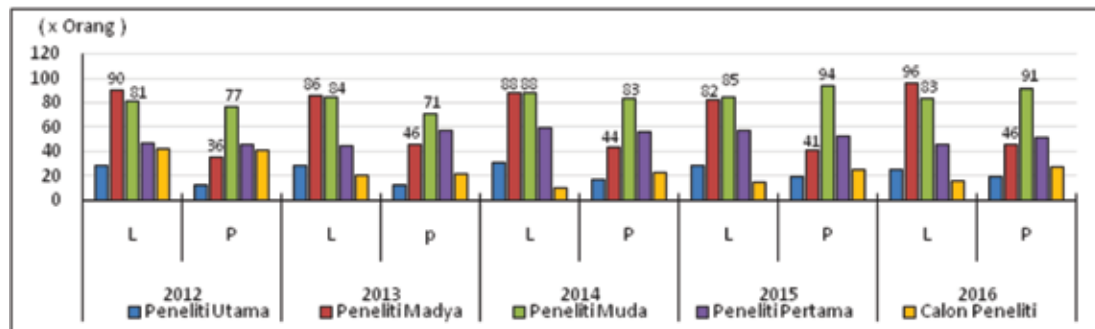
Sumber : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) 2016

11

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi



Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) merupakan institusi pendukung unit Eselon I lingkup Kementerian LHK dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan LHK dengan sasaran program yang harus dicapai yaitu tersedianya IPTEK bidang LHK yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BLI didukung oleh tenaga fungsional peneliti sebagaimana tersaji pada grafik berikut:



Grafik 11.1. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti BLI Tahun 2012-2016

Berdasarkan kebijakan baru yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, arah kebijakan (BLI) mengalami perubahan mendasar pada struktur kegiatan (sasaran kegiatan). Strategi yang digunakan agar arah kebijakan BLI dapat sesuai dan konsisten antara lain melalui penyusunan Rencana Penelitian dan Pengembangan Integratif (RPPI) selama lima tahun dengan focus pada aspek hulu hilir, melaksanakan kegiatan pengembangan melalui Piloting IPTEK serta melaksanakan penelitian unggulan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah.

Pada periode Renstra 2015-2019, program BLI didukung oleh lima kegiatan dan satu dukungan manajemen yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan;
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan;
3. Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
4. Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim;
5. Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang di daerah; dan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, BLI berinovasi melaksanakan kerjasama dengan para pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pencapaian program BLI serta pengelolaan sumber daya pendukung seperti Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan publikasi baik yang bersifat ilmiah maupun populer dilaksanakan BLI untuk menyebarluaskan hasil-hasil IPTEK antara lain dalam bentuk jurnal, *policy brief*, pameran, alih teknologi, dan website.

Tabel 11.1. Kegiatan Litbang, Pilot IPTEK dan Tematik Unggulan Daerah Berdasarkan Program Tahun 2016

No.	Kegiatan	Kegiatan dan Hasil Penelitian Berdasarkan Program	Jumlah
1	2	3	4
1	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	1 Konservasi Keanekaragaman Hayat	32
		2 Konservasi Sumber Daya Air	16
		3 Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	35
		4 Sumber Pangan Alternatif	11
		5 Sumber Energi Alternatif	10
		6 Obat-obatan Alternatif Tanaman Hutan	14
2	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	Jumlah	118
		7 Revitalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Pasca Panen untuk Energi, Pangan dan Obat-obatan Alternatif dari Hutan	8
		8 Pengolahan Hasil Hutan	6
		9 Keteknikan Hutan	1
3	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah	15
		10 Kualitas Lingkungan untuk IKLH dan ISTV	8
		11 Kualitas Lingkungan untuk IPE	1
		12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	1
		Jumlah	10
4	Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim	13 Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik Kawasan Hutan	13
		14 Keekonomian dan Daya Saing Industri serta Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutana	7
		15 Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
		Jumlah	26
		1 Aplikasi Iptek untuk pengembangan inokulan gaharu dan minyak gaharu hasil budiday	27
5	Pengembangan	2 Pengelolaan Sampah dengan Model 3 In 1 untuk Nano Fertilizer dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan	
		3 Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produktivitas tanaman	
		4 Pengembangan alat pengolah bio etanol	
		5 Pengembangan penerapan teknologi pelengkungan kayu untuk peningkatan nilai tambah dan efisiensi bahan baku	
		6 Pengembangan alat ukur diameter wesyau generasi 2	
		7 Evaluasi pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia	
		8 Pengembangan Wood Pellet	
		9 Pengembangan Klon Sukun Unggulan	
		10 Pengembangan Kultur Jaringan dan Hutan Rakyat	
		11 Pengembangan Tanaman Unggul untuk Bahan Baku Kayu Energi	
		12 Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan Bukan Kayu Jernang (Daemonorops spp) dan Kapur (Dryobalanops aromatic) melalui pengembangan bibit unguu	
		13 Pengembangan Plot Sumber Benih Jenis Tanaman Kulim	
		14 Pengembangan Plot Sumber Benih Jenis Gelam	

No.	Kegiatan	Kegiatan dan Hasil Penelitian Berdasarkan Program	Jumlah
1	2	3	4
6	Pilot IPTEK	15 Pengembangan teknologi restorasi untuk konservasi jenis-jenis flora langka dan unggulan hutan rawa gambut di Sumatera Selatan	
		16 Pengembangan tanaman gaharu sebagai komoditas bisnis KPI	
		17 Peningkatan Produktivitas Kayu Pertukangan sebagai komoditas usaha di KPI	
		18 Pengembangan Taman Unggulan Hasil Pemuliaan di KHDTK	
		19 Pengelolaan DAS Mikro di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur, DAS Bengawan Solo	
		20 Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Telaga Warna Telaga Pengilon Melalui Penanaman Flora Pegunungan	
		21 Penanaman Murbei Unggul dan Hibrid Ulat Sutra	
		22 Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Sebagai Media Tumbuh Jamur Tiram Putih	
		23 Pengembangan Demplot Kebun Benih dan Konservasi Eboni (Diospyros Spp.	
		24 Breeding Center of Anoa	
		25 Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Urban Farming	
		26 Mikrohidro untuk Menggaitkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan dan Pengembangan Usaha Produktif Desa Hutan (RPPI 2)	
7	Penelitian Tematik Unggulan Daerah	27 Model Pengelolaan Sumberdaya Air Mandiri Berbasis Desa (PAM-BD) (RPPI 2	
		1 Penguatan Kelembagaan dan Perangkat Hukum KPH Yogyakarta	8
		2 Pengembangan Kayu Putih di KPH Blak Numfor	
		3 Penerapan Teknologi Persuteraan Alam di KPH Boalemo dan KPH Yogyakarta	
		4 Penerapan teknologi budidaya dan pemanfaatan rotan jernang di KPH Boalemo	
		5 Penerapan teknologi budidaya dan pemanfaatan bambu	
		6 Penerapan Iptek Koffco di KPH Tasik Besar Serkar	
		7 Penerapan Iptek untuk mendorong terbentuknya KPH di Kubu Raya	
		8 Teknologi Pemanfaatan Jamur di KPHP Unit VI Lakitar	
		1 Konservasi Jenis-jenis Unggulan Daerah	9
		2 Strategi Pengelolaan Kawasan dan Peningkatan Nilai Ekonomi Pengolahan Madu Lebah Hutan Sumbaw	
		3 Kajian Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Wilayah Tertentu (Wisata Alam) di KPHL Rinjani Barat	
		4 Kesesuaian Habitat dan Resolusi Konflik Orangutan (Pongo abelii Lesson) di Taman Nasional Bukit Tigapuluh	
		5 Model Pengelolaan Hutan Rawa Gambut Beresiko Kecil Kebakaran	
		6 Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam Pulau Perbatasan Bersama Masyarakat	
		7 Identifikasi Penyebab Banjir di Kota Manado (DAS Tondano	
		8 Model Pengelolaan Jasing Air, Kearifanragaman Hayati Satwa Liar dan Wisata Alam di TN Babul (RPPI 1	
		9 Model Pengelolaan Persuteraan Alam (RPPI 3)	
		Jumlah Penelitian	178
		Jumlah Pengembangan	27
		Pilot Ipdek	8
		Jumlah Kegiatan Litbang dan Pilot IPTEK	213

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Tabel 11.2. Hasil-Hasil Penemuan Badan Litbang dan Inovasi yang Sudah/Dalam Proses Untuk Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No.	Hak Kekayaan Intelektual	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
A	Hak Paten					
	1	0	0	0	0	0
	2	7	3	3	1	6
	3	0	0	0	0	0
	4	4	0	0	0	0
	5	1	0	1	1	1
	6	0	11	3	6	6
	7	3	4	14	13	12
	8	1	0	0	1	2
	9	4	5	5	5	6
	Jumlah A	20	23	26	27	33
B	Hak Cipta					
	1	0	0	0	0	0
	2	0	0	6	0	12
	3	7	2	1	5	9
	Jumlah B	7	2	7	5	21
C	PVT					
	1	0	0	0	0	12
	2	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0
	Jumlah C	0	0	0	0	12
	Total	27	25	33	32	66

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Tabel 11.3. Publikasi Ilmiah Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2012 - 2016

No.	Jenis Publikasi	Jumlah / Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jurnal Ilmiah	32	34	37	31	31
2	Abstrac/Bibliografi	2	2	2	2	0
3	Prosiding	31	27	29	19	12
4	Semi Populer	40	43	57	21	29
5	Populer	24	26	29	30	27
6	Buku	33	33	62	46	49

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Tabel 11.4. Daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2012 - 2016

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah Kegiatan Penelitian / Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2,038.50	18	15	8	5	2
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1,027.00	8	7	3	3	2
5	Jambi	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	4,736.78	10	6	16	16	22
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	198.20	21	43	39	11	77
13	Jawa Tengah	1,595.60	14	41	20	34	23
14	D.I. Yogyakarta	122.90	2	26	22	22	22
15	Jawa Timur	45.00	1	12	16	22	8
16	Banten	3,000.00	1	6	3	7	6
17	Bali	157.70	2	2	6	6	5
18	Nusa Tenggara Barat	325.87	4	14	11	11	3
19	Nusa Tenggara Timur	509.42	8	8	10	8	5
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	5,630.10	6	20	12	12	6
22	Kalimantan Selatan	2,630.00	41	46	11	15	24
23	Kalimantan Timur	14,423.70	45	29	15	15	20
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1,018.00	19	19	13	13	10
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
		37,458.77	200	294	205	200	235

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Tabel 11.5. Rekapitulasi Sumber Benih Yang Sudah Bersertifikasi s.d. Tahun 2016

No.	Unit Kerja	Jenis Sumber Benih	Luas (Ha)	Klasifikasi	Tahun Sertifikasi	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	B2P2BPTH	<i>Eucalyptus pellita</i> Generasi Kesatu (F1)	2.39	KBS	2010	KHDTK Wonogiri
		<i>Eucalyptus pellita</i> Generasi Kedua (F2)	1.02	KBS	2012	KHDTK Wonogiri
		<i>Acacia Mangium</i> Generasi Kesatu (F1)	3.33	KBS	2010	KHDTK Wonogiri
		<i>Acacia mangium</i> Generasi Kedua (F2)	0.80	KBS	2012	KHDTK Wonogiri
		<i>Acacia auriculiformis</i> Generasi Kesatu (F1)	2.11	KBS	2011	KHDTK Wonogiri
2	B2P2EHD	Meranti (<i>Shorea</i> spp)	30.00	TBS	2011	KHDTK Labanan
		Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp.)	25.00	TBS	2012	KHDTK Labanan
3	BP2LHK Palembang	Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	11.00	TBT	2009	KHDTK Benakat
		Tembesu (<i>Fagrae Fragrans</i>)	5.00	TBT	2015	KHDTK Benakat
4	BP2TPTH	Mangium (<i>Acacia mangium</i>)	2.00	APB	2011	HP Parung Panjang
5	BP2TA	Hopea (<i>Hopea mengarawan</i>)	1.66	TBT	2010	Ciamis
		Meranti merah (<i>Shorea ovalis</i>)	1.83	TBT	2010	Ciamis
6	BP2THHBK	Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	5.00	TBT	2010	KHDTK Rarung
		Rajumas (<i>Duabanga mollucana</i>)	5.00	TBT	2010	KHDTK Rarung
		Klicung (<i>Duospysos malabarica</i>)	1.84	TBT	2010	KHDTK Rarung
		Klokos (<i>Eugenia polyantha</i>)	0.62	TBT	2010	KHDTK Rarung
		Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>)	0.23	TBT	2011	KHDTK Rarung
7	BP2LHK Kupang	Cendana (<i>Santalum album</i> L.)	4.09	APB	2011	Desa Netpala dan Oelbobok, Kab. TTS
		Ampupu (<i>Eucalyptus urophylla</i>)	24.39	APB	2011	Desa Bu'at, Mollo Selatan, Kab. TTS.
		Kayu Merah (<i>Pterocarpus indicus</i>)	100.19	TBT	2011	Desa Benlutu & Biloto, Kab. TTS.
8	BP2LHK Banjarbaru	Jelutung rawa (<i>Dyera polyphylla</i> Mic Steenis)	100.00	TBT	2012	Petak Bukit, Palangkaraya
		Jelutung rawa (<i>Dyera polyphylla</i> Mic Steenis)	0.50	TBT	2012	Petak Bukit, Palangkaraya
		Jelutung rawa (<i>Dyera polyphylla</i> Mic Steenis)	50.00	TBT	2012	Petak Bukit, Palangkaraya
		Ketapi (<i>Sandoricum koetjape</i>)	0.25	TBT	2013	KHDTK Riam Kiwa
		Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	2.00	TBT	2013	KHDTK Riam Kiwa
		Jingah (<i>Gluta reinghas</i>)	0.25	TBT	2013	KHDTK Riam Kiwa
		Pulai (<i>Alstonia angustiloba</i>)	2.00	TBT	2013	KHDTK Riam Kiwa
		Belangeran (<i>Shorea balangeran</i>)	30.00	TBT	2013	Mesuji Kapuas
9	BP2TKSDA	Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>)	30.00	TBS	2012	KHDTK Samboja
		Keruing (<i>Dipterocarpus humeratus</i>)	20.00	TBT	2013	KHDTK Samboja
		Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>)	5.00	TBT	2013	KHDTK Samboja
		Kapur (<i>Dryobalanops lanceolata</i>)	5.00	TBT	2013	KHDTK Samboja
10	BP2LHK	Cempaka (<i>Magnolia elegans</i>)	6.25	TBT	2011	Minahasa Selatan
		Mangrove	15.00	TBT	2012	Minahasa Utara
11	BP2LHK Manokwari	Merbau (<i>Instia</i> sp)	87.04	TBT	2010	PT. Memberamo Alas Mandiri Kab. Memberamo Raya,

Keterangan : KBS = Kebun Benih Semai

TBS = Tegakan Benih Terseleksi

TBT = Tegakan Benih Teridentifikasi

APB = Areal Produksi Benih

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

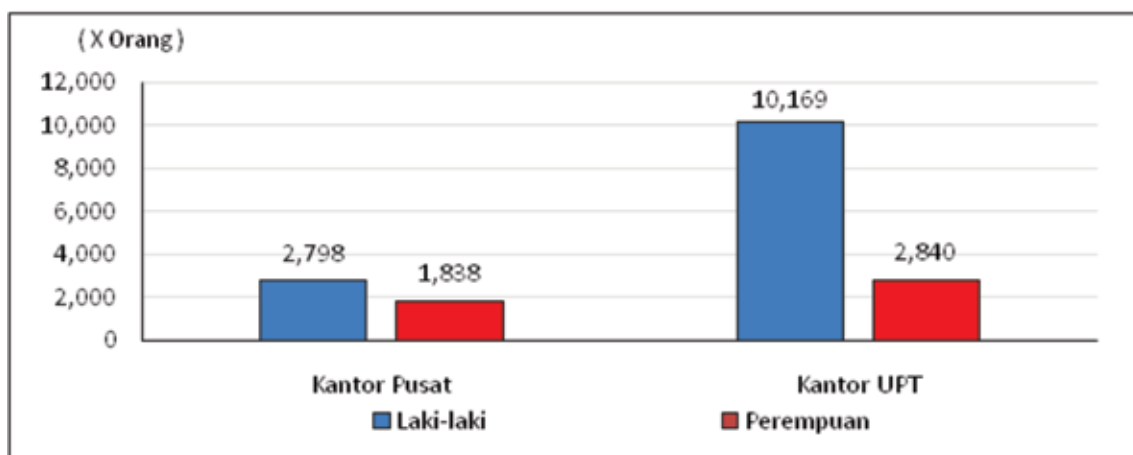
12

Kesekretariatan



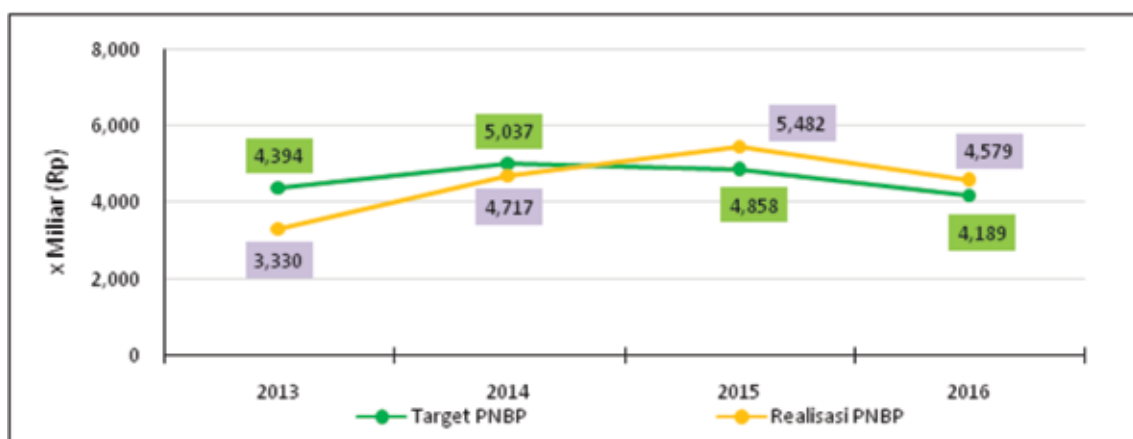
Berlandaskan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-II/2015 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Kementerian LHK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian LHK tahun 2016 didukung oleh 17.645 orang PNS, 4.636 orang merupakan PNS di kantor pusat dan 13.009 orang PNS lainnya merupakan PNS di kantor Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Grafik 12.1. Distribusi PNS Kementerian LHK

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016 Kementerian LHK adalah sejumlah Rp4.579.425.534.739,28 atau 109,32% dari target PNBP yang ditetapkan.



Grafik 12.2. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 - 2016

Sesuai neraca nilai barang milik negara diketahui bahwa pada tahun 2016 nilai asset Kementerian LHK mengalami penyusutan dari tahun sebelumnya yang semula Rp5.603.082.067.096,00 menjadi Rp5.540.171.639.611,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,14%.

Tabel 12.1. Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Tahun 2016

No	Unit Kerja	Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
		Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah			
		L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Total (Orang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Kantor Pusat												
	1 Pusat-Pusat	57	38	164	122	45	21	8	0	274	274	548	
	2 Sekretariat Jenderal	65	37	237	164	102	22	16	0	420	420	840	
	3 Inspektorat Jenderal	38	10	110	53	25	16	3	0	176	176	352	
	4 Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	41	26	196	136	27	20	3	0	267	267	534	
	5 Ditjen. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34	31	143	132	40	18	0	0	217	217	434	
	6 Ditjen. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	37	17	86	80	4	4	1	0	128	128	256	
	7 Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	49	13	153	85	15	5	0	0	217	217	434	
	8 Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	36	17	72	62	33	9	2	0	143	143	286	
	9 Ditjen. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	22	31	60	61	22	12	3	0	107	107	214	
	10 Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim	27	18	74	59	19	5	1	0	121	121	242	
	11 Ditjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	24	20	62	45	10	10	0	0	96	96	192	
	12 Ditjen. Penegakan Hukum LHK	28	10	67	49	17	7	1	0	113	113	226	
	13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	53	20	102	96	29	17	1	0	185	185	370	
	14 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi LHK	82	63	162	154	78	22	12	1	334	335	669	
	Jumlah I	593	351	1.688	1.298	466	188	51	1	2.798	1.838	4.636	
II	Unit Pelaksana Teknis												
	1 Balai PKH [22]	35	14	543	210	181	69	5	0	764	293	1.057	
	2 Balai KSDA [18]	27	11	767	299	545	81	61	1	1.400	392	1.792	
	3 Balai TN [40]	61	5	1.467	288	759	102	17	1	2.304	396	2.700	
	4 Balai Besar KSDA [8]	37	12	651	221	321	48	16	2	1.025	283	1.308	
	5 Balai Besar TN [8]	37	11	508	101	261	34	17	0	823	146	969	
	6 Balai PDASHL [34]	57	25	902	400	255	43	13	0	1.227	468	1.695	
	7 Balai PTH [2]	3	2	45	20	9	4	0	0	57	26	83	
	8 Balai PHP [16]	37	7	306	144	66	23	2	0	411	174	585	
	9 Balai PPI Karhut [5]	10	2	64	25	29	14	0	1	103	42	145	
	10 Balai PSKL [5]	9	0	96	40	40	4	3	0	148	44	192	
	11 Balai Pangakkum LHK [5]	22	2	530	23	83	8	1	0	636	33	669	
	12 SMK Kehutanan [5]	11	2	85	67	46	22	3	2	145	93	238	
	13 Balai Diklat LHK [7]	62	24	171	71	122	28	21	1	376	124	500	
	14 Balai Litbang [13]	67	29	377	174	143	44	24	1	611	248	859	
	15 Balai Besar Litbang [2]	24	15	66	57	44	6	5	0	139	78	217	
	Jumlah II	499	161	6.578	2.140	2.904	530	188	9	10.169	2.840	13.009	
	Jumlah Seluruhnya	1.092	512	8.266	3.438	3.370	718	239	10	12.967	4.678	17.645	

Sumber : Biro Kepagawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 12.2. Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Tahun 2016

No	Unit Kerja	Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																			
		S3				S2				ST/D4				SLTA				SLTP			
		L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I	Kantor Pusat																				
	1 Pusat-Pusat	6	1	63	46	132	102	14	22	51	10	3	0	5	0	274	181	455			
	2 Sekretariat Jenderal	7	1	68	44	115	90	36	28	160	60	20	0	14	0	420	223	643			
	3 Inspektorat Jenderal	0	1	47	18	85	34	15	13	22	13	2	0	5	0	176	79	255			
	4 Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4	3	51	35	102	83	17	25	84	34	4	2	5	0	267	182	449			
	5 Ditjen. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	4	0	59	49	66	64	20	24	58	41	5	2	5	1	217	181	398			
	6 Ditjen. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	5	1	50	23	46	48	2	8	21	21	1	0	3	0	128	101	229			
	7 Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5	0	68	24	88	53	16	10	35	16	1	0	4	0	217	103	320			
	8 Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2	0	27	18	65	46	7	9	33	14	4	0	5	1	143	88	231			
	9 Ditjen. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	1	2	17	37	53	46	0	5	29	14	4	0	3	0	107	104	211			
	10 Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim	5	2	34	30	49	35	4	1	27	14	1	0	1	0	121	82	203			
	11 Ditjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	4	1	29	22	38	31	1	12	21	9	2	0	1	0	96	75	171			
	12 Ditjen. Penegakan Hukum LHK	0	0	32	14	54	39	5	5	18	8	2	0	2	0	113	66	179			
	13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	9	6	57	13	51	75	14	20	46	16	4	1	4	2	185	133	318			
	14 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi LHK	25	17	70	74	75	90	7	14	133	43	6	1	18	1	334	240	574			
	Jumlah I	77	35	672	447	1.019	836	158	196	738	313	59	6	75	5	2.798	1.838	4.636			
II	Unit Pelaksana Teknis																				
	1 Balai PKH [22]	1	0	82	30	253	101	68	61	347	101	6	0	7	0	764	293	1.057			
	2 Balai KSDA [18]	2	0	57	34	306	172	45	39	894	146	51	0	45	1	1.400	392	1.792			
	3 Balai TN [40]	3	1	149	34	569	179	129	75	1.395	106	42	1	17	0	2.304	396	2.700			
	4 Balai Besar KSDA [8]	3	2	68	21	219	125	38	37	650	95	30	1	17	2	1.025	283	1.308			
	5 Balai Besar TN [8]	0	1	66	15	197	52	43	22	482	55	15	1	20	0	823	146	969			
	6 Balai PDASHL [34]	2	2	128	58	481	249	24	25	559	134	10	0	23	0	1.227	468	1.695			
	7 Balai PTH [2]	1	0	9	4	28	15	1	2	17	5	1	0	0	0	57	26	83			
	8 Balai PHP [16]	0	0	80	20	187	105	20	15	120	34	4	0	0	0	411	174	585			
	9 Balai PPI Karhut [5]	0	0	20	4	45	21	4	7	34	9	0	1	0	0	103	42	145			
	10 Balai PSKL [5]	0	0	17	2	58	24	3	1	50	15	4	0	16	2	148	44	192			
	11 Balai Pangakkum LHK [5]	0	0	27	3	190	7	20	7	397	16	2	0	0	0	636	33	669			
	12 SMK Kehutanan [5]	0	0	9	6	67	48	8	4	52	31	6	2	3	2	145	93	238			
	13 Balai Diklat LHK [7]	9	3	66	23	89	38	13	16	161	41	22	2	16	1	376	124	500			
	14 Balai Litbang [13]	16	8	126	66	190	105	16	15	226	53	11	1	26	0	611	248	859			
	15 Balai Besar Litbang [2]	5	10	32	21	27	34	4	2	64	11	3	0	4	0	139	78	217			
	Jumlah II	42	27	936	341	2.906	1.275	436	328	5.448	852	207	9	194	8	10.169	2.840	13.009			
	Jumlah Seluruhnya	119	62	1.608	788	3.925	2.111	594	524	6.186	1.165	266	15	269	13	12.967	4.678	17.645			

Sumber : Biro Kepagawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 12.3. Pegawai KLHK Menurut Unit Kerja,Jabatan, dan Jenis Kelamin s/d Tahun 2016

No	Unit Kerja	Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Orang)																	
		Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu		Fungsional Umum		Jumlah					
		L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	Total (Orang)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Kantor Pusat																		
	1 Pusat-Pusat	0	0	10	1	26	11	68	38	4	3	166	128	274	181	455			
	2 Sekretariat Jenderal	4	2	5	2	18	6	45	26	44	54	304	133	420	223	643			
	3 Inspektorat Jenderal	1	0	6	0	3	0	5	8	117	24	44	47	176	79	255			
	4 Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	0	5	1	13	9	32	25	42	37	174	110	267	182	449			
	5 Ditjen. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	0	0	5	1	12	8	29	26	26	18	145	128	217	181	398			
	6 Ditjen. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1	0	6	0	15	6	36	21	7	16	63	58	128	101	229			
	7 Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	1	0	6	0	17	3	39	17	38	9	116	74	217	103	320			
	8 Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	0	3	3	15	8	34	20	3	6	87	51	143	88	231			
	9 Ditjen. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	0	1	3	3	14	9	22	30	1	2	67	59	107	104	211			
	10 Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim	0	1	4	2	15	9	35	17	4	6	63	47	121	82	203			
	11 Ditjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	1	0	4	1	9	8	27	16	4	6	51	44	96	75	171			
	12 Ditjen. Penegakan Hukum LHK	1	0	4	1	13	5	25	16	16	10	54	34	113	66	179			
	13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1	0	2	3	12	6	26	16	39	23	105	85	185	133	318			
	14 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi LHK	1	0	3	2	12	6	29	15	123	117	166	100	334	240	574			
	Jumlah I	13	4	66	20	194	94	452	291	468	331	1.605	1.098	2.798	1.838	4.636			
II	Unit Pelaksana Teknis																		
	1 Balai PKH [22]	0	0	0	0	19	2	54	9	201	86	490	196	764	293	1.057			
	2 Balai KSDA [18]	0	0	0	0	16	1	53	9	721	149	610	233	1.400	392	1.792			
	3 Balai TN [40]	0	0	0	0	34	1	121	13	1.383	166	766	216	2.304	396	2.700			
	4 Balai Besar KSDA [8]	0	0	6	2	30	4	63	11	505	86	421	180	1.025	283	1.308			
	5 Balai Besar TN [8]	0	0	7	0	29	6	76	7	432	42	279	91	823	146	969			
	6 Balai PDASHL [34]	0	0	0	0	25	4	104	21	211	109	887	334	1.227	468	1.695			
	7 Balai PTH [2]	0	0	0	0	2	0	5	2	12	11	38	13	57	26	83			
	8 Balai PHP [16]	0	0	0	0	14	2	41	5	152	55	204	112	411	174	585			
	9 Balai PPI Karhut [5]	0	0	0	0	5	0	17	3	33	11	48	28	103	42	145			
	10 Balai PSKL [5]	0	0	0	0	3	0	18	2	34	14	93	28	148	44	192			
	11 Balai Pangakkum LHK [5]	0	0	0	0	5	0	20	0	581	16	30	17	636	33	669			
	12 SMK Kehutanan [5]	0	0	0	0	0	0	4	0	39	35	102	58	145	93	238			
	13 Balai Diklat LHK [7]	0	0	0	0	5	2	18	2	81	33	272	87	376	124	500			
	14 Balai Litbang [13]	0	0	0	0	9	0	33	9	312	125	257	114	611	248	859			
	15 Balai Besar Litbang [2]	0	0	2	0	4	2	4	8	69	38	60	30	139	78	217			
	Jumlah II	0	0	15	2	200	24	631	101	4.766	976	4.557	1.737	10.169	2.840	13.009			
	Jumlah Seluruhnya	13	4	81	22	394	118	1.083	392	5.234	1.307	6.162	2.835	12.967	4.678	17.645			

Sumber : Biro Kepegawain Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 12.4. Neraca Nilai Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2012 s/d 2016

No.	Jenis Barang Milik Negara	Neraca Nilai Barang Milik Negara					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	
1	2	3	3	5	6	7	
1	Barang Konsumsi	9,785,441,412	14,141,717,834	13,499,705,242	18,979,474,582	12,920,325,860	
2	Amunisi	2,004,277,516	2,348,637,605	2,336,012,545	2,183,936,005	2,032,923,441	
3	Bahan untuk Pemeliharaan	649,319,288	3,263,039,288	389,788,869	925,443,024	540,321,479	
4	Suku Cadang	1,316,825,125	1,361,295,452	2,102,484,863	2,320,674,319	1,588,574,691	
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	2,659,924,364	3,922,202,565	3,506,111,319	2,594,339,318	823,259,473	
6	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	22,135,183,902	23,373,357,489	25,217,174,994	21,796,812,827	29,350,925,104	
7	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	11,072,314,990	7,474,468,508	10,056,400,451	16,072,070,428	33,356,289,817	
8	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	31,491,555,356	22,930,433,103	23,012,588,761	46,321,077,501	122,001,505,687	
9	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	128,768,263	0	0	31,319,783,303	1,290,976,363	
10	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,082,892,696	322,596,950	470,354,929	379,089,132	883,534,668	
11	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2,413,922,996	1,216,869,231	1,142,646,708	122,164,000	114,419,886	
12	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	6,022,442,199	4,891,646,165	3,000,753,992	23,196,213,841	20,398,593,900	
13	Bahan Baku	3,426,751,017	2,545,837,747	849,523,946	2,365,401,721	12,105,038,018	
14	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0	0	3,875,000	0	
15	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	2,944,041,549	3,461,351,614	411,016,764	313,465,740	115,490,190	
16	Persediaan Lainnya	5,077,087,843	3,718,149,759	2,422,949,951	2,659,629,433	2,193,883,428	
17	Tanah	2,183,593,473,405	2,192,995,774,148	2,219,569,806,892	2,325,363,098,289	2,327,324,149,104	
18	Peralatan dan Mesin	1,851,666,302,911	2,217,423,144,819	2,265,311,853,761	2,887,247,752,244	3,024,602,102,823	
19	Gedung dan Bangunan	1,430,714,945,550	1,664,914,297,711	1,786,949,639,697	1,966,417,875,151	2,036,724,645,288	
20	Jalan dan Jembatan	71,250,296,835	92,988,125,022	90,742,472,424	98,495,645,310	104,327,069,601	
21	Irigasi	39,274,608,444	45,303,219,012	48,571,634,811	56,717,756,103	59,258,204,002	
22	Jaringan	46,921,228,217	50,619,820,249	53,662,052,545	59,506,397,300	62,627,157,164	
23	Aset Tetap dalam Renovasi	3,010,729,476	5,602,951,342	7,043,693,768	29,426,064,150	29,417,254,038	
24	Aset Tetap Lainnya	57,382,608,617	59,696,076,556	59,924,460,776	78,674,796,253	76,564,860,253	
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50,968,864,416	53,803,018,094	56,226,901,318	37,765,260,024	27,082,864,734	
26	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1,303,908,617,560)	(1,492,187,679,397)	(1,945,655,041,141)	(2,160,329,316,665)	
27	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(373,211,701,198)	(243,189,161,145)	(300,690,335,841)	(349,661,004,882)	
28	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	(43,494,542,451)	(47,720,271,180)	(53,593,237,759)	(60,770,855,611)	
29	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	(14,436,833,804)	(15,875,343,327)	(18,017,504,181)	(20,962,071,344)	
30	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	(12,856,174,138)	(15,971,113,786)	(21,668,300,481)	(26,891,040,834)	

No.	Jenis Barang Milik Negara	Neraca Nilai Barang Milik Negara				
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	2	3	3	5	6	7
31	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	(633,692,862)	(651,467,575)	(6,599,255,024)	(5,875,878,698)
32	Hak Cipta	0	0	0	77,500,000	77,500,000
33	Software	19,543,175,487	29,161,705,226	31,997,430,463	55,987,816,305	57,910,948,323
34	Lisensi	0	566,546,000	568,017,250	568,017,250	568,017,250
35	Hasil Kajian/Penelitian	17,182,628,260	17,495,959,328	17,751,572,828	18,527,875,078	18,527,875,078
36	Aset Tak Berwujud Lainnya	28,935,657,201	29,999,952,307	31,240,590,973	46,796,121,398	47,937,508,398
37	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	80,000,000
38	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	52,646,176,261	63,322,509,073	167,595,320,610	261,750,450,127	315,145,392,505
39	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0	317,386,193
40	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	0	(49,933,327,163)	(102,308,287,251)	(145,570,133,633)	(216,907,263,206)
41	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	0	0	(3,874,999)
42	Akumulasi Amortisasi software	0	0	0	0	(46,169,810,401)
43	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	0	0	0	(156,479,315)
44	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	0	0	0	0	(309,761,193)
	Jumlah	5,955,301,443,596	4,821,092,266,842	5,007,669,637,779	5,603,082,067,096	5,540,171,639,611

Sumber : Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 12.5. Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Program	Pagu APBN-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1,009,547,467,000.00	764,487,741,204.00	75.73
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63,379,435,000.00	58,676,842,133.00	92.58
3	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	499,312,067,000.00	432,301,424,320.00	86.58
4	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1,103,304,607,000.00	976,476,227,195.00	88.50
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1,590,879,426,000.00	1,438,933,254,093.00	90.45
6	Program Planologi dan Tata Lingkungan	520,841,693,000.00	396,887,014,791.00	76.20
7	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	398,956,170,000.00	358,762,311,768.00	89.93
8	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	443,132,533,000.00	407,820,235,417.00	92.03
9	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	283,261,577,000.00	243,712,121,778.00	86.04
10	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	278,980,384,000.00	219,387,311,196.00	78.64
11	Program Pengendalian Perubahan Iklim	285,723,046,000.00	236,523,724,950.00	82.78
12	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	118,670,004,000.00	102,549,436,895.00	86.42
13	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	110,080,111,000.00	105,206,637,178.00	95.57
Jumlah		6,706,068,520,000.00	5,741,724,282,918.00	85.62

Sumber : Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 12.6. Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN-P Tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Program	Pagu APBN-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4	5
1	029.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	906,085,544,000.00	702,950,421,609.00	77.58
2	029.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65,795,221,000.00	61,739,659,627.00	93.84
3	029.03.06 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	330,203,298,000.00	266,948,644,961.00	80.84
4	029.04.07 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1,019,933,857,000.00	794,785,782,078.00	77.93
5	029.05.08 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1,284,235,032,000.00	1,126,868,520,807.00	87.75
6	029.06.09 Program Planologi dan Tata Lingkungan	323,973,949,000.00	296,802,622,318.00	91.61
7	029.07.04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	320,489,412,000.00	302,142,792,978.00	94.28
8	029.08.10 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	348,061,545,000.00	332,037,992,961.00	95.40
9	029.09.11 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	242,267,995,000.00	169,501,706,588.00	69.96
10	029.10.12 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	246,999,918,000.00	202,343,791,436.00	81.92
11	029.11.13 Program Pengendalian Perubahan Iklim	584,982,144,000.00	411,238,831,195.00	70.30
12	029.12.14 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	133,418,823,000.00	116,610,924,161.00	87.40
13	029.13.15 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	140,862,028,000.00	99,128,356,717.00	70.37
Jumlah		5,947,308,766,000.00	4,883,100,047,436.00	82.11

Sumber : Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 12.7. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Jenis PNBP	MAP	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
			Target PNBP	Realisasi (Rp)	%	Target PNBP	Realisasi (Rp)	%	Target PNBP	Realisasi (Rp)	%	Target PNBP	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I														
PNBP SDA														
A DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI														
1	Dana Reboisasi	421411	1.773.485.666.000.00	1.494.322.688.982.91	84,26	2.310.000.000.000.00	1.722.496.529.548.00	74,61	2.516.757.276.000.00	1.970.396.130.269.00	78,29	1.866.900.000.000.00	1.513.282.377.584.00	81,06
2	DR dan Pengembalian Pinjaman/Kredit	421411	75.500.000.000.00	174.505.216.192.00	231,13	130.000.000.000.00	87.608.219.091.00	67,34	113.404.344.000.00	58.106.726.554.00	51,24	86.754.323.160.00	104.865.426.579.00	120,88
3	PSOH	421421	1.897.232.899.000.00	697.793.071.634.00	36,78	1.790.444.000.000.00	827.808.219.091.00	46,22	1.071.590.000.000.00	1.012.830.957.193.00	94,52	852.787.600.000.00	827.046.155.417.20	96,98
4	IUPHA	421431/421434	12.550.000.000.00	105.428.364.304.00	840,07	146.250.000.000.00	195.936.404.998.00	133,97	162.000.000.000.00	57.312.538.190.00	35,38	165.928.500.000.00	128.688.336.935.00	77,54
5	DPEH	423751	2.000.000.00	5.703.985.097.00	285,199,25	2.000.000.00	18.990.853.702.00	949,51	70.187.199.630.00	70.187.199.630.00	100,00	82.489.467.249.00	82.489.467.249.00	100,00
6	Ganti Rugi Tegakan	423751	86.612.130.381.00	86.612.130.381.00	100,00	86.612.130.381.00	290.278.316.988.00	335,00	923.374.584.191.60	923.374.584.191.60	100,00	2.239.041.000.00	44.620.626.945.00	1.992,85
7	Ganti Rugi Tegakan	423751	3.758.791.565.000.00	2.564.366.458.990.90	68,22	4.376.094.000.000.00	3.144.318.543.418.00	71,84	3.963.711.620.000.00	3.692.208.106.027.40	93,18	2.974.609.664.160.00	2.670.982.390.709.20	89,78
B DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN														
1	Penggunaan Kawasan Hutan	421441	495.168.491.000.00	587.960.710.378.00	118,74	495.168.491.000.00	880.042.543.579.00	177,73	849.588.379.686.00	1.050.294.877.438.00	123,62	1.000.307.417.000.00	1.182.471.150.953.00	118,21
2	Penggunaan Kawasan Hutan	421441	495.168.491.000.00	587.960.710.378.00	118,74	495.168.491.000.00	880.042.543.579.00	177,73	849.588.379.686.00	1.050.294.877.438.00	123,62	1.000.307.417.000.00	1.182.471.150.953.00	118,21
3	Jumlah PNBP SDA		4.253.999.056.000.00	3.152.327.168.988.98	74,10	4.871.862.491.000.00	4.024.361.086.997.02	82,60	4.713.299.999.696.00	4.742.502.983.465.69	100,62	3.974.916.881.160.00	3.853.453.541.662.20	96,94
II														
PNBP LAINNYA														
A DITJEN KSDAE														
1	UPA, UPEA, PUPEA, PUPEA	421444												
2	Hati Laga Kayu Temuan & TSL	423721												
3	IMMS/TA	423731	6.511.655.000.00	6.887.573.334.00	105,77	9.533.537.000.00	12.823.604.487.00	134,57	5.220.843.826.00	14.462.696.352.00	277,02	10.702.135.000.00	15.506.181.256.00	144,89
4	PIPPA	423732	102.300.000.00	55.785.000.00	54,53	1.761.734.000.00	6.547.248.300.00	371,81	2.500.700.000.00	3.471.265.000.00	138,81	5.757.160.000.00	2.799.693.691.00	48,63
5	PNOWA	423733	29.347.057.000.00	36.073.742.293.00	122,92	46.995.882.000.00	60.933.314.962.00	129,87	35.794.468.000.00	117.520.539.716.00	328,32	78.697.476.000.00	132.348.120.112.00	168,17
6	IUPHA	423734	124.125.000.00	241.623.598.00	194,66	273.357.000.00	296.212.082.00	108,37	392.038.698.00	657.813.729.00	167,79	2.239.041.000.00	699.045.988.00	31,27
7	Penggunaan Hasil Isatua, Jasa Wisata Alam	423735												
8	Iuran Ijin Usaha Penebalaan Jasa Wisata Alam	423735												
9	Penggunaan Hasil Isatua, Jasa Wisata Alam	423735												
10	Iuran Ijin Usaha Penebalaan Jasa Wisata Alam	423735												
11	Penggunaan Hasil Isatua, Jasa Wisata Alam	423735												
12	Denda Administrasi Hutan Perindungan Hutan & KA	423736	36.085.137.000.00	43.298.727.225.00	119,88	57.864.210.000.00	80.714.750.440.00	139,35	43.908.050.524.00	136.415.350.997.00	310,43	98.066.445.000.00	151.961.141.807.00	154,86
B BADAN LTBANG & INOVASI														
1	Jasa Laboratorium & Jasa Perputakaan	42321E												
2	Produk Samping Hasil Penelitian	423111												
3	Jasa Lainnya	423291												
4	Jumlah PNBP BADAN LTBANG & INOVASI													
C BP2SDM														
1	Jasa Penggunaan Sarpras yang terkait Tur	423141												
2	Jasa Lainnya	423291												
3	Jumlah PNBP BP2SDM													
D DITJEN PDAS HL														
1	Kegiatan Penelitian di Bidang Perencanaan	421451												
2	Sertifikasi Benih	421452												
3	Pengumpulan Benih dan Anakar	421453												
4	Jumlah PNBP DITJEN PDAS HL													
E BADAN LAYANAN UMUM														
1	Pendapatan Program Dana Bergilir Sektor	424134												
2	Pendapatan Jasa Layanan Perbaikan BL	424911	103.947.519.273.00	134.676.865.721.00	129,56	107.986.760.986.00	221.421.017.413.00	206,17	100.839.646.700.00	135.836.727.881.00	134,71	114.025.000.000.00	181.971.700.570.00	159,59
3	Jumlah PNBP BLU		103.947.519.273.00	134.676.865.721.00	129,56	107.986.760.986.00	221.421.017.413.00	206,17	100.839.646.700.00	135.836.727.881.00	134,71	114.025.000.000.00	181.971.700.570.00	159,59
F DITJEN GAKUM LHK														
1	Pendapatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	423722												
2	Jumlah PNBP DITJEN GAKUM LHK													
Jumlah PNBP LAINNYA														
1	Jumlah PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN LHK		140.032.656.273.00	177.935.532.946.00	127,07	165.340.970.996.00	302.505.225.903.00	182,94	144.747.692.224.00	273.386.229.688.00	188,87	214.024.999.957.00	335.547.487.009.00	156,78
2	Jumlah PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN LHK		4.933.991.712.273.00	3.320.262.701.914.98	75,79	5.037.223.461.996.00	4.826.846.312.902.00	85,90	4.858.947.496.920.00	5.015.889.213.153.69	103,25	4.188.941.881.117.00	4.189.001.023.671.26	100,00
III														
PNBP UMUM														
1	Jumlah PNBP UMUM													
2	Jumlah PNBP FUNGSIONAL - UMUM KEMENTERIAN LHK		4.933.991.712.273.00	3.320.262.701.914.98	75,79	5.037.223.461.996.00	4.716.588.357.637.44	95,63	4.858.947.496.920.00	5.479.579.864.121.05	112,79	4.188.941.881.117.00	4.582.414.091.487.26	109,39

Tabel 12.8. Penerimaan Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Uraian Peringkat	Klasifikasi Pemenang		
		Provinsi	Kabupaten	Kota
1	2	3	4	5
2016	Peringkat 1	Jawa Timur	Buleleng	Surabaya
	Peringkat 2	Jawa Barat	Dharmasraya	Balikpapan
	Peringkat 3	Sumatera Barat	Bandung	-
	Peringkat 4	Sulawesi Selatan	Lumajang	-
	Peringkat 5	Jambi	-	-
2017	Peringkat 1	Jawa Timur	Malang	Surabaya
	Peringkat 2	Sumatera Barat	Dharmasraya	Balikpapan
	Peringkat 3	DKI Jakarta	Sukoharjo	Bukittinggi

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13

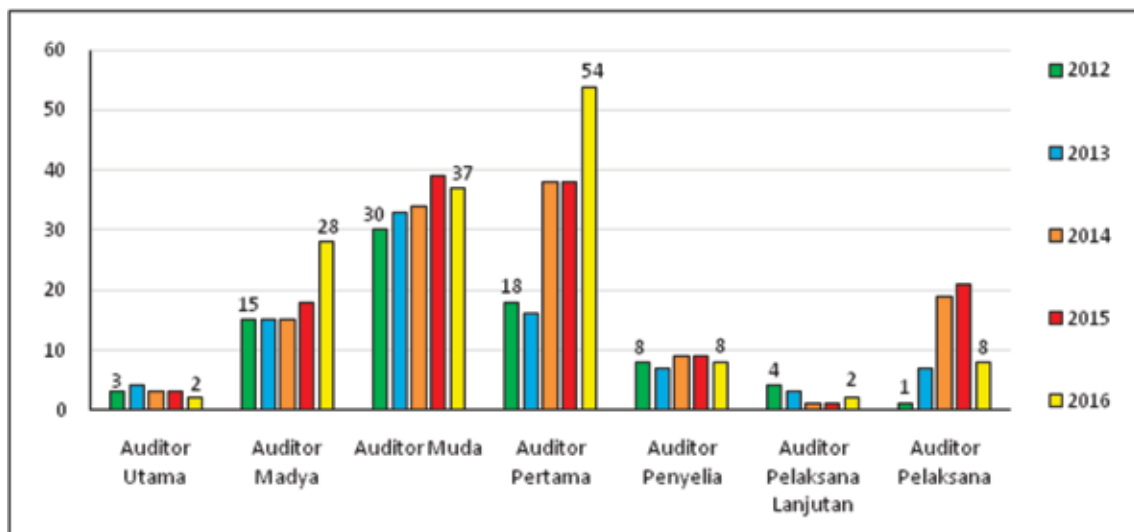
Pengawasan dan Pengendalian



Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian LHK menyelenggarakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan audit (audit kinerja, revidi laporan keuangan, evaluasi SAKIP), audit dengan tujuan tertentu, penilaian dan evaluasi serta pemantauan tindak lanjut dan pembinaan. Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut senantiasa dimonitor, dievaluasi dan dipublikasikan secara berkala dan transparan serta didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan.

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kementerian LHK baik di pusat maupun di daerah, Inspektorat Jenderal didukung oleh pejabat fungsional auditor.

Jumlah auditor periode 2012-2016 pada umumnya semakin meningkat. Pada tahun 2012 sebanyak 79 orang auditor, tahun 2013 sebanyak 85 orang auditor. Jumlah auditor pada tahun 2014 meningkat secara signifikan menjadi 119 orang merupakan akumulasi pengangkatan jabatan fungsional auditor tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 129 orang dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 139 orang karena adanya penggabungan auditor antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.



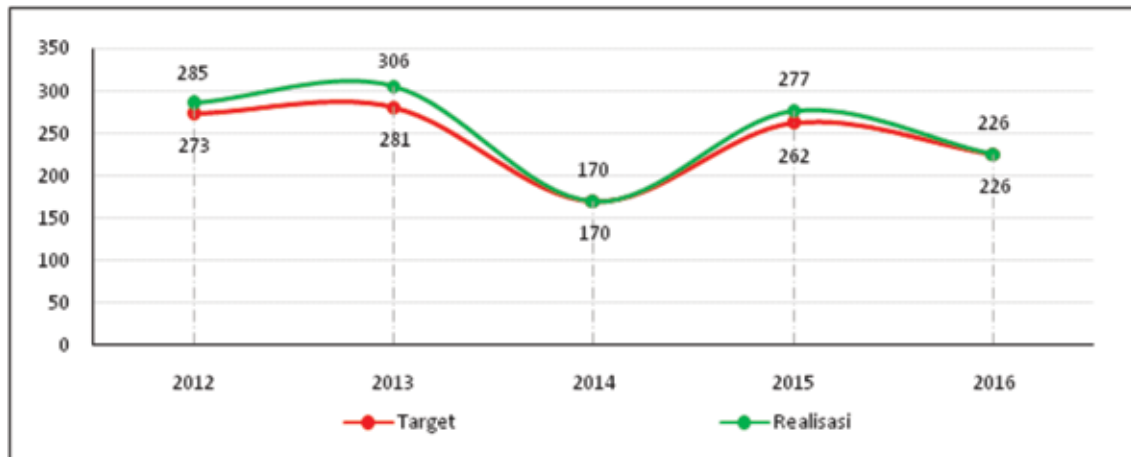
Grafik 13.1. Perkembangan kualifikasi auditor tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Tabel 13.1, maka dibuat grafik perkembangan kualifikasi auditor periode tahun 2012-2016 dari kualifikasi auditor Inspektorat Jenderal yang ada, maka dapat dilihat jumlah pejabat fungsional auditor paling banyak adalah kualifikasi auditor muda dan auditor pertama.

Peningkatan jumlah auditor pertama secara signifikan terlihat pada tahun 2012 semula sebanyak 18 orang menjadi 54 orang di tahun 2016, hal ini terjadi akibat kenaikan level jabatan fungsional auditor. Jumlah Auditor Pelaksana mengalami peningkatan secara signifikan terlihat pada tahun 2013 semula sebanyak 7 orang menjadi 19 orang pada tahun 2014, hal ini terjadi akibat pengangkatan pertama jabatan fungsional auditor pada rekrutmen formasi tahun 2013.

13.1. Realisasi Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2012-2016

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Laporan Hasil Audit (LHA) merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Untuk mengetahui perbandingan target dan realisasi jumlah LHA audit kinerja periode tahun 2012-2016 digambarkan pada grafik berikut.

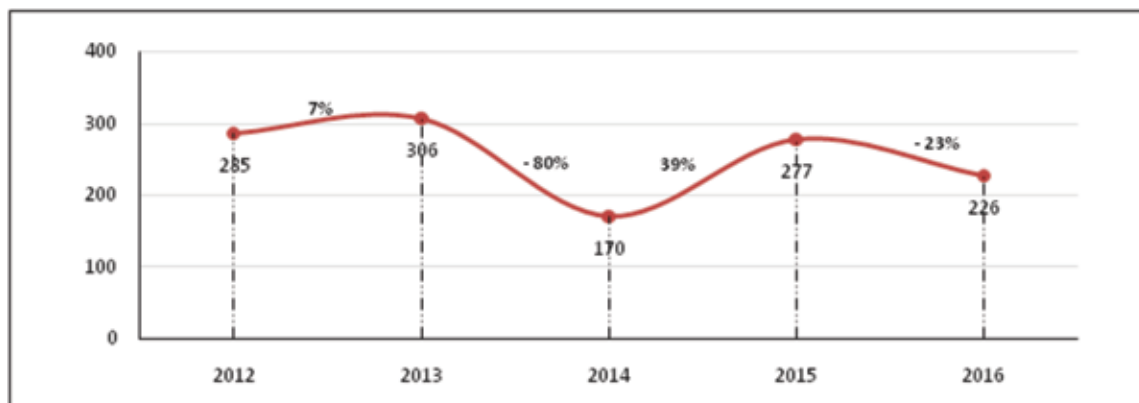


Grafik 13.2. Perbandingan target dan realisasi audit reguler berdasarkan PKPT Tahun 2012 - 2016

Pada grafik di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi jumlah LHA audit kinerja berdasarkan PKPT untuk periode tahun 2012-2016 lebih besar dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan audit pada satu satker dapat menghasilkan lebih dari 1 LHA untuk audit dana dekonsentrasi.

13.2. Rekapitulasi Realisasi LHA

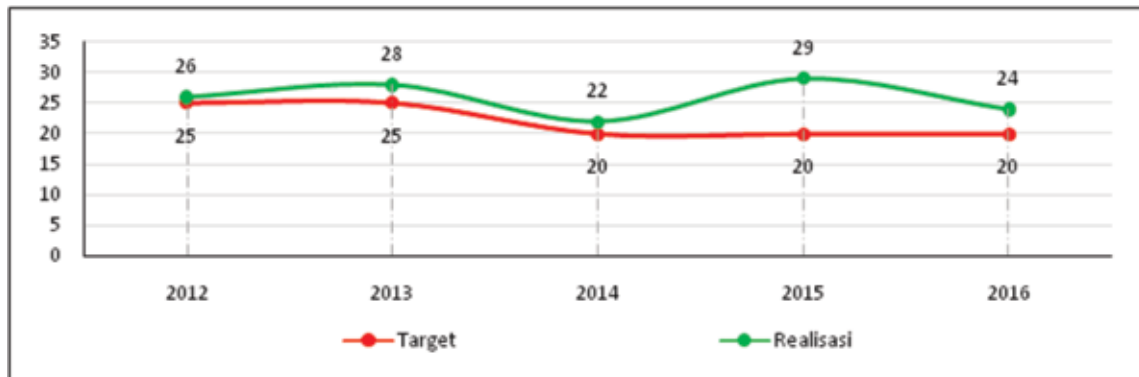
Realisasi LHA periode tahun 2012-2016 adalah sebanyak 1.227 LHA untuk 33 provinsi dan Pusat. Pada grafik di bawah ini terlihat bahwa jumlah LHA tertinggi terjadi di tahun 2012, 2013 dan 2015.



Grafik 13.3. Persentase Realisasi Audit Kinerja Per Provinsi Tahun 2012 - 2016

13.3. Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2011-2016

Audit investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Realisasi Audit Khusus/Investigasi dari tahun 2012-2016 tersaji pada grafik sebagai berikut:

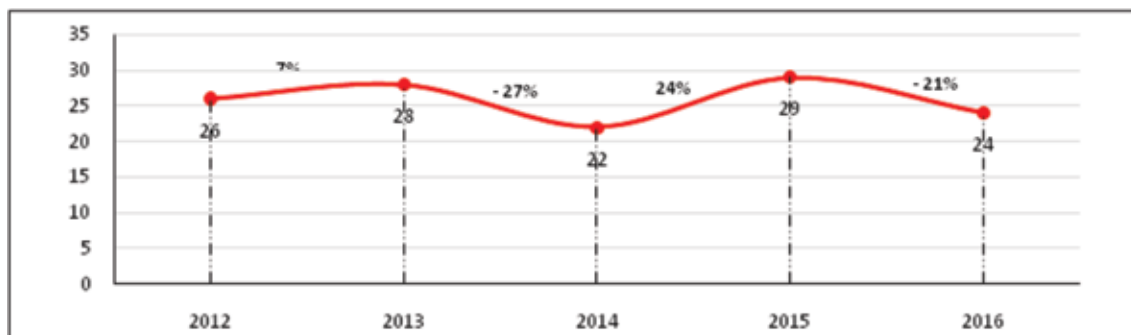


Grafik13.4. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2012 - 2016

Pada gambar grafik terlihat bahwa pada umumnya realisasi Audit Khusus/Investigasi periode 2012-2016 lebih besar daripada target hal ini pada dasarnya dipengaruhi banyaknya jumlah pengaduan masyarakat yang diterima.

13.4. Rekapitulasi Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2012-2016

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung in-efisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Rekapitulasi Audit Khusus/Investigasi periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik di bawah terlihat bahwa tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah kasus terbanyak pelaksanaan Audit Khusus/Investigasi.



Grafik 13.5. Persentase Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2011-2016

13.5. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja

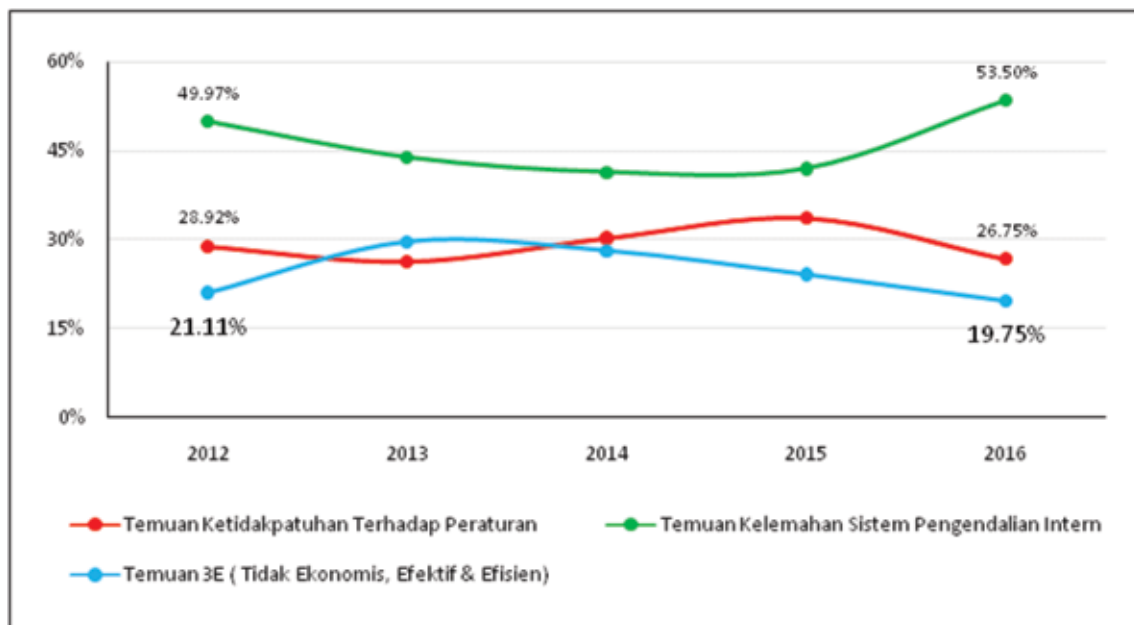
Berdasarkan data yang diperoleh perkembangan tindak lanjut hasil audit kinerja yang masih terdapat sisa tunggakan temuan/rekomendasi paling banyak terjadi di Pusat (Eselon I Lingkup Kementerian LHK), Provinsi Maluku, Papua dan Kalimantan Timur.

13.6. Jenis Temuan Tahun 2011 s/d2016

Kodefikasi temuan hasil audit reguler tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdapat perubahan kode atribut temuan audit dan kode atribut rekomendasi, sehingga kodefikasi temuan mulai Tahun 2012 berbeda dengan kodefikasi tahun-tahun sebelumnya.

Untuk melihat perbandingan setiap jenis temuan periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 13.6. berikut:

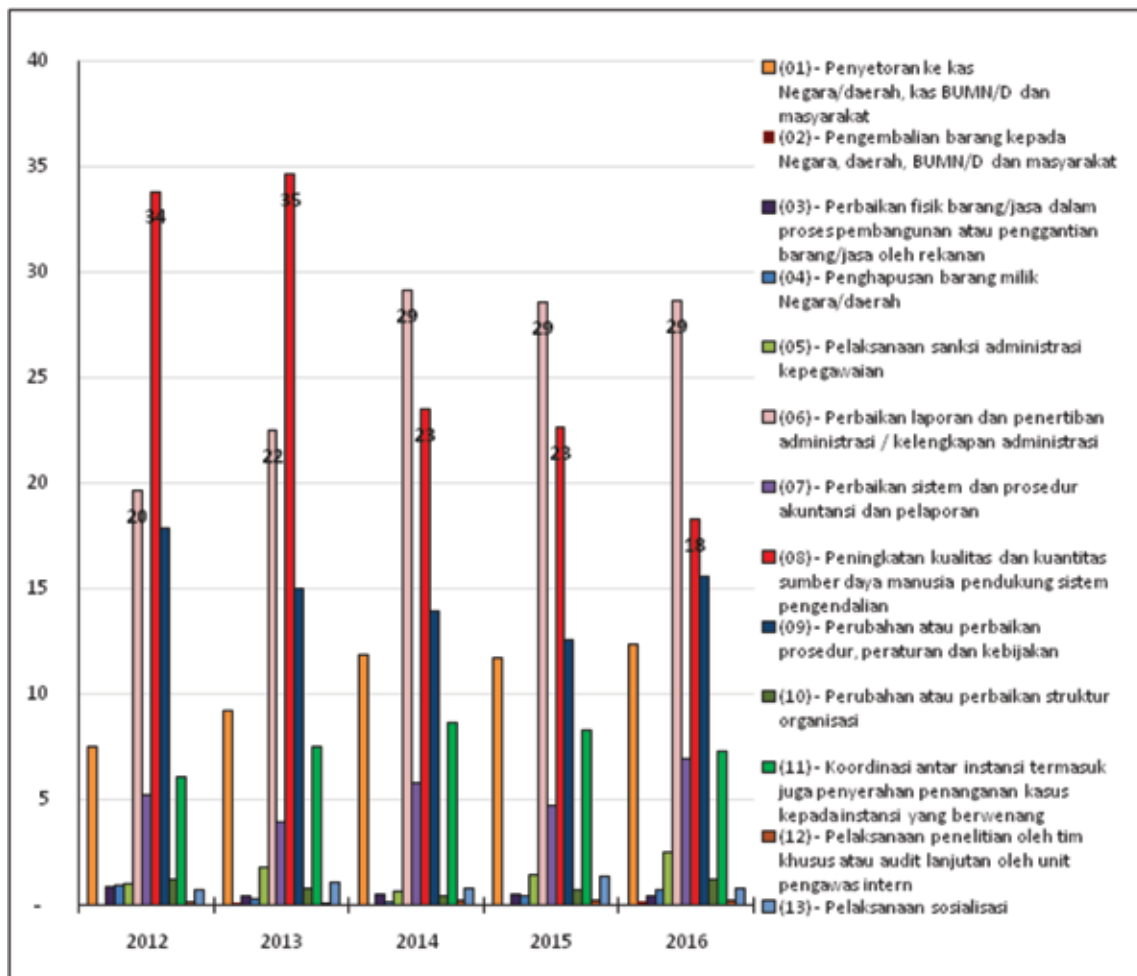


Grafik 13.6. Trend Temuan Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun temuan terkait kelemahan sistem pengendalian internal masih menjadi permasalahan utama, kedua diikuti temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan terakhir temuan yang disebabkan tidak ekonomis, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

13.7. Jenis Rekomendasi Tahun 2011-2016

Berdasarkan data yang tersaji pada Grafik 13.7, rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi (06) merupakan rekomendasi paling dominan pertama pada tahun 2014-2016 dengan nilai persentase rata-rata 29%. Rekomendasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sistem pengendalian (08) merupakan rekomendasi dominan pertama di tahun 2012 (34%) dan tahun 2013 (35%) kemudian mengalami trend penurunan di tahun 2014-2016 dengan rata-rata 21% .



Grafik 13.7. Trend Rekomendasi Tahun 2012 - 2016

13.8. Pengaduan Masyarakat (DUMAS)

Pengaduan masyarakat periode tahun 2012-2016 yang telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal diterima melalui surat, sejumlah pengaduan melalui SMS (*short message service*) mulai diterima Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2014-2016. Seluruh pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Jenderal selanjutnya akan ditangani oleh Inspektorat Investigasi.

Tabel 13.1. Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2012 s/d 2016

No	Jabatan	Perkembangan Kualifikasi Auditor									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)	L (Orang)	P (Orang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Auditor Utama	3	0	4	0	3	0	3	0	2	0
2	Auditor Madya	14	1	14	1	14	1	14	4	23	5
3	Auditor Muda	27	3	30	3	31	3	36	3	34	3
4	Auditor Pertama	17	1	13	3	33	5	31	7	38	16
5	Auditor Penyelia	8	0	7	0	7	2	9	0	8	0
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	4	0	3	0	1	0	1	0	2	0
7	Auditor Pelaksana	1	0	2	5	12	7	13	8	6	2
Jumlah		74	5	73	12	101	18	107	22	113	26
Total		79		85		119		129		139	

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Keterangan :

Tabel 13.2. Realisasi Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2012 s/d 2016

No	Tahun	Realisasi Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Berdasarkan PKPT		
		Target (Kasus)	Realisasi (Kasus)	Prosentase %
1	2	3	4	5
1	2012	273	285	104.40
2	2013	281	306	108.90
3	2014	170	170	100.00
4	2015	262	277	105.73
5	2016	226	226	100.00
Jumlah		1,212	1,264	104.29

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 13.3. Realisasi Audit Investigasi Tahun 2012 s/d 2016

No	Tahun	Realisasi Audit Investigasi		
		Target (Kasus)	Realisasi (Kasus)	Prosentase %
1	2	3	4	5
1	2012	25	26	104.00
2	2013	25	28	112.00
3	2014	20	22	110.00
4	2015	20	29	145.00
5	2016	20	24	120.00
Jumlah		110	129	117.27

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel 13.4. Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Kinerja Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	LHA Audit Kinerja					
		2012 (Laporan)	2013 (Laporan)	2014 (Laporan)	2015 (Laporan)	2016 (Laporan)	TOTAL (Laporan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	5	5	2	7	4	23
2	Sumatera Utara	12	13	6	6	7	44
3	Sumatera Barat	5	5	2	5	5	22
4	Riau	9	8	6	6	11	40
5	Kepulauan Riau	2	2	2	5	2	13
6	Jambi	2	6	3	5	9	25
7	Bengkulu	2	4	2	5	2	15
8	Sumatera Selatan	9	10	6	7	7	39
9	Bangka Belitung	2	4	2	5	2	15
10	Lampung	5	7	4	9	2	27
11	DKI Jakarta	3	3	2	1	2	11
12	Banten	4	1	1	1	3	10
13	Jawa Barat	17	16	8	9	10	60
14	D I Yogyakarta	9	11	3	3	8	34
15	Jawa Tengah	10	11	4	10	8	43
16	Jawa Timur	12	13	4	6	8	43
17	Bali	7	12	6	5	9	39
18	Nusa Tenggara Timur	9	9	3	6	5	32
19	Nusa Tenggara Barat	4	9	3	4	2	22
20	Kalimantan Barat	11	12	5	9	8	45
21	Kalimantan Tengah	9	8	5	9	6	37
22	Kalimantan Selatan	10	9	6	4	6	35
23	Kalimantan Timur	13	13	7	15	8	56
24	Papua	9	9	5	8	9	40
25	Papua Barat	10	10	7	5	6	38
26	Gorontalo	5	5	2	8	4	24
27	Sulawesi Utara	9	9	5	17	7	47
28	Sulawesi Selatan	14	15	9	20	12	70
29	Sulawesi Tenggara	7	7	5	16	6	41
30	Sulawesi Tengah	9	9	6	15	7	46
31	Sulawesi Barat	4	4	1	5	3	17
32	Maluku	9	9	6	9	8	41
33	Maluku Utara	5	5	2	5	4	21
34	Pusat	33	33	30	27	26	149
Jumlah		285	306	170	277	226	1,264

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Tabel 13.5. Jumlah Audit Investigasi Tahun 2012 s/d 2016

No	Provinsi	Jumlah Audit Investigasi				
		2012 (Laporan)	2013 (Laporan)	2014 (Laporan)	2015 (Laporan)	2016 (Laporan)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0	0	0	1	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	2	0
3	Sumatera Barat	0	1	1	0	0
4	Riau	0	1	0	3	1
5	Kepulauan Riau	0	0	1	0	0
6	Jambi	2	1	1	0	1
7	Bengkulu	0	0	1	0	1
8	Sumatera Selatan	0	0	1	1	2
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Lampung	1	0	2	1	0
11	DKI Jakarta	0	1	1	3	10
12	Banten	0	0	1	0	1
13	Jawa Barat	2	1	0	0	1
14	D I Yogyakarta	1	0	1	0	0
15	Jawa Tengah	1	0	0	2	0
16	Jawa Timur	0	1	2	1	0
17	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	1	0	0	4	0
19	Kalimantan Selatan	2	0	1	1	0
20	Kalimantan Timur	9	13	1	0	4
21	Gorontalo	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	1	1	0	0
23	Sulawesi Selatan	0	4	0	1	2
24	Sulawesi Tenggara	1	0	0	2	0
25	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	0
26	Sulawesi Barat	2	1	0	0	0
27	Bali	1	0	0	0	0
28	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	0	0
29	Nusa Tenggara Barat	1	0	2	0	0
30	Maluku	0	0	0	1	0
31	Maluku Utara	0	0	0	3	0
32	Papua	0	1	1	1	0
33	Papua Barat	0	2	1	1	1
34	Pusat	0	0	0	1	0
Jumlah		26	28	22	29	24

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel 13.6. Pemantauan Tindak Lanjut / Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Desember 2016

No	Provinsi	Hasil Audit		Tindak Lanjut		Sisa	
		Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	Temuan	Rekom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangka Belitung	201	331	183	302	18	29
2	Bali	821	1,490	780	1,422	41	68
3	Banten	246	467	225	421	21	46
4	Bengkulu	402	699	390	676	12	23
5	DIY	484	849	473	833	11	16
6	DKI Jakarta	251	510	243	487	8	23
7	Gorontalo	361	672	353	661	8	11
8	Jawa barat	1116	2,151	1,046	2,029	70	122
9	Jambi	1024	1,777	984	1,699	40	78
10	Jawa Tengah	781	1,434	762	1410	19	24
11	Jawa Timur	1039	1970	992	1,888	47	82
12	Kalimantan Barat	898	1,664	878	1640	20	24
13	Kalimantan Selatan	856	1,553	840	1,534	16	19
14	Kalimantan Tengah	1003	1,862	961	1,785	42	77
15	Kalimantan Timur	1274	2,331	1,189	2,195	85	136
16	Kepulauan Riau	228	384	203	344	25	40
17	Lampung	799	1,411	783	1,388	16	23
18	Maluku	870	1,778	772	1,595	98	183
19	Maluku Utara	443	927	404	854	39	73
20	Aceh	510	876	492	853	18	23
21	NTB	552	925	528	890	24	35
22	NTT	900	1,746	863	1,694	37	52
23	Papua	722	1,422	640	1,275	82	147
24	Papua Barat	647	1,359	609	1,306	38	53
25	Pusat	2562	4,429	2,292	3,955	270	474
26	Riau	1189	2,018	1,134	1,917	55	101
27	Sulawesi Barat	193	431	158	374	35	57
28	Sulawesi Selatan	1473	2,697	1,442	2640	31	57
29	Sulawesi Tengah	912	1800	850	1,689	62	111
30	Sulawesi Tenggara	883	1,631	857	1,594	26	37
31	Sulawesi Utara	843	1,642	790	1,567	53	75
32	Sumatera Barat	693	1,237	673	1,204	20	33
33	Sumatera Selatan	1124	1870	1,098	1,831	26	39
34	Sumatera Utara	1642	2,872	1,616	2,826	26	46
Jumlah		27,942	51,215	26,503	48,778	1,439	2,437

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel 13.7. Klasifikasi Temuan Audit Tahun 2012 s/d 2016

Kel	Sub Kel	Deskripsi Temuan Audit	Klasifikasi Temuan Audit											
			2012		2013		2014		2015		2016			
			(Jumlah)	(%)	(Jumlah)	(%)	(Jumlah)	(%)	(Jumlah)	(%)	(Jumlah)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Temuan Ketidaktepatan Terhadap Peraturan		481	28.92	443	26.35	560	30.30	467	33.72	336	26.75		
	1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	177	10.64	208	12.37	308	16.67	245	17.69	204	16.24		
	2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	13	0.78	10	0.59	5	0.27	2	0.14	13	1.04		
	3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	48	2.89	43	2.56	41	2.22	51	3.68	30	2.39		
	4	Administrasi	243	14.61	182	10.83	206	11.15	168	12.13	89	7.09		
	5	Indikasi tindak pidana	0	-	0	-	0	-	1	0	0	-		
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern		831	49.97	739	43.96	767	41.50	583	42.09	672	53.50		
	1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	402	24.17	370	22.01	435	23.54	289	20.87	313	24.92		
	2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	279	16.78	255	15.17	215	11.63	187	13.50	201	16.00		
	3	Kelemahan struktur pengendalian intern	150	9.02	114	6.78	117	6.33	107	7.73	158	12.58		
3	Temuan 3E		351	21.11	499	29.68	521	28.19	335	24.19	248	19.75		
	1	Ketidakhormatan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	19	1.14	38	2.26	26	1.41	7	0.51	15	1.19		
	2	Ketidakefisienan	14	0.84	45	2.68	13	0.70	15	1.08	5	0.40		
	3	Ketidakefektifan	318	19.12	416	24.75	482	26.08	313	22.60	228	18.15		
Jumlah			1,663	100.00	1,681	100.00	1,848	100.00	1,385	100.00	1,256	100.00		

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel 13.8. Klasifikasi Jenis Rekomendasi Audit Tahun 2012 s/d 2016

No	Rekomendasi	Klasifikasi Jenis Rekomendasi Audit									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Jenis Rekomendasi (Jumlah)	Prosentase (%)	Jenis Rekomendasi (Jumlah)	Prosentase (%)	Jenis Rekomendasi (Jumlah)	Prosentase (%)	Jenis Rekomendasi (Jumlah)	Prosentase (%)	Jenis Rekomendasi (Jumlah)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyetoran ke kas Negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	231	7.47	302	9.22	399	11.87	323	11.75	310	12.33
2	Pengembalian barang kepada Negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	2	0.06	3	0.09	1	0.03	1	0.04	4	0.16
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	26	0.84	13	0.40	17	0.51	14	0.51	11	0.44
4	Penghapusan barang milik Negara/daerah	29	0.94	10	0.31	6	0.18	11	0.40	18	0.72
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	32	1.03	59	1.80	22	0.65	40	1.46	62	2.47
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi / kelengkapan administrasi	607	19.63	736	22.47	980	29.15	785	28.56	720	28.64
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	162	5.24	129	3.94	195	5.80	129	4.69	175	6.96
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1,045	33.80	1134	34.63	789	23.47	622	22.63	459	18.26
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	553	17.88	491	14.99	468	13.92	346	12.59	392	15.59
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	37	1.20	26	0.79	14	0.42	20	0.73	30	1.19
11	Kordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penangan kasus kepada instansi yang berwenang	188	6.08	246	7.51	290	8.63	227	8.26	183	7.28
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	3	0.10	2	0.06	7	0.21	6	0.22	5	0.20
13	Pelaksanaan sosialisasi	22	0.71	34	1.04	27	0.80	37	1.35	20	0.80
14	Lain-lain	155	5.01	90	2.75	147	4.37	188	6.84	125	4.97
	Jumlah	3,092	100.00	3,275	100.00	3,362	100.00	2,749	100.00	2,514	100.00

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterangan : Rekomendasi lain-lain adalah jenis rekomendasi selain 13 kode rekomendasi terkait dengan pihak lain (Dinas kabupaten/kota atau perusahaan) dan lain sebagainya.

Tabel 13.9. Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2012 s/d 2016

No	Tindak Lanjut	Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				
		2012 (Jumlah)	2013 (Jumlah)	2014 (Jumlah)	2015 (Jumlah)	2016 (Jumlah)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengaduan masyarakat melalui surat					
	1 Penyelesaian diserahkan kepada Eselon I atau instansi terkait	28	9	18	29	14
	2 Penyelesaian diserahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Kasus LHK	-	-	-	8	-
	3 Dilakukan Audit Investigasi	13	2	5	7	4
	4 Dilakukan Identifikasi Khusus	-	14	6	17	15
	5 Diusulkan Audit Investigasi	-	-	-	3	-
	6 Diusulkan Identifikasi Khusus	2	6	7	6	5
	7 Telah dilakukan identifikasi khusus dan diusulkan audit Investigasi	-	-	-	-	1
	8 Ditangani oleh Instansi lain	-	-	-	-	2
	9 Diusulkan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	-	-	-	2	-
	10 Dilakukan Pulbaket dan pengecekan lapangan	-	-	1	-	-
	11 Dalam proses penelaahan	-	10	27	27	3
	12 Penyelesaian ditangani unit kerja lain	-	-	1	2	-
	13 Tidak dapat ditindaklanjuti	-	-	7	10	13
	14 Monitoring hasil tindak lanjut penanganan eselon I/ Unit kerja terkait lainnya	-	-	2	-	-
	15 Diarsipkan	-	-	-	-	-
	16 Telah dilakukan klarifikasi dan tidak terbukti	7	1	-	-	-
	17 Tidak dapat ditindaklanjuti	3	1	-	-	-
	Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui surat (A)	53	43	74	111	57
B	Pengaduan masyarakat melalui SMS					
	1 Penyelesaian diserahkan kepada Eselon I atau instansi terkait	-	-	43	6	1
	2 Penyelesaian diserahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Kasus LHK	-	-	-	2	-
	3 Dilakukan Audit Investigasi	-	-	1	1	3
	4 Dilakukan Identifikasi Khusus	-	-	-	8	3
	5 Diusulkan dilakukan audit khusus	-	-	-	-	1
	6 Diusulkan dilakukan audit investigasi	-	-	-	-	1
	7 Dilakukan survei pendahuluan	-	-	-	1	-
	8 Diusulkan untuk diserahkan ke unit kerja lain	-	-	-	1	-
	9 Penyelesaian ditangani instansi lain	-	-	1	1	-
	10 Dilakukan Pulbaket dan pengecekan lapangan	-	-	4	-	-
	11 Dilakukan Audit oleh Inspektorat Wilayah	-	-	-	1	-
	12 Dalam proses penelaahan	-	-	-	2	1
	13 Tidak dapat ditindaklanjuti	-	-	7	2	3
	Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS (B)	0	0	56	25	13
	TOTAL (A+B)	53	43	130	136	70

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

